PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

bappeda.temanggungkab.go.id

email : bappeda@temanggungkab.go.id

youtube chanel : bappeda temanggung

instagram : @bappedatemanggung

whatsapp : 089616352800

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2023

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 32
Telepon : (0293) 491004 Temanggung 56216

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Bupati pada tahun 2023, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi penanggung jawab kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 digunakan sebagai:
a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM;
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS;
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
i. BAB IX : PENUTUP.

Pasal 5

Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-12
1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-29
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-76
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-187
2.2 Ringkasan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2018-2022 ..... II-197
2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama II-197
2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-200
2.2.2.1 Urusan Bidang Pendidikan II-200
2.2.2.2 Urusan Bidang Kesehatan II-205
2.2.2.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-213
2.2.2.4 Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman II-216
2.2.2.5 Urusan Bidang Pertanahan II-218
2.2.2.6 Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-219
2.2.2.7 Urusan Bidang Sosial II-225
2.2.3 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-231
2.2.3.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja II-231
2.2.3.2 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-234
2.2.3.3 Urusan Bidang Pangan II-237
2.2.3.4 Urusan Bidang Lingkungan Hidup II-238
2.2.3.5 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil II-242
2.2.3.6 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa II-245
2.2.3.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana II-248
2.2.3.8 Urusan Bidang Perhubungan II-251
2.2.3.9 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika II-253
2.2.3.10 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. II-255
2.2.3.11 Urusan Bidang Penanaman Modal II-257
2.2.3.12 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga II-260
2.2.3.13 Urusan Bidang Statistik II-262

2.2.3.14 Urusan Bidang Persandian II-263
2.2.3.15 Urusan Bidang Kebudayaan..... II-264
2.2.3.16 Urusan Bidang Perpustakaan II-266
2.2.3.17 Urusan Bidang Kearsipan II-267
2.2.4 Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-269
2.2.4.1 Urusan Bidang Perikanan II-269
2.2.4.2 Urusan Bidang Pariwisata II-271
2.2.4.3 Urusan Bidang Pertanian II-273
2.2.4.4 Urusan Bidang Perdagangan II-276
2.2.4.5 Urusan Bidang Perindustrian II-278
2.2.4.6 Urusan Bidang Transmigrasi II-279
2.2.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-280
2.2.5.1 Perencanaan II-280
2.2.5.2 Penelitian dan Pengembangan II-282
2.2.5.3 Kepegawaian II-283
2.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan II-286
2.2.5.5 Keuangan II-287
2.2.6 Urusan Pendukung Urusan Pemerintah II-290
2.2.6.1 Sekretariat Daerah II-290
2.2.6.2 Sekretariat DPRD II-296
2.2.7 Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan II-297
2.2.8 Unsur Kewilayahan II-300
2.2.9 Unsur Pemerintahan Umum II-311

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... III-1
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2018 - 2022..... III-2
3.1.1 Pendapatan Daerah..... III-2
3.1.2 Belanja Daerah..... III-7
3.1.3 Pembiayaan Daerah III-13
3.2 Analisis Rasio III-17
3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2018 - 2022..... III-24
3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-24
3.4 Proyeksi dan Kebijakan Pendanaan Tahun 2024 - 2026..... III-27
3.4.1 Proyeksi dan Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-27
3.4.2 Proyeksi dan Kebijakan Belanja Daerah..... III-33
3.4.3 Proyeksi dan Kebijakan Pembiayaan Daerah III-35

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah IV-4
4.2 Isu Strategis..... IV-26

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 .. V-1
5.1.1 Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN

2020-2024 dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 ..... V-19
5.1.2 Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2024 dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 ..... V-20
5.2 *Cascading* Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026..... V-21

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... VI-1
6.1.1 Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya VI-1
6.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan VI-3
6.1.3 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN VI-6
6.2 Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan..... VI-15
6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah VI-17
6.4 Rencana Inovasi VI-21

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah..... VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah..... VII-6

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah..... VIII-2
8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VIII-4
8.3 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah VIII-13
8.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VIII-58
8.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah..... VIII-84

BAB IX
PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN I-1

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH II-1
Tabel 2.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung II-3
Tabel 2.2 Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ... II-6
Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian II-9
Tabel 2.4 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun Semester I Tahun 2022 ..... II-17
Tabel 2.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 ..... II-18
Tabel 2.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2022 ..... II-20
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2022 ..... II-21
Tabel 2.8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2022 ..... II-23
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2022 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2022 ..... II-24
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Semester I Tahun 2022 ..... II-26
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2022 ..... II-27
Tabel 2.12 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2018-2022 Menurut lapangan usaha II-29
Tabel 2.13 Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-31
Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan PURWOMANGGUNG..... . II-33
Tabel 2.15 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (persen) II-34
Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Temanggung (Persen) II-35
Tabel 2.17 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-36
Tabel 2.18 Target dan Realisasi PDRB Kab. Temanggung Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah) II-37

Tabel 2.19 PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-38
Tabel 2.20 Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Purwomanggung)..... II-39
Tabel 2.21 Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2018-2022..... II-44
Tabel 2.22 Realisasi dan Perubahan Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2.23 Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-46
Tabel 2.24 Rasio Presentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-47
Tabel 2.25 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung Tahun 2018-2022..... II-48
Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-49
Tabel 2.27 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten /Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2022 ..... II-50
Tabel 2.28 Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/ Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-51
Tabel 2.29 Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/ Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-51
Tabel 2.30 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-52
Tabel 2.31 Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022..... II-54
Tabel 2.32 Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/ Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022..... II-55
Tabel 2.33 Pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel 2.34 Pertumbuhan HLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel 2.35 Pertumbuhan RLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel 2.36 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022..... II-57

Tabel 2.37 Perbandingan Komponen Pembentuk IPG Antara Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 ..... II-62
Tabel 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-62
Tabel 2.39 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022 II-63
Tabel 2.40 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022 II-64
Tabel 2.41 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022 II-64
Tabel 2.42 TPT Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-66
Tabel 2.43 Realisasi dan Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-67
Tabel 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021..... II-68
Tabel 2.45 Pertumbuhan Jumlah Penganggur Terbuka Kabupaten/ Kota di Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah, dan Nasional..... II-69
Tabel 2.46 Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-71
Tabel 2.47 Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2021-2022 dari Kementrian PAN dan RB..... II-72
Tabel 2.48 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018-2022 ..... II-73
Tabel 2.49 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022 . ..... II-74
Tabel 2.50 Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021..... ..... II-75
Tabel 2.51 APK dan APM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 II-77
Tabel 2.52 Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-78
Tabel 2.53 Gambaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022 ..... II-79
Tabel 2.54 Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung II-92
Tabel 2.55 Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung II-95
Tabel 2.56 Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Temanggung II-96
Tabel 2.57 Ketersediaan Sanitasi di Kabupaten Temanggung..... II-97
Tabel 2.58 Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung..... II-104
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berkaitan dengan Target SPM s.d. Tahun 2022 ..... II-107

Tabel 2.61 Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2018-2022..... II-120
Tabel 2.62 Presentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2018-2022 ..... II-121
Tabel 2.63 Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 ..... II-122
Tabel 2.64 Gambaran Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-125
Tabel 2.65 Kecamatan Layak Anak Tahun 2018-2022..... II-126
Tabel 2.66 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-127
Tabel 2.67 Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-128
Tabel 2.68 Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Temanggung II-130
Tabel 2.69 Klasifikasi Dan Rentang Nilai IKLH..... II-130
Tabel 2.70 IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-131
Tabel 2.71 Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022..... II-132
Tabel 2.72 Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... II-133
Tabel 2.73 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 dan 2022 ..... II-133
Tabel 2.74 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2018-2022 ..... II-134
Tabel 2.75 Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 – 2022..... II-135
Tabel 2.76 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-136
Tabel 2.77 Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-136
Tabel 2.78 Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022..... II-137
Tabel 2.79 Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-137
Tabel 2.80 Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non-Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-138
Tabel 2.81 Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-139
Tabel 2.82 Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d TW III..... II-139
Tabel 2.83 Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-140
Tabel 2.84 Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) II-141
Tabel 2.85 Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-142
Tabel 2.86 Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2021..... II-142

Tabel 2.87 Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-143
Tabel 2.88 Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2018-2022..... II-143
Tabel 2.89 Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan Tahun 2018-2022 ..... II-144
Tabel 2.90 Persentase Desa yang Menetapkan Penyusunan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2018-2022 ..... II-145
Tabel 2.91 Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2018-2022..... II-146
Tabel 2.92 Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan..... II-147
Tabel 2.93 Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2018-2022 ..... II-148
Tabel 2.94 Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2018-2022.... ..... II-148
Tabel 2.95 Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2018-2022 ..... II-149
Tabel 2.96 Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2018-2022..... II-149
Tabel 2.97 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif Tahun 2018-2022 ..... II-150
Tabel 2.98 Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2018-2022 ..... II-151
Tabel 2.99 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2018-2022..... II-151
Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-152
Tabel 2.101 Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-154
Tabel 2.102 Gambaran Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-155
Tabel 2.103 Gambaran Urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-157
Tabel 2.104 Gambaran Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-159
Tabel 2.105 Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-160
Tabel 2.106 Gambaran Urusan Statistik di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-161
Tabel 2.107 Gambaran Urusan Persandian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-162
Tabel 2.108 Gambaran Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-162
Tabel 2.109 Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-163
Tabel 2.110 Gambaran Urusan Kearsipan di Kabupaten

Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-164
Tabel 2.111 Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-165
Tabel 2.112 Gambaran Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-166
Tabel 2.113 Gambaran Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-167
Tabel 2.114 Gambaran Urusan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-171
Tabel 2.115 Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d Triwulan III II-172
Tabel 2.116 Gambaran Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-173
Tabel 2.117 Gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018-2022... II-174
Tabel 2.118 Gambaran Urusan Perencanaan Tahun 2018-2022..... II-175
Tabel 2.119 Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-176
Tabel 2.120 Komposisi PNS dan Non-PNS Kabupaten Temanggung 2018-2022 ..... II-177
Tabel 2.121 Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-179
Tabel 2.122 Perkembangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-180
Tabel 2.123 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung 2018-2022 ..... II-181
Tabel 2.124 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-182
Tabel 2.125 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-182
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Indeks Toleransi Tahun 2018 s.d 2022 ..... II-183
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Indeks Gotong-Royong Tahun 2018 s.d 2022..... II-184
Tabel 2.128 Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2022 ..... II-185
Tabel 2.129 Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-189
Tabel 2.130 Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-190
Tabel 2.131 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-190
Tabel 2.132 Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-192
Tabel 2.133 Perkembangan Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-192
Tabel 2.134 Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-193
Tabel 2.135 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 s.d TW III

Di RPJMD II-194
Tabel 2.136 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-196
Tabel 2.137 Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-197
Tabel 2.138 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-197
Tabel 2.139 Kriteria/Status Capaian Kinerja II-197
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .... II-197
Tabel 2.141 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d Tahun 2022 ..... II-200
Tabel 2.142 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d Tahun 2022 ..... II-205
Tabel 2.143 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Tahun 2022 ..... II-213
Tabel 2.144 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Tahun 2022..... II-216
Tabel 2.145 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanahan s.d Tahun 2022 ..... II-218
Tabel 2.146 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Tahun 2022 ..... II-219
Tabel 2.147 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD) s.d Tahun 2022 ..... II-222
Tabel 2.148 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Tahun 2022 ..... II-225
Tabel 2.149 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja s.d Tahun 2022 ..... II-231
Tabel 2.150 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Tahun 2022 ..... II-234
Tabel 2.151 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pangan s.d Tahun 2022 ..... II-237
Tabel 2.152 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Lingkungan Hidup s.d Tahun 2022 ..... II-239
Tabel 2.153 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2022 ..... II-242
Tabel 2.154 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa s.d Tahun 2022 . II-245
Tabel 2.155 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Tahun 2022 ..... II-248
Tabel 2.156 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perhubungan s.d Tahun 2022 ..... II-251
Tabel 2.157 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika s.d Tahun 2022..... II-253
Tabel 2.158 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah s.d Tahun 2022 ..... II-255

Tabel 2.159 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanaman Modal s.d Tahun 2022 ..... II-257
Tabel 2.160 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga s.d Tahun 2022 ..... II-260
Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Statistik s.d Tahun 2022 ..... II-262
Tabel 2.162 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Persandian s.d Tahun 2022 ..... II-263
Tabel 2.163 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kebudayaan s.d Tahun 2022 ..... II-264
Tabel 2.164 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perpustakaan s.d Tahun 2022 ..... II-266
Tabel 2.165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kearsipan s.d Tahun 2022 ..... II-267
Tabel 2.166 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perikanan s.d Tahun 2022 ..... II-269
Tabel 2.167 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata s.d Tahun 2022 ..... II-271
Tabel 2.168 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanian s.d Tahun 2022 ..... II-273
Tabel 2.169 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perdagangan s.d Tahun 2022 ..... II-276
Tabel 2.170 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perindustrian s.d Tahun 2022 ..... II-278
Tabel 2.171 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Transmigrasi s.d Tahun 2022 ..... II-279
Tabel 2.172 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan s.d Tahun 2022 ..... II-280
Tabel 2.173 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Penelitian Dan Pengembangan s.d Tahun 2022 ..... II-282
Tabel 2.174 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepegawaian s.d Tahun 2022 ..... II-283
Tabel 2.175 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pendidikan Dan Pelatihan s.d Tahun 2022 ..... II-286
Tabel 2.176 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Keuangan s.d Tahun 2022 ..... II-287
Tabel 2.177 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Sekretariat Daerah s.d Tahun 2022 ..... II-290
Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Sekretariat DPRD s.d Tahun 2022 ..... II-296
Tabel 2.179 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pengawasan s.d Tahun 2022 ..... II-297
Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kewilayahan s.d Tahun 2022 ..... II-300
Tabel 2.181 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemerintahan Umum s.d Tahun 2022 ..... II-311

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2018-2020 ..... III-4
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Tahun 2022 ..... III-5
Tabel 3.3 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah III-6
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020 ..... III-8
Tabel 3.5 Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah.... III-9
Tabel 3.6 Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah III-9
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Tahun 2022 ..... III-11
Tabel 3.8 Persentase Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah III-12
Tabel 3.9 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah III-12
Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020 ..... III-15
Tabel 3.11 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Tahun 2022 ..... III-16
Tabel 3.12 Kriteria Rasio Efektivitas PAD..... III-17
Tabel 3.13 Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 – Tahun Anggaran 2022 ..... III-18
Tabel 3.14 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan III-18
Tabel 3.15 Penghitungan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 – Tahun Anggaran 2022 ..... III-19
Tabel 3.16 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 (Belanja Operasi) III-20
Tabel 3.17 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 – Tahun Anggaran 2022 (Belanja Modal) III-20
Tabel 3.18 Penghitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018-2022 ..... III-21
Tabel 3.19 Penghitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021-2022 ..... III-22
Tabel 3.20 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah III-22
Tabel 3.21 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 – Triwulan III 2022 ..... III-23
Tabel 3.22 Proporsi Belanja Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – Tahun 2022 ..... III-24
Tabel 3.23 Proporsi Belanja Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – Tahun 2022 ..... III-25
Tabel 3.24 Proporsi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022..... III-25
Tabel 3.25 Proporsi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... III-26

Tabel 3.26 Proporsi Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – Tahun 2022..... III-26
Tabel 3.27 Proporsi Belanja Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – Tahun 2022 ..... III-27
Tabel 3.28 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ..... III-29
Tabel 3.29 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 ..... III-30
Tabel 3.30 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ..... III-34
Tabel 3.31 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ..... III-36
Tabel 3.32 Proyeksi APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ..... III-37

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN V-1
Tabel 5.1 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Periode Keempat RPJPD 2005-2025 dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 ..... V-7
Tabel 5.2 4 Pilar Periode Keempat RPJPD Tahun 2005-2025 Dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 ..... V-8
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tahun 2024-2026..... V-14
Tabel 5.4 Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ..... V-19
Tabel 5.5 Kesesuaian Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ..... V-20
Tabel 5.6 *Cascading* Kinerja Rencna Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026..... V-22

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1
Tabel 6.1 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026 ..... VI-9
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Tahunan RPD 2024-2026 ..... VI-15
Tabel 6.3 Rencana Inovasi Pendukung Capaian Sasaran RPD 2024-2026 ..... VI-21

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... ..... VII-1
Tabel 7.1 Kerangka pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026..... VII-3

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.... VII-35

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2026..... VIII-2
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2026..... VIII-5
Tabel 8.3 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2026..... VIII-14
Tabel 8.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2026 ..... VIII-59
Tabel 8.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2026..... VIII-85

BAB IX
PENUTUP IX-1

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN..... I-1
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..... I-9
Gambar 1.2 Alur Penyusunan RPD dan Renstra I-12

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH II-1
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung..... II-5
Gambar 2.2 Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah II-7
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Temanggung II-9
Gambar 2.4 Perkembangan IRBI Tahun 2018 s/d 2021 ..... II-10
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Temanggung..... II-11
Gambar 2.6 Grafik Kasus Covid-19 Per-Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan 2021 ..... II-12
Gambar 2.7 Grafik Kasus Kesembuhan Covid-19 Per-Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ..... II-13
Gambar 2.8 Grafik Kasus Kematian COVID-19 Per-Puskesmas Kabupaten Temanggung tahun 2021..... II-14
Gambar 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 2022..... II-17
Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kawasan Purwomanggung Semester I Tahun 2022..... II-18
Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2022..... II-20
Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2022..... II-24
Gambar 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-27
Gambar 2.14 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-28
Gambar 2.15 Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-36
Gambar 2.16 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-39
Gambar 2.17 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021..... II-43
Gambar 2.18 Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-49
Gambar 2.19 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022 ..... II-50
Gambar 2.20 Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-54
Gambar 2.21 Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-58

Gambar 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2018-2022 ..... II-61
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ... II-63
Gambar 2.24 Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2018-2022..... II-102
Gambar 2.25 Persentase peserta pelatihan keterampilan yang Menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2018 – 2022 ..... II-103
Gambar 2.26 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2018-2022..... II-104
Gambar 2.27 Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK tahun 2018-2022..... II-105
Gambar 2.28 Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ..... II-106
Gambar 2.29 Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama II-107
Gambar 2.30 Persentase Peningkatan Produktivitas Kewirausahaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022 ..... II-108
Gambar 2.31 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..... II-111

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... III-1
Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Temanggung Tahun 2018-2022..... III-3

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN V-1
Gambar 5.1 *Logframe* Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026..... V-10

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1
Gambar 6.1 Diagram Tema Kebijakan Tahunan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026..... VI-16

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

BAB IX
PENUTUP IX-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 sehingga mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD akan mengacu pada RPJPD. Namun, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJPD yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen RPD.

Dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini nantinya akan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, serta isu strategis aktual.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Sementara itu, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut (dalam hal ini RPJMD digantikan oleh RPD Tahun 2024-2026 dan perlu dilakukan elaborasi dengan ketentuan Inmendagri No. 52 Tahun 2022):

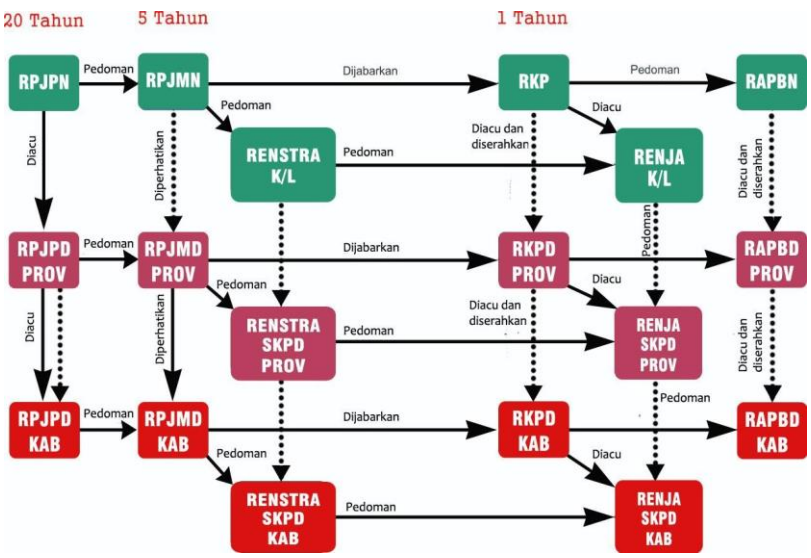

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

1) **Hubungan RPD dengan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025**

Penyusunan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, sekaligus dalam rangka mencapai Visi pembangunan jangka panjang, yaitu "Mewujudkan Temanggung yang maju, mandiri, aman, damai dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera". Periode RPD Tahun 2024-2026 merupakan tahapan keempat RPJPD.

2) **Hubungan RPD dengan RPJMN**

Penyusunan RPD merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian arahan RPJMN Tahun 2020-

2024, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

3) **Hubungan RPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025**

Penyusunan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 berpedoman memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dengan Visi "JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI". Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut dirumuskan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga

kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.

5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

4) Hubungan RPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPD juga memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan Visi "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

5) Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah didukung oleh perencanaan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait erat secara sinergis, oleh karena itu

RPD merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Renstra. Demikian halnya berbagai isu dan permasalahan sektoral yang berasal dari masing-masing perangkat daerah juga menjadi masukan bagi penyusunan RPD. Adanya sinergi antara RPD dengan Renstra perangkat daerah pada tahap selanjutnya akan mendukung efektivitas pencapaian indikator kinerja daerah yang ditunjang oleh capaian kinerja kepala perangkat daerah beserta unit kerja di bawahnya. Berikut adalah alur penyusunan RPD dan kaitannya dengan Renstra PD.

Gambar 1.2
Alur Penyusunan RPD dan Renstra

6) Hubungan RPD dengan RKPD

RPD Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah selama 3 (tiga) tahun dan dijabarkan setiap tahunnya oleh RKPD. RKPD berpedoman pada tema pembangunan RPD setiap tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7) Hubungan RPD dengan RTRW

Penyusunan RPD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, yang diwujudkan melalui

Kebijakan Penataan Ruang Daerah yang meliputi:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
2. Pengembangan industri berbahan baku lokal;
3. Pengembangan pusat pelayanan;
4. Pengembangan kepariwisataan;
5. Peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan-perdesaan;
6. Pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas daerah;
7. Pengembangan prasarana wilayah daerah;
8. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
9. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
11. Pengembangan kawasan strategis daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung dan guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
2. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPD yang meliputi latar belakang penyusunan RPD, landasan hukum penyusunan RPD, hubungan antara RPD dengan dokumen terkait, maksud dan tujuan penyusunan RPD, dan sistematika penulisan RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Memuat tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang penjelasan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat tentang butir-butir yang menjadi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kondisi daerah, capaian kinerja daerah dan isu strategis daerah.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang jelas, ringkas, mudah dipahami, dan terukur; serta *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome.*

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD serta program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat kerangka pendanaan yang digunakan untuk mendanai program-program Perangkat Daerah dan daftar program Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan tentang capaian indikator kinerja pemerintah daerah yang berguna sebagai gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IX PENUTUP

Memuat tentang pernyataan penutup dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Temanggung secara administratif terletak di provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pengembangan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo – Kabupaten Wonosobo – Kabupaten Magelang – Kota Magelang – Kabupaten Temanggung). Pengembangan wilayah di kawasan Purwomanggung didasarkan pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri, dan panas bumi. Keunggulan dari Kabupaten Temanggung pada sektor pertanian khususnya hortikultura adalah bawang putih, bawang merah dan cabai. Kabupaten Temanggung merupakan sentra produksi bawang putih terbesar di Indonesia. Jenis bawang putih yang dikembangkan di Temanggung adalah lumbu hijau, lumbu kuning, lumbu putih. Melalui program lumbung pangan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022 luas lahan panen bawang putih Kabupaten Temanggung mencapai 1.095,50 ha dengan produksi 74.176,20 kwintal. Luas lahan bawang merah sebesar 2.167 ha dengan produksi sebesar 165.706 kwintal. Produk hortikultura unggulan lainnya yaitu cabai rawit dengan luas lahan 3.412 ha, produksi sebesar 624.944 kwintal dan untuk cabai besar luas lahan sebesar 2.180,00 ha, produksi 421.411 kwintal.

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Tembakau srintil merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia yang ditanam dengan kearifan lokal berasal dari varietas asli Temanggung yaitu

Kemloko, selain itu tembakau Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Produksi tembakau sampai dengan triwulan tiga tahun 2022 dengan luas lahan 14.716,25 ha sebesar 95.089,09 kwintal, sedangkan untuk produksi kopi, salah satu kopi yang mempunyai cita rasa yang khas yaitu kopi Robusta dan kopi Arabika. Produksi kopi Robusta sampai dengan triwulan tiga tahun 2022 dengan luas lahan 11.688,01 ha sebesar 68.419,34 kwintal, dimana produksi kopi Arabika sampai dengan triwulan tiga tahun 2022 dengan lahan 1.699,95 ha sebesar 11.045,81 kwintal luas. Kopi dari Temanggung menjadi produsen terbesar di Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung merupakan wilayah pergunungan dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadikan embung sebagai salah satu cara efektif untuk menampung air hujan. Program 1.000 embung merupakan program pemerintah pusat dalam penanganan kekeringan jangka panjang. Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2022 mempunyai 40 Embung yang tersebar di 16 Kecamatan 34 desa. Pembangunan embung tersebut bersumber dari beberapa sumber dana di antaranya TJSLP dari PT, APBN Kementerian Pertanian, DAK Pertanian, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki potensi alam yang sangat menarik untuk dapat dijadikan tempat wisata diantaranya adalah Gunung Sindoro, Sumbing dan Prau. Selain itu Kabupaten Temanggung memiliki Pasar Papringan yang berbeda dengan pasar yang ada pada umumnya. Pasar Papringan hanya buka pada hari Minggu Wage dan Minggu Pon yang menjual kuliner asli hasil tani Kabupaten Temanggung. Transaksi dipasar papringan juga dapat dikatakan unik karena tidak menggunakan uang rupiah, melainkan menggunakan kepingan bambu.

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 87.065 ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan	• Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngaliyan di Kecamatan Bejen. • Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. • Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang. • Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	• Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan. • Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran. • Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	• Desa Soropadan, Desa Kupen, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat. • Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan. • Desa Bagusan, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang. • Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candiroto, Wonoboyo	• Desa Batursari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung. • Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. • Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

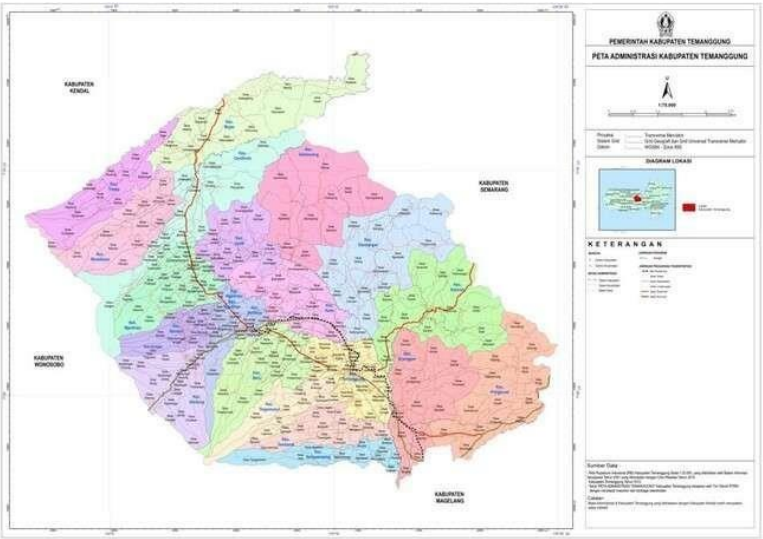

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan,1.506 RW, dan 5.914 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	BULU	4.304	19	0	84	302	0	0	84	302
2	TEMBARAK	2.683	13	0	67	224	0	0	67	224
3	TEMANGGUNG	3.339	6	19	20	87	119	534	139	621
4	PRINGSURAT	5.728	14	0	113	364	0	0	113	364
5	KALORAN	6.392	14	0	111	416	0	0	111	416
6	KANDANGAN	7.836	16	0	101	378	0	0	101	378
7	KEDU	3.496	14	0	108	424	0	0	108	424
8	PARAKAN	2.223	14	2	50	239	27	120	77	359
9	NGADIREJO	5.331	19	1	97	396	3	30	100	426
10	JUMO	2.932	13	0	60	273	0	0	60	273
11	TRETEP	3.365	11	0	25	141	0	0	25	141
12	CANDIROTO	5.994	14	0	74	275	0	0	74	275
13	KRANGGAN	5.761	12	1	97	358	7	29	104	387
14	TLOGOMULYO	2.484	12	0	47	156	0	0	47	156
15	SELOPAMPANG	1.729	12	0	46	128	0	0	46	128
16	BANSARI	2.254	13	0	46	189	0	0	46	189
17	KLEDUNG	3.221	13	0	38	160	0	0	38	160
18	BEJEN	6.884	14	0	51	170	0	0	51	170
19	WONOBOYO	4.398	13	0	53	209	0	0	53	209
20	GEMAWANG	6.711	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		87.065	266	23	1.350	5.201	156	713	1.506	5.914

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kandangan dengan luas 7.836 ha atau setara dengan 9,01% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1.729 ha (1,98%). Kecamatan dengan

jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.

2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan.

b) Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.2
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak pada posisi strategis yang terletak di tengah di antara tiga pusat

kegiatan ekonomi yaitu Semarang, Purwokerto dan Yogyakarta. Posisi strategis Kabupaten Temanggung yang berada pada jalur ekonomi yang menghubungkan Jawa Tengah bagian utara dan selatan memberikan keuntungan dalam perkembangan ekonomi khususnya melalui aktivitas sektor industri yang banyak berkembang di wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Lokasi strategis yang dimiliki Kabupaten Temanggung diperkirakan semakin menguntungkan dengan adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta yang melintasi Kabupaten Temanggung. Hal ini menjadikan Kabupaten Temanggung berpotensi menjadi salah satu kota transit yang akan mendorong peningkatan mobilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Temanggung. Seiring dengan peningkatan mobilitas yang terjadi, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pengembangan kawasan melalui sektor industri, pariwisata maupun sektor ekonomi lainnya yang potensial di Kabupaten Temanggung.

c) Kemiringan Lahan

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di

Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 ha (39,31%), curam seluas 31.232 ha(37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 ha (21,64%).

d) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400->1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

e) Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.

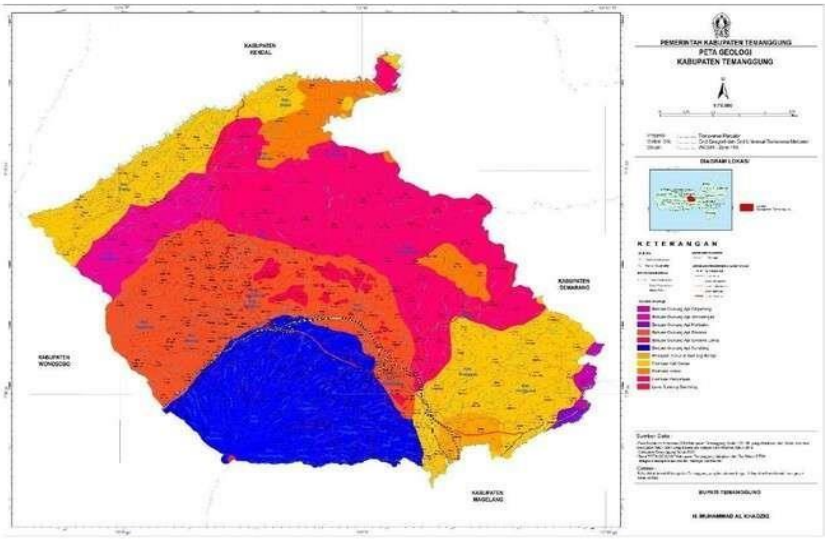

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

b. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Temanggung berdasarkan Buku IRBI Tahun 2021, indeks risiko bencana Kabupaten Temanggung sebesar 121.33 dengan kategori sedang. Selanjutnya menurut Indeks

Risiko per Ancaman, Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi (13,66 tinggi), Indek Resiko Gunung Berapi (16,18 tinggi), Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (22,77 tinggi), Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor (15,18 tinggi), dan Indeks Resiko Bencana Kekeringan (15,18 tinggi). Dalam publikasi inarisk.bnpb.go.id, data perkembangan IRBI Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dapat dilihat dalam gambar 2.4 dibawah ini.

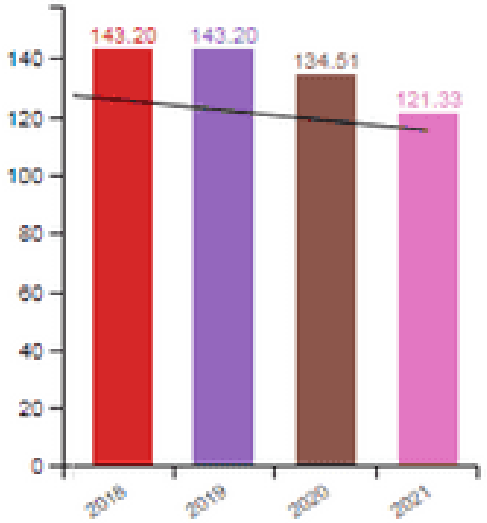

Sumber: inarisk.bnpb.go.id, 2022

Gambar 2.4

Perkembangan IRBI Tahun 2018 sd. 2021

Dalam data RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, berikut beberapa kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Temanggung:

1. Kawasan rawan bencana angin topan meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Temanggung, Kledung, Tretep, Pringsurat, Kaloran, Jumo, Gemawang, Wonoboyo, Candiroto, dan Kedu.
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Tretep, Wonoboyo, Bejen,

Candiroto, Gemawang, Kandangan, Jumo, Bansari, Kledung, Kaloran, Pringsurat, Bulu, Tlogomulyo, dan Selopampang.

3. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Bejen, Jumo, dan Bulu.
4. Kawasan rawan bencana banjir meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kedu, Parakan, dan Bejen.

Dengan kondisi bentang alam Kabupaten Temanggung maka seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung berpotensi terkena bencana alam. Jenis bencana alamnya antara lain tanah longsor, puting beliung dan banjir. Selain bencana tersebut, kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) serta kebakaran karena kelalaian manusia juga terjadi di Kabupaten Temanggung.

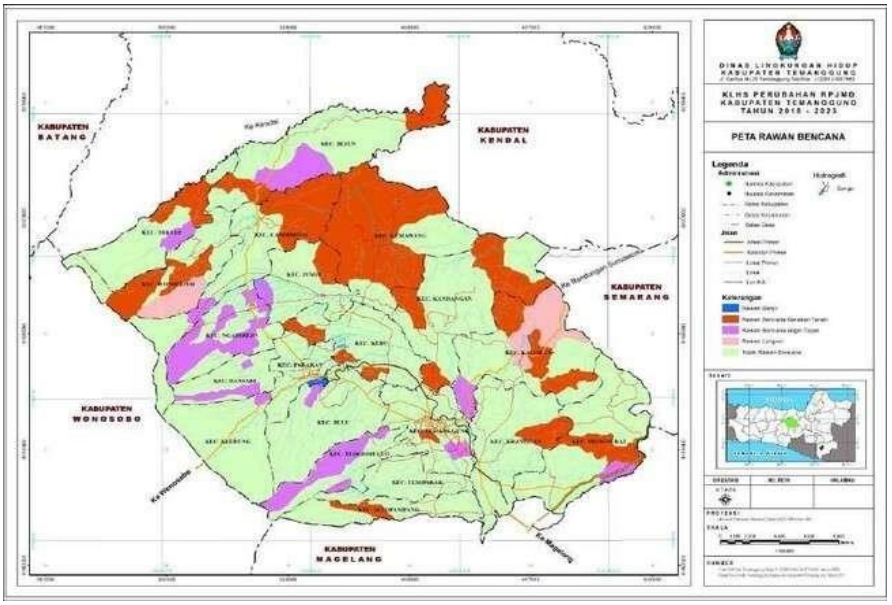

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Gambar 2.5

Peta Rawan Bencana Kabupaten Temanggung

c. Kondisi dan Dampak Pandemi Covid-19

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian pada tanggal 30

Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi *2019-nCoV*) sebagai "Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya". Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Infeksi Novel Corona virus telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, serta kesejahteraan massyarakat Indonesia.

KASUS COVID-19 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

a. Kasus Konfirmasi

Berikut ini disajikan data kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di wilayah Kabupaten Temanggung per kecamatan.

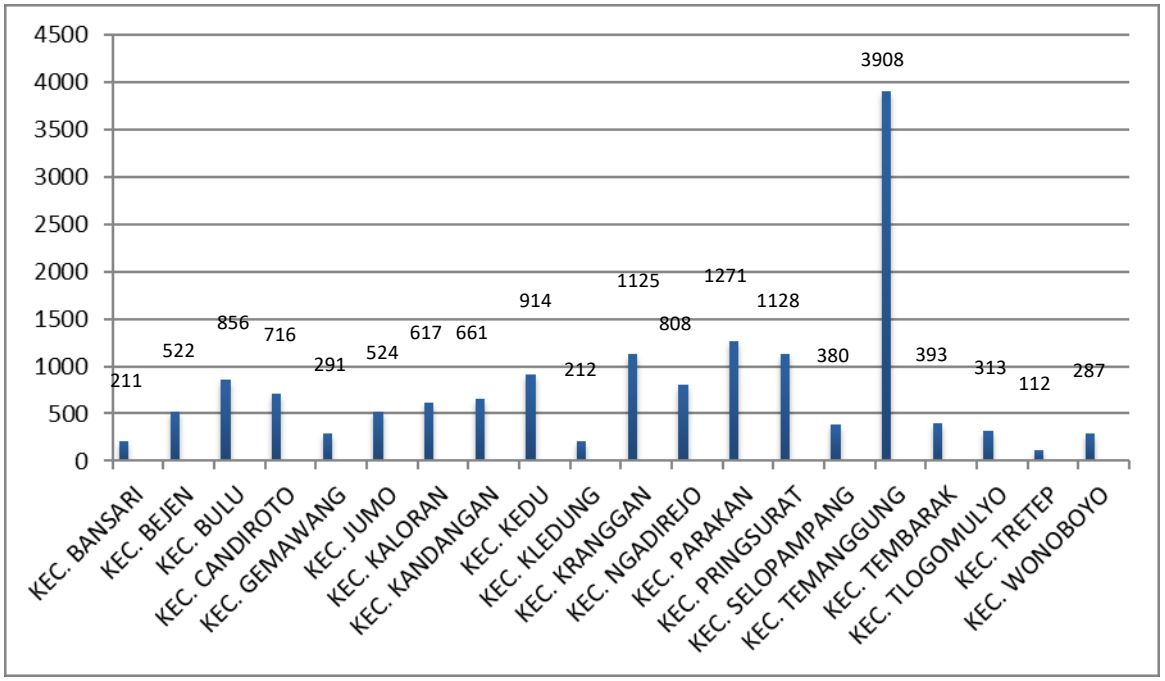

Gambar 2.6
Grafik Kasus COVID-19 Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

b. Kasus Sembuh

Berikut ini disajikan data pasien yang sembuh dari Covid-19 di wilayah Kabupaten Temanggung per kecamatan.

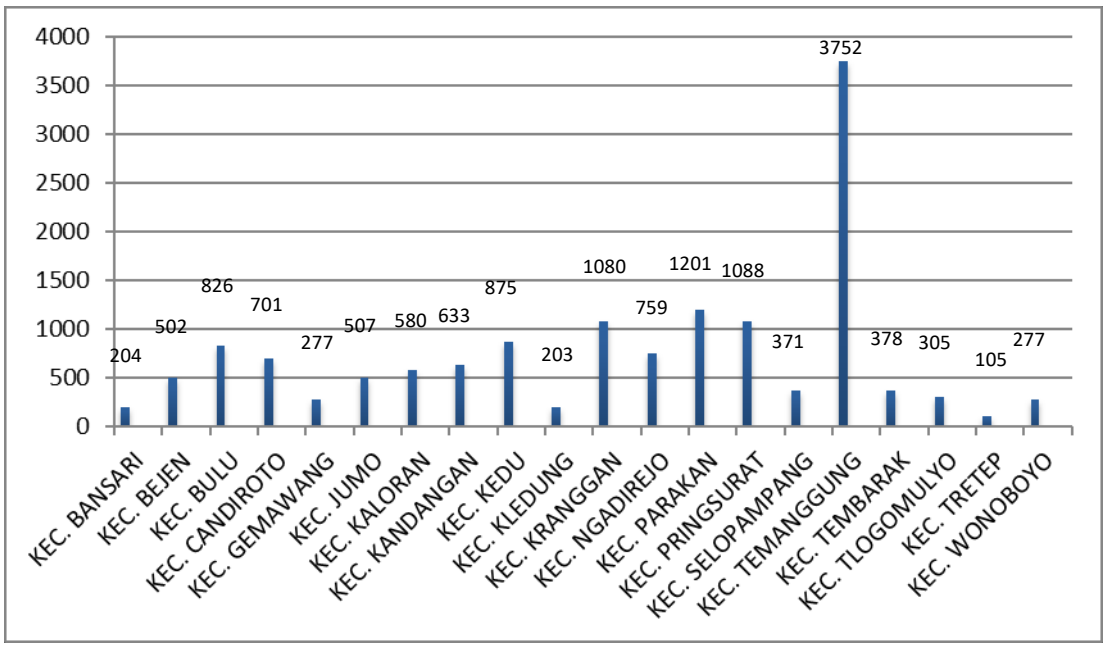

Gambar 2.7
Grafik Kasus Kesembuhan COVID-19
Per Kecamatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

c. Kasus Meninggal

Berikut ini disajikan data pasien yang meninggal akibat Covid-19 di wilayah Kabupaten Temanggung per kecamatan.

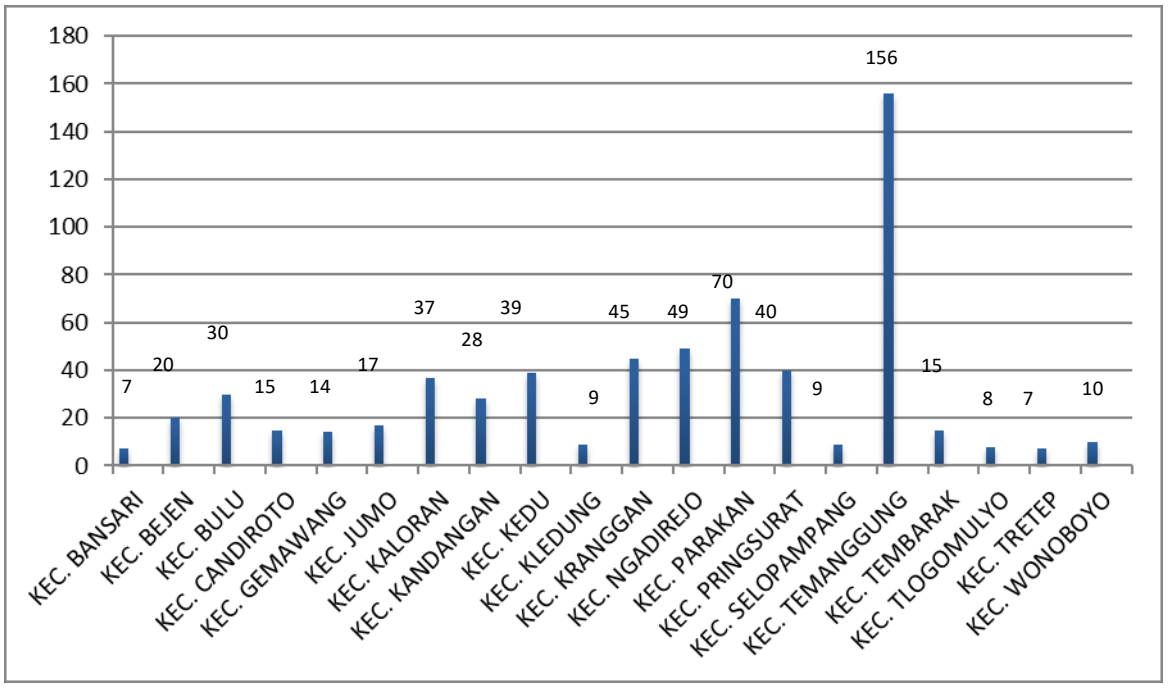

Gambar 2.8
Grafik Kasus Kematian COVID-19 Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

d. Kondisi Demografi

1) Jumlah dan Sebaran Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk pada tahun 2022 semester II adalah 807.440 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 406.545 jiwa (50,35%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 400.895 jiwa (49,65%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101,41. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan RasioJenis Kelamin di Tiap Kecamatan Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio jenis kelamin
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%	
1	BULU	25.320	50,76	24.559	49,24	49.879	6,18	103,10
2	TEMBARAK	16.223	50,98	15.598	49,02	31.821	3,94	104,01
3	TEMANGGUNG	41.680	49,67	42.231	50,33	83.911	10,39	98,70
4	PRINGSURAT	26.605	50,12	26.473	49,88	53.078	6,57	100,50
5	KALORAN	23.373	50,04	23.334	49,96	46.707	5,78	100,17
6	KANDANGAN	27.154	50,55	26.562	49,45	53.716	6,65	102,23
7	KEDU	30.315	50,50	29.720	49,50	60.035	7,44	102,00
8	PARAKAN	27.244	50,29	26.930	49,71	54.174	6,71	101,17
9	NGADIREJO	29.198	50,49	28.636	49,51	57.834	7,16	101,96
10	JUMO	15.355	50,21	15.227	49,79	30.582	3,79	100,84
11	TRETEP	11.020	51,05	10.567	48,95	21.587	2,67	104,29
12	CANDIROTO	16.828	50,28	16.640	49,72	33.468	4,14	101,13
13	KRANGGAN	24.935	49,64	25.299	50,36	50.234	6,22	98,56
14	TLOGOMULYO	11.964	51,05	11.473	48,95	23.437	2,90	104,28
15	SELOPAMPANG	10.388	50,16	10.320	49,84	20.708	2,56	100,66
16	BANSARI	12.467	50,72	12.112	49,28	24.579	3,04	102,93
17	KLEDUNG	14.444	50,69	14.050	49,31	28.494	3,53	102,80
18	BEJEN	10.946	50,36	10.788	49,64	21.734	2,69	101,46
19	WONOBOYO	13.772	50,81	13.335	49,19	27.107	3,36	103,28
20	GEMAWANG	17.314	50,40	17.041	49,60	34.355	4,25	101,60
Jumlah		406.545	50,44	400.895	49,56	807.440	100	101,78

Sumber: Dindukcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

Pada tahun 2022 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung pada tahun 2022 sebanyak 83.911 jiwa dimana mencakup 10,39% dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang

yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 20.708 jiwa yang mencakup hanya sekitar 2,56% dari total penduduk. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)
1	BULU	43,04	49.879	6,18	1.159
2	TEMBARAK	26,84	31.821	3,94	1.186
3	TEMANGGUNG	33,39	83.911	10,39	2.513
4	PRINGSURAT	57,27	53.078	6,57	927
5	KALORAN	63,92	46.707	5,78	731
6	KANDANGAN	78,36	53.716	6,65	686
7	KEDU	34,96	60.035	7,44	1.717
8	PARAKAN	22,23	54.174	6,71	2.437
9	NGADIREJO	53,31	57.834	7,16	1.085
10	JUMO	29,32	30.582	3,79	1.043
11	TRETEP	33,65	21.587	2,67	642
12	CANDIROTO	59,94	33.468	4,14	558
13	KRANGGAN	57,61	50.234	6,22	872
14	TLOGOMULYO	24,84	23.437	2,90	944
15	SELOPAMPANG	17,29	20.708	2,56	1.198
16	BANSARI	22,54	24.579	3,04	1.090
17	KLEDUNG	32,21	28.494	3,53	885
18	BEJEN	68,84	21.734	2,69	316
19	WONOBOYO	43,98	27.107	3,36	616
20	GEMAWANG	67,11	34.355	4,25	512
Jumlah		870,65	807.440	100	1.055,74

Sumber: Dindukcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.513

jiwa/km2, diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.437 jiwa/km2, Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.717 jiwa/km2 dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah 1.055,74 jiwa/km2. Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung bertambah dari 772.289 jiwa pada tahun 2018 menjadi 807.440 jiwa pada tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan sejumlah 35.151 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

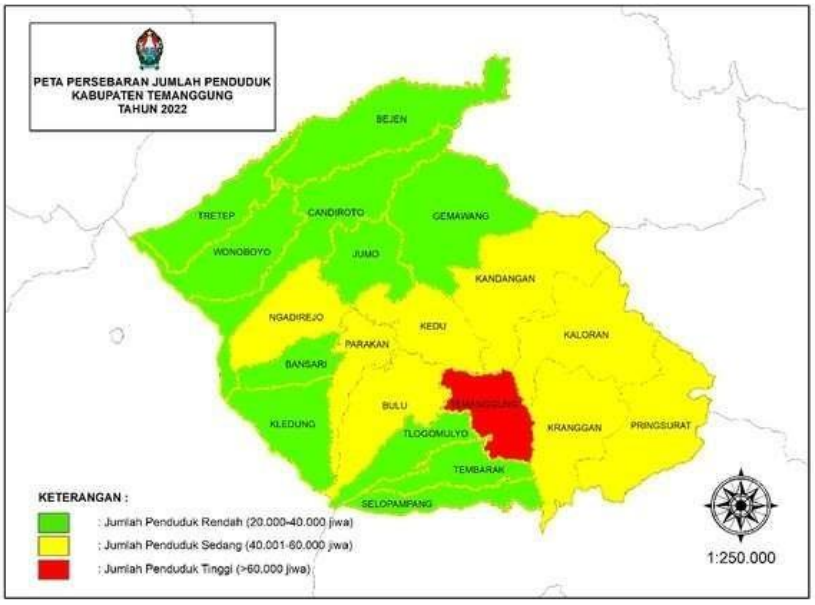

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.9
Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung
Semester II Tahun 2022

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo dan Purworejo. Kepadatan penduduk di Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

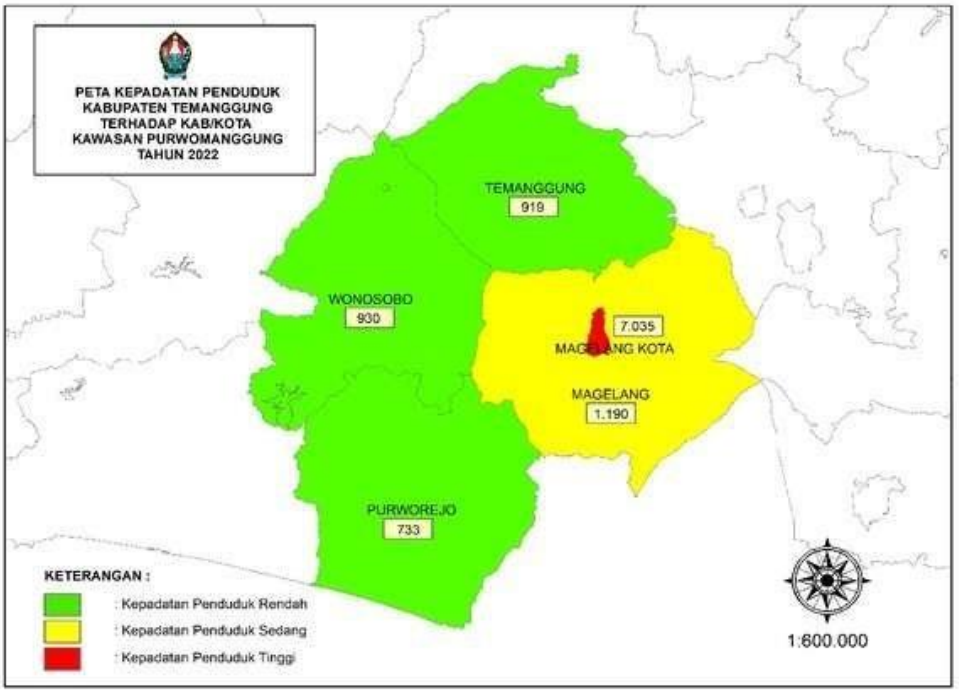

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.10
Kepadatan Penduduk Kawasan Purwomanggung
Semester II Tahun 2022

Tabel 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2022

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Kepadatan Penduduk Tahun 2022 (Jiwa/Km^2)
Kab. Purworejo	1.091,49	800.275	733
Kab. Wonosobo	984,68	915.634	930
Kota Magelang	18,12	127.466	7.035
Kab. Magelang	1.102,93	1.312.175	1.190
Kab. Temanggung	870,65	807.440	1.055,74
Rata-rata			2.188,6

Sumber: Dinpermadesdukcapil Jateng semester I tahun 2022

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung adalah 2.188,6 jiwa/km2. Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.035 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk Kabupaten

Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung, dengan kepadatan 1.055,74 jiwa/km2. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bulu	48.119	48.785	48.840	49.301	49.879
2	Tembarak	30.739	31.107	31.274	31.545	31.821
3	Temanggung	82.620	83.157	83.138	83.271	83.911
4	Pringsurat	51.583	52.122	52.458	52.791	53.078
5	Kaloran	45.098	45.631	46.065	46.248	46.707
6	Kandangan	51.618	52.160	52.648	53.084	53.716
7	Kedu	58.072	58.889	58.935	59.318	60.035
8	Parakan	53.297	53.588	53.897	54.076	54.174
9	Ngadirejo	55.746	56.233	56.921	57.371	57.834
10	Jumo	29.656	30.002	30.172	30.344	30.582
11	Tretep	20.906	21.113	21.238	21.394	21.587
12	Candiroto	32.621	32.956	32.857	33.166	33.468
13	Kranggan	48.465	49.021	49.254	49.750	50.234
14	Tlogomulyo	22.710	22.832	23.087	23.208	23.437
15	Selopampang	19.986	20.175	20.465	20.618	20.708
16	Bansari	23.984	24.203	24.298	24.409	24.579
17	Kledung	27.606	27.902	28.009	28.171	28.494
18	Bejen	21.278	21.482	21.693	21.643	21.734
19	Wonoboyo	26.172	26.294	26.540	26.781	27.107
20	Gemawang	33.274	33.612	33.767	33.940	34.355
	Jumlah	772.289	783.550	791.264	800.429	807.440

Sumber : Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2022

Jumlah penduduk terbesar pada akhir tahun 2022 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

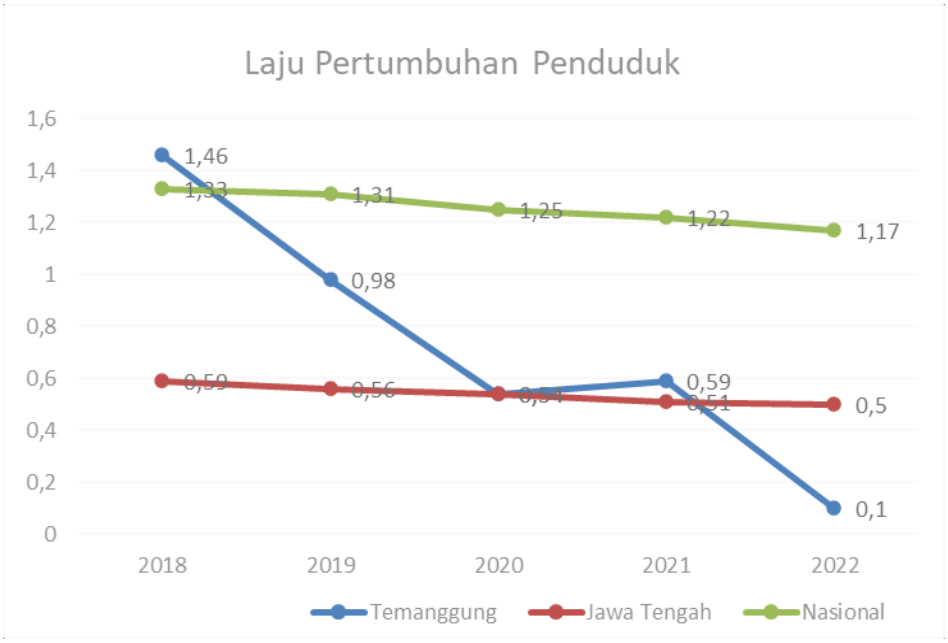

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2022

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah danNasional Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2022

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.8
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota
Kawasan Purwomanggung Tahun 2018 sampai
dengan Semester II Tahun 2022

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	716.477	718.316	769.880	773.588	800.275	0,27	0,26	0,99	0,64	3.45
Kab.Wonosobo	787.384	790.504	879.124	886.613	930.000	0,42	0,41	1,49	1,14	4.89
Kota. Magelang	121.872	122.111	121.526	121.610	127.466	0,31	0,27	0,27	0,09	4.82
Kab.Magelang	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.175	0,89	0,88	0,93	0,59	0.51
Kab. Temanggung	783.550	791.264	795.556	800.429	807.440	1,46	0,98	0,54	0,71	0.10
Rata-rata	814.000	818.461	869.397	776.345	794.641	0,60	0,51	0,95	0,63	2,75
Rata-rata 5 tahun						1,09				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Purwomanggung Tahun 2018-2022 adalah 1,09%, meskipun secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk di Kawasan Purwomanggung.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2022 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah penduduk					Laju pertumbuhan penduduk (%)			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	BULU	48.119	48.785	48.840	49.301	49.879	1,38	0,11	0,77	0,94
2	TEMBARAK	30.739	31.107	31.274	31.545	31.821	1,20	0,54	0,73	0,87
3	TEMANGGUNG	82.620	83.157	83.138	83.271	83.911	0,65	(0,02)	0,32	0,16
4	PRINGSURAT	51.583	52.122	52.458	52.791	53.078	1,04	0,64	0,55	0,63
5	KALORAN	45.098	45.631	46.065	46.248	46.707	1,18	0,95	0,50	0,40
6	KANDANGAN	51.618	52.160	52.648	53.084	53.716	1,05	0,94	0,73	0,83
7	KEDU	58.072	58.889	58.935	59.318	60.035	1,41	0,08	0,56	0,65
8	PARAKAN	53.297	53.588	53.897	54.076	54.174	0,55	0,58	0,43	0,33
9	NGADIREJO	55.746	56.233	56.921	57.371	57.834	0,87	1,22	0,76	0,79
10	JUMO	29.656	30.002	30.172	30.344	30.582	1,17	0,57	0,72	0,57
11	TRETEP	20.894	20.906	21.113	21.238	21.587	0,99	0,59	0,58	0,59
12	CANDIROTO	32.469	32.621	32.956	32.857	33.468	1,03	(0,30)	0,79	-0,30
13	KRANGGAN	47.467	48.465	49.021	49.254	50.234	1,15	0,48	0,66	0,48
14	TLOGOMULYO	22.573	22.710	22.832	23.087	23.437	0,54	1,12	0,52	1,12
15	SELOPAMPANG	19.821	19.986	20.175	20.465	20.708	0,95	1,44	0,73	1,44
16	BANSARI	23.423	23.984	24.203	24.298	24.579	0,91	0,39	0,49	0,39
17	KLEDUNG	27.049	27.606	27.902	28.009	28.494	1,07	0,38	0,71	0,38
18	BEJEN	21.004	21.278	21.482	21.693	21.734	0,96	0,98	0,25	0,98
19	WONOBOYO	26.077	26.172	26.294	26.540	27.107	0,47	0,94	0,86	0,94
20	GEMAWANG	32.780	33.274	33.612	33.767	34.355	1,02	0,46	0,49	0,46
Jumlah/rata-rata		772.289	783.550	791.264	795.556	807.440	0,98	0,54	0,61	0,63

Sumber: Dindukcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018-2022 di tiap kecamatan cenderung menurun. Pada Tahun

2022, laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kecamatan Selopampang sebesar 1.44% atau bertambah 243 jiwa.

3) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Tiap Kecamatan

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										JUMLAH
		Strata III	Strata II	D IV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ Belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Bulu	1	52	1.072	395	142	4.853	6.051	9.696	14.873	12.744	49.879
2	Tembarak	6	23	690	164	118	3.385	4.851	6.698	5.256	10.630	31.821
3	Temanggung	10	434	6.128	1.960	651	17.674	10.832	15.454	11.168	19.598	83.911
4	Pringsurat	3	49	1.064	302	173	7.148	10.230	12.094	4.212	17.803	53.078
5	Kaloran	3	22	825	241	201	4.541	6.993	10.153	5.226	18.503	46.707
6	Kandangan	5	38	943	314	232	4.906	6.897	10.082	6.707	23.592	53.716
7	Kedu	2	73	1.664	557	296	6.873	7.501	12.174	13.749	17.145	60.035
8	Parakan	17	114	2.090	781	296	8.639	7.018	9.011	9.219	16.991	54.174
9	Ngadirejo	1	32	1.370	515	266	6.756	10.304	15.811	9.895	12.884	57.834
10	Jumo	2	19	652	231	159	2.870	4.295	6.837	5.456	10.061	30.582
11	Tretep	1	4	129	47	41	705	2.807	5.873	4.598	7.382	21.587
12	Candiroto	2	16	804	317	201	3.309	4.334	8.172	9.444	6.869	33.468
13	Kranggan	3	58	1.335	392	213	7.303	9.147	8.570	7.536	15.677	50.234
14	Tlogomulyo	1	11	319	120	45	1.992	3.559	5.816	4.719	6.853	23.437
15	Selopampang	1	11	457	131	70	2.510	3.240	5.607	3.463	5.217	20.708
16	Bansari	0	13	425	140	64	2.086	3.721	5.146	9.213	3.771	24.579
17	Kledung	1	10	235	95	36	1.803	3.750	6.866	4.212	11.486	28.494
18	Bejen	1	13	315	126	93	2.107	3.604	6.126	2.593	6.756	21.734
19	Wonoboyo	2	8	316	104	86	1.815	4.392	8.248	3.680	8.456	27.107
20	Gemawang	2	14	363	123	91	2.038	4.084	7.804	7.350	12.487	34.355
	Jumlah	66	1.014	21.196	7.055	3.474	93.313	117.610	176.238	142.569	244.905	807.440
	Persentase (%)	0,01	0,13	2,63	0,87	0,43	11,56	14,57	21,83	17,66	30,33	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Tingkat pendidikan yang ditamatkan terbanyak adalah tidak/belum sekolah sebesar 30,33%, disusul jenjang tamat SD sebesar 21,83%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil karena mahalnya biaya pendidikan.

4) Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 semester II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Semester II Tahun 2022

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
1	0 – 4	53.303	6,6
2	5 – 9	59.290	7,34
3	10 – 14	66.796	8,27
4	15 – 19	53.189	6,59
5	20 – 24	61.109	7,57
6	25 – 29	58.949	7,3
7	30 – 34	57.662	7,14
8	35 – 39	56.199	6,96
9	40 – 44	59.044	7,31
10	45 – 49	57.471	7,12
11	50 – 54	57.703	7,15
12	55 – 59	52.454	6,5
13	60 – 64	42.853	5,31
14	65 – 69	31.711	3,93
15	70 – 74	19.228	2,38
16	≥ 75	20.519	2,54
Jumlah		807.440	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Kelompok umur paling banyak di Kabupaten Temanggung adalah penduduk usia 10-14 tahun dengan jumlah 66.796 jiwa atau setara dengan 8,27% dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 20-24 tahun, dengan jumlah 61.109 jiwa atau setara dengan 7,57%.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester II Tahun 2022

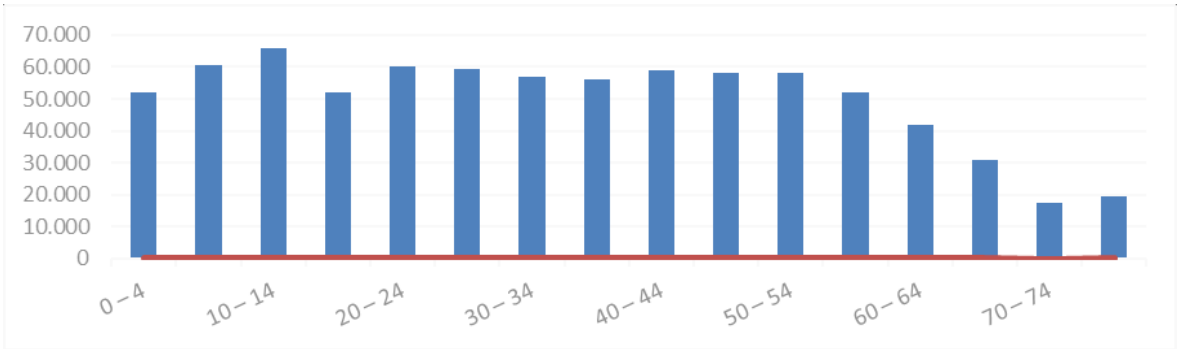

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2018-2022 menurut pertumbuhan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2018-2022 Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.213,42	3.269,02	3.331,08	3.358,51	3.456,66
B	Pertambangan dan Penggalian	111,58	116,31	118,76	126,77	121,77
C	Industri Pengolahan	3.804,20	3.971,38	3.947,19	4.025,97	4.069,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,15	13,70	14,10	14,78	15,56.
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,17	12,74	13,00	13,73	13,76
F	Konstruksi	707,36	764,99	749,62	806,17	836,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.268,88	3.445,11	3.314,95	3 .559,94	3.712,92
H	Transportasi dan Pergudangan	706,33	771,94	533,79	548,56	907,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244,29	267,28	249,09	264,11	303,84
J	Informasi dan Komunikasi	287,01	332,03	378,99	401,67	410,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	449,37	466,12	475,46	491,70	494,23
L	Real Estate	125,87	134,95	134,87	137,94	145,94
M,N	Jasa Perusahaan	52,96	58,37	54,68	56,33	59,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389,25	402,52	396,03	395,01	401,33
P	Jasa Pendidikan	619,12	669,62	668,34	671,96	682,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164,86	178,40	192,22	193,28	198,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	313,46	339,57	318,57	321,56	356,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.483,26	15.214,06	14.890,75	15 387,93	16.187,37

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung, 2022.

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel di atas nilai PDRB Temanggung pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,20. Nilai PDRB Temanggung tahun 2021 atas dasar harga konstan sebesar 16,18 triliun rupiah, naik dari tahun 2021 yang sebesar 15,38 triliun rupiah. Hal ini menunjukan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung mulai bangkit kembali pasca pandemi covid-19. Salah satu sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Temanggung adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 4,30 %, lapangan usaha kontruksi mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 % kemudian disusul dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,92% dan lapangan usaha sektor industri pengolahan sebesar 1,09 %.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga 10%. Sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat kurang dari lima persen.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Pada Tahun 2018, ekonomi Kabupaten Temanggung tumbuh melebihi target yang diharapkan. Namun pada tahun 2019 di bawah target yang ditetapkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	Temanggung	
	Target	Realisasi
2018	5,01	5,13
2019	5,20	5,05
2020	2,50	-2,13
2021	3,50	3,34
2022	4,50	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 4,50% dengan asumsi ada peningkatan ekonomi dari upaya pemerintah daerah menggenjot semua sektor lapangan usaha, dan tetap dilakukan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Sebagai perbandingan, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022.

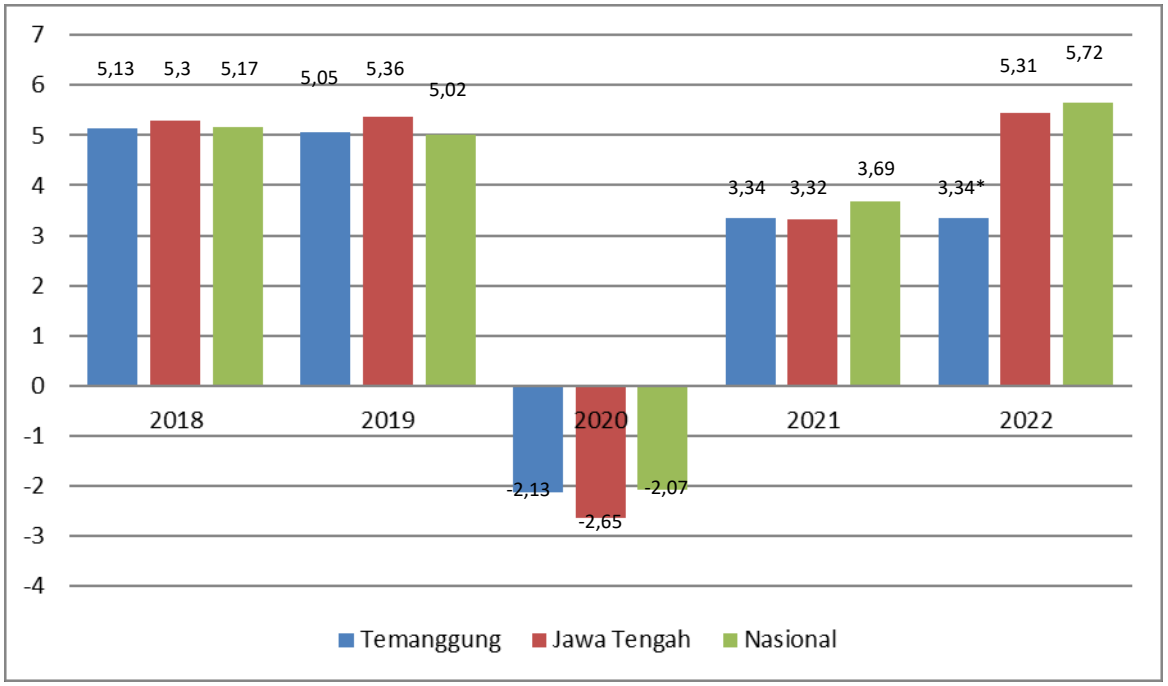

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2022

Gambar 2.13

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018-2019 cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kabupaten Temanggung pada tahun 2018-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 ketiganya mengalami penurunan yang sangat drastis akibat adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2022 kondisi perekonomian semakin membaik, ditunjukan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Temanggung. Sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap PDRB Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 4,30 %, sedangkan sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung adalah lapangan usaha konstruksi sebesar 3,72 %.

Dilihat dari posisi perekonomian terhadap nasional dan Jawa Tengah, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 berada pada posisi yang lebih baik dari Jawa Tengah namun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung.

Tabel 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

Kab/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
Kab.Purworejo	5,32	3,50	5,54	4,14	-1,66	-129,96	3,38	303,61	5,36	n.a.
Kab. Wonosobo	4,94	56,33	5,61	13,56	-1,66	-129,59	3,68	321,69	5,02	n.a.
Kota Magelang	5,59	7,92	5,44	-2,68	-2,45	-145,04	3,2	230,61	5,77	n.a.
Kab. Magelang	5,43	7,52	5,3	-2,39	-1,68	-131,70	3,48	307,14	5,46	n.a.
Kab. Temanggung	5,13	1,99	5,05	-1,56	-2,13	-142,18	3,34	256,81	5,20	n.a.
Rata-Rata Purwomanggung	5,28	15,45	5,39	2,21	-1,92	-135,69	3,42	283,97	5,36	n.a.
Jawa Tengah	5,3	0,76	5,36	1,13	-2,65	-149,44	3,32	225,28	n.a.	n.a.
Nasional	5,17	1,97	5,02	-2,90	-2,07	-141,24	3,69	278,26	n.a.	n.a.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

1. Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk

menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022 (persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,10	23,38	24,43	23,91	23,41
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,89	0,90	0,93	0,84
C	Industri Pengolahan	27,31	27,20	27,47	27,11	26,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0.07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi	4,92	5,12	5,06	5,37	5,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,45	20,61	20,14	20,90	20,79
H	Transportasi dan Pergudangan	4,19	4,36	3,14	3,18	5,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,56	1,62	1,53	1,58	1,73
J	Informasi dan Komunikasi	1,37	1,46	1,70	1,48	1,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	3,21	3,29	3,21	3,40
L	Real Estate	0,76	0,76	0,77	0,76	0,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	0,39	0,38	0,39	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,74	2,69	2,70	2,69	2,42
P	Jasa Pendidikan	4,78	4,97	5,10	4,97	4,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,18	1,32	1,18	1,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,98	2,02	1,93	2,02	1,98
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 yang paling dominan adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 26,19 %, kemudian lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,41% dilanjutkan dengan

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,79%.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Temanggung (Persen)

Kategori Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.36	1.73	1.86	0.86	2,92
B. Pertambangan dan Penggalian	3.61	4.24	2.11	6.75	-3,94
C. Industri Pengolahan	5.63	4.39	-0.62	2.00	1,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.62	4.22	2.87	4.84	5,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.67	4.74	2.02	5.62	0,22
F. Konstruksi	5.79	8.15	-2.01	7.54	3,72
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.79	5.39	-3.79	7.40	4,30
H. Transportasi dan Pergudangan	4.53	9.29	-30.59	2.37	65,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.24	9.41	-6.81	6.03	15,04
J. Informasi dan Komunikasi	11.05	15.69	14.14	5.98	2,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.17	3.73	2.01	3.42	0,51
L. Real Estate	4.65	7.21	-0.10	2.32	5,80
M,N. Jasa Perusahaan	8.77	10.21	-6.32	3.01	5,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.11	3.41	-1.61	-0.26	1,60
P. Jasa Pendidikan	5.98	8.16	-0.19	0.54	1,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.86	8.22	7.70	0.59	2,59
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.87	8.33	-6.22	0.98	10,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.13	5.05	-2.13	3.34	5,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	5.13	5.05	-2.13	3.34	5,20

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Dampak dari pandemik sangat terasa di tahun 2020 yang ternyata sangat meluluhlantakkan sektor transportasi dan perdagangan. Pada tahun 2022 sektor tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 65,39 %, sektor penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 15,04 %, dan sektor jasa lainnya sebesar 10,95 %. Sedangkan sector yang

mengalami penurunan adalah sektor Pertambangan dan penggalian sebesar -3,94 %.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Temanggung Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.880.345,92	5.063.109,78	5.263,68	5.411,36	5.789,18
B	Pertambangan dan Penggalian	183.240,43	192.996,33	194,99	210,32	208,32.
C	Industri Pengolahan	5.532.188,09	5.890.562,41	5.920,28	6134,63	6.476,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.479,28	16.158,79	16,54	17,21	18,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.388,05	15.306,64	16,51	17,61	17,91
F	Konstruksi	997.043,32	1.107.955,11	1.090,85	1.214,05	1.347,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.141.922,37	4.464.461,12	4.341,92	4.730,06	5.141,96
H	Transportasi dan Pergudangan	848.360,47	943.701,55	679,50	718,50	1.256,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.974,13	350.651,85	329,87	356,76	427,39
J	Informasi dan Komunikasi	277.566,36	316.523,72	366,50	388,56	398,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	661.916,58	694.551,48	708,79	769,23	841,11
L	Real Estate	153.236,65	164.696,20	165,41	171,05	184,41
M,N	Jasa Perusahaan	75.423,12	85.101,79	81,44	84,89	93,62

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	555.701,15	582.670,36	582,67	574,17	599,52
P	Jasa Pendidikan	968.893,03	1.075.522,89	1.075,52	1.118,47	1.143,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233.244,71	255.948,99	283,38	287,61	299,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	400.559,20	437.478,06	415,39	423,32	489,22
	PDRB	20.207.517,86	21.657.397,07	21.577,05	22.627,79	24.733,34

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mencapai 24,73 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2,1 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai 22,62 triliun rupiah.

Tabel 2.18

Target dan Realisasi PDRB Kab. Temanggung Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB*	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2018	20.000.000	20.207.517,86	14.000.000	14.452.019,21
2019	21.500.000	21.657.397,07	15.000.000	15.214.058,87
2020	21.700.000	21.557.080,00	15.000.000	14.890.760,00
2021	22.500.000	22.627.790,00	15.000.000	15.387.930,00
2022	22.700.000	24.733.340,00	16.00.000	16.187.370,00

Sumber: BPS Kab. Temanggung 2022

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, karena banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 PDRB Kabupaten Temanggung baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan dan memenuhi target, demikian pula PDRB tahun 2022 mengalami peningkatan.

2. PDRB Perkapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	26.682.478,77	6,76
2019	28.052.969,06	5,14
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34
2022	30.930.000,00	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Sebelum pandemi, nilai PDRB perkapita selalu naik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada tahun 2020, mengalami penurunan PDRB perkapita akibat adanya pandemi covid-19. Tahun 2021 sebesar 3,34%, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 5,20% menunjukan kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung kembali membaik pasca pandemi covid-19 dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung

semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.20
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Purwomanggung)

Kabupaten /Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)
Kabupaten Purworejo	17.677,00	5,05	18.681,00	5,68	17.090,00	-8,52	17.558,00	2,74	n.a.	n.a.
Kabupaten Wonosobo	16.593,99	3,76	17.532,72	4,22	15.473,24	-10,69	15.863,48	0,66	n.a.	n.a.
Kabupaten Magelang	17.257,24	4,36	18.101,09	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,90	n.a.	n.a.
Kota Magelang	50.369,40	5,12	53.231,38	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,77	3,12	n.a.	n.a.
Kabupaten Temanggung	18.917,67	4,24	19.799,53	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62	n.a.	n.a.
RATA-RATA PURWO-MANGGUNG	24.163,06	4,51	25.469,14	4,93	24.198,98	-5,80	24.896,03	2,41	n.a.	n.a.

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Dilihat dari capaian PDRB per kapita dengan wilayah yang setara, dalam hal ini kawasan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan PDRB per kapita yang positif, dibuktikan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Purwomanggung. Capaian ini turut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19.

Pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa

yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

b. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi mencerminkan kestabilan nilai jual mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah. Perkembangan inflasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk tahun 2020 dan 2021 data yang ditampilkan merupakan data inflasi *sister city* yaitu angka inflasi Kota Purwokerto karena Kabupaten Temanggung sudah tidak dihitung angka inflasinya oleh BPS.

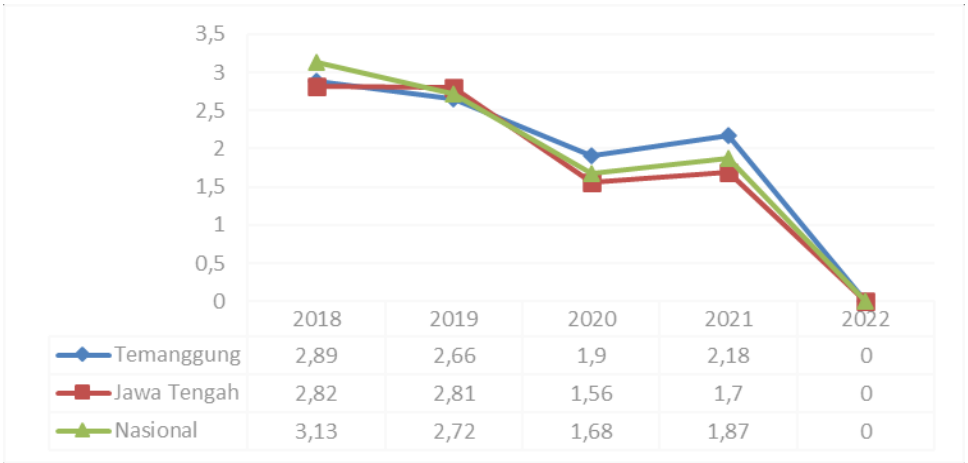

Sumber: BPS Kab. Temanggung Tahun 2022

Gambar 2.14
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama tahun 2018 s.d 2019 cukup fluktuatif namun masih di kisaran angka 2%. Tinggi rendahnya angka inflasi salah-satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Inflasi terendah selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,90%.

c. Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan

memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Indeks Gini dihitung oleh BPS hanya sampai provinsi karena menggunakan data susenas dan jumlah sample jika dihitung sampai kabupaten/kota kurang mencukupi. RSE (*relative standar error*) >25% menunjukan standar eror melebihi ambang batas jadi data tidak valid.

Sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk digunakan 'distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia' yang juga menggunakan data susenas (survei sosial ekonomi Nasional) Maret 2019 dengan membagi penduduk berdasarkan pengeluarannya 40% bawah, 40% tengah, 20% atas.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;
b. memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
c. memperoleh > 17 persen,maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berikut merupakan gambaran distribusi pengeluaran berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2018-2022.

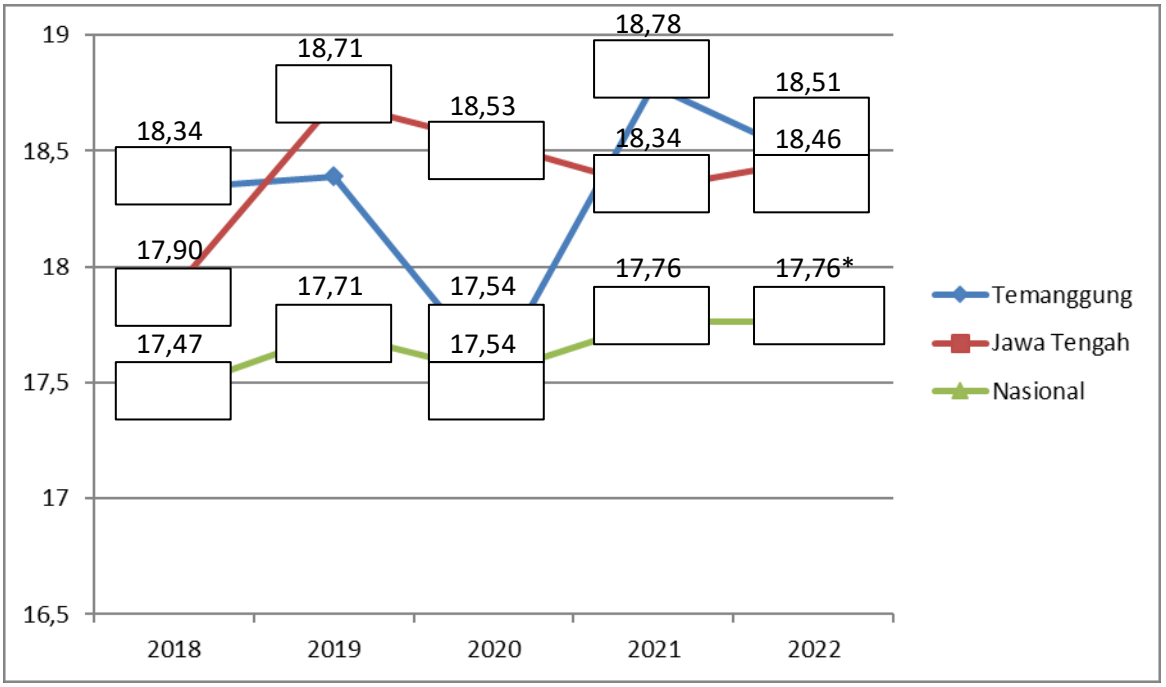

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.15
Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2022

Distribusi pengeluaran berdasar kriteria bank dunia Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2019 cenderung naik. Nilai tersebut lebih baik dibanding Nasional namun masih rendah

dari Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dan berada pada kategori paling rendah dengan nilai 17,54%. Hal tersebut disebabkan ketimpangan pendapatan cukup tinggi akibat adanya pandemi covid-19. Tahun 2021 kembali meningkat sebesar 7,07% menunjukan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik dengan ditandai peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mengukur keberhasilan Kabupaten Temanggung dalam mengatasi ketimpangan, berikut grafik ketimpangan Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Purwomanggung periode 2018-2022.

Tabel 2.21
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	17,35	19,20	19,76	20,24	20,10
Kab. Wonosobo	17,22	17,85	18,76	17,16	18,61
Kab. Magelang	18,52	17,71	18,57	18,01	18,82
Kota Magelang	16,29	15,17	16,26	14,90	16,24
Kab. Temanggung	18,34	18,39	17,54	18,78	18,46
Rata-rata	17,544	17,664	18,178	17,818	18,446

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari angka pengeluaran 40% bawah Kriteria angka dan sebutannya:

a. ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
b. ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
c. ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

d. Ketimpangan rendah berarti pemerataan tinggi

Kabupaten Temanggung tiap tahun angkanya meningkat diatas 17% menunjukan ketimpangan yang rendah, sehingga pemerataannya tinggi.

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan nasional, sehingga masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar:

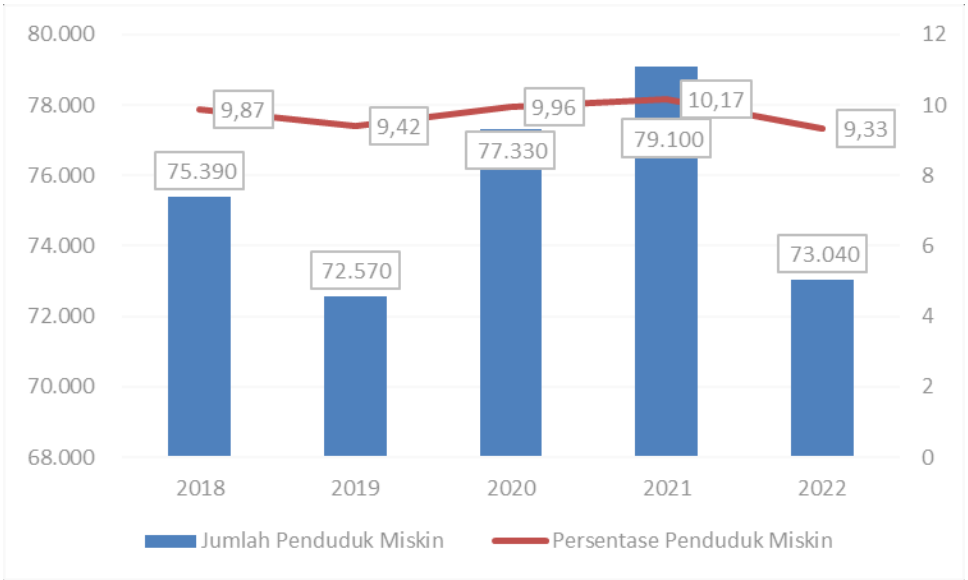

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.16
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir turun dari 9,87% pada tahun 2018 menjadi 10,17% pada tahun 2021. Pada tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Temanggung turun 1,59 % atau berkurang 11.380 jiwa. Namun pada tahun 2021 meningkat sebesar 2,11% yaitu di angka 10,17 sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2022

tingkat kemiskinan mencapai angka 9,33% bahkan lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung. Realisasi dan perubahan angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.22
Realisasi dan Perubahan Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2018	9,87	-1,59	11,32	-1,69	9,82	-0,82
2019	9,42	-0,45	10,80	-0,52	9,44	-0,38
2020	9,96	0,54	11,41	0,61	9,78	0,34
2021	10,17	0,21	11,79	0,38	10,14	0,36
2022	9,33	-0,84	10,93	-0,86	9,54	-0,6

Sumber: BPS, 2022

Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan provinsi, namun lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin turun dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 9,87% menjadi 9,42%. Pada tahun 2021 dengan capaian 10,17% dan tahun 2022 sebesar 9,33 %. Target dan realisasi angka kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.23
Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	Target		Realisasi	
	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa
2018	10,9	94.587	9,87	75.390
2019	9,36	81.223	9,42	72.570
2020	8,85	76.798	9,96	77.330
2021	8,34	72.372	10,17	79.100
2022	10	80.126	9,33	73.040

Sumber: BPS 2022, (menggunakan data maret)

Perbandingan perubahan presentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian nasional tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Rasio Presentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	Presentase Penduduk Miskin Kab. Temanggung		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Kab. Temanggung	Nasional
2018	9,87	-1,59	5,13	5,17
2019	9,42	-0,45	5,05	5,02
2020	9,96	0,54	-2,13	-2,07
2021	10,17	0,21	3,34	3,69
2022	9,33	-0,84	3,34	5,31
Rata-rata	10,18	-0,45	2,95	3,42

Sumber: BPS, 2022

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung tahun 2021 naik sebesar 0,21 begitupun pertumbahan ekonomi juga naik sebesar 3,34. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin. Mayoritas penduduk Kabupaten Temanggung adalah petani sedangkan penyumbang terbesar pertumbuhan adalah pada sektor industri pengolahan. Walaupun sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang yang termasuk besar namun karena pertumbuhannya lambat sehingga mayoritas penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tidak serta-merta menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Sampel dari survei untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi bukan populasi masyarakat miskin. Sedangkan posisi relatif dan perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Temanggung dan kabupaten/kota se-Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung, Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	11,67	11,45	11,78	12,40	11,53
Kab.Wonosobo	17,58	16,63	17,36	17,67	16,17
Kab.Magelang	11,23	10,67	11,27	11,91	11,09
Kota. Magelang	7,87	7,46	7,58	7,75	7,10
Kab.Temanggung	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33
RATA-RATA	11,64	11,13	11,59	11,98	11,04

Sumber: BPS, 2022

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 di Kawasan Purwomanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Temanggung di Kawasan Purwomanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke 13 dibandingkan kabupaten/kota lain yaitu:

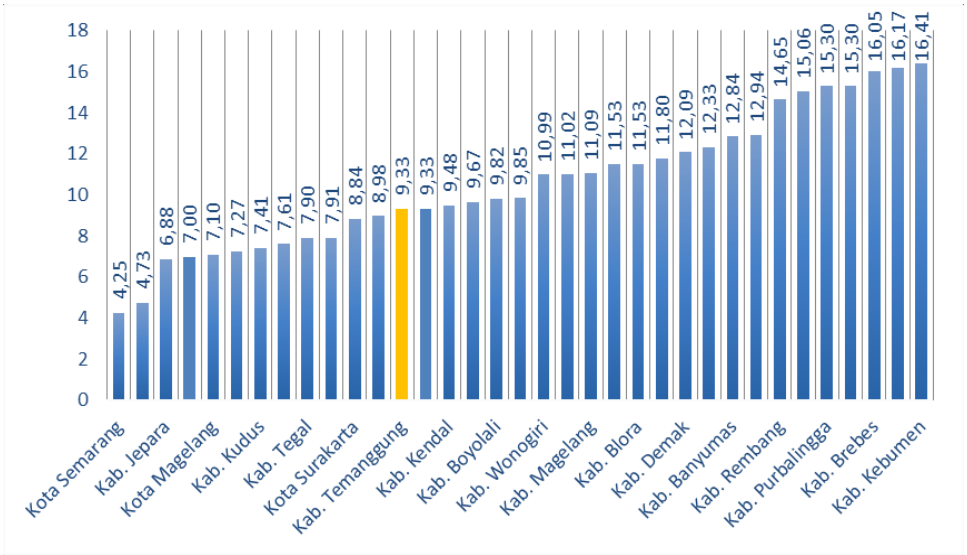

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.17
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Selain itu, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, kabupaten/kota sewilayah Purwomanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	83,55	82,17	84,79	88,80	82,64
Kab.Wonosobo	138,32	131,35	137,64	139,67	128,11
Kab.Magelang	143,44	137,45	146,34	154,91	145,33
Kota Magelang	9,59	9,10	9,27	9,44	8,65
Kab.Temanggung	75,39	72,57	77,33	79,09	73,04
RATA-RATA	90,06	86,53	91,07	94,38	87,5
JAWA TENGAH	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75	3.831,44
NASIONAL	25.949,80	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26,16

Sumber: BPS, 2022, data diolah

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri. Tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung sebesar 1,06% berada di atas angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,77% dan Nasional sebesar 1,58%. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung dibandingkan dengan Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.27

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)
1	Kab. Purworejo	1,31	0,24	393.731
2	Kab. Wonosobo	3,18	0,86	399.180
3	Kab. Magelang	1,66	0,41	377.497
4	Kota Magelang	0,47	0,06	575.130
5	Kab. Temanggung	1,06	0,19	354.012
Rata-Rata		1,53	0,35	419.910
Prov Jawa Tengah		1,77	0,42	438.833
Nasional		1,58	0,39	505.469

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022 (data diolah)

Tabel 2.28
Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	1,67	0,84	0,98	1,36	1,31	-0,58	-0,83	0,14	0,38	-0,05
Kab.Wonosobo	3,25	2,44	2,43	2,75	3,18	-0,60	-0,81	-0,01	0,33	0,43
Kota Magelang	1,07	0,99	1,12	0,85	0,47	-0,23	-0,08	0,13	-0,27	-0,38
Kab.Magelang	1,55	0,98	1,23	1,63	1,66	-0,12	-0,57	0,25	0,40	0,03
Kab. Temanggung	1,36	0,51	0,86	1,57	1,06	-0,45	-0,85	0,35	0,71	-0,51
RATA-RATA	1,78	1,15	1,32	1,63	1,53	-0,40	-0,63	0,17	0,31	-0,1
JAWA TENGAH	1,85	1,53	1,72	1,91	1,77	-0,36	-0,32	0,19	0,19	-0,14
NASIONAL	1,71	1,55	1,61	1,71	1,58	-0,12	-0,16	0,06	0,10	-0,13

Sumber: BPS, 2022 (menggunakan data Maret)

Tabel 2.29
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	0,36	0,10	0,12	0,28	0,24	-0,18	-0,26	0,02	0,16	-0,04
Kab.Wonosobo	0,78	0,60	0,47	0,65	0,86	-0,32	-0,32	0,01	0,18	0,21
Kota Magelang	0,21	0,19	0,24	0,15	0,06	-0,11	-0,02	0,05	-0,08	-0,09
Kab.Magelang	0,34	0,17	0,2	0,35	0,41	0,03	-0,17	0,03	0,15	0,06
Kab.Temanggung	0,29	0,05	0,11	0,39	0,19	-0,14	-0,24	0,06	0,28	-0,2
RATA-RATA	0,40	0,22	0,23	0,36	0,35	-0,14	-0,20	0,03	0,14	-0,01
JAWA TENGAH	0.45	0.3	0.34	0.45	0,42	-0,12	-0,15	0,04	0,11	-0,03
NASIONAL	0,44	0,37	0,38	0,42	0,395	-0,04	-0,07	0,01	0,04	-0,025

Sumber : BPS, 2022 (menggunakan data Maret)

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indexs* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil

pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		68,83	69,56	69,57	69,88	70,77
A	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,47	75,48	75,58	75,64	75,70
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,08	12,14	12,14	12,32	12,55
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,94	7,24	7,24	7,25	7,41
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.142	9.343	9.343	9.408	9.773

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Status pencapaian IPM dikategorikan: (a) sangat tinggi, apabila IPM ≥80; (b) Tinggi, apabila IPM antara 70-80; (c) Sedang, apabila IPM antara 60-70; dan (d) Rendah, apabila IPM <60.

IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2018-2022 naik dari 68,83 pada tahun 2018 menjadi 70,77 pada tahun 2022, termasuk kategori tinggi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan laju 1,27 dan terendah pada tahun 2020 sebsesar 0,01. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran rill perkapita semuanya mengalami kenaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 telah mencapai 75,70 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat

antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mencapai 12,55 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,32 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian tahun 2020 (12,14). Capaian HLS Temanggung pada tahun 2022 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,77) dan Nasional (13,08).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2022 mencapai 7,41 naik 0,16 point dibandingkan capaian tahun 2021. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung dibawah capaian Jawa Tengah (7,75) dan capaian Nasional (8,54). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2018-2022.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke-30 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah

pada umumnya. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp9.773.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp11.377.000,00. Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

No	Variabel	Temanggung		Jawa Tengah		Nasional
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		69,84	70,77	72,50	72,79	72,91
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	75,49	75,70	74,10	74,57	71,85
b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,65	7,41	7,37	7,93	8,69
c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,35	12,55	13	12,81	13,10
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.500	9.773	-	11.377	11.479

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.

IPM dan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 serta Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional Kawasan Purwomanggung dan Jawa Tengah ditunjukkan pada gambar berikut.

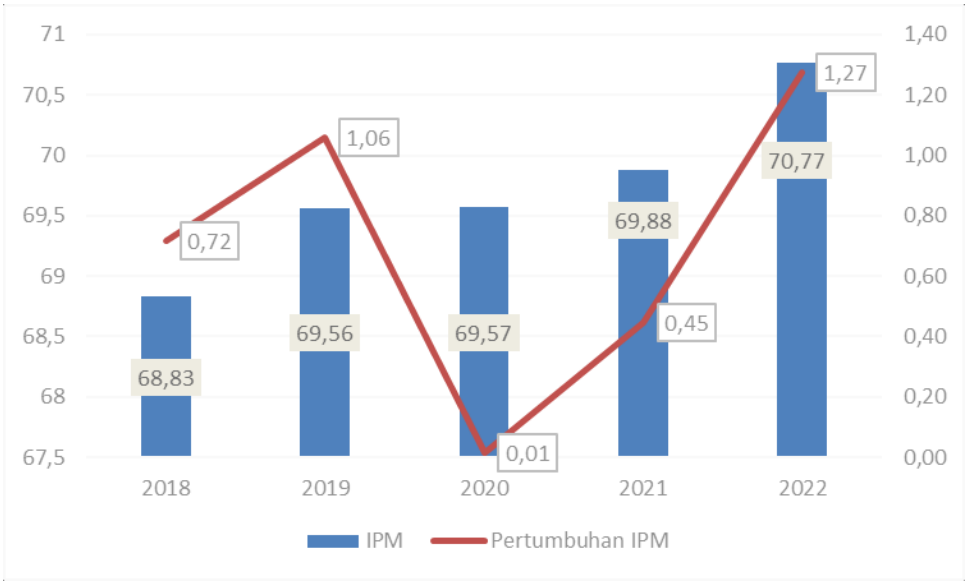

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.18
Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tabel 2.32
Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	71,87	72,50	72,68	72,98	73,60	0,79	0,88	0,25	0,41	0,85
Kab.Wonosobo	69,11	68,27	68,22	68,43	68,89	1,38	0,68	-0,07	0,31	0,67
Kab.Magelang	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85	1,05	1,1	0,00	0,36	1,04
Kota Magelang	78,31	78,80	78,99	79,43	80,39	0,6	0,63	0,24	0,56	1,21
Kab.Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	0,72	1,06	0,01	0,45	1,27
RATA-RATA	71,45	71,80	71,87	72,17	72,9	0,91	0,87	0,09	0,42	1,01
JAWA TENGAH	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	0,85	0,86	0,20	0,40	0,87
NASIONAL	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,82	0,74	0,03	0,49	0,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

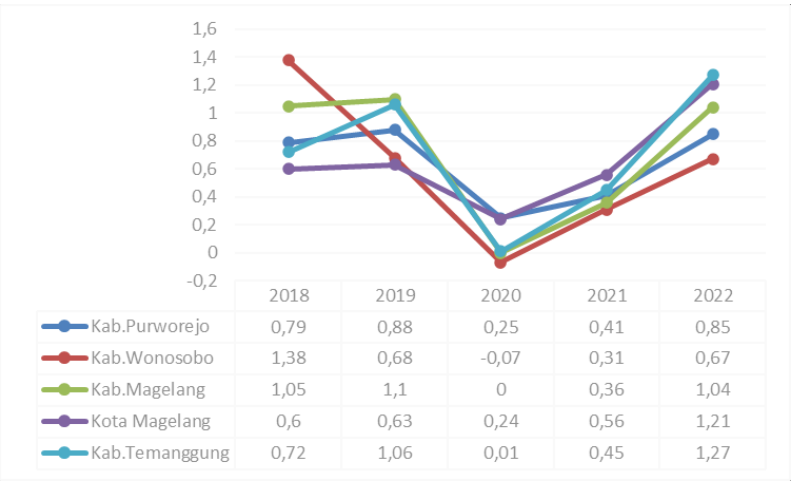

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.19
Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung
Tahun 2018-2022

Pertumbuhan IPM Kabupaten selama tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM kabupaten/kota Kawasan Purwomanggung tahun 2018-2022, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat.

Sementara itu, pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita dari Kabupaten/Kota sewilayah Purwomanggung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33
Pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	AHH (tahun)					Pertumbuhan AHH				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	74,40	74,52	74,72	74,87	75,03	0,19	0,16	0,27	0,20	0,16
Kab.Wonosobo	71,46	71,60	71,82	71,94	72,05	0,22	0,20	0,31	0,17	0,11
Kab. Magelang	73,47	73,56	73,72	73,88	74,03	0,11	0,12	0,22	0,22	0,15
Kota Magelang	76,72	76,75	76,85	76,93	77,02	0,08	0,04	0,13	0,10	0,09
Kab.Temanggung	75,47	75,48	75,58	75,64	75,70	0,07	0,01	0,13	0,08	0,06
RATA-RATA	74,30	74,38	74,54	74,65	74,76	0,13	0,11	0,21	0,15	0,11
JAWA TENGAH	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57	0,13	0,07	0,19	0,13	0,1
NASIONAL	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85	0,20	0,20	0,18	0,14	0,28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.34
Pertumbuhan HLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	HLS (tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	13,48	13,49	13,50	13,51	13,52	0,07	0,07	0,07	0,07	0,01
Kab.Wonosobo	11,69	11,74	11,75	11,76	11,78	0,09	0,43	0,09	0,09	0,02
Kota Magelang	13,80	13,81	14,14	14,15	14,31	0,07	0,07	2,39	0,07	0,16
Kab.Magelang	12,48	12,53	12,54	12,55	12,58	0,08	0,40	0,08	0,08	0,03
Kab.Temanggung	12,08	12,13	12,14	12,32	12,55	0,08	0,41	0,08	1,48	0,23
RATA-RATA	12,71	12,74	12,81	12,86	12,94	0,08	0,28	0,54	0,36	0,08
JAWA TENGAH	12,63	12,68	12,70	12,77	12,81	0,48	0,40	0,16	0,55	0,04
NASIONAL	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	0,47	0,31	0,23	0,77	0,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.35
Pertumbuhan RLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	RLS (tahun)					Pertumbuhan RLS				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Purworejo	7,70	7,91	8,12	8,21	8,32	0,13	2,73	2,65	1,11	0,11
Kab.Wonosobo	6,75	6,76	6,81	6,82	6,88	3,69	0,15	0,74	0,15	0,06
Kota Magelang	10,31	10,33	10,39	10,62	10,94	0,10	0,19	0,58	2,21	0,32
Kab.Magelang	7,57	7,77	7,78	7,79	7,81	2,16	2,64	0,13	0,13	0,02
Kab.Temanggung	6,94	7,15	7,24	7,25	7,41	0,58	3,03	1,26	0,14	0,16
RATA-RATA	7,854	7,984	8,068	8,138	8,27	1,332	1,748	1,072	0,748	0,13
JAWA TENGAH	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93	1,10	2,45	2,12	0,78	0,18
NASIONAL	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	0,86	2,08	1,68	0,71	0,15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.36
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (ribu Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	10.048	10.342	10.163	10.275	10.671
Kab.Wonosobo	10.503	10.871	10.621	10.760	11.108
Kab. Magelang	9,025	9,387	9,301	9,440	10.011
Kota Magelang	11.994	12.514	12.210	12.349	12.816
Kab.Temanggung	9.142	9.489	9.343	9.408	9.773
RATA-RATA	8.339	8.645	8.469	8.560	10.875
JAWA TENGAH	10,777	11,102	10,930	11,034	11.377
NASIONAL	11,059	11,299	11,013	11,156	11.479

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kabupaten Temanggung masih mempunyai harapan untuk meningkatkan IPM mendekati target Nasional dengan program-program prioritas yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target ini sesuai arahan Nasional yaitu:

a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular;
b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilakukan dengan melakukan mengupayakan pemenuhan standar minimal pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran yang sesuai dengan regulasi;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kualitas kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan, pemetaan kebutuhan dan kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai dengan kondisi riil di sekolah dan alternatif pembiayaan yang dapat mencukupi

kebutuhan tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kondisi sarana prasarana pendukung yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan mendukung pemenuhan kebutuhan layanan Pendidikan;

d. Memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya yang memiliki anak usia didik agar dapat memberikan motivasi kepada anaknya agar mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Layanan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan prestasi yang dicapai, kemudahan akses pembelajaran dan fasilitasi bagi peserta didik yang memeiliki kebutuhan khusus yang akan tetap dilayani dengan sarana prasarana pendidikan yang ada;

d. Menimgkatkan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan kesetaraan yaitu pelayanan untuk semua paket pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) yang diperuntukkan bagi semua kategori usia. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapsitas kelembagaan dan SDM lembaga pendidikan kesetaraan yang sudah ada serta metode pembelajaran lembaga kesetaraan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu kepada metode pembelajaran dan kurikulum kesetaraan yang sudah ada;

e. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, Lembaga pendidikan kegamaan dan organisasi masyarakat yang memeliki lembaga pendidikan non formalagar dapat mendorong dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kesetaraan baik dilakukan secara mandiri maupun

melakukan kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM terdekat;

f. Melakukan pendataan dan penyusunan database kependidikan yang terintegrasi secara langsung dengan data kependudukan dan data kemiskinan yang ada sehingga akan didapat data kependidikan yang sesuai dengan arah dan kebijakan pelayanan pendidikan yang telah ada. Hal tersebut akan menjadi acuan dasar dan penerapan kebijakan teknis yang mendukung proses peningkatan IPM khususnya yang terkait dengan parameter pendidikan; dan

g. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

f. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan.

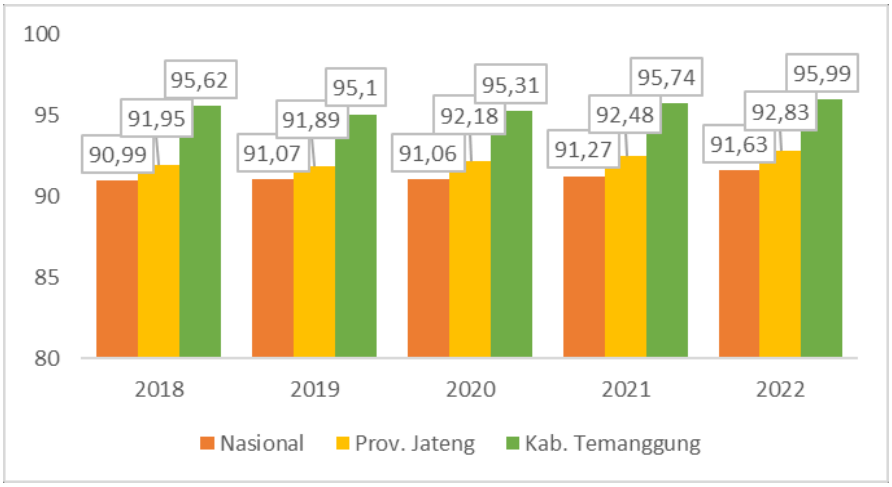

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

Gambar 2.20

Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Selama periode 2018-2022, IPG Kabupaten Temanggung cenderung berfluktuasi, sebagaimana capaian IPG Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum, kualitas pembangunan gender di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan pembangunan gender Jawa Tengah maupun Nasional. Selanjutnya selama periode lima tahun tersebut, capaian IPG tertinggi Kabupaten Temanggung terjadi di tahun 2022 dengan nilai IPG sebesar 95,99.

Nilai IPG yang semakin tinggi menunjukkan semakin rendahnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Sementara itu, kinerja pembangunan gender terendah terjadi di tahun 2019, dimana di tahun tersebut IPG Kabupaten Temanggung mengalami penurunan sebesar -0,52 poin. Di tahun 2020, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, IPG Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan. Tahun 2021, IPG Kabupaten Temanggung kembali mengalami peningkatan, bahkan peningkatan IPG Kabupaten Temanggung melampaui peningkatan IPG Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPG Kabupaten Temangung pada tahun 2022 adalah 95,99, lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang nilainya sebesar 91,63 dan

lebih tinggi dari pencapaian tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83. Perbandingan Komponen Pembentuk IPG Antara Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37

Perbandingan Komponen Pembentuk IPG Antara Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,87	77,64	12,41	12,80	7,56	7,28	11.538	9.081
2	awa Tengah	72,71	76,53	12,72	12,99	8,31	7,55	15.606	10.098

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan. Data IDG ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.38

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
		Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1.	2018	82,01	74,03	72,10
2.	2019	84,46	72,18	75,24
3.	2020	84,21	71,73	75,57
4.	2021	84,56	71,64	76,26
5.	2022	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Temanggung selama periode 2018-2022 lebih tinggi dibandingkan pemberdayaan gender Jawa Tengah dan Nasional. Selama periode tersebut, kinerja pemberdayaan gender Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan nilai IDG sebesar 84,56. Sementara itu kinerja pemberdayaan perempuan terendah terjadi di tahun 2018 dengan nilai IDG sebesar 82,01. Capaian IDG beserta seluruh komponen penyusunnya untuk tahun 2022 masih belum dirilis karena sama seperti IPG, IDG merupakan salah satu data makro yang angkanya akan keluar pada tahun n+1.

Pemberdayaan perempuan pada aspek politik merupakan salah satu komponen IDG. Gambaran pemberdayaan perempuan pada aspek politik di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen (Persen)		
		Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1.	2018	31,11	22,00	17,32
2.	2019	33,33	19,17	20,52
3.	2020	33,33	18,80	21,09
4.	2021	33,33	18,33	21,89
5.	2022	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS, 2022

Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Temanggung sudah masuk dalam kondisi ideal sebesar 30%. Selama periode 2018 hingga 2022, persentase anggota parlemen perempuan di Kabupaten Temanggung lebih tinggi

dibandingkan persentase anggota parlemen di Jawa Tengah dan Nasional.

Sumbangan pendapatan perempuan juga merupakan komponen IDG. Gambaran persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional selama 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)		
		Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1.	2018	40,85	34,28	36,70
2.	2019	40,86	34,31	37,10
3.	2020	40,79	34,29	37,26
4.	2021	41,19	34,60	37,22
5.	2022	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS, 2022

Selama periode 2018-2022, persentase sumbangan pendapatan perempuan lebih tinggi dibandingkan persentase Jawa Tengah dan Nasional. Dari tahun 2018 hingga 2022, persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif.

Tabel 2.41
Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)		
		Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1.	2018	41,09	47,57	47,02
2.	2019	50,78	49,36	47,46
3.	2020	52,69	50,20	48,76
4.	2021	48,14	50,67	49,99
5.	2022	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS, 2022

Perempuan sebagai tenaga profesional merupakan komponen IDG dengan kondisi yang paling baik dibandingkan kedua komponen lainnya. Selama periode 2018 hingga 2022, persentase tertinggi perempuan sebagai tenaga profesional terjadi di tahun 2020 sebesar 52,69%. Namun di tahun 2021, perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan. Sedangkan persentase untuk tahun 2022 masih belum keluar karena merupakan komponen dari data makro yang baru dapat diketahui pada awal tahun 2023.

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

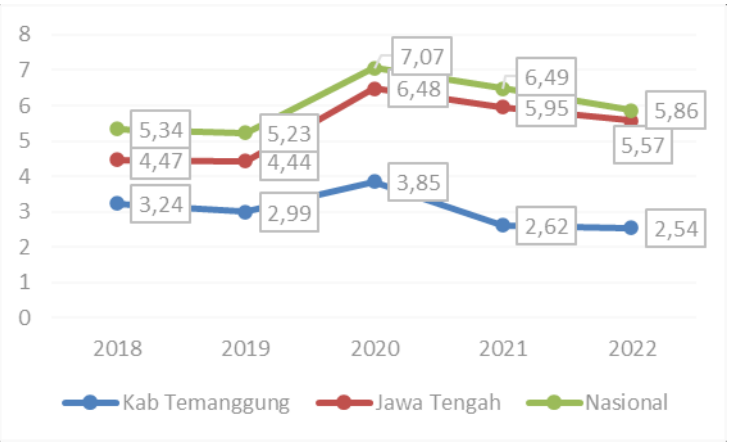

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.21
Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2018-2022

Sepanjang 5 tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung relatif rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional yaitu dibawah 5%. Hal ini karena banyak sektor pertanian terutama pertembakauan dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. TPT tertinggi Kabupaten Temanggung terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,85%. Tingginya TPT tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 TPT Kabupaten Temanggung turun di angka 2,62%. Turunnya TPT tahun 2021 menunjukan sektor-sektor penyerap tenaga kerja yang terpuruk akibat pandemi covid-19 terutama industri padat karya mulai pulih kembali. Sedangkan pada tahun 2022 TPT Kabupaten Temanggung kembali menurun mencapai angka 2,54.

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
TPT Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	TPT Kabupaten Temanggung	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Temanggung	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2018	3,24	5,13	5,32	5,07
2019	2,99	5,05	5,41	5,17
2020	3,85	-2,13	-2,65	-2,07
2021	2,62	3,34	3,24	3,69
2022	2,54	5,20	5,31	5,72

Sumber: BPS, 2022

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah

hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena sebanyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi.

Pada tahun 2018 rupanya pertumbuhan ekonomi sedikit melambat mengakibatkan pengangguran bertambah sehingga TPT naik. Namun pada Tahun 2019 TPT dapat diturunkan meskipun di tahun 2020 naik lagi akibat banyak PHK di masa pandemi Covid-19 namun ada harapan di tahun berikutnya ketika pandemi sudah berakhir, angka TPT kembali turun. Terbukti pada tahun 2021 TPT turun di angka 2,62. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 pada tahun 2022 TPT mencapai 2,54.

Jika dilihat dari pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Realisasi dan Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah		Nasional	
	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
2018	3,00	3,24	-9,09	4,47	+2,19	5,30	+3,64
2019	3,20	2,99	+7,72	4,44	+0,67	5,23	+1,32
2020	3,15	3,85	-28,76	6,48	-45,95	7,07	-35,18
2021	3,50	2,62	+31,95	5,95	+8,18	6,49	+8,20
2022	3,50	2,54	+3,05	5,57	+6,39	5,86	+9,71

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

TPT Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 angkanya naik drastis karena pandemi Covid-19, dimana sektor-sektor yang terkait dengan jasa yang padat karya pada saat pandemi banyak yang tidak beroperasi dan mengakibatkan PHK karyawan. Namun kondisi PHK ini diperkirakan hanya bersifat sementara dan akan berjalan normal kembali ketika pandemi tidak lagi mengkhawatirkan. Proyeksi TPT Kabupaten Temanggung diperkirakan akan mulai membaik di tahun 2021. Terbukti dengan realisasi tahun 2021 sebesar 2,62 dan tahun 2022 sebesar 2,54, angka tersebut melebihi target yang ditetapkan.

TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi keempat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kawasan Purwomanggung dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung
Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	4,43	2,91	4,04	3,59	4,45
Kab. Wonosobo	3,50	3,43	5,37	5,26	5,01
Kab. Magelang	2,89	3,07	4,27	5,03	4,97
Kota Magelang	4,78	4,37	8,59	8,73	6,71
Kab.Temanggung	3,24	2,99	3,85	2,62	2,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

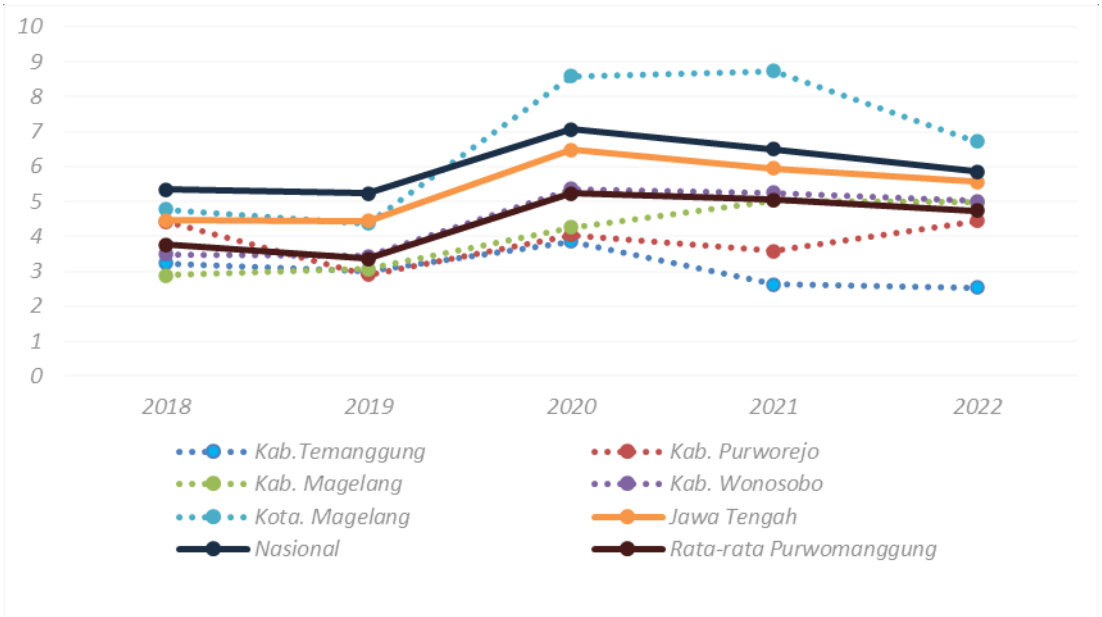

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Tabel 2.45
Pertumbuhan Jumlah Penganggur Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah, dan Nasional

Kab/Kota	Jumlah Penganggur					Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
Kab. Purworejo	16.513	10.899	15.936	14.898	18.354	-6,51	+23,20
Kab. Wonosobo	15.005	14.755	22.991	22.527	22.714	-2,02	+0,83
Kab. Magelang	20.381	22.922	33.080	38.976	40.895	+17,82	+4,92
Kota. Magelang	3.201	2.769	5.699	5.769	4.487	+1,23	-22,22
Kab. Temanggung	14.226	13.681	13.756	11.918	12.024	-13,36	+0,89
Jawa Tengah	815.083	818.276	1.214.342	1.128.223	1.084.475	-7,09	-3,88
Nasional	7.073.385	7.104.424	9.767.754	9.102.052	8.425.931	-6,82	-7,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

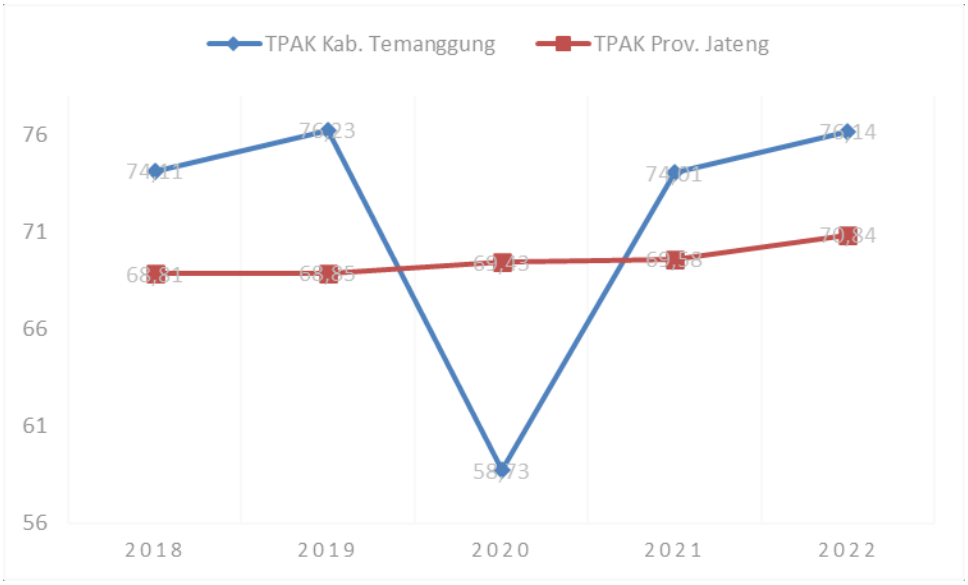

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.23
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 ke 2022 TPAK Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, demikian juga TPT. Sehingga bukan hanya faktor jumlah penganggur saja yang mempengaruhi TPAK tapi berkurang dan bertambahnya angkatan kerja juga berpengaruh, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. TPAK Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir selalu lebih tinggi dari TPAK Provinsi Jateng yang menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia

untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

j. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	61,28
2	2019	62,76
3	2020	62,70
4	2021	63,42
5	2022	64,61

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementrian PAN dan RB di tahun 2022 membuahkan hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah 64,61 dengan kategori ”B” terinci sebagai berikut:

.

Tabel 2.47
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung
Tahun 2021-2022 dari Kementrian PAN dan RB

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,61	14,40
Total Komponen Pengungkit		60,00	31,82	34,32
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35	7,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,21	8,30
3.	Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN	10,00	8,59	8,12
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,45	6,34
Total Komponen Hasil		40,00	31,60	30,29
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100,00	63,42	64,61

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung 2022

Melihat data di tabel pada tahun 2021 dan 2022 indeks reformasi birokrasi Kabupaten Temanggung cenderung meningkat. Hasil evaluasi diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkaynya nilai pada komponen pengungkit. Hal tersebut menjadi indikasi semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung

Tahun 2018 sampai 2022 ditampilkan pada table berikut:

Tabel 2.48
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018-2022

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	59, 05	CC
2	2019	60,16	B
3	2020	62,11	B
4	2021	63,84	B
5	2022	64,73	B

Sumber: Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung meningkat dari 59,05 menjadi 64,73 dengan kategori meningkat dari CC menjadi B.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabiltas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai Aparatur Sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda setiap tahun telah melaksanakan

survey indeks kepuasan masyarakat di seluruh Perangkat Daerah yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat sebagai berikut.

Tabel 2.49
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	75,38
2	2019	79,95
3	2020	80,41
4	2021	82,06
5	2022	83,41

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menyatakan bahwa kinerja unit pelayanan dapat dikategorikan **"baik",** dengan nilai yang tiap tahun naik, menandakan bahwa unit pelayanan selalu melaksanan rekomendasi dan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan, sebagaimana berikut:

Tabel 2.50

Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	89,19	B (Baik)	
2	Dinas Kesehatan	87,31	B (Baik)	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,55	B (Baik)	
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	78,19	B (Baik)	
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	77,75	B (Baik)	
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,97	A (Sangat Baik)	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,69	B (Baik)	
8	Dinas Sosial	82,22	B (Baik)	
9	Dinas Perhubungan	79,07	B (Baik)	
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,95	B (Baik)	
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,58	B (Baik)	
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,51	B (Baik)	
13	Dinas Penanaman Modal	86,71	B (Baik)	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	77,70	B (Baik)	
15	RSUD	84,09	B (Baik)	
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	87,27	B (Baik)	
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,04	B (Baik)	
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,52	B (Baik)	
19	Bagian PBJ	82,00	B (Baik)	
20	Kecamatan Temanggung	85,32	B (Baik)	
21	Kecamatan Kranggan	84,387	B (Baik)	
22	Kecamatan Pringsurat	76,67	B (Baik)	
23	Kecamatan Kandangan	84,41	B (Baik)	
24	Kecamatan Kaloran	80,63	B (Baik)	
25	Kecamatan Kedu	89,52	A (Sangat Baik)	
26	Kecamatan Tlogomulyo	83,84	B (Baik)	
27	Kecamatan Tembarak	87,41	B (baik)	
28	Kecamatan Selopampang	86,20	B (Baik)	
29	Kecamatan Bulu	86,70	B (Baik)	
30	Kecamatan Parakan	81,02	B (Baik)	
31	Kecamatan Kledung	82,50	B (Baik)	
32	Kecamatan Bansari	82,00	B (Baik)	
33	Kecamatan Ngadirejo	89,32	A (Sangat Baik)	
34	Kecamatan Gemawang	82,25	B (Baik)	
35	Kecamatan Jumo	85,25	B (Baik)	
36	Kecamatan Candiroto	84,87	B (Baik)	
37	Kecamatan Bejen	85,50	B (Baik)	
38	Kecamatan Wonoboyo	84,44	B (Baik)	
39	Kecamatan Tretep	84,02	B (Baik)	
40	Puskesmas Temanggung	84,18	B (Baik)	
41	Puskesmas Dharmarini	84,41	B (Baik)	

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
42	Puskesmas Kranggan	78,38	B (Baik)	
43	Puskesmas Pare	88,26	B (Baik)	
44	Puskesmas Pringsurat	80,47	B (Baik)	
45	Puskesmas Rejosari	79,1	B (Baik)	
46	Puskesmas Kaloran	76,62	B (Baik)	
47	Puskesmas Tepusen	87,25	B (Baik)	
48	Puskesmas Kandangan	80,92	B (Baik)	
49	Puskesmas Jumo	89,09	A (Sangat Baik)	
50	Puskesmas Gemawang	79,37	B (Baik)	
51	Puskesmas Kedu	77,47	B (Baik)	
52	Puskesmas Tlogomulyo	77,88	B (Baik)	
53	Puskesmas Tembarak	95,4	A (Sangat Baik)	
54	Puskesmas Selopampang	82,89	B (Baik)	
55	Puskesmas Bulu	89,89	A (Sangat Baik)	
56	Puskesmas Parakan	84,27	B (Baik)	
57	Puskesmas Traji	84,29	B (Baik)	
58	Puskesmas Kledung	77,87	B (Baik)	
59	Puskesmas Bansari	76,68	B (Baik)	
60	Puskesmas Ngadirejo	82,53	B (Baik)	
61	Puskesmas Banjarsari	83,47	B (Baik)	
62	Puskesmas Candiroto	81,25	B (Baik)	
63	Puskesmas Bejen	84,36	B (Baik)	
64	Puskesmas Wonoboyo	81,02	B (Baik)	
65	Puskesmas Tretep	83,18	B (Baik)	
Nilai Rata-rata IKM Tahun 2022		83,41	B (Baik)	

Sumber: Bag. Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dan sebagai salah satu target yang menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar. Indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian APK dan APM semua jenjang Pendidikan di Kabupaten Temanggung periode 2018-2022 ditampilkan pada table berikut:

Tabel 2.51

APK dan APM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK PAUD 0-6 th (%)	32,91	37,53	38,27	40,31	39,59
APK PAUD 4-6 th (%)	73,72	73,99	74,16	72,07	75,18
APK SD/MI (%)	110,39	106,89	106,68	98,07	100,45
APK SMP/MTs (%)	96,42	97,26	98,17	98,56	95,35
APM SD/MI (%)	96,88	96,97	97,62	91,24	94,12
APM SMP/MTs (%)	84,43	84,52	85,52	77,18	79,77

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2022

Selama lima tahun terakhir, APK PAUD 0-6 tahun di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat, namun APK PAUD 0-6 tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,59%. Penurunan tersebut dikarenakan jumlah anak usia 6 tahun yang sudah lulus PAUD dan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar lebih banyak dibandingkan bertambahnya jumlah anak usia 0-1 tahun.

Selanjutnya, di tingkat Sekolah Dasar (SD) Terdapat selisih antara APM dan APK SD/MI. Hal tersebut kemungkinan disebabkan banyaknya anak di bawah usia 7 tahun yang telah memasuki Sekolah Dasar, sementara penegakan aturan usia minimal masuk SD baru diterapkan secara efektif di tahun 2017.

Kesenjangan APK dan APM juga ditemukan di jenjang pendidikan SMP/MTs sedrajat di tahun 2022. Rendahnya APM SMP Sederajat diantaranya disebabkan karena terdapat anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang Pendidikan menengah, dan adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah.

Angka Putus Sekolah untuk jenjang Pendidikan dasar menunjukkan kecenderungan tetap, sebagaimana ditampilkan

pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	0,30	0,29	0,21	0,37	0,29

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2022.

Selama lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019, namun berbanding terbalik dengan APS jenjang SMP sederajat yang awalnya mengalami penurunan namun naik pada tahun 2021, namun kembali turun pada tahun 2022. APS SMP menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan APS SD berdasarkan Profil Pendidikan Tahun 2022, sebagian besar siswa SMP/MTs mengalami putus sekolah di kelas 7 dan didominasi oleh siswa laki-laki. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya APS pada siswa SD/MI dan SMP/MTs umumnya adalah faktor motivasi anak, perhatian/persepsi orang tua siswa, memiliki kebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus), budaya, dan faktor ekonomi orang tua siswa.

2. Kesehatan

Indikator aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesejahteraan sosial adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).

AKI, AKB, dan AKBa di Kabupaten Temanggung selama periode 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Di tahun 2020 angka kematian untuk ibu, dan bayi mengalami peningkatan, dimana peningkatan tertinggi terjadi untuk kematian ibu. Kondisi

tersebut disebabkan oleh hampir seluruh fasilitas kesehatan tidak dapat menyediakan layanan kesehatan secara optimal karena persebaran Covid-19. Selain itu, masyarakat juga cenderung enggan untuk mengakses sebagian besar layanan kesehatan tersebut karena khawatir tertular. Kondisi tersebut menunjukkan penyediaan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil serta deteksi dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan belum optimal.

Gambaran kinerja kesehatan di Kabupaten Temanggung periode 2018 sampai dengan 2022 Triwulan III ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Gambaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,47	75,48	75,58	75,64	75,70
2	Indeks Kinerja RSUD	%		70,7	69,05	93	93
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	87,62	85,27	95,83	174,38	75,32
4	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	12,85	12,51	12,65	12,72	13,23
5	Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,30	0,27	0,18	0,18	0,31
6	Prosentase rumah tangga	%	86,66	89,14	97,72	100	100,00
7	Persentase Puskesmas	%	100%	96,15	96,15	100	100
8	Persentase ketersediaan	%	97,3	99,22	98,41	97,73	98,72

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
9	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	99,65	100	100	100	100
10	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,97	100	100	100	100
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,59	100	100	100	100
12	Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	99,95	100	100	100
13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	99,09
14	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
15	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	9,74	9,00	9,77	9,54	9,15

16	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	80,40	81,64	92,95
17	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	14,31	14,68	13,90	14,05	15,60
18	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	30,95	84,92	82,05
19	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	77,87	86,60	51,81	69,25	89,07
20	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,36	94,25	62,64	89.52	*83,22*
21	Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	46,53	36,06	38,09	33,83	55,32
22	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	8%	40	40	40	40

23	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	23,46	22,63	19,99	30,97	84,78
24	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	13,25	75,91	77,37	92,50	123,45
25	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	69,36	88,86	83,06	102	104
26	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	72,11	38,19	67,88	95,65
27	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	68,41	74,42	73,49	87,03
28	Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100
29	Angka Kesakitan kasus malaria (API)	maks per 1.000 penduduk	0,009	0,008	0	0,0005	0,0002
30	Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	maks per 100.000 penduduk	19,23	37,62	51,13	3.75	3,62

31	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Maks per 100.000 penduduk	0,4	0,1	0,38	0	0,125
32	Persentase Desa/kelurahan UCI	%	99,65	98,96	99,31	99,31	99,65
33	Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	% minimal	99,8	95,6	95,75	81,16	97,05
34	Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan)	% maksimal	1,92	1,85	2,96	3,79	3,41
35	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	18,7	20,40	14,23	13,13	13,03
36	Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	84,0	86,03	74,15	84,02	82,33
37	Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	17,04	15,72	14,18	13,64	13,44
38	Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100
39	Persentase rumah sehat	%	74,02	80,10	83,75	82,16	87,42
40	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100
41	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	94,72	51,13	50,73	55,90	56,35

42	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	95,15	97,06	100	100	100
43	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai	%	n.a	n.a	n.a	19,23	100
	standar						
44	Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	n.a	n.a	n.a	80,77	96,15
45	Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	n.a	n.a	n.a	100	100
46	Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	n.a	n.a	n.a	100	100
47	Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	n.a	n.a	n.a	100	100
48	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	84,64%	89,15%	92,92%	94,42	94,96

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Angka Harapan Hidup selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan

pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2021 tergolong cukup tinggi. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

Angka kematian ibu selama empat tahun terakhir cenderung meningkat meskipun pada tahun 2018-2019 tidak ada peningkatan. Tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat secara drastis yaitu sebesar 174,38 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 17 kematian dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 95,83 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab kematian ibu tertinggi di tahun 2021 yakni 9 orang (52,94%). Kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Temanggung disebabkan mayoritas karena ibu hamil memiliki riwayat penyakit dan kurang optimalnya kunjungan nifas. Sedangkan pada tahun 2022, angka kematian ibu mengalami penurunan yang sangat signifikan disbanding tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 75,32.

Angka kematian bayi pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel di atas. Dari tahun 2018 hingga tahun 2019 AKB mengalami penurunan dari 12,67

per 1.000 kelahiran hidup menjadi 12,51 per 1.000 kelahiran hidup, akan tetapi mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 ada kecenderungan untuk naik kembali. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil.

Untuk tahun 2022 jumlah kematian bayi sebanyak 123 kematian yang tersebar di seluruh Kecamatan dan wilayah Puskesmas. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi paling besar yaitu sebanyak 85 (69,1%) kasus dari 123 kasus kematian bayi di Kabupaten Temanggung tahun 2022. Mayoritas penyebab kematian adalah BBLR, asfiksia dan kelainan kongenital.

Persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 0,5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Sedangkan untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk data capaian Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar tahun 2022 digunakan standar berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) yaitu Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standar merupakan Puskesmas dengan

capaian pemenuhan SPA lebih dari 60% dan pada tahun 2022 telah mencapai 100%.

Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan belum bisa 100% karena proses perencanaan dan pengadaan obat di Kabupaten diadakan setahun sekali di awal tahun sehingga dimungkinkan terjadi perubahan dalam kebutuhan dalam bulan-bulan terakhir yang disebabkan karena perubahan dari segi jumlah pasien yang berobat (metode konsumsi) dan jenis penyakit yang muncul (metode epidemiologi) sehingga tidak bisa tepat 100%. Selain jenis penyakit yang muncul bervariasi faktor lain yang menyebabkan ketersediaan obat belum mencapai angka 100% adalah keterlambatan pengiriman obat, ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa dengan pemesanan, dan belum semua obat masuk ke *e-catalog* serta sisanya masih proses tender cepat.

Indikator Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 seluruh bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 100%. Namun, pada tahun 2022 angka capaiannya hanya 99,09% dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kelengkapan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan penyakit pada bayi, pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan.

Semua balita di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 telah mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100%, yang merupakan salah satu indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan bagi masyarakat khususnya balita (0-60 bulan). Indikator cakupan

pelayanan kesehatan balita sesuai standar merupakan indikator berstatus upaya keras. Tahun 2020 mencapai 80,40% dan tahun 2021 naik menjadi 81,64% dimana dari 51.545 balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sebanyak 42.083 balita disebabkan pandemi Covid-19 kegiatan posyandu dibatasi sehingga tidak maksimal. Kemudian s.d 2022 capaian pelayanan Kesehatan balita sesuai standar sebesar 92,95% atau terdapat 40.199 balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar tidak maksimal sehingga hanya mencapai 84,92%. Pada tahun 2022, persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah mencapai 82,05%, hal ini dikarenakan dalam perhitungan untuk capaian skrining sudah mulai dilakukan tetapi terdapat beberapa sekolah yang belum melakukan skrining.

Persentase orang usia 15-59 dan usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan indikator SPM Bidang kesehatan dimana targetnya adalah 100% yang artinya bahwa semua warga negara usia 15-59 tahun dan 60 tahun ke atas wajib mendapatkan skrining kesehatan. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 belum semua sasaran mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, hal ini dikarenakan yang mendapatan skrining kesehatan baru sasaran yang datang ke fasilitas kesehatan yang dilayani skrining kesehatan, sedangkan yang tidak mengunjungi fasilitas kesehatan belum mendapatkan skrining kesehatan, di tahun 2021 dengan adanya pandemic Covid-19 membuat warga enggan untuk pergi ke fasilitas Kesehatan untuk memeriksakan dirinya.

Untuk Data Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan DM baru dapat diperoleh mulai tahun 2017 karena pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan baru diimplementasikan mulai tahun 2017. Jumlah penderita hipertensi dan DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar masih sangat kecil pada awalnya, dikarenakan data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Swasta, namun seiring bertambahnya waktu telah tercapai pelayanan 100% pada tahun 2022.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat dilaksanakan berdasarkan Permenkes tentang SPM Bidang Kesehatan dan dimulai tahun 2018 dengan capaian belum memenuhi target 100% yaitu hanya 69,36%. Indikator persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar merupakan indikator berstatus upaya keras dimana pada tahun 2022 capaiannya sebesar 104%. Capaian yang melebihi angka 100% tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti telah dilaksanakan deteksi dini khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat, pengobatan yang dilakukan telah sesuai standar, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, mengadakan bimtek kepada puskesmas terkait capaian kinerja, dan adanya advokasi terhadap para *stakeholder* di tingkat kabupaten.

Indikator persentase orang terduga TBC merupakan salah satu indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan dimana targetnya sebesar 100% yang artinya semua orang terduga TB wajib menerima pemeriksaan penunjang TB sesuai standar. Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang TB ditemukan dan tercatat tahun 2022 adalah sebanyak 8.115 orang dari sasaran orang terduga TB sebanyak 8.484 orang dengan capaian sebesar 95,65% dari

target 100%.

Tahun 2021 semua kejadian Luar Biasa (KLB) di lakukan Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan < 24 jam atau 100% dapat ditanggulangi. Bila dilihat dari tahun 2020 jumlah frekuensi KLB menurun dari 4 kejadian menjadi 3 kejadian, hal didorong oleh adanya kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di masing-masih wilayah puskesmas, dimana bila ada kenaikan kasus penyakit menular di wilayah kerjanya segera ditindaklanjuti dengan penanganan untuk mencegah peningkatan atau penyebaran kasus penyakit tersebut. Pada tahun 2022 terdapat 19 KLB yang terjadi yaitu KLB diare di Jumo; keracunan pangan di Bejen dan keracunan pangan di pondok pesantren Kyai Parak Parakan Temanggung namun dapat ditangani karena Dinas Kesehatan memiliki tenaga epidemiologi yang memadai sehingga melakukan PE (Penyelidikan Epidemiologi) dengan optimal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 di bawah target <1 per 1.000 penduduk dikarenakan Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah endemis malaria dan kewaspadaan dini tetap berlanjut agar tidak muncul kasus malaria.

Penyakit DBD masih menjadi permasalahan kesehatan prioritas di Kabupaten Temanggung, Angka Kesakitan (*Incident rate*/IR) DBD di Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 3.83 per 100.000 penduduk, angka ini jauh dibawah target yang ditetapkan (<20 per 100.000 penduduk). Bila dibandingkan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus, hal ini disebabkan karena dalam penegakan diagnosa DBD pada tahun 2021 didasarkan pada standar WHO Tahun 2011 yang dilaporkan dalam format pencatatan pelaporan E-DBD Tronik.

Sedangkan di tahun 2022 nilai IR DBD per 100.000 penduduk sebesar 3,62.

Selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2016-2022 capaian desa UCI hanya 99,65% dikarenakan ada 1 (satu) desa yang masyarakatnya menolak untuk dilakukan imunisasi pada balita mereka, yaitu desa Bonjor Kecamatan Tretep, karena keyakinan. Kemudian untuk persentase anak umur 1 tahun yang mendapat imunisasi campak dari tahun 2017-2022 mengalami fluktuatif walaupun sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 97,05%. Imunisasi Campak merupakan indikator bahwa anak usia 1 tahun sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Rumah sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 sebesar 83,75 % Bila dibandingkan dengan target Kabupaten Temanggung sebesar 80 % telah melebihi target. Kegiatan untuk meningkatkan cakupan rumah sehat juga didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tahun 2021 capaian rumah sehat menurun menjadi 82,16% walaupun telah melebihi target yang ditentukan yaitu 81%. Ditahun 2022 capaian rumah sehat sebesar 87,42%. Hal ini juga didukung dengan program Dinas Kesehatan antara lain adanya upaya pendataan rumah yang belum sehat dan adanya upaya pembinaan bagi rumah yang belum memiliki kategori sehat.

Untuk data PHBS tahun 2022 capaian masih 94,96%. Saat ini petugas sudah melakukan pendataan terkait data PHBS dan melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan kader posyandu dalam kegiatan pendataan di masing masing desase-Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan kader posyandu.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur dengan aspek fasilitas dan infrastruktur wilayah dengan komponen: kapasitas air baku, daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik, jalan kondisi baik, jembatan kondisi baik, dan rasio tingkat pelayanan ruas jalan. Perkembangan kinerja aspek ini ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung

Komponen	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan (%)	79,24	81,17	82,37	83,70	83,79
a. Rumah tangga berakses air minum layak (%)	84,99	86,73	93,90	94.52	95.32
b. Jumlah rumah tangga berakses air minum layak (unit)	173.661	191.027	228.998	254.563	257,570
c. Daerah Irigasi dlm. kondisi baik (%)	n.a.	57.41	59.97	58.11	58,83
d. Luas daerah Irigasi dlm. kondisi baik (km²)	n.a	10167,36	10621,66	10.291,61	10.417,61
e. Jalan kondisi baik (%)	84.15	89.14	83.33	89,29	88,15
f. Panjang jalan kondisi baik (km)	547,405	579,866	542,047	580,790	573,366
g. Jembatan kondisi baik (%)	92	91,39	92.28	92.88	92,88
h. Jumlah jembatan dalam kondisi baik (unit)	309	311	313	313	313

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2022 menunjukkan kinerja sebesar 83.79%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 83.70% peningkatan ini memang tidak terlalu besar karena bagaimanapun dampak pandemi Covid 19 masih terasa dengan keterbatasan anggaran yang ada. Meski pada komponen "Jalan Kondisi Baik" ada penurunan angka capaian menjadi 88,15% namun capaian peningkatan pada angka akses air minum layak dan peningkatan daerah irigasi yang baik dapat dilakukan.

Akses kebutuhan air bersih di Kabupaten Temanggung dilayani oleh PDAM maupun non PDAM. Untuk kebutuhan air bersih aman saat ini dilayani sepenuhnya oleh PDAM. Kebutuhan air bersih dari non PDAM berupa jaringan perpipaan (diantaranya Pamsimas dan swadaya) maupun bukan jaringan perpipaan. Secara total, pelayanan air bersih di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2022 sebesar 95,32% dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pelayanan air bersih aman (PDAM) sebesar 18,19% ; dan
2. Tingkat pelayanan Non PDAM sebesar 77,13% dari jumlah KK yang ada

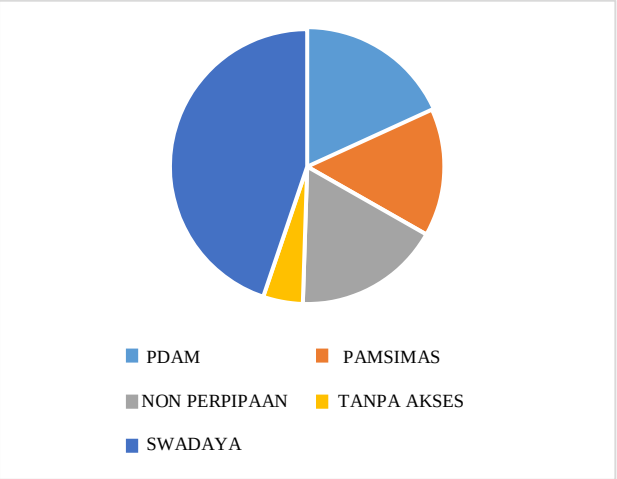

Gambar 2.24
Cakupan Layanan Air Bersih Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Pelayanan air bersih jaringan perpipaan non PDAM terdiri dari tingkat pelayanan Pamsimas sebesar 15,04% dan tingkat pelayanan swadaya sebesar 44,81%, sedangkan tingkat pelayanan air bersih dari bukan jaringan perpipaan sebesar 17,28%.

Pelayanan air bersih perpipaan PDAM melayani 18,19% dari jumlah KK, sebaran jaringan PDAM secara umum meliputi kawasan Kota/Kota Kecamatan, berikut salah satu peta jaringan perpipaan Kota Temanggung.

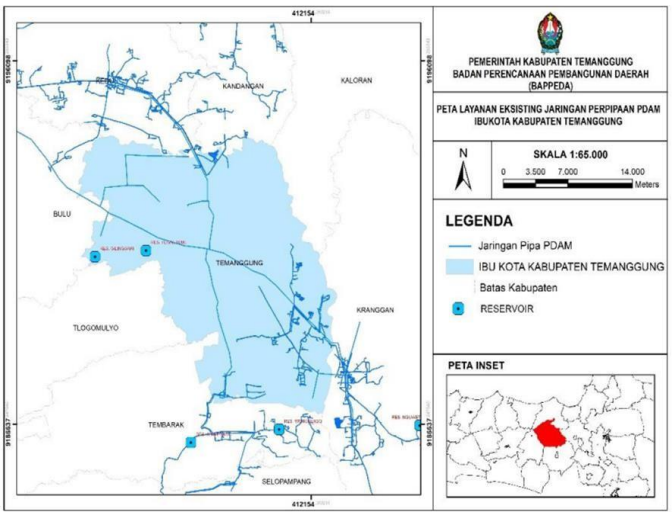

Gambar 2.25
Peta Jaringan Perpipaan PDAM Kota Temanggung

Khusus infrastruktur jalan, data menunjukkan bahwa kondisi jalan keseluruhan yaitu jalan kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi baik terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi kondisi jalan harus terus- menerus dijaga dikarenakan tingkat kerusakan jalan setiap tahunnya sekitar 21%. Apabila disarikan dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

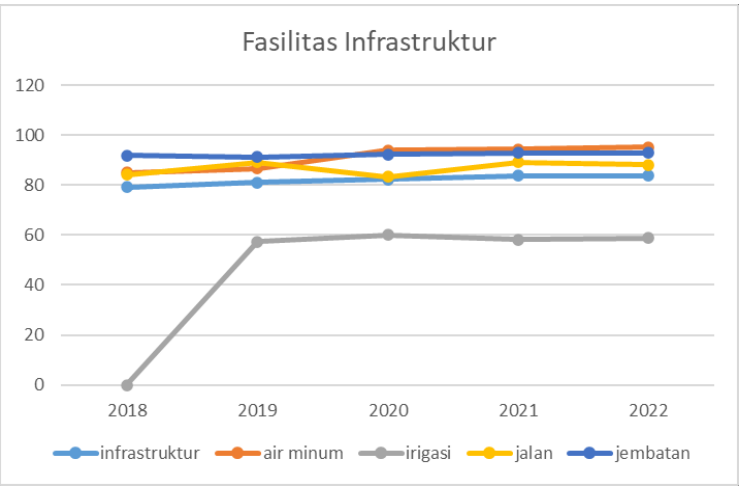

Gambar 2.26
Grafik Jalan Kabupaten Dan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Baik
Sumber : DPUPR, 2022

Selanjutnya capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	%	79,24	81,17	82,37	83.70	83,79
2	Prosentase Pemanfaatan Ruang sesuai tata ruang	%	74,62	87,70	89,20	88,54	88,56
3	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	n.a	n.a	91,89	95,29	97,97
4	Prosentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	%	n.a	57,41	59,97	58,11	58,83
5	Cakupan RT yang mendapatkan akses air minum	%	n.a	86,73	93,90	94,52	95,32
7	Prosentase pelayanan drainase skala Kawasan/kota	%	n.a	46,14	46,59	22,54	69,04
8	Prosentase desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	%	n.a	n.a	n.a	100	100
9	Prosentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	n.a	n.a	63.10	86.82	86.82

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Meski fluktuatif tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum cukup baik dan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ketahun.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Gambaran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terkahir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.56
Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Temanggung

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase perumahan dan permukiman layak huni	%	n.a	n.a	98,71	98,99	98,99
2	Prosentase Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)	%	n.a	10,67	8,12	6,05	5,25
3	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	n.a	90,19	92,38	92,98	88,11
4	Jumlah rumah tinggal bersanitasi layak	unit	n.a	177.265	181.568	182.735	198.531
5	Prosentase Rumah Layak Huni	%	n.a	88,38	90,24	91,15	94,75
6	Prosentase Kawasan kumuh perkotaan	%	n.a	11,93	7,09	5,55	4,86
7	Prosentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a	n.a	100	100	100
8	Prosentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	%	n.a	n.a	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian sampai akhir tahun 2022, yang menunjukkan luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami penurunan sebesar 4,86% atau setara 121,41 Ha. Salah satu faktor penentu teratasinya kekumuhan kawasan adalah tersedianya sarana sanitasi yang layak, untuk sarana tersebut kabupaten Temanggung mampu menyediakan sarana sanitasi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dengan tersedianya akses sanitasi untuk 196.536 unit rumah.

Secara umum ketersediaan sarana/prasarana sanitasi dapat dikategorikan atas :

- Sanitasi Dasar, berupa sarpras sanitasi yang terhubung dengan tangki septic namun belum menerapkan sistem pengolahan secara rutin;
- Sanitasi Aman, berupa sarpras sanitasi yang terhubung dengan tangki septic dan dapat disedot secara rutin dan diolah pada sarana instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) baik individu (SPALDS) maupun komunal (SPALDT);
- Sanitasi Tidak Layak, dimana sarana/prasarana yang tersedia belum sesuai dengan syarat teknis bangunan maupun kesehatan, biasanya belum tersedia tanki septic yang kedap, dan;
- Tanpa akses sanitasi.

Dari ketiga kategori diatas apabila dijabarkan di Kabupaten Temanggung telah tersedia sebanyak:

Tabel 2.57
Ketersediaan Sanitasi di Kabupaten Temanggung

Uraian	Jumlah KK	Akses Sanitasi Dasar	Akses Sanitasi Aman		Sanitasi Tidak Layak	Tanpa Akses Sanitasi
			SPADS	SPLADT		
KK dengan akses unit sanitasi	196.536	167.517	1.354	4.277	23.388	0

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2022

Dengan kata lain telah tersedia akses sanitasi dasar sebesar 85,23% , fasilitas sanitasi aman sebesar 2,5% , dan diantaranya masih terdapat fasilitas sanitasi tidak layak sebesar 11,9% , namun demikian seluruh KK di Kabupaten Temanggung telah memiliki akses sarana sanitasi yang ada.

Faktor penghambat capaian indikator di atas adalah terbatasnya anggaran sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang menangani kawasan kumuh perkotaan. Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Temanggung memerlukan kolaborasi dan peran serta dari berbagai sektor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta (CSR).

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian target sasaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, program-program dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satpol PP dan Damkar dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh BPBD dengan 1 (satu) indicator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program. Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Rasa Aman	angka	n.a	4,23	4,36	4,48	4,55
2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	87,3	100	100	100	100
3	Rasio Linmas per RT	rasio	1,38	1,38	1,38	1,42	1,42
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	n.a	n.a	n.a	100	100
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
6	Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)	%	69,8%	42,86%	55,56%	76,67%	60,00%
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	n.a	n.a	n.a	310	468
8	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	33,9%	35,9%	35,19%	32,14%	80,00%
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	69,8%	42,5%	55,5%	47,72	43,75%
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	n.a	144,51	214,81	251,07	174,59
11	Cakupan desa tangguh bencana	%	n.a	10,47	6,67	7,04	11,98
13	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	n.a	100	90	100	100
15	Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	n.a	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
16	Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	n.a	66,19	65,73	67,74	109,22
17	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	n.a	100	100	100	100
18	Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	n.a	100	100	100	100
19	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	n.a	n.a	100	100
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	n.a	n.a	100	100
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana	%	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kecuali capaian kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) yang turun dari angka 76,67% pada tahun 2021 menjadi 60,00% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pendukung penanganan bencana kebakaran.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan

penyelesaian sengketa secara beradab. Selanjutnya, untuk pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baru mencakup perda reklame dan Perda PGOT. Penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (preventif non yustisial).

Tahun 2022 strategi penanganan pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi bapak Bupati agar tiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar perda, sehingga meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran, semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100 %). Selain pelanggaran perda K4 / reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu adanya anak-anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang kebanyakan berasal dari luar daerah. Pada bulan februari 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP juga berhasil menutup aktifitas galian C di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso Temanggung Tahun 2021.

Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana pada tahun 2022 mencapai angka 100% dimana hal ini didukung oleh partisipasi dari pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kemampuan TRC BPBD Kabupaten Temanggung sehingga jumlah desa mitigasi bencana meningkat dari 147 pada tahun 2021 menjadi 237 pada tahun 217 dengan perbandingan 217 desa rawan bencana pada tahun 2021 dan 2022.

Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2022, pembangunan pos pemadam kebakaran tidak dapat terlaksana, sehingga jangkauan luas layanan penanganan bencana kebakaran sangat terbatas yaitu baru sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi beberapa jenis bencana yang dapat menganggu kondusifitas wilayah. Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dari beberapa jenis bencana tersebut, bencana banjir dan kekeringan memberikan dampak yang paling luas dibandingkan bencana lainnya.

6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial. Gambaran penanganan PMKS di Kabupaten Temanggung periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	n.a	n.a	n.a	100	64,30
2	Cakupan pemberdayaan PSKS perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
3	Prosentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	%	100	100	100	100	100
4	Prosentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	%	100	100	100	100	100
5	Prosentase warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	%	100	100	100	100	100
6	Prosentase warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
7	Prosentase warga gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
8	Prosentase rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan sosial diluar panti	%	n.a	1.31	2.20	4.22	11,58
9	Prosentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	n.a	100	0	100	100
10	Prosentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	54	63	98.78	100
11	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	100	100	78.44	91,11
12	Prosentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n.a	n.a	n.a	63.72	100
13	Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	n.a	46	83	100	61,70

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
14	Prosentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
15	Prosentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mampu melaksanakan kewajiban pelayanan dasar masyarakat dalam bidang sosial melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditandai dengan capaian kinerja dalam penanganan masalah sosial yang telah memenuhi target.

Pada indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2021 mencapai angka 100%. Namun, pada tahun 2022 angka capaian turun menjadi 64,30% dimana hal ini disebabkan oleh faktor yaitu masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan.

Pada indikator Prosentase PPKS yang memperolah bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar ada penurunan capaian dari yang tadinya 100% pada tahun 2021 turun menjadi 61,70% pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh faktor penghambat yaitu masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verifikasi oleh daerah.

b. Standar Pelayanan Minimal

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah salah satu bentuk tanggungjawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memprioritaskan pemenuhan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial.

Standar pelayanan minimal tersebut diampu oleh 7 (tujuh) perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Daerah Berkaitan dengan Target SPM s.d. Tahun 2022

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100		n.a	98,36	92,88	95,55	95,55		AT		DINDIKPORA
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100		n.a	91,17	81,35	94,74	94,74		AT		DINDIKPORA
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100		n.a	35,42	25,52	27,48	27,48			UK	DINDIKPORA

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
2	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar	% minimal	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINKES
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	% maksimal	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINKES
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100		100	100	100	99,09	99,09		AT		DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	% minimal	100	100		99,7	80,4	81,64	92,95	92,95		AT		DINKES
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan	%	100	100		100	30,95	84,92	82,05	82,05		AT		DINKES

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		pelayanan kesehatan sesuai standar													
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	% minimal	100	100		86,6	51,81	69,25	89,07	89,07		AT		DINKES
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	% minimal	100	100		94,3	62,64	89,52	83,22	83,22		AT		DINKES
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		22,6	19,99	30,97	70,59	84,78		AT		DINKES

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		75,9	77,37	92,5	123,45	100	TT			DINKES
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100		88,9	83,06	102,63	104,20	100	TT			DINKES
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100		72,1	38,19	67,88	95,65	95,65		AT		DINKES
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang	%	100	100		68,4	74,42	73,49	87,03	87,03		AT		DINKES

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		mendapatkan layanan kesehatan													
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	89	90		86,7	93,9	94,52	95,32	100	TT			DPUPR
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100		n.a	n.a	92,38	100	100	TT			DPRKPLH
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100		n.a	n.a	100	100	100	TT			DPRKPLH

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100		n.a	100	100	100	100	TT			DPRKPLH
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100		n.a	n.a	100	100	100	TT			BPBD
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100		n.a	n.a	100	100	100	TT			SATPOL DAMKAR

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100		n.a	n.a	100	100	100	TT			BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana	%	100	100		n.a	n.a	100	100	100	TT			BPBD
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		0	0	47,73	43,75	43,75			UK	SATPOL DAMKAR
6	SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh	%	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINSOS

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		rehabilitasi sosial diluar panti													
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINSOS
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINSOS
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINSOS

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			PENGAMPU
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100		100	100	100	100	100	TT			DINSOS

c. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja terhadap animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.27
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2018-2022

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2022 anggarannya berasal dari dana APBN, dengan pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 5 jurusan dengan jumlah siswa pelatihan sebanyak 80 orang.

b. Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja.

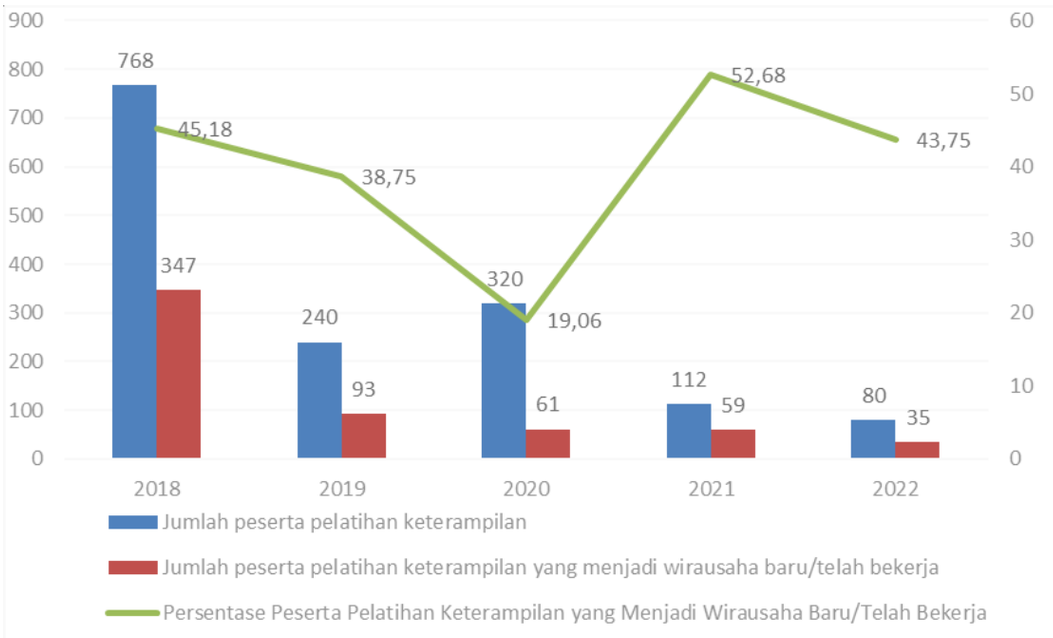

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.28
Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2018 – 2022

Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja pada tahun 2022 mencapai angka sebesar 43,75%, turun sebesar 8,93% dari tahun 2021 yang mencapai angka sebesar 52,68%. Penurunan capaian ini bila dilihat dari tabel disebabkan faktor jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja hanya berjumlah 35 orang dari 80 orang peserta pelatihan dimana jumlah ini tidak sampai 50% dari keseluruhan peserta pelatihan. Jumlah yang demikian dapat dipengaruhi faktor teknis maupun non-teknis seperti materi pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan, motivasi dari peserta dalam mencari kerja atau berwirausaha setelah mengikuti

pelatihan yang dinilai kurang maupun persyaratan melamar kerja yang tidak bisa dipenuhi oleh peserta pelatihan.

c. Persentase Peningkatan Produktivitas Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan skill personal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang.

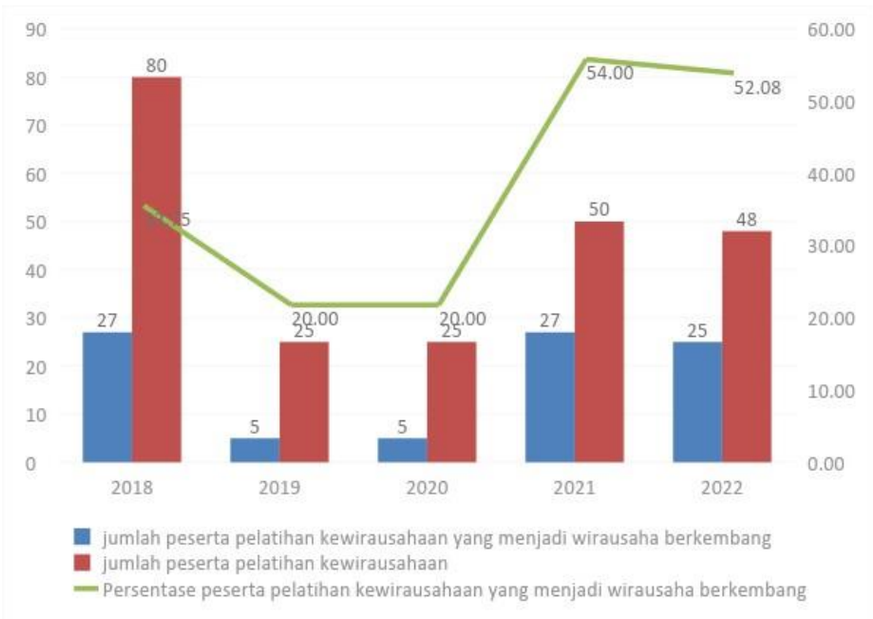

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.29
Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022

d. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja yang terdaftar difasilitasi penempatan dengan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 terlihat fluktuatif, hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar.

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentasenya juga relatif kecil, karena pencaker terdaftar tidak dapat maksimal termonitoring, hanya pencaker terdaftar yang tertempatkan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja saja yang dapat termonitoring, baik bekerja di luar negeri maupun dalam negeri. Lowongan pekerjaan meningkat dan trendnya selalu naik meskipun masih ada pandemi covid-19 di tahun 2021.

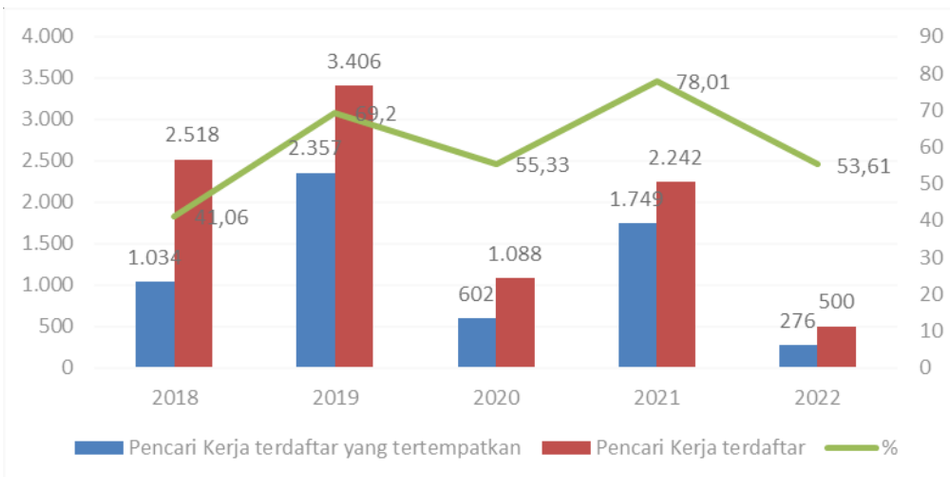

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung tahun 2022

Gambar 2.30

Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2018-2022

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022 mencapai angka sebesar 53,61% dan turun sebesar 24,40% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang menyentuh angka persentase sebesar 78,01%. Dilihat dari tabel menunjukkan jumlah pencari kerja terdaftar yang tertempatkan sebanyak 276 orang berbanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 500 orang. Jumlah yang demikian dapat dipengaruhi faktor kuota ketersediaan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sama setiap tahun sehingga hanya ada 276 orang yang tertempatkan.

e. Tingkat Setengah Pengangguran

Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak

ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Tingkat Setengah Pengangguran adalah persentase jumlah Pengangguran setengah menganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Tingkat Setengah Pengangguran menunjukkan Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia. Kondisi Tingkat Setengah Pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengangguran setengah menganggur	27.124	23.336	23.236	41.660	20.805
Jumlah Angkatan Kerja	437.295	455.242	455.242	357.156	454.927
Tingkat Setengah Pengangguran	6,20	5,10	5,10	11,66	4,57

Sumber : BPS Prov Jateng,2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka setengah pengangguran mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan jumlah tersebut masih sama hingga Tahun 2020. Pada Tahun 2021 angka setengah pengangguran melonjak tinggi di angka 11,66% hal ini diakibatkan karena pandemi covid-19. Tahun 2022 presentase tingkat setengah pengangguran menurun menjadi 4,57%.

f. Persentase Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum. Kondisi Tenaga Kerja Formal dibanding Jumlah seluruh Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel
2.62
Presentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga kerja formal	118.204	139.942	139.942	83.003	129.788
Jumlah tenaga kerja total	423.133	441.632	441.632	343.400	443.009
Presentase Tenaga Kerja Formal(%)	27,94	31,69	31,69	24,17	29,30

Sumber : BPS Prov Jateng

Dari data di atas terlihat bahwa pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja berkurang di sektor formal. Pada saat itu yang berkembang adalah sektor teknologi informasi, ekonomi digital dan jasa transportasi daring. Selama daya saing industri rendah, peluang dalam membuka lapangan kerja formal sedikit. Pada tahun 2022 Triwulan jumlah tenaga formal mengalami kenaikan dari 83.003 menjadi 129.788, sehingga mengakibatkan presentase tenaga kerja formal mengalami kenaikan menjadi 29,30%.

g. Proposi Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas

melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosialketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pekerja peserta BPJS	20.548	14.467	18.223	16.328	24.672
Jumlah pekerja total	27.751	27.751	27.751	26.732	29.062
Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	74,04	52,13	65,67	61,08	84,89

h. Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK

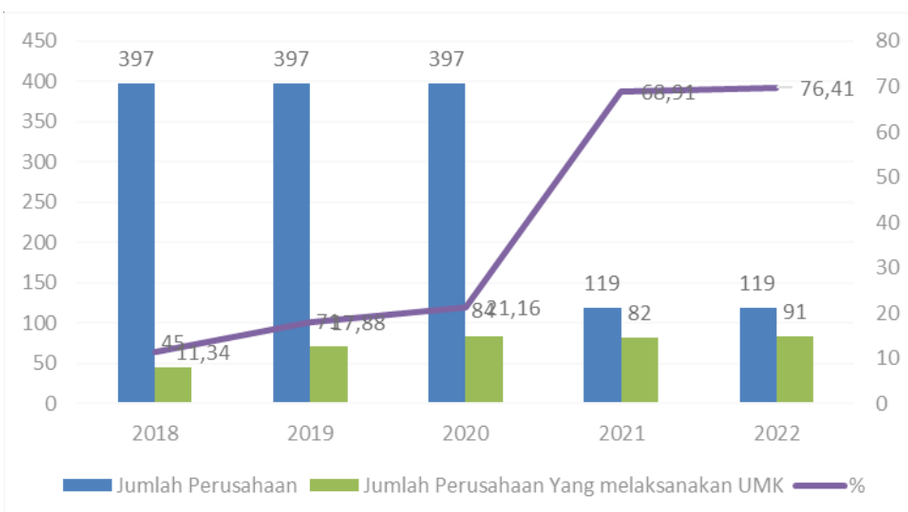

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung tahun 2022

Gambar 2.31
Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK
Tahun 2018-2022

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. UMK Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.887.872,11,-. Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarannya memenuhi UMK Tahun 2022.

i. Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah (a) serikat pekerja/serikat buruh; (b) organisasi pengusaha; (c) lembaga kerja sama bipartit; (d) lembaga kerja sama tripartit; (e) perjanjian kerja bersama; (f) peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan; dan (g) lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.32
Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

j. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang.

Namun demikian Disnaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan Perjanjian Bersama. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2018-2022 fluktuatif mengikuti jumlah perselisihan yang terjadi.

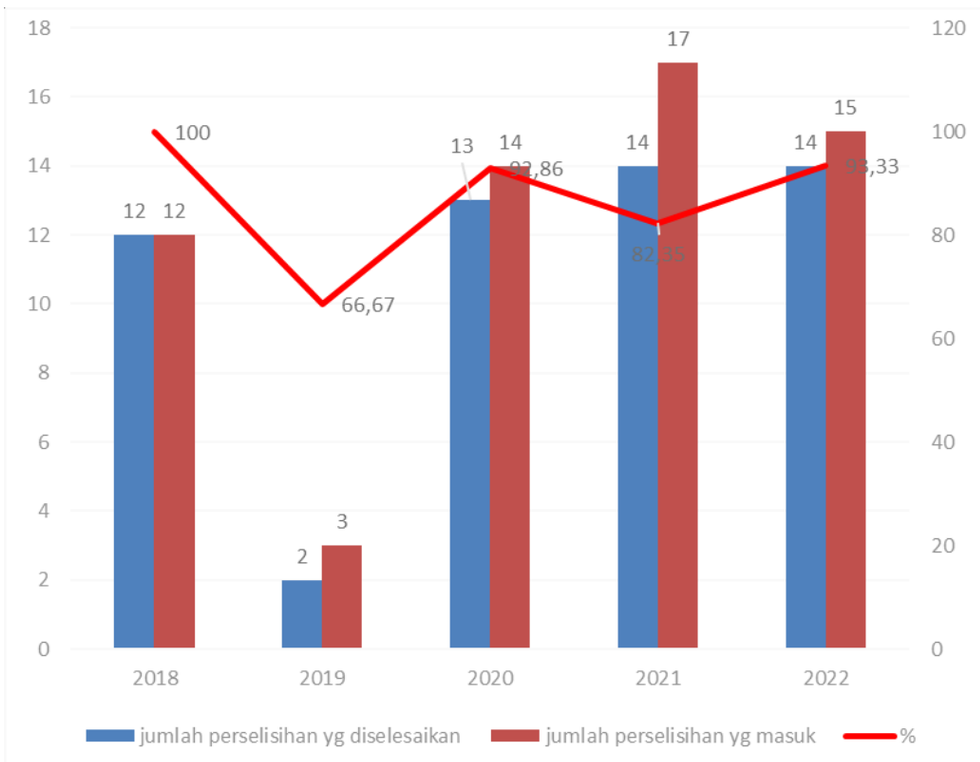

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.33

Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022 semakin baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Gambaran Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,016	0,009	0,008	0,002	0,0043
2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,29	1,89	2,02	1,79	2,64
3	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	0	32,28	43,48	45,65	82,61	100
4	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	-	0-014	0,0 22	0,0021	0,003
5	Persentase perempuan korban kekerasan	%	-	0,0002	0,0002	0,0013	0,003
6	Persentase desa saying ibu dan bayi	%	-	30,83	30,83	31,49	39,79
7	Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	-	100	100	100	100
8	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	20	40	60	80	80
9	Persentase anak korban kekerasan	%	0,015	0,04	0,04	0,0026	0,0048

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2022

Upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT melalui *Women Crisis Center* (WCC), Unit Pelayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan san Anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

a. Persentase Terbentuknya Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak

Tabel 2.65
Kecamatan Layak Anak Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	4	8	12	16	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20
3	Persentase	20 %	40%	60%	80%	80%

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2022

Prosentase kecamatan dan kelurahan layak anak semakin meningkat dan sudah mencapai 80%. Hingga saat ini hanya 4 kecamatan yang belum berpredikat kecamatan layak anak yaitu Kecamatan Tretep, Wonoboyo, Kledung, Bejen. Kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/kelurahan layak anak. Dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya merupakan temuan yang harus di selesaikan.

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Tabel 2.66
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	182.753	196.675	174.643	169.821	*190.121*
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	292.608	296.141	307.055	293.706	304.068
Persentase		62,45	66,41	56,87	57,82	62,52

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2022

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dari 62,45 ke 66,41. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 56,87%, tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi 57,82%. Untuk tahun 2022, persentase mengalami kenaikan sebesar 4,7%.

3. Pangan

Skor PPH berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan 2019 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2019. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

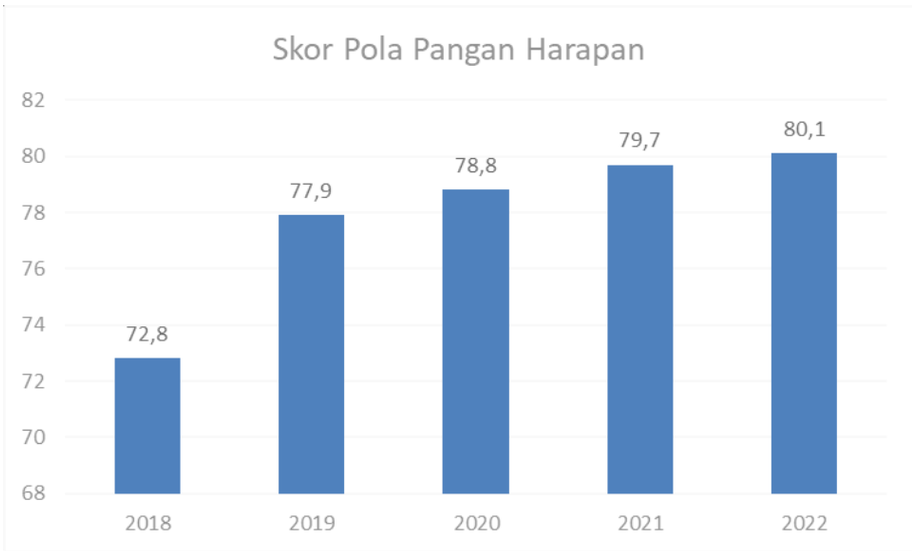

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.34
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tren PPH dari tahun 2018 - 2022 selalu meningkat. Beberapa hal yang mendukung peningkatan skor PPH diantaranya adanya partisipasi kelompok wanita tani dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga. Berikut ini gambaran Bidang Pangan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.67
Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio ketersediaan pangan	%	na	na	na	147,06	122,54
2	Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	na	na	17,3	28,03	32,53
3	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	na	na	0	56	58
4	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	na	na	100	100	100

Sumber: DKPPP Temanggung, 2022

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai 2022 rasio ketersediaan pangan telah tercapai 100%.

Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan adalah suatu lokasi (desa/kelurahan/kelompok) yang mempunyai program yang dilaksanakan secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan. Pada tahun 2022 terdapat 96 desa/Kelurahan/kelompok pelaksana Program Ketahanan Pangan.

Cadangan Pangan masyarakat di Kabupaten Temanggung banyak berupa cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok. Pada tahun 2022 terdapat terdapat 50 unit lumbung pangan dan lumbung pangan yang aktif sejumlah 29.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel bahan pangan segar asal tumbuhan dan semua sampel yang diujikan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 aman, dengan tidak adanya hasil yang positif dari sampel yang diujikan.

4. Pertanahan

Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pertanahan hingga tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 2.68
Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Temanggung

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	n.a	100	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2022

Dalam setiap fasilitasi penyelesaian sengketa tanah Garapan dapat deselesaikan semua sengketa hingga tuntas, sehingga capaian kinerja pada sub bidang ini mencapai 100%.

5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.69
Klasifikasi Dan Rentang Nilai IKLH

Klasifikasi	Rentang Nilai
Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber: Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.70
IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penduduk	Luas Wilayah (KM^2)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	2018	772.289	870,65	83,50	30,00	74,33	63,78
2	2019	789.508	870,65	81,96	51,11	74,33	69,65
3	2020	794.055	870,65	83,65	41,11	74,33	65,61
4	2021	762.980	870,65	80,89	54,45	74,33	69,51
5	2022	801.267	870,65	83,82	52,22	74,33	69,86

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2022

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 69,86 dengan kategori sedang. Nilai IKLH mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin dibanding

tahun 2021. Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai, maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Berikut ini adalah gambaran bidang lingkungan hidup Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.71
Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	52,33	61.4	31.36	100	100
2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	na	na	na	0	100
3	Indeks Kualitas Air	Angka	30,00	51.1	41.11	54.5	52,22
4	Indeks Kualitas Udara	Angka	83,50	81,96	83.65	80.9	83.82
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74.3	74.33	74.3	74.3
6	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	na	0.17	0.17	0.1	1,75
7	Cakupan RTH Publik	%	1,08	1.1	1.1	1.1	1.1
8	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	na	na	na	0	100
9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	67,24	41.6	14.71	100	100
10	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	24,60	26,47	26.48	27.3	27.87
11	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	-	-	-	82.4	84,62
12	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
13	Persentase sampah yang tertangani	%	30,52	31.96	24.23	32.00	59,06
14	Cakupan layanan persampahan	%	30,44	47.06	45.33	53.63	61,25

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2022

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu:

a. Kartu Keluarga (KK);
b. KTP-el;
c. Akta Kelahiran;
d. Akta perkawinan;
e. Akta Kematian;
f. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Tabel 2.72
Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

Sumber : PermenPAN & RB No. 14 Tahun 2017

Tabel 2.73
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM	
		2021	2022
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88	83.41
2	KTP-el	84.12	84.34
3	Akta Kelahiran	83.22	84.23
4	Akta Perkawinan	83.52	80.74
5	Akta Kematian	84.78	84.22
6	Surat Keterangan Pindah	83.52	87.77
	rata2 nilai IKM	83.84	84.12

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Dari data diatas diketahui bahwa kinerja Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sudah baik.

a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.

Persentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	251.334	257.391	257.772	266.270	269.212
2	Jumlah KK	258.294	263.885	262.643	270.220	269.219
3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	97.30	97,54	98.15	98.53	99.99

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan kartu keluarga dari tahun 2018 s/d 2022 terus meningkat. Jumlah kepemilikan KK s/d tahun 2022 adalah 269.212 dari jumlah Jumlah wajib KK 269.219 jadi penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 2022 sebanyak 7 Kepala Keluarga diantaranya disebabkan oleh:

- Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah KK
- Dalam satu rumah harusnya terdapat dua kepala keluarga tapi tidak mengajukan pisah KK

b. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Persentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)	579.350	589.079	499.679	597.354	600.882
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	587.125	591.955	594.852	599.276	605.188
	Persentase (%)	98,67	99,51	84	99.68	99.29

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP dari tahun 2018-2019 naik, karena pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti. Persentase kepemilikan KTP-el pada tahun 2021 naik dikarenakan Dinas Dukcapil sudah melaksanakan perekaman KTP-el dengan cara pendafataran melalui online dan jumlah pemohon perekaman dibatasi guna faktor kehati-hatian. Pada tahun 2022 Dindukcapil sudah melakukan pelayanan penuh, namun untuk data kepemilikan KTP-el menurun. Hal ini karena pelaksanaan SIAK Terpusat yang mulai pada bulan April 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil melaksanakan migrasi database dari SIAK Daerah ke database SIAK terpusat, sehingga data 2022 data merupakan data dari pusat dan dalam hal ini ada beberapa target yang turun.

c. Persentase Kepemilikan KIA

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Persentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.76
Persentase Kepemilikan KIA
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	76.625	117.231	132.497	179.382	100.409
2	Jumlah wajib KIA	193.137	221.911	232.772	252.351	201.731
3	Persentase Kepemilikan KIA	45,51	52,83	56.92	65.02	49,77

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 49,77, hal ini disebabkan akibat proses migrasi database dari SIAK Daerah ke database SIAK terpusat yang dalam proses migrasi dimaksud ada sebagian data yang tidak terekam di data pusat sehingga capaian kepemilikan KIA turun.

d. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Surat Keterangan Penduduk Pindah dan Datang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Dindukcapil untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya guna masuk menjadi penduduk di Kabupaten Temanggung dan pindah ke luar Kabupaten/Provinsi. Batasan waktu pelayanan surat pindah datang tepat waktu yaitu 7 hari.

Tabel 2.77
Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	6.470	9.176	13.494	18.722	15.325
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	6.470	9.176	13.494	18.722	15.325
3	Persentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu dan tidak ada pemohon yang tidak terlayani.

e. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 2.78
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	514.790	530.737	551.910	556.084	590.887
2	Jumlah penduduk	783.550	791.264	795.556	800.429	801.267
3	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	65.70	67,07	69.37	70.02	73.74

Sumber : Aplikasi SIAK Kemendagri tahun 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran adalah 210.380 jiwa.

f. Persentase Penerbitan Akta Kematian

Tabel 2.79
Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	3.443	8.666	5.023	8.194	5.676
2	Jumlah pemohon akta kematian	3.443	8.666	5.023	8.194	5.676
3	Persentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2022

Penerbitan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pencapaiannya cukup tinggi karena adanya jemput bola akta kematian. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dan pada tahun 2019 kembali karena adanya

Program Sanka (program pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin) sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari. Semua permohonan pencatatan perkawinan telah diterbitkan akta perkawinannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	172	133	151	200	137
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	172	133	151	200	137
3	Cakupan pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

h. Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari. Perceraian yang dicatat hanya bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hingga saat ini tidak ada

permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraiannya sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	41	27	32	40	42	24
2	Jumlah permohonan pencatatan	41	27	32	40	42	24
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

i. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang berhak menerima hak akses data kependudukan yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan. Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	7	21	21	26	26
2	Jumlah per angkat daerah pengguna data kependudukan	21	21	21	31	30
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	33,3	100	100	83,87	86,67

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2022

j. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.83
Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah inovasi layanan	6	12	20	29	19	20
2	Jenis Layanan	31	31	31	31	24	24
3	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	19,36	38,71	64,52	93,55	79,16	83,33

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung 2022

Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 Juni 2021 terdapat 24 jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terus mengembangkan inovasi untuk semua pelayanan guna memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu:

1) Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2) Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
3) Desa tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
4) Desa sangat tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Tabel 2.84
Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

STATUS DESA	RENTANG NILAI
Mandiri	IDM> 0,8155
Maju	0,7072 <IDM< 0,8155
Berkembang	0,5989<IDM< 0,7072
Tertinggal	0,4907<IDM< 0,5989
Sangat tertinggal	IDM< 0,4907

Sumber : Kementrian Desa PDTT, 2020.

Tabel 2.85
Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata nilai IDM	0,65	0,67	0,68	0,69	0,72

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dari angka Tahun 2021, sehingga predikat desa berkembang menjadi desa maju pada tahun 2022.

b. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.86
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2021

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa Mandiri	1	0	10	15	26
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	0,37	0	3,76	5,64	9,77

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Terdapat peningkatan desa dengan status mandiri dari yang semula tahun 2021 sebanyak 15 desa menjadi 26 desa di tahun 2022. Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

c. Persentase Desa Swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Tabel 2.87
Persentase Desa/Kelurahan Swasembada
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa/Kelurahan	46	58	58	81	81
Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	266	266	266
Persentase	15,92	20,07	21,80	30,45	30,45

Sumber: Dinpermades, Tahun 2022

Peningkatan perkembangan desa dan kelurahan tergolong sangat pesat, hal ini menunjukan bahwa desa dan kelurahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga desa dan kelurahan dalam mencukupi kebutuhannya dapat dilaksanakan secara mandiri.

d. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilaksanakan menggunakan Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan metode evaluasi diri. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Pusat.

Tabel 2.88
Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2018-2022

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa Cepat Berkembang	na	58	40	95	116
Jumlah Desa dan kelurahan	na	289	266	266	266
Persentase	na	20,06	15,03	35,71	43,61

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Persentase desa yang cepat berkembang di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan Indek Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 116 desa dan desa berkembang ada 150.

e. Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan

Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan
Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kawasan yang dikembangkan	1	1	1	1	1
Jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Perbup	1	1	1	1	1
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2018 hingga tahun 2022, dimana arah pengembangan kawasan perdesaan yang

dilakukan pada tahun ini fokus di Kecamatan Bansari dengan konsep pengembangan Eduwisata Bansari.

f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan

Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kab./kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kab/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan APBDesa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. RKPDesa yang disusun tepat waktu bila ditetapkan selambatnya tanggal 30 September.

Tabel 2.90
Persentase Desa yang Menetapkan Penyusunan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	56	117	205	256	256
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	21,5	43,98	77,07	96,24	96,24

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan mengalami peningkatan, dikarenakan perangkat desa dan masyarakat desa yang semakin memahami pentingnya perencanaan dalam proses pembangunan desa.

g. Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa/BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.

Tabel 2.91
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu	62	228	228	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266
Persentase	23,7	85,71	85,71	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Pada tahun 2022 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 266 desa atau sudah mencapai 100%.

h. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018.

Tabel 2.92
Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	266	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Persentase desa yang menerapkan siskeudes sudah mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan aplikasi siskeudes yang diterapkan mulai Tahun 2018 sudah dapat digunakan oleh pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan.

i. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa.

Persentase Desa yang menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu	217	266	266	255	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	81,8	100	100	95,86	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

j. Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu

Pemerintah desa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas. Persentase desa yang tertib administrasi mengalami peningkatan tiap tahun ditunjukkan pada tabel:

Tabel 2.94
Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2018-2022

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah desa yang tertib administrasi	213	234	264	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	80	87,97	86,84	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

k. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan

indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi. Jumlah aparatur desa yang disiplin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.95
Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2018-2022

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	0	36	18	0	0
jumlah kepala desa dan perangkat desa	3.123	3.186	3.285	3.285	3.281
Persentase	0	1,12	0,55	0	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Tingkat disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa meningkat dari tahun 2018–2019 dan mulai tahun 2021 tidak ada pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

l. Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Aset

Pengertian aset desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 11 yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Tabel 2.96
Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2018-2022

Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah desa yang tertib mengelola asset	161	191	212	264	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	60,52	71,80	79,69	99,24	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Semua desa sudah melakukan pencatatan aset tetap, Kartu inventaris barang, label stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan/aset desa, SK Kepala desa penetapatan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudes.

m. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif

LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP. PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kriteria LKD yang aktif adalah:

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- Ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes).

Tabel 2.97
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif
Tahun 2018-2022

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah LKD Aktif				8.639	8.639
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	5.178	5.201	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	1.348	1.350	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	289	578	1489	1489
2	Jumlah LKD				8.639	8.639
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	5.178	5.201	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	1.348	1.350	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	289	578	1489	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

n. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif

Tabel 2.98
Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah BUMDesa yang aktif	154	163	163	227	257
Jumlah BUMDesa	154	266	266	266	266
Persentase BUMDesa yang aktif	100	61,28	61,28	85,34	96,62

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Persentase BUMDesa yang aktif pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung meningkat, karena adanya tindak lanjut dukungan kegiatan mulai dari dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentukan BUMdesa, adanya penyertaan modal BUMDesa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD.

o. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif

Lembaga ekonomi masyarakat desa terdiri dari UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD seluruhnya aktif karena selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

Tabel 2.99
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif
Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif	109	118	118	118	118
- UP2K-PKK	21	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa	109	118	118	118	118
- UP2K-PKK	21	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	*Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)*	%	0,88	0,98	0,98	0,98	0,54
2	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,80	11,43	13,76	12,99	11,47
4	Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2.08	1,52	2,16	1,02	2,45
5	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	na	29,43	21,32	9,80	6,67
6	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	83.27	83.03	82,61	75,29	76,58
7	Persentase kepesertaan KB aktif	%	83,27	77,50	74,70	75,29	76,58
8	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,35	48,02	45,38	45,21	45,03
9	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	18,26	29,82	33,85	33,85	33,85
10	Indek Pembangunan Keluarga	%	na	0,00	0,00	55,97	55,97

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih perlu penekanan terhadap

implementasi kinerja sasaran pada laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan tabel diatas, kinerja program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana relatif baik dengan status akan tercapai (94,19%). Meskipun demikian, terdapat satu indikator kinerja yang tergolong Upaya Keras yaitu ersentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/*unmetneed* disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ikut KB dan rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB). Kepesertaan KB aktif pada tahun 2022 juga mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemi covid 19, sehingga pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal khusunya pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yang mendukung kelestarian Peserta KB aktif. Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya penyuluh KB melakukan koordinasi dan meningkatkan pendekatan dengan tokoh agama/tokoh masyarakat/pimpinan wilayah yang dianggap dapat mensukseskan program KB serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap pemahaman kesehatan reproduksi.

9. Perhubungan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas.

Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah/banyaknya

kejadian kecelakaan. Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai.

Pada tahun 2022 tercatat sejumlah 300 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,32% dibanding tahun 2021.

Tabel 2.101
Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase penurunan angka kecelakaan	%	2,37	0,30	5,79	1,62	1,32
2	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	37,50	33,82	34,78	35,26	41,06
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	93,64	95,55	97,27	98,18	98,18
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	108,88	102,21	83,60	96,28	99,56
5	Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	n.a	25	25	25	50

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	n.a	12,5	25	37,5	50
7	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	n.a	43,48	47,82	56,52	60,87
8	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100
9	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	85,71	100	100	100
10	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71
11	Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%	n.a	31,68	31,69	31,69	32,08

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2022

10. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi empat domain yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
2) Domain Tata Kelola SPBE;
3) Domain Manajemen SPBE;
4) Domain Layanan SPBE.

Selain indek SPBE, indicator kinerja urusan Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana table 2.102 berikut:

Tabel 2.102
Gambaran Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	1,84	2,82	3,61	2,78	3,12
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	77,9	80,03	95,5	89,56	88,33
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	7,3	11,34	13,20	14,66	18,18
4	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	6,25	15,63	15,63	21,88	28,13
5	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100
6	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	41,6	68,3	73,33	73,33	80,00
7	Ketersediaan jaringan intranet	%	59,49	80,25	82,03	88,10	84,11
8	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	%	6,79	13,23	16,17	16,99	52,48
9	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optmal	%	38,38	40,13	52,27	52,15	71,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2022

Dari tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja urusan akan tercapai pada akhir periode masa RPJMD 2018-2023.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran kinerja bidang urusan koperasi, UKM dan perdagangan di Kabupaten Temanggung periode tahun 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Gambaran Urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Sehat	%	43,27	67,09	6,82	7,35	15,09
2	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	%	na	0	0,012	0,035	0,0148
3	Persentase koperasi aktif	%	17,11	12,99	13,81	22,93	27,47
4	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	n.a	24,97	21	3,98	110,11
5	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	n.a	na	na	57,35	89,14
6	Prosentase usaha mikro aktif	%	n.a	na	32,20	33,07	100,00
7	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	0	0	0	0,93	1,40

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha merupakan indikator baru, pelaksanaannya dimulai pada Tahun 2021 triwulan 2, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM.

Fasilitasi pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitasi pengembangan usaha antara lain pelatihan membatik, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara *offline* maupun *online*, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt). Tahun 2022 baru dalkasanakan pelatihan Optimalisasi Bisnis dan *Start Up* bagi Wirsusaha Baru atau pemula dan masih ada 3 pelatihan yang belum dilaksanakan . Rencana akan dilaksanakan pada semester 2 Tahun 2022.

Diharapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreatifitasnya dalam berproduksi misalkan diversifikasi produk. Bisa memasarkan produknya secara *online* maupun *offline*.

12. Penanaman Modal Daerah

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujdukan tujuan kesejahateraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 2.104
Gambaran Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	n.a	n.a	n.a	78	78
2	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	760,49	375,6	1.245,66	1.496,68	1.836,01
3	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	3,1	18,75	28,13	28,13	28,13
4	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	0	44,19	100.00
5	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	16,67	60	60	60	100
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	46,2	98,48	98,35	98,09
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat waktu	%	54,5	81,21	96,20	100	100
9	Persentase kesesuaian Pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	99,43	100	93,37	93,53	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi. Potensi Investasi adalah kemampuan

investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan.

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian. Pada tahun 2021 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refokusing anggaran. Sedangkan pada tahun 2022 tidak dilaksanakan Kajian Teknis Potensi Investasi.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Definisi dari indek pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi peringatan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja.

Indikator-indikator Indek pembangunan pemuda terdiri dari:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan dan kesejahteraan;
c. Kesempatan dan lapangan kerja;
d. Kepemimpinan dan partisipasi;
e. Gender dan diskriminasi.

Tabel 2.105
Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n.a	3,35	3,57	3,78	3,98
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a	n.a	n.a	3,31	2,97
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	62,9	62,96	96,43	93,10	92,86
4	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	49,27	54,31	56,06	100	96

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase prestasi olahraga	%	46,15	46,51	54,29	21,62	45,24
6	Persentase atlet berprestasi	%	12,56	70,43	63,66	46,81	40,91
7	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a	n.a	n.a	80,61	100

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

14. Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2.106
Gambaran Urusan Statistik
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan ketersediaan data makro daerah Berusaha	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

15. Persandian

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya sekedar proses mengirim berita namun lebih strategis yaitu tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentiksasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Sedangkan indikator kinerja urusan persandian sebagaimana tabel 2.107 berikut:

Tabel 2.107
Gambaran Urusan Persandian di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1,1	0.65	0,79	1,37	4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

16. Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK merupakan instrumen disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, IPK bukan mengukur nilai budaya, tetapi lebih memotret pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan kebudayaan sebagaimana tabel 2.108 berikut:

Tabel 2.108
Gambaran Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	n.a	n.a	n.a	3,31	3,67
2	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	0	0	0	125,61	125.61
3	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	0	45,16	18,63	28,98	31,71
4	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	0	0,03	2,64	2,64	6,61
5	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	3.63	3.63	3.63	3.63	5,18

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung

17. Perpustakaan

Kinerja perpustakaan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Temanggung periode 2018 sampai dengan 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peminjam di Perpustakaan	%	89,37	77,78	78,88	75,38	86,13
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	16,71	20,57	-6,51	-60,70	1009,05
3	Persentase Perpustakaan yang aktif	%	34,27	36,83	39,41	39,46	97,68
4	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	n.a	n.a	n.a	0,039	99,12

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Persentase peminjam perpustakaan di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 75,38% akibat pandemi Covid-19 dan kembali naik pada Tahun 2022 menjadi 86,13%. Pada kinerja Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun 2022 meningkat drastis sebesar 646,66%. Kenaikan pertumbuhan yang sangat tinggi ini didorong oleh membaiknya kondisi *pasca pandemi covid* 19 sehingga sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Sedangkan capaian kinerja perpustakaan yang aktif pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 97,68%.

18. Kearsipan

Salah satu ukuran keberhasilan Kinerja urusan kearsipan diukur melalui penghitungan Indeks manajemen kearsipan yang diperoleh dari hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Dinas Kearsipan dan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung. Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung periode 2018 sampai dengan tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Gambaran Urusan Kearsipan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Manajemen Kearsipan	angka	n.a	65,44	65,44	54,03	62,46
2	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	25,87	30,52	32,56	34,30
3	Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialihmediakan	%	n.a	n.a	10	20	40,08

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Temanggung terdiri dari budidaya perikanan dalam kolam yaitu ikan nila, ikan lele dan ikan mas. Perkembangan kinerja urusan perikanan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja urusan perikanan di Kabupaten Temanggung periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/ tahun	20,91	22,96	23,34	24,34	24,34
2	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m2	3,19	3,61	3,82	4,05	5,40
3	Produktivitas Ikan Lele	Kg/m2	8,73	9,63	10,52	10,76	12,60
4	Produktivitas Ikan Mas	Kg/m2	5,23	5,42	5,53	5,62	5,80
5	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	n.a	n.a	n.a	12,48	43,58
6	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	n.a	n.a	n.a	222	100
7	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dari 20,91 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 menjadi 24,34 kg/kapita/tahun pada tahun 2022. Peningkatan tingkat konsumsi ikan ini tidak lepas dari adanya peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Temanggung. Selain itu Kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang diselenggarakan secara rutin pada tiap tahunnya juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Secara keseluruhan perkembangan kinerja urusan perikanan cenderung mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023.

2. Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan didukung oleh keberagaman daya tarik wisata yang ada yaitu alam, budaya dan buatan. Adanya pandemi covid-19 menjadikan usaha pariwisata mengalami pertumbuhan negatif. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah sehingga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan, kuliner, biro perjalanan/travel dan ekonomi kreatif.

Tabel 2.112
Capaian kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	na	1,62	0,50	1,53	1,53
2	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	20,83	25,00	30,56	32,29	34,00
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	15,41	12,30	-64,85	12,62	103,81
4	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
5	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	5,26	6,39	6,57	7,27	8,65
6	Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	0	6,39	89,47	80,95	73,91
7	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	na	6,39	na	6,32	9,90

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan capaian kinerja urusan pariwisata mengalami kondisi yang fluktuatif. Pertumbuhan jumlah wisatawan dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi covid-19, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Lama tinggal wisatawan hanya 1 (satu) hari, hal ini menunjukkan Kabupaten

Temanggung masih belum menjadi tujuan utama wisatawan yang disebabkan masih rendahnya sumber daya pelaku wisata serta sarana prasarana pendukung wisata yang menyebabkan pengunjung destinasi wisata masih didominasi oleh wisatawan lokal.

3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Sektor pertanian menjadi tumpuan mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Temanggung dan sebagai penyedia bahan pangan masyarakat, sehingga urusan bidang pertanian ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.113
Gambaran kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat ketersediaan energi perkapita (standar nasional 2400)	kkal/hari	2.912	2.576	2.271	2.934	3.198
2	Tingkat ketersediaan protein perkapita (standar nasional 63)	gram/hari	102,99	130,02	124,99	62,59*	83,19
3	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita (Standart nasional 37, minimal 25% dari tingkat konsumsi protein)	gram/hari	na	na	na	79	64,66
4	Peningkatan produktifitas Padi	ton/ha	6,62	6,4	5,9	5,9	6,103
5	Peningkatan produktifitas Jagung	ton/ha	4,57	5,08	4,9	4,500	5,4
6	Peningkatan produktifitas Ubi Kayu	ton/ha	33,9	27,12	32,91	32,912	33,0
7	Produktivitas Bawang Putih	ton/ha	7,90	7,91	6,58	6.51	6,77
8	Produktivitas Bawang Merah	ton/ha	7,97	8	7,36	7.14	7,63
9	Produktivitas Cabai Rawit	ton/ha	5,45	6,66	7,00	6,987	5,19
10	Produktivitas Cabai Besar	ton/ha	6,99	7,25	7,21	7.057	5,67
11	Produktivitas Tembakau	ton/ha	0.679	0,68	0.678	0,688	0,668
12	Produktivitas Kopi Robusta	ton/ha	0,48	0.69	0,67	0.71	0,69
13	Produktivitas Kopi Arabika	ton/ha	0.67	0,617	0,62	0,611	0,65

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
14	Produktifitas Cengkeh	ton/ha	0.204	0,326	0.302	0,232	0,417
15	Produktifitas Vanili	ton/ha	0,283	0.258	0,209	0,293	0,302
16	Produktivitas ternak sapi (data RPH dan qurban)	Kg/Ekor	176,65	176,80	177	177,20	177,40
17	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70
18	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,67	13.68	13,69	13,70
19	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
20	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10, 3	10,88	10,88	10,26	10,35
21	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70
22	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	na	na	na	76,64	79,15
23	Persentase penanganan penyakit hewan	%	na	na	na	96,68	100
24	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	60	84,298	82,96	100
25	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	na	na	na	41,2	41,45
26	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	n.a	0,59	0,68	0,81	1,03

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Ketersediaan Energi per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.

Ketersediaan protein per kapita di kabupaten Temanggung cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Penurunan terbesar

terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan menurunnya ketersediaan protein nabati akibat luas tanam pangan serealia (padi dan jagung) berkurang dan adanya serangan hama. Pada sektor ketersediaan protein hewani, berkurangnya ketersediaan disebabkan penurunan produksi ikan, ternak serta penurunan produksi telur. Sampai tahun 2022 tingkat ketersediaan protein Kabupaten Temanggung pada posisi 63 gr/kap/hr dan sudah melebihi dari standar nasional.

Produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) cenderung meningkat di tahun 2022, peningkatan ini didorong oleh berbagai bentuk kegiatan fasilitasi pemerintah guna meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan benih unggul serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu.

Produktivitas beberapa jenis tanaman hortikultura pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021, terutama pada komoditas tanaman cabai. Hal ini dikarenakan faktor cuaca terutama curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan serangan penyakit pada tanaman hortikultura.

Rata-rata Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung cenderung terjadi fluktuasi. Pada komoditas tembakau terjadi penurunan produktifitas dibanding tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen. Selain itu, di tahun 2020 mengalami penurunan luasan karena pengaruh isu pabrik rokok mengurangi pembelian tembakau serta informasi harga beli tembakau yang belum pasti. Produktifitas tanaman kopi mengalami kondisi fluktuasi pada tiap tahunnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas kopi diantaranya melalui pengembangan kopi dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya, pemeliharaan dan pemangkasan kopi yang efektif dengan bimbingan

lapang oleh penyuluh maupun sekolah lapang bagi kelompok tani. Produktifitas tanaman cengkeh juga mengalami kondisi yang fluktuatif, hal ini disebabkan banyaknya tanaman cengkeh yang mati karena serangan penyakit PBKc. Beberapa upaya telah dilakukan diantaranya melalui pelatihan pemanfaatan agensia hayati dalam penanggulangan penyakit PBKc serta bantuan pengadaan bibit tanaman cengkeh sebagai upaya penanaman baru tanaman yang mati. Mulai tahun 2020 minat masyarakat untuk budidaya vanili semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada peningkatan produktifitas tanaman vanili pada tahun 2022. Mekanisasi pertanian berperan penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 79.15%, salah satu penyebabnya adalah dukungan dari kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD.

Kelembagaan petani juga merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Data 2021 kenaikan kelas kelompok sebesar 0,81% atau 22 kelompok tani dan tahun 2022 sebanyak 28 kelompok (1,03%) dari total kelompok tani yang terdaftar 2.709. Peningkatan kualitas kelompok tani didorong oleh pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/Gapoktan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang.

Produktivitas ternak potong di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, walaupun rata-rata kenaikannya tidak cukup *signifikan*. Hal ini disebabkan populasi ternak di Kabupaten Temanggung cenderung pada posisi yang *stagnan*.

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacingan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Newcastle Disease, Avian Influenza, Kembung, Malnutrisi, Toxoplasmosis, Diare, Fraktur,

Luka, Scabies, dll. Sampai dengan Tahun 2022 terdapat 743 laporan kasus dan yang tertangai 729 kasus telah tertangani 98,12 %.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Pasar daerah merupakan salah satu penggerak sektor perdagangan di Kabupaten Temanggung. Dalam perkembangannya pasar daerah menghadapi persaingan dengan pasar modern yang mulai merebak, maka dari itu diperlukan peningkatan layanan pengelolaan pasar daerah dengan fokus kepada penyediaan sarana prasarana pasar, kebersihan pasar hingga ketertiban para pedagangnya. Kabupaten Temanggung memiliki 6 (enam) pasar daerah yaitu pasar Temanggung, pasar Parakan, pasar Ngadirejo, pasar Candiroto, pasar Kranggan/Agro dan pasar Pingit.

Tabel 2.114
Gambaran Urusan Perdagangan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,45	20,61	20,14	20,90	20,90
2	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	33,33	50	50	50	66,67
3	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	28,55	29,12	29,59	62,67
4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	70,05	98,71	64,45	105,58
5	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	18,7	18,46	13,17	53,27
6	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	%	66,84	66,58	66,3	69,32	98,08
7	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sector perdagangan	%	40,39	58,90	20	31,21	27,80

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
8	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	3,65	15,30	43,53	79,02	101,12

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2020-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2022 pada kinerja persentase pasar daerah dalam kondisi baik sebesar 66,67%, persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang 62,67%, realisasi pendapatan pasar telah mencapai 105,58 % yang terdiri dari pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan pendapatan dari sewa Barang milik Daerah (BMD). Sedangkan kinerja persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2022 sebesar 98,08% yang diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu pasar Temanggung, pasar Parakan, pasar Ngadirejo dan pasar Kranggan. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan sebesar 62,67%. Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan 2020–2021 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan sebagai akibat lesunya kondisi ekonomi global. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sudah melebihi target yang ditetapkan.

5. Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiki peranan sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung dan menempati urutan pertama dibandingkan dengan 17 lapangan usaha lainnya.

Tabel 2.115
Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018–2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	27,31	27,20	27,47	27,11	27,11
2	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	n.a	n.a	n.a	18,46	64,62
3	Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	n.a	n.a	n.a	2,09	9,92

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Dan Sesuai RPIK Tahun 2021, fokus untuk menangani IKM produk unggulan daerah seperti tembakau, kopi, pengolahan kayu, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bara, genteng dan furniture. Pada tahun 2022, jumlah IKM Unggulan Daerah yang telah terfasilitasi sebanyak 210 dari 325 IKM unggulan daerah dengan persentase sebesar 64,62%.

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3.580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Sedangkan IKM tembakau yang sudah dibina sebanyak 355, sehingga pada tahun 2022 capaian kinerja presentase pembinaan industri penghasil cukai mengalami kenaikan menjadi 9,92%.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan bagian dari urusan penunjang pemerintahan yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Sekretariat Daerah tidak lepas dari tugas dan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 2.116
Gambaran Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Angka	n.a	n.a	n.a	50	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	CC	B	B	B	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah yang antara lain ditunjukkan dalam Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa (PBJ) mulai dihitung mulai tahun 2021 dan kinerjanya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun
2022. Sedangkan capaian indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dari tahun 2019-2022 tidak ada kenaikan.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran untuk pelayanan administrasi tugas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi. Keberadaanya sangat menentukan kelancaran dan kualitas dari output kelembagaan DPRD sebagai partner eksekutif dalam pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan daerah yang menyangkut kepentingan publik harus mendapatkan pengawalan dari wakil rakyat agar tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan bersama. Kinerja Sekretariat DPRD dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.117
Gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	93,75	73,08	90,48	80,00	88,89

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada kondisi yang fluktuatif. Capaian kinerja Sekretariat DPRD sangat bergantung pada kinerja DPRD dalam menyelesaikan pembahasan Raperda.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memastikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerntah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Tabel 2.118
Gambaran Kinerja Urusan Perencanaan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	n.a	n.a	4,5	4,5
2	Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah	%	n.a	98,48	86,60	92,35	96,44
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a	n.a	Level 1	Level 2	Level 3

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2022 masih sama dengan capaian kinerja tahun 2021.

Capaian Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2022 sebesar 96,44%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 92,35.

Indikator Manajemen risiko indeks merupakan indikator baru yang tertuang dalam perubahan RPJMD sehingga nilai indikator tersebut ditahun 2018-2019 belum dihitung. Capaian kinerja Manajemen risiko indeks pada tahun 2022 pada level 3, naik dibandingkan tahun 2022 yang berada pada posisi level 2.

2. Keuangan

Aspek keuangan sebagaimana tercermin dalam struktur APBD menyangkut penerimaan/pendapatan daerah dan pengeluaran/belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja daerah dialokasikan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kualitas pengelolaan keuangan maupun aset daerah sangat ditentukan oleh beberapa indikator sebagaimana tercermin dalam tabel capaian berikut.

Tabel 2.119
Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capain Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini LKPD (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	0	15,12	16,79	18,67	16,69
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	0	0	0	49,87	62,74

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang

diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir adalah wajar tanpa pengecualian.

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan merupakan salah satu gambaran kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Komposisi utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Capaian kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan pada tahun 2022 sebesar 13,91%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur rekening pendapatan Hibah BOS yang semula padarekening Pendapatan asli daerah yang sah menjadi rekening pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2022 sebesar 62,75%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

3. Kepegawaian

Selama periode 2018 hingga 2022 terdapat perubahan komposisi ASN dan non-ASN di Kabupaten Temanggung sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Komposisi ASN dan Non-ASN Kabupaten Temanggung 2018-2022

NO	JENIS DATA	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Jumlah ASN	6.778	6.670	6.280	5.910	6.378
	1. Golongan I	338	315	292	269	208
	2. Golongan II	1.128	1.082	903	862	1.314
	3. Golongan III	3.245	3.395	3.394	3.281	3.554
	4. Golongan IV	2.067	1.878	1.691	1.498	1.302
II.	Jumlah Pejabat Struktural	710	633	624	626	470
	1. Eselon I	0	0	0	0	0

	2. Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	23	22	29	27	31
	3. Eselon III (Administrator)	144	134	151	156	152
	4. Eselon IV (Pengawas)	543	477	444	289	287
	5. Eselon V	0	0	0	0	0
III.	Jumlah Fungsional	0	0	0	5,425	5.908
	1. Guru	0	0	0	2.657	2.450
	2. Tertentu	0	0	0	1.394	1.353
	3. Umum (Pelaksana)	0	0	0	1.374	2.105
IV	Jumlah Pegawai	6.778	6.670	6.280	8.223	10.605
	1. PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.378
	2. PPPK	0	0	0	222	1.460
	3. Non ASN (BLUD)	0	0	0	650	650
	4. Non ASN (*Supporting Staff*)	0	0	0	1.441	1.473
V	Jumlah ASN	6.778	6.670	6.280	5.910	6.378
	Laki-Laki	3.089	2.959	2.743	2.542	2.535
	Perempuan	3.689	3.711	3.537	3.368	3.843

Sumber: BKPSDM Temanggung, 2022

Komposisi pegawai Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2022 sejumlah 10.605 orang dengan rincian ASN sejumlah 6.380 orang, PPPK sejumlah 1460 orang, Non ASN BLUD sejumlah 650 orang, dan Non ASN (supporting staf) sejumlah 1.473 orang.

Berdasarkan golongannya, jumlah PNS mengalami fluktuasi. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 6.378.

Berdasarkan jumlah pejabat struktural, jumlah pejabat struktural Eselon I dan Eselon V tidak ada karena pejabat Eselon I berada pada tingkat provinsi, sedangkan pejabat struktural Eselon II, III, IV selalu mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan jumlah pegawai fungsional, sekitar 23% PNS di Kabupaten Temanggung merupakan fungsional tertentu. Selama dua tahun terakhir, jumlah pegawai fungsional di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, jumlah pegawai fungsional di Kabupaten Temanggung berjumlah 5.908. Dari jumlah tersebut, 2.450

adalah fungsional guru, 1.353 adalah fungsional tertentu, dan 2.105 adalah fungsional umum (pelaksana).

Berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2022 jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki adalah 2.535, sedangkan jumlah PNS berjenis kelamin perempuan adalah 3.843.

Kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari perubahan indeks profesionalitas PNS. Selama periode 2018 hingga 2022, indeks profesionalitas Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.121
Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Profesionalitas PNS	Angka Indeks	46	51,7	50,03	51,24	53,13
2	Indeks Merit Sistem	Angka Indeks	n.a.	n.a.	0,52	0,259	0,482

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas dari tahun ke tahun pada indikator Indeks Profesionalitas PNS menunjukkan fluktuatif. Capaian IP PNS pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah dikarenakan belum terkoneksinya data kepegawaian dengan perhitungan indeks. Sedangkan Indeks Merit Sistem tahun 2022 berdasarkan data hitungan mandiri pada posisi 0,482, naik dibandingkan capaian tahun 2021.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mengisi kesenjangan kompetensi pada ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Gambaran keikutsertaan ASN Kabupaten Temanggung dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Perkembangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten TemanggungTahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	35,63	37,91	27,08	25,08	30,13
2	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi diklat teknis dan fungsional	%	10	4,87	7,36	14,57	16,50

Sumber : BKPP Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berkaitan dengan Diklat Kepemimpinan, masih terdapat pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang belum memiliki kompetensi diklat pimpinan. Berdasarkan tabel 2.81, capaian persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan menunjukkan fluktuasi, dikarenakan keterbatasan quota dari penyelenggaraan diklat manajerial (BKPSDM Provinsi Jateng) sehingga mempengaruhi jumlah peserta yang dikirim.

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara umum dapat dibedakan menjadi diklat wajib dan dan diklat teknis. Diklat wajib terdiri dari diklat kepemimpinan dan diklat fungsional. Secara komulatif, jumlah ASN yang mengikuti diklat menunjukkan kenaikan, dan pada tahun 2022 sudah mencapai 16,50%.

5. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public. Namun demikian, penerapan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat belum optimal. Sehingga masih terus diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Tabel 2.123
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	n.a.	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 adalah sangat inovatif, dan meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2021.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Kinerja Inspektorat daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi di Kabupaten Temanggung.

a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturasi SPIP.

Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Tabel 2.124
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Maturitas SPIP	3,045	3,045	3,045	3,045	3,008

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas

penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Tabel di atas menampilkan level SPIP Kabupaten Temanggung, tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilainya 2,63, menurun dibandingkan capaian tahun 2021. Hal ini dikarenakan dengan adanya perubahan peraturan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah.

b. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

IPAK merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut “persepsi".

Tabel 2.125
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.38	3.92	3.92	3.61	4,06

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, hasil penilaian IPAK Kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 3,38 meningkat menjadi 3,92 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 nilai IPAK mengalami penurunan 3,61 dan meningkat lagi pada tahun 2022 nilai IPAK menjadi 4,06.

Dengan meningkatnya nilai IPAK Kabupaten Temanggung pada tahun 2022, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari nilai Indeks Toleransi dan Indeks Gotong Royong yang ada di

masyarakat Kabupaten Temanggung.

a. Indeks Toleransi

Toleransi adalah "salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat". Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain. Terdapat dua domain variabel dalam indikator toleransi, yaitu toleransi agama dan toleransi suku.

Tabel 2.126
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Indeks Toleransi Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Indeks Toleransi	n.a.	0,828	4	4,5	4,5

Sumber:Kantor Kesatuan bangsa dan Politik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat Temanggung yang masih tinggi dengan rasa tepo seliro, sehingga mendorong indeks toleransi yang tercipta tinggi.

b. Indeks Gotong Royong

Indeks gotong rotong adalah "Kegiatan Kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan".

Tabel 2.127
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Indeks Gotong Royong
Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Indeks Gotong Royong	n.a.	4,15	0,83	4,33	4,33

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks gotong royong di masyarakat Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan budaya masyarakat

Temanggung yang masih kental dengan tolong menolong dan percaya terhadap sesama.

2) Kerjasama Antar Daerah

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan dengan daerah perbatasan, daerah lain, dan dengan lembaga untuk meningkatkan pelayanan publik.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tabel 2.128
Jumlah Kerjasama Antar Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kerjasama Antar Daerah	4	9	16	44	28

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kerjasama antar daerah, dengan jumlah kerja sama antar daerah yang terjalin setiap tahunnya tidak selalu sama sesuai dengan kebutuhan.

3) BUMD

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan

PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD.

Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannnya menyerap tenaga kerja.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki 6 (enam) BUMD yang terdiri dari 1 (satu) BUMD berbentuk Perseroaan Daerah (Perseroda) yaitu PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali dan Pemkab Temanggung. BUMD yang lain yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ada 5 (lima) yang kepemilikan sahamnya 100% milik Pemkab Temanggung yaitu:

a) Perumda BPR Bank Pasar Kab. Temanggung.

b) Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung.
c) Perumda Air Minum Tirta Agung Kab. Temanggung.
d) Perumda Aneka Usaha Kab. Temanggung.
e) Perumda Bhumi Phala Wisata Kab. Temanggung.

Kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah belum berjalan secara optimal. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal. Pada faktanya perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan. Gambaran kondisi BUMD juga dapat dilihat dengan masih adanya BUMD yang mengalami kerugian.

Untuk menunjang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan perekonomian daerah serta mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah, maka BUMD juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah. Pada laporan keuangan tahun 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) BUMD mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 1 (satu) BUMD mendapat predikat Tidak Wajar, dan 2 (dua) BUMD mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan hasil audit KAP tersebut, maka Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian Setda masih berupaya keras melalui pembinaan dan pengawasan ke 3 (tiga) BUMD agar pada tahun 2023 mampu mencapai predit WTP untuk 2 (dua) BUMD, sedangkan untuk 1(satu) BUMD masih dalam proses pembenahan secara management dan diharapkan di tahun 2024 juga mendapatkan predikat WTP.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah

adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga dan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Tabel 2.129
Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	14.520.09	15.585,59	15.586,21	16.179,76	17.669,40

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah.

2) Pengeluaran konsumsi rumah tangga bahan makanan dan non bahan makanan per kapita

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Temanggung selama dua tahun terakhir hampir sama. Konsumsi non makanan relative lebih banyak dibanding konsumsi makanan. Menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin baik.

Distribusi persentase pengeluaran penduduk Kabupaten Temanggung menurut Kelompok Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.130
Distribusi persentase pengeluaran penduduk menurut Kelompok Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Non Makanan	n.a.	51,70	52,69	51,38	52,56
Makanan	n.a.	48,30	47,31	48,62	47,44

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

b. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menggambarkan kepadatan lalu lintas kendaraan di daerah. Semakin kecil rasio maka menunjukkan makin padatnya arus lalu lintas di daerah tersebut. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraaan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 2,05 Km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor. Sampai pada tahun 2021, ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Temanggung memadai sehingga dapat menunjang aktivitas lalu lintas kendaraan di Kabupaten Temanggung. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan (Km)	650.467	650.467	650.467	650.467	650.467
Jumlah kendaraan (unit)	151.694	102.519	102.519	317.240	329.839
Ratio (Km/1000 kendaraan)	4,29	6,34	6,34	2,05	1,97

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2022

2) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Kawasan wisata Candi Borobudur yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi awal

pembangunan pariwisata skala internasional.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan pembangunan dan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Temanggung yang sangat terkait dengan KSPN Borobudur dan Kawasan Wisata Dieng.

Umbul Jumprit yang terletak di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung merupakan mata air yang digunakan sebagai air suci pada perayaan Waisak umat Budha sangat berpotensi dalam mendukung KSPN Borobudur, sehingga pada Tahun 2022 rencana pembangunan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pengelolaan Kawasan Umbul Jumprit dengan 2 (dua) pekerjaan besar yakni Perkuatan Dinding Tebing Sungai (Hulu Sungai Progo) dan Pembangungan Prasarana Air Baku. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan konservasi mata air Jumprit, program Progo bersih, dan memenuhi kebutuhan air baku di Kecamatan Candiroto dan Ngadirejo yang bersumber dari mata air Umbul Jumprit.

Disamping itu peningkatan 5 (lima) ruas jalan yaitu Jalan Kedu – Ngadirejo, Muntung – Jumprit, Jumprit – Sibajak, Bantir – Wonoboyo dan Medono – Kepratan dengan total anggaran Rp 37 miliar dari bantuan keuangan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 menjadi bagian dari salah satu rencana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi guna menangkap perkembangan KSPN Borobudur.

Proyek preservasi dan konservasi sumber air Jumprit bertujuan untuk memperkokoh posisi objek wisata budaya berkelas dunia 'Borobudur-Dieng'. Selain itu pengembangan kawasan Umbul Jumprit diharapkan air Jumprit akan bermanfaat semakin besar, lestari, dan wisatanya semakin terkenal, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi warga Temanggung.

3) Perkembangan Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik adalah banyaknya pelanggan di

suatu daerah yang memakai fasilitas listrik. Data yang digunakan adalah data pelanggan PLN di Kabupaten Temanggung. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah pelanggan listrik di tahun 2021 mencapai 234.737 pelanggan, sebagaimana tersebut pada gambar berikut ini.

Tabel 2.132
Perkembangan Pelanggan Listrik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Pelanggan Listrik	212.870	221.265	228.137	234.737	240.996

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

4) Perkembangan Jumlah Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Kabupaten Temanggung dengan sumber daya alamnya yang menonjol dapat menjadi modal untuk pengembangan pariwisata. Dukungan infrastruktur yang mendukung obyek wisata terutama adalah sarana akomodasi perhotelan. Dengan adanya sarana akomodasi perhotelan akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata di daerah dengan waktu yang relatif lebih lama.

Tabel 2.133
Perkembangan Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Perkembangan Hotel	14	14	17	17	17

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2022

Perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas bahwa hingga saat ini terdapat 17 hotel yang terdiri dari 15 (lima belas) hotel non bintang dan 2 (dua) hotel bintang.

Peningkatan jumlah hotel di Kabupaten Temanggung memberikan efek positif, diantaranya menampung tenaga kerja

sekitar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan kemajuan industri pariwisata.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas, jenis pajak dan retribusi daerah serta PERDA yang mendukung iklim berusaha.

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Tingkat keamanan dan ketertiban umum sangat mempengaruhi terhadap iklim berusaha di suatu wilayah, investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Berikut ini perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.134
Perkembangan Angka Kriminalitas Di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus Narkoba	19	22	27	26	33
2	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	3	2	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	3	0	6	10	6
4	Jumlah kasus Penganiayaan	11	0	17	0	6
5	Jumlah kasus Pencurian	51	40	62	30	28
6	Jumlah kasus Penipuan	10	0	4	10	9
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	2	3	1	1	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal	96	66	127	79	84

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Jumlah Penduduk	783.550	791.264	795.556	800.276	807.440
10	Angka Kriminalitas	12,3	8,3	15,9	9,87	10,40

Sumber: Polres Temanggung, 2022.

Angka Kriminalitas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif dan pada posisi 10,40 pada tahun 2022. Semakin rendah angka kriminalitas, maka tingkat keamanan di Kabupaten Temanggung semakin baik, dengan demikian mendorong iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Temanggung.

2) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar Rp 40.401.373,470,00 naik menjadi Rp52.832.020.942,00 di tahun 2021. Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi dimana penerimaan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp16.189.001.249,00 dan terendah di tahun 2020 sebesar Rp8.436.170.882,00. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar. Adapun Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.135
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1)	Pajak Daerah	40.401.374.470	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	58.425.439.009
	Pajak Hotel	248.404.566	253.504.852	170.636.594	165.229.973	160.983.816
	Pajak Restoran	233.306.220	1.873.169.859	1.916.160.155	2.125.018.457	1.651.644.422
	Pajak Hiburan	27.422.200	131.081.750	39.936.150	14.158.750	78.310.150
	Pajak Reklame	568.466.160	542.925.078	519.430.836	832.726.326	515.450.117

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pajak Penerangan Jalan	16.732.755.112	17.577.126.015	15.932.617.325	17.219.779.238	15.727.797.110
	Pajak BPHTB	9.012.090.184	19.014.475.009	16.156.615.814	16.472.087.860	15.938.739.936
	Pajak Air Tanah	142.066.110	188.164.850	272.188.236	311.626.105	259.907.791
	Pajak Parkir	82.303.650	112.142.925	114.054.600	101.799.300	94.690.933
	Pajak Bumi dan Bangunan	13.154.250.762	13.597.151.854	12.765.965.103	15.589.594.933	23.997.914.734
	Tungakan Pajak PBB	200.309.506	134.351.854	-	-	
2)	Retribusi Daerah	12.702.535.344	16.189.001.249	8.436.170.882	9.400.033.763	6.827.327.510
	Retribusi Jasa Umum	8.449.327.370	7.642.891.349	5.719.411.972	6.835.412.583	5.137.116.885
	Retribusi Jasa Usaha	1.373.812.904	1.675.887.900	1.162.596.760	1.077.724.500	970.705.050
	Retribusi Perizinan Tertentu	2.879.395.070	6.870.222.000	1.554.162.150	1.486.896.680	719.505.575

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Pasca pandemi covid-19 pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

3) Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha. Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mendukung iklim berusaha, sebagai berikut :

a) Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
b) Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
c) Perda No. 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;

d) Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
e) Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f) Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha;
g) Perda No. 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.136
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Perda	6	6	6	6	7

Sumber: DPM Kabupaten Temanggung.

Dengan bertambahnya Peraturan Daerah di Kabupaten Temanggung yang mendukung iklim berusaha, pada Tahun 2021 sejumlah 6 Perda menjadi 7 Perda pada Tahun 2022, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung konsisten dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada berbagai sektor. Pelaku Usaha di Kabupaten Temanggung diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kualitas tenaga kerja semakin tinggi dan sebaliknya. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan terlihat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga produktif dalam bekerja dan menggambarkan sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Kualitas tenaga kerja diukur dengan menghitung rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk. Rasio lulusan

S1/S2/S3 mengalami peningkatan, dari 0,041 di tahun 2018 menjadi 0,045 pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan tetap. Pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Temanggung hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dampak dari menurunnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Temanggung menunjukkan rendahnya mutu sumber daya manusia, sehingga menjadi tantangan bagi Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Tabel 2.137
Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah lulusan Perguruan Tinggi	31.935	35.296	29.928	30.586	22.276
2.	Jumlah Penduduk	783.550	791.264	795.556	800.429	807.440
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,041	0,045	0,038	0,038	0,026

Sumber: Dindukcapil, 2022

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.138
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Usia<15 tahun	172.153	176.538	177.988	178.179	179.389
2.	Jumlah Penduduk usia>64 tahun	63.453	67.615	64.267	67.131	71.458
3.	Jumlah Penduduk UsiaTidak Produktif	235.606	244.153	242.247	245.310	250.847
4.	Jumlah Penduduk Usia15-64 tahun	547.945	547.111	553.309	555.119	556.593

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.	Rasio ketergantungan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
6	Persentase	42,99	44,62	43,79	44,19	45,07

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung, 2022

Semakin naik angka ketergantungan mengandung arti semakin naik pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung relatif sama yaitu setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

Angka ketergantungan Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 45,07 %, yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia non produktif. Peluang melimpahnya usia produktif di Kabupaten Temanggung agar dimanfaatkan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

2.2. Ringkasan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2018-2022

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2018-2023 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.139
Kriteria /Status Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria / Status
1	100	Telah tercapai atau TT
2	80 sampai dengan 99,99	Akan tercapai atau AT
3	<80	Upaya keras atau UK

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 8 indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.140
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)*	Angka	70,16	70,49	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	100	TT		
		Angka Kemiskinan*	%	10	9,8	9,78	9,42	9,96	10,17	9,33	100	TT		
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi*	%	3,5	4,8	5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20	100	TT		
		Pendapatan Perkapita*	Juta rupiah	28,45	29,57	26,68	28,05	27,28	28,45	30,39	100	TT		
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)*	%	3,5	3,5	3,24	2,99	3,85	2,62	2,54	100	TT		
		Ketimpangan Pendapatan*	%	18,5	18,7		18,39	17,54	18,78	18,46	98,72		AT	

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi**	Angka	64,5	65	72,34	62,76	62,7	63,42	64,61	99,40		AT	
		Indeks Kepuasan Masyarakat **	Angka	81	82	75,00	79,75	80,41	82,06	83,41	100	TT		
										RATA-RATA	95,43	6	2	

*Sumber: *) BPS kabupaten Temanggung. **) Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung*
BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2022, data diolah

2.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.2.2.1 Urusan Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PENDIDIKAN													
A.		Indikator Sasaran												
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,65	7,80	6,94	7,15	7,24	7,25	7,41	95,00		AT	
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,42	12,49	12,14	12,13	12,14	12,32	12,55	100	TT		
		JUMLAH INDIKATOR SASARAN	2			RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					95,79	1	1	0
B		Indikator Program												
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD Sederajat	%	106,23	105,05	110,39	106,89	106,68	98,07	100,45	100	TT		
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,960	0,965	0,94	0,983	0,984	0,972	0,974	100	TT		
		Persentase APM SD Sederajat	%	97,90	98,30	96,88	96,97	97,62	91,24	94,12	95,75		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,970	0,975	0,95	0,990	0,993	0,986	0,987	100	TT		
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,00	79,50	76,12	77,51	78,13	43,21	89,49	100	TT		
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,57	96,97	94,39	95,39	98,39	97,93	98,16	100	TT		
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	100	TT		
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	52,81	53,90	45,92	49,70	50,61	56,13	61,22	100	TT		
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,52	98,59	96,42	97,26	98,17	98,56	95,35	96,72		AT	
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	1,000	1,000	1,02	1,016	1,003	0,990	1,003	100	TT		
		Persentase APM SMP Sederajat	%	87,14	88,00	84,43	84,52	85,25	77,18	79,77	90,65		AT	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1,060	1,055	1,08	1,074	1,009	0,996	1,056	100	TT		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,30	98,50	97,35	97,63	97,79	98,21	98,21	99,71		AT	
		Persentase ruang kelas SMP	%	94,42	95,17	88,78	92,17	92,25	53,68	94,14	98,92		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Negeri dalam kondisi baik												
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,39	97,20	85,5	90,91	91,03	88,75	86,75	89,25		AT	
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	99,99	100	100	100	100	TT		
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,22	0,20	0,3	0,29	0,21	0,37	0,29	56,81			UK
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,98	63,21	63,18	64,23	62,48	58,55	65,53	100	TT		
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	-	n.a	98,36	92,88	95,55	95,55		AT	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,02	76,60	73,72	73,99	74,16	72,07	75,18	98,14		AT	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	38,91	40,41	32,91	37,53	38,27	40,31	35,59	97,98			
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	-	n.a	91,17	81,35	94,74	94,74		AT	
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	50,22	51,00	46,5	47,84	56,75	55,89	60,30	100	TT		
		Persentase Pendidik TK yang	%	46,52	47,47	49	46,88	44,51	37,87	48,29	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		memiliki sertifikat pendidik												
		Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,61	98,64	98,51	98,47	98,51	98,71	99,59	100	TT		
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	97,09	97,19	96,79	96,80	98,10	85,86	86,70	89,21		AT	
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	-	n.a	35,42	25,52	27,48	27,48			UK
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Angka	15,80	15,80	n.a	23,73	24,04	8,44	8,86	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		29	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR P ROGRAM							94,14	16	11	2

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, masih ada 2 indikator program yang perlu upaya keras yaitu:

a. Persentase Angka putus sekolah SMP sederajat, faktor penghambatnya adalah pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; menurunnya semangat belajar siswa dan kurangnya motivasi dari orangtua.

b. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, faktor penghambat adalah pencapaian indikator ini

adalah pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal, minat dan motivasi belajarnya sangat rendah. Disamping itu ada yang merasa tidak butuh pendidikan (ijazah), dan ada beberapa yang sudah bekerja. Upaya untuk mencapai target pada tahun 2023 adalah meningkatkan motivasi belajar untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi, gerakan kembali ke sekolah, dan pendidikan kesetaraan.

2.2.2.2 Urusan Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) program. Evaluasi terhadap target indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.142
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KESEHATAN													
A.	Indikator Sasaran													
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,51	75,53	75,43	75,48	75,58	75,64	75,70	100	TT		
		Indeks Kinerja RSUD	%	79,8	80	73,45	70,7	69,05	93	93	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							100	2	0	0
B.	Indikator Program													
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	71,5	67,5	87,62	85,27	95,83	174,38	75,32	88,42		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	12,2	12	12,85	12,51	12,65	12,72	13,23	89,71		AT	
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,5	0,5	0,3	0,27	0,18	0,18	0,10	100	TT		
		Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	82,84	83,84	77,92	89,14	97,72	100	100	100	TT		
		Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	95	100	80,1	96,15	96,15	100	100	100	TT		
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97,80	98,00	97,3	99,22	98,41	97,73	99,39	100	TT		
		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	29,87	100	100	100	100	100	TT		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan	%	100	100	99,6	100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		yang memiliki kompetensi kebidanan												
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	99,95	100	100	100	100	TT		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	99,09	99,09		AT	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	70	72	100	100	100	100	100	100	TT		
		Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	7,00	7,00	9,7	9,00	9,77	9,54	9,15	69,35			UK
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	99,67	80,40	81,64	92,95	92,95		AT	
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	13,8	13,6	14,3	14,68	13,90	14,05	15,60	85,28		AT	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	30,95	84,92	82,05	82,05		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		sesuai standar												
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	77,9	86,60	51,81	69,25	89,07	89,07		AT	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	94,4	94,25	62,64	89,52	83,22	83,22		AT	
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	43,00	43,5	46,53	36,06	38,09	33,83	55,32	100	TT		
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	50,00	53,85	8	40,00	40,00	40,00	40,00	74,28			UK
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	23,46	22,63	19,99	30,97	84,78	84,78		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100		94,25	62,64	89,52	70,09	70,09			UK
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	13,25	75,91	77,37	92,50	123,45	100	TT		
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	88,86	83,06	102,63	104	100	TT		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	72,11	38,19	67,88	95,65	95,65		AT	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100		68,41	74,42	73,49	87,03	87,03		AT	
		Persentase Penanganan	%	100	100	100	100		100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		KLB 1x24 jam						100						
		Angka Kesakitan kasus malaria (API)	maks per 1.000 penduduk	1	1	0,0001	0,01	0	0,005	0,0002	100	TT		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	maks per 100.000 penduduk	20	20	20	37,62	51,13	3,75	3,62	100	TT		
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Maks per 100.000 penduduk	1	1	0,38	0,13	0,38	0,00	0,125	100	TT		
		Persentase Desa/kelurahan UCI	%	100	100	99,6	98,96	99,31	99,31	99,65	99,65	AT		
		Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	% minimal	95	95	95,6	95,61	95,75	81,16	97,05	100	TT		
		Prevalensi gizi kurang (underweigth) pada anak balita (0-60bulan)	% maksimal	15,5	15,5	3,64	3,35	2,20	3,10	3,41	100	TT		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak	% maksimal	27,5	27	29,87	20,40	14,2	13,1	13,03	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		baduta (0-24 bulan)						3	3					
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	80	80	84	86,03	74,01	84,02	82,33	100	TT		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	20	20	17,66	15,72	14,18	13,64	13,44	100	TT		
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase rumah sehat	%	81,5	82	74,02	80,10	83,75	85,07	87,42	100	TT		
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	52	54	94,72	51,13	50,73	55,90	56,35	100	TT		
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	97	100	90	97,06	100	100	100	100	TT		
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62	62	-	-	-	19,23	100	100	TT		
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77	77	-	-	-	96,15	100	100	TT		
		Pengawasan makanan	%	100	100	-	-	-	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		minuman di pasar tradisional												
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	100	100	-	-	-	100	100	100	TT		
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100	100	-	-	-	94,17	100	100	TT		
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,07	83,09	83	89,15	92,92	94,42	94,96	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		46	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							96,10	32	12	2

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas masih ada 2 indikator program yang perlu upaya keras yaitu:

a) Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup, faktor penghambatnya diantaranya Kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal, Pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, Kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan adalah meningkatkan kualitas, mutu dan komitmen dalam pelaksanaan kunjungan neonatal dan pelaksanaan manajemen laktasi (IMD).
b) Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama. Faktor penghambat diantaranya adalah pelaksanaan penilaian akreditasi fasyankes tergantung regulasi pusat, pelaksanaan workshop pembinaan untuk puskesmas yang re-akreditasi belum optimal, Akreditasi klinik sulit dilaksanakan, dan Adanya surat edaran Kemenkes Nomor HK 02.02/I/3991/2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan adalah peningkatan kualitas pada fasyankes.

2.2.2.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian target sasaran terdiri dari 1 (satu) sasaran dan 10 (sepuluh) program. Evaluasi terhadap target indikator Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrasruktur kondisi baik	%	83.95	84.00	79,51	81.17	82.37	83.70	83,79	99,75		AT	
		Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang	%	89.45	89.50	87,60	87.70	89.32	88.54	88,56	98,95		AT	
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							99,35	0	2	0
	INDIKATOR PROGRAM													
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	96.90	97.00	-	-	91.89	95.2939	97,97	100	TT		
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	58.82	59.32	-	57.41	59.97	58.1159	58,83	99,17		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	89	90	85,82	86.73	93.9	94.5168	95,32	100	TT		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	49.00	50	41	46.14	46.59	22.5443	69,04	100	TT		
4	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	%	100	100	-	-	-	100	100	100	TT		
5	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	77.50	80	-	-	63.10	86.82	86,82	100	TT		
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	-	61	62	-	-	-	75.6627	73,93	100	TT		
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	84.85	85.00	84,15	89.14	83.33	89.29	88,15	100	TT		
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	93.43	93.73	92	92.28	92.88	92.8783	92,88	99.09		AT	
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	90	100	100	100	100	100	100	TT		
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88.00	88.10	87,6	87.70	89.32	88.539	88,56	100	TT		
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	%	100	100	-	-	-	92.38	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			12	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							99.85	10	2	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022 (data diolah)

2.2.2.4 Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG :PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97.92	97.97	n.a	Na	98.71	98.99	98.99	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							100	1	0	0
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	6.35	5	12,04	10.67	8.12	6.05	5,25	95,05		AT	
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses	%	86.78	86.8	-	90.19	92.38	92.98	88,11	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		sanitasi												
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	88.87	89.42	86,84	88.38	90.24	91.15	94,75	100	TT		
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18.5	18.25	19,5	11.93	7.09	5.55	4,86	100	TT		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	n.a	-	-	100	100	100	TT		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	n.a		100	100	100	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		6	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							99,18	5	1	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022 (data diolah)

2.2.2.5 Urusan Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanahan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERTANAHAN													
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		1	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERTANAHAN							100	1	0	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022 (data diolah)

2.2.2.6 Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian target sasaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, program-program dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satpol PP dan Damkar dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh BPBD dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.146
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat													
		INDIKATOR SASARAN												
1		Indeks Rasa Aman	angka	4,43	4,44	n.a	4,23	4,36	4,48	4,55	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG							100	1		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
				5	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	*2*	*3*	*4*											
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	87,3	100	100	100	100	100	TT		
		Rasio Linmas per RT	Rasio	1,62	1,62	-	1,62	1,38	1,38	1,42	87,65		AT	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	-	0	0	100	100	100	TT		
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,81	61,00	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64	99,42		AT	
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	69,8	69,8	42,9	55,56	76,67	60,00	85,96		AT	
		Cakupan penanganan bencana non	angka	*43*	*44*	39,6	*n.a*	*n.a*	*310*	*468*	*100*	*TT*		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		kebakaran kabupaten												
		Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	43	44	39,6	34	35,19	32,14	80,00	100	TT		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	-	0	0,00	47,73	43,75	43,75			UK
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			8	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH							89,60	4	3	1

Sumber :Satpol PP dan Damkar, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas masih ada 1 indikator program yang perlu upaya keras yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Faktor penghambat diantarnya adalah :

1) Wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, dan jalan sempit;
2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi;
4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

Tabel 2.147
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD) s.d. Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	angka	192,08	192,08	n.a	144,51	214,81	251,07	174,59	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG							100	1	0	0

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	9,52	10,47	5,71	6,67	7,04	8,29	11,98	100	TT		
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	90	100	100	100	TT		
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	78,3	86,4	30,5	66,19	65,73	67,74	109,22	100	TT		
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	-	n.a	n.a	100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	-	n.a	n.a	100	100	100	TT		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana	%	100	100	-	n.a	n.a	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			9	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG							100	9	0	0

Sumber : BPBD, 2022 (data diolah)

2.2.2.7 Urusan Bidang Sosial

Bidang Sosial diimplementasikan oleh Dinas sosial dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 14 (empat belas) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d. Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A	BIDANG SOSIAL													
	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	INDIKATOR SASARAN Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	63	n.a	na	na	116,70	64,30	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	TT	STATUS	
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022			AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							100	1	0	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	%	100	100	-			100		100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Asal												
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100			100	100	100	TT		
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100	100	100			100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		diluar panti												
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22	1,37	1,31	2,20	4,22	11,58	100	TT		
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan	%	100	100	100	100	0	100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		sosial												
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	80	85	n.a	54	63	98,78	100	100	TT		
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	90	95	n.a	100	100	78,44	91,11	95,90		AT	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,1	10,2	n.a			63,72	100	100	TT		
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	%	48	48	-	46	83	111,90	61,70	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		kebutuhan dasar												
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			14	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH							99,71	13	1	0

Sumber : Dinas Sosial, 2022 (data diolah)

2.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.2.3.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Tenaga Kerja dapat dilihat pada sebagai berikut.

Tabel 2.149
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : TENAGA KERJA													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,5	75,00	73,96	76,09	58,73	74,01	74,01	98,68		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG TENAGA KERJA							98,68	0	1	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	62	65	51,65	68,18	58,72	34,78	71,43	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	40	45	-	38,75	19,06	52,68	43,75	97,22		AT	
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	40	45	33,75	20	20	54	52,08	100	TT		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62	65	-	69,20	55,33	78,01	53,61	82,47		AT	
		Tingkat setengah pengangguran	%	5,8	5,7	6,2	5,10	5,10	11,66	4,57	80,23		AT	
		Persentase Tenaga Kerja Formal	%	30	31	27	31,69	31,69	24,17	29,30	94,51		AT	
3	Program Hubungan Industrial	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	78	79	74,04	52,13	65,67	61,08	84,89	100	TT		
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	56	58	-	17,88	21,16	68,91	76,47	100	TT		
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	40	45	15,62	3,78	3,78	15,13	55,46	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	66,67	92,86	82,35	93,33	93,33		AT	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			10	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG TENAGA KERJA							94,78	5	5	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022 (data diolah)

2.2.3.2 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dua indikator sasaran dan delapan indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.150
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d. Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A.	BIDANG : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
		Indikator Sasaran												
1.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,64	95,65	94,65	95,10	95,62	95,31	95,71	100	TT		
		Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,004	0,016	0,009	0,008	0,002	0,0043	93,45		AT	
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						96,73	1	1	0
B.	Indikator Program													
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,33	2,34	2,29	1,89	2,02	1,79	*2,64*	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	0	45,71	45,71	32,28	43,48	45,65	82,61	*100*	100	TT		
2.	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,011	0,011	-	0-014	0,022	0,0021	0,003	100	TT		
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,012	0,011	-	0,0002	0,0002	0,0013	0,003	100	TT		
3.	Program peningkatan	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	41,52	62,28	-	30,83	30,83	31,49	39,79	63,89			UK
			%	100	100	-	100	100	100	100	100	TT		
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	50	60	20	40	60	80	80	100	TT		
5.	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan	%	0,011	0,011	0,015	0,04	0,04	0,0026	0,0048	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		8	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							95,49	7	0	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas masih ada satu indikator dengan status upaya keras yaitu Persentase desa sayang ibu dan bayi, faktor penghambatnya yaitu masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan

perempuan, dan upaya tidak lanjutnya penguatan dan advokasi dan sosialiasitentang GSI bersama mitra kerja terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan Penggerakan DESA Sayang IBU.

2.2.3.3 Urusan Bidang Pangan

Bidang Pangan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Pangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.151
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pangan s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PANGAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,2	78,3	72,8	77,9	78,8	79,7	80,1	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PANGAN							100	1	0	0
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	-	na	na	147,1	122,54	100	TT		
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	24,22	27,68	-	na	17,3	28,03	32,53	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	52	56	-	na	0	56	58	100	TT		
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	-	na	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			4	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PANGAN							100	4	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2022 (data diolah)

2.2.3.4 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Lingkungan Hidup s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG :LINGKUNGAN HIDUP													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	69.18	70.53	63,78	69.65	65.61	69.51	69,86	99.05		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							99,05	0	1	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	60.5	62.7	52,33	61.4	31.36	100	100	100	TT		
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan	%	100	100	n.a	n.a	n.a	0	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
		keputusan kelayakan Lingkungan Hidup												
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	46	46	30	51.1	41.11	54.5	52,22	100	TT		
		Indeks Kualitas Udara	Angka	85.5	86	83,5	82	83.65	80.9	83.82	97.47		AT	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74.3	74.3	74,33	74.3	74.33	74.3	74.33	100	TT		
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0.07	0.07	n.a	0.17	0.17	0.1	1,75	100	TT		
		Cakupan RTH Publik	%	0,07	0,07	-	1.1	1.1	1.1	1.10	100	TT		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	90	100	-	Na	Na	0	100	100	TT		
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	90	100	-	41.6	14.71	100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26.8	26.9	-	26.5	26.48	27.3	27.87	100	TT		
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66.7	66.7	-	-	-	82.4	84,62	100	TT		
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	36.7	38.2	-	31.96	24.23	32.00	59,06	100	TT		
		Cakupan layanan persampahan	%	52	55	-	47.06	45.33	53.63	61,25	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			14	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							99,82	13	1	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022 (data diolah)

2.2.3.5 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan satu indikator sasaran dan sepuluh indikator program. Evaluasi terhadap target indikator Kinerja Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.153
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)		STATUS	
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A.	BIDANG : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
		Indikator Sasaran												
1.		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	angka	79,5	80	n.a	na	na	83.84	83,84	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		1	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							100	1	0	0
B.	Indikator Program													
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,3	97,4	96,98	97,54	98,15	98,54	99,997	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP el	%	98,6	99	96,8	99,51	84,00	99,68	99,29	100	TT		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	67	72	-	52,83	56,92	71,08	49,77	69,13			UK
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	73	75	-	67,07	69,37	70,72	73,74	98,83		AT	
		Persentase penerbitan akte kematian	%	98	99	-	100	100	100	100	100	TT		
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
3.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	40	60	-	100	100	83,87	86,67	100	TT		
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	80	90	-	65,00	93,55	79,17	83,33	92,59		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		10	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							96,00	7	2	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas masih ada 1 (satu) indikator berstatus upaya keras yaitu Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan faktor penghambat Jumlah pelayanan terbatas dan keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan. Upaya tindak lanjut yaitu menyukupi ketersediaan alat perekaman KTP-el di Dinas & kecamatan dan tersedianya peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el.

2.2.3.6 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dua indikator sasaran dan 13 (tiga belas) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.154
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A.	BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
		Indikator Sasaran												
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0.7	0.71	0,62	0,67	0,68	0,69	0,72	100	TT		
		Persentase desa yang ber predikat mandiri	%	6,02	6,39	n.a	0	3,76	5,64	9,77	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							100	2	0	0
B.														
1.	Program penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	35	40	20	20	20,07	30,45	30,45	76,13			UK
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	35	37	25	20,07	20,07	35,71	43,61	100	TT		
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	90	21,5	43,98	43,61	96,24	96,24	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	90	23,7	85,71	84,21	100	100	100	TT		
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	80	85	55	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100	81,8	100	100	96	100	100	TT		
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	83	85	75	87,97	86,84	100	100	100	TT		
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	1,13	0,55	0	0	100	TT		
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	83	85	75	79,70	86,84	100	100	100	TT		
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	30	35	12	96,25	100	100	100	100	TT		
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	29	32	20	61,28	61,28	85,34	96,62	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	100	100	100	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		13	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							98,16	12	0	1

Sumber: Dinpermades Kab. Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel diatas masih ada 1 (satu) indikator berstatus upaya keras yaitu pada indikator Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada . Permasalahan yang ada adalah tidak semua desa update isian data profil karena data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun, dea lebih fokus pada isian data IDM. Upaya tidak lanjut yaitu dengan mendampingi dan pembinaan desa secara berkala.

2.2.3.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan satu indikator sasaran dan sembilan indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A.	BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Indikator Sasaran												
1.		Laju pertumbuhan penduduk	%	0,81	0,80	0,85	0,88	0,98	0,98	0,54	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		1	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							100	1	0	0
B.		Indikator Program												
1.	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmet need	%	9,51	9,17	7,16	11,44	13,76	12,99	11,47	74,93			UK
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,05	2,04	2,08	1,52	2,16	1,02	2,45	80,02		AT	
		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	26,5	26,3	n.a	29,43	21,32	9,80	6,67	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	75,87	76,21	83,27	83,03	82,61	75,29	76,58	100	TT		
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	75,87	76,21	83,27	77,50	74,71	75,29	76,58	100	TT		
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,87	49,19	48,72	48,02	45,38	45,21	45,03	91,53		AT	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	33,9	33,9	41,67	29,82	33,85	33,85	33,85	99,84		AT	
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	%	45	50	-	0,00	0,00	55,97	55,97	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		9	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							94,04	5	3	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas masih ada 1 (satu) indikator dengan status upaya keras yaitu pada indikator program persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed. Faktor penghambat adalah masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan,

Masih tingginya angka kelahiran (CBR), Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB serta Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB). Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status upaya keras, yaitu :

a. Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) baik pemerintah maupun swasta dengan melakukan advokasi dan bintek kepada Kepala Desa dalam program KKBPK

b. Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana) sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran unmetneed.

2.2.3.8 Urusan Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dengan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perhubungan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : Perhubungan													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1.59	1.61	2,37	0.30	5.79	1.62	1.32	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERHUBUNGAN							100	1	0	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	37.68	38.65	37,5	33.82	34.78	35.27	41,06	100	TT		
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	98.18	100	93,64	95.45	97.27	98.18	98,18	98,18		AT	
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99.53	99.50	108,8	102.21	83.61	96.28	99,56	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25	50	n.a	25	25	25	50	100	TT		
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	50	62.5	n.a	12.5	25	37.5	50	80		AT	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	60.87	65.22	n.a	43.48	47.83	56.52	60.87	93.33		AT	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87.18	87.18	81,82	80	80	80	100	100	TT		
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	85,71	85.71	100	100	100	100	TT		
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	85.71	100	57,14	71.43	71.43	85.71	85.71	85.71		AT	
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	12.9	14.26	-	31.68	31.69	31.69	32.08	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			10	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERHUBUNGAN							95.72	6	4	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022 (data diolah)

2.2.3.9 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Bidang Komunikasi dan Informatika diimplementasikan oleh Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.157
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	2.9	3	1,84	2.82	3.61	2.78	3.12	100	TT		
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	95.70	96.00	77,9	80.03	95.50	89.56	88.33	92,01		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			2	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							96,01	1	1	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	18	20	6,7	10.70	13.20	14.66	18.18	90.91		AT	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	25	30	5	15.63	15.63	21.88	28.13	93.75		AT	
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
		INDIKATOR SASARAN												
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersedian akses internet publik	%	100	100	41	68.3	73.33	73.3	80	80		AT	
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100	59,49	80.25	82.03	88.10	84.11	84.11		AT	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	40	50	7	13.23	16.17	16.99	52.48	100	TT		
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	55	60	38	40.1	52.27	52.1	71,29	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			7	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							92.68	3	4	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 (data diolah)

2.2.3.10 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat dilihat pada tabel sebagai Berikut.

Tabel 2.158
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Persentase Koperasi Sehat	%	9,5	10,71	7,40	8,71	5,95	7,35	15,09	100	TT		
		Prosentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,014	0,015	n.a	0	0,012	0,004	0,0148	98,67		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			2	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							99,33	1	1	0
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	20	22	7,45	0	13,81	22,86	27,47	100	TT		
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	25	30	-	24,97	21,08		110,11	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3	Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	37,5	75	-	0	41,28	57,35	89,14	100	TT		
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro	Prosentase usaha mikro aktif	%	34	35	n.a	35,93	32,2	33,07	100	100	TT		
5	Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	0,72	1,07	n.a	0	0	0,93	1,40	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			5	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							100	5	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, 2022 (data diolah)

2.2.3.11 Urusan Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.159
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanaman Modal s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PENANAMAN MODAL													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Indeks Kemudahan Berusaha		62,5	65	n.a	n.a.	n.a	78	78	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PENANAMAN MODAL							100	1	0	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	520	625	760,48	375,6	1245,7	1496,7	1836,01	100	TT		
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10	9,5	18,75	28,125	28,125	28,13	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	0	44,19	100	100	TT		
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100	60	60	60	100	100	TT		
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	21,23	46,2	98,48	98,35	98,09	98,09		AT	
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	82,85	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	95	95	54,5	81,21	96,20	100	100	100	TT		
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	98,86	100	93,37	93,53	100	100	TT		
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	n.a	100	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			10	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PENANAMAN MODAL							99,81	9	1	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.3.12 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga dengan dua indikator sasaran dan lima indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A.	BIDANG : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
		Indikator Sasaran												
1.		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,53	3,56	n.a	3,35	3,57	3,78	3,98	100,00	TT		
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	3,20	3,41	n.a	n.a	n.a	3,31	2,97	87,10		AT	
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							93,55	1	1	
B.	Indikator Program													
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76,90	80,76	6,29	62,96	96,43	93,10	92,86	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	34,50	35,40	30,83	54,31	56,06	100	96	100	TT		
		Persentase prestasi olahraga	%	56,40	59,00	46,15	46,51	54,29	21,62	45,24	76,67			UK
		Persentase atlet berprestasi	%	20,00	21,00	12,56	70,43	63,66	46,81	40,91	100	TT		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	90,10	92,89	-	n.a	n.a	80,61	100	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							95,33	4	0	1

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas masih ada 1 (satu) indikator berstatus upaya keras yaitu pada indikator program Persentase prestasi olah raga, permasalahan yang ada adalah persentase prestasi olahraga karena pandemi covid 19 yang mengakibatkan minimnya event olahraga prestasi yang ada dan minimnya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga. Upaya yang dapat dilakukan dengan

cara penyaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

2.2.3.13 Urusan Bidang Statistik

Bidang Statistik diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Statistik s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : STATISTIK													
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100	100	87	100	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			1	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG STATISTIK							100	1	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 (data diolah)

2.2.3.14 Urusan Bidang Persandian

Bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja Persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Persandian s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERSANDIAN													
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1	1	8,3	0.65	0.79	1.37	4.00	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			1	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERSANDIAN							100	1	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 (data diolah)

2.2.3.15 Urusan Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.163
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kebudayaan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KEBUDAYAAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,41	3,51	n.a	n.a	n.a	3,31	3.67	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KEBUDAYAAN							100	1	0	0
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	72,58	80,64	40,32	0	0	126	125,61	100	TT		
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang	%	26,09	32,16	-	45,16	18,63	28,98	31,71	98,59		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		produktif												
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	5,38	6,73	-	0,03	2,64	2,64	6,61	98,19		AT	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	4,66	5,18	-	46,56	3,63	3,63	5,18	100	TT		
		JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	4	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEBUDAYAAN							99,19	2	2	0

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.3.16 Urusan Bidang Perpustakaan

Dalam rangka pencapaian target sasaran Bidang Perpustakaan, program-program dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DINPUSIP). Bidang Perpustakaan diimplementasikan oleh DINPUSIP 1 (satu) indikator sasaran dan 3 (tiga) indikator program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.164

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Bidang Perpustakaan s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERPUSTAKAAN													
		INDIKATOR SASARAN												
		Persentase peminjam di perpustakaan	%	80	82	74,39	77,78	78,88	75,38	86,13	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							100	1		
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	35	40	16,71	20,57	(6,51)	(60,71)	1009,5	100	TT		
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	35,35	35,62	34,27	36,83	39,41	39,46	97,68	100	TT		
2	Program pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	75	100	-	0	0	0,039	99,12	99,12		AT	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			3	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							99,71	2	1	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diolah

2.2.3.17 Urusan Bidang Kearsipan

Bidang Sosial diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearkrsip (DINPUSIP) dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 1 (satu) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.165
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d. Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KEARSIPAN	INDIKATOR SASARAN												
		Indeks manajemen kearsipan	*angka*	66,50	67,00	n.a	62,80	65,44	54,03	93,93	93,23		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							94,36		1	
INDIKATOR PROGRAM														
2	Program Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	29,07	31,98	15,99	25,87	30,52	32,56	34,30	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : KEARSIPAN	INDIKATOR SASARAN												
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	40						40,08	80,16		AT	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			1	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							90,08	1	1	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diolah

2.2.4 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

2.2.4.1 Urusan Bidang Perikanan

Bidang Perikanan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.166
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perikanan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	*2018*	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERIKANAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	21,29	21,34	20,91	22,96	23,34	24,3	24,34	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERIKANAN							100	1	0	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidava	Produktivitas Ikan Nila	kg/m2	5,4	6,2	3,19	3,61	3,82	4,05	5,40	87,10		AT	
		Produktivitas Ikan Lele	kg/m2	12,6	13,8	8,73	9,63	10,52	10,76	12,60	91,33		AT	
		Produktivitas Ikan Mas	kg/m2	5,8	6	5,23	5,42	5,53	5,62	5,80	96,67		AT	
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	20	30	-	na	na	12,48	43,58	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	*2018*	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERIKANAN													
		INDIKATOR SASARAN												
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	33	n.a	na	na	222	100	100	TT		
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	100	n.a	na	na	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			6	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERIKANAN							95,85	3	3	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.4.2 Urusan bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.167
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PARIWISATA													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya Pariwisata Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,63	1,65	n.a	1,62	0,5	1,53	1,53	92,73		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PARIWISATA							92,73	0	1	0
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	37,50	41,66	20,83	25	30,56	32,29	34	81,61		AT	
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	20	21	15,41	12,30	-64,85	12,62	103,81	100	TT		
		Lama Tinggal Wisatawan	%	1	1	-	1	1	1	1	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PARIWISATA	INDIKATOR SASARAN												
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	10	11,76	-	6,39	6,57	7,27	8,65	73,53			UK
	BIDANG : PARIWISATA	INDIKATOR SASARAN												
		Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	5	5	-	6,39	89,47	81	73,91	100	TT		
		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	8,27	9,02	-	6,39	na	6,32	9,90	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			6	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PARIWISATA							92,52	4	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas masih ada 1 (satu) indikator yang berstatus upaya keras pada indikator Persentase peningkatan desa wisata dengan faktor penghambatya yaitu masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisata.

2.2.4.3 Urusan Bidang Pertanian

Bidang Pertanian diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang diukur dengan 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanian s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERTANIAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita (standar nasional 2400)		2930	2935	2912	2576	2271	2934	3198	100	TT		
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan protein perkapita (standar nasional 63)	gram/kapita/th	104	104	102,99	130,2	125	62,59	83,19	80,14		AT	
3	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita (Standart nasional 37, minimal 25% dari tingkat konsumsi protein)		37,3	37,5	n.a	na	na	79	37,6	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			3	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERTANIAN							93,38	2	1	0
		INDIKATOR PROGRAM												

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produktifitas Padi	Kuintal/ha	63,15	63,30	62,15	64,17	59	59	63,15	99,76		AT	
		Peningkatan produktifitas Jagung	Kuintal/ha	45,95	46	45,7	50,86	49	45	46,10	100	TT		
		Peningkatan produktifitas Ubi Kayu	Kuintal/ha	340	340	339	288,3	329	329	340	100	TT		
		Produktivitas Bawang Putih	Kuintal/ha	79,45	79,60	79	79,13	65,8	65,1	69,16	86,89		AT	
		Produktivitas Bawang Merah	Kuintal/ha	80	80,2	79,7	80,12	73,6	71,4	81	100	TT		
		Produktivitas Cabai Rawit	Kuintal/ha	55	55	54,5	66,66	70	69,9	76,36	100	TT		
		Produktivitas Cabai Besar	Kuintal/ha	69,4	69,5	69	72,51	72,1	70,6	79,04	100	TT		
		Produktivitas Tembakau	Kuintal/ha	6,75	6,8	6,53	6,8	6,78	6,88	6,68	98,30		AT	
		Produktivitas Kopi Robusta	Kuintal/ha	7,2	7,25	6,9	6,82	6,79	7,15	6,93	95,60		AT	
		Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal/ha	6,9	7	6,7	6,17	6,2	6,11	5,90	84,29		AT	
		Produktifitas Cengkeh	Kuintal/ha	2,35	2,45	2,04	4,41	3,02	2,32	4,17	100	TT		
		Produktifitas Vanili	Kuintal/ha	2,93	2,95	2,83	0	2,09	2,93	3,02	100	TT		
		Produktivitas ternak sapi (data RPH dan qurban di TW III)	Kg/Ekor	177	178	176,65	176,8	177	177,2	177,40	99,89		AT	
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,7	13,7	13,66	13,67	13,7	13,7	13,7	99,93		AT	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,7	13,7	13,66	13,67	13,7	13,7	13,7	99,93		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	100	TT		
		Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,9	10,9	10,3	10,88	10,9	10,3	10,35	95,09		AT	
		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	100	TT		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,5	76,6	n.a	na		76,6	79,15	100	TT		
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	85	90	n.a	na	na	96,7	100	100	TT		
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	70	60	62,5	84,3	83	100	100	TT		
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,25	40,30	n.a	na		41,2	41,45	100		AT	
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,83	0,98	n.a	0,59	0,68	0,81	1,03	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			23	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERTANIAN							97,02	10	13	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.4.4 Urusan Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Perdagangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.169
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perdagangan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERDAGANGAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,5	20	20,35	20,35	20,14	20,14	20,14	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERDAGANGAN							100	1	0	0
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	67	67	-	54	50	50	66,67	99,50		AT	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	60	70	27,68	28,55	29,12	29,59	62,27	88,96		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	90	90	-	70,05	98,71	64,45	105,58	100	TT		
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	32	34	18,63	18,7	18,46	13,17	53,27	10	TT		
2	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	%	68,37	68,41	66,84	66,58	66,3	69,32	98,08	100	TT		
3	Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	2,32	2,56	-	0	20,42	32,09	27,80	100	TT		
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	90	95	350	7,98	39,9	79,02	101,1	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			7	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN							98,35	5	2	0

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.4.5 Urusan Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diukur dengan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.170
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perindustrian s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : PERINDUSTRIAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	26	27	26,83	27,21	27,47	27,47	27,47	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERINDUSTRIAN							100	1	0	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Perencanaan dan pengembangan industri	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	33	35	29,29			18,46	64,62	100	TT		
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	4,77	5,30	-			2,09	9,92	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			2	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERINDUSTRIAN							100	2	0	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.4.6 Urusan Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diukur dengan 1 (satu) program. Hasil evaluasi terhadap target indikator kinerja daerah Bidang Trasmigrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.171

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Transmigrasi s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG : TRANSMIGRASI													
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Calon Transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			1	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG TRANSMIGRASI							100	1	0	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2022 (data diolah)

2.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.5.1 Perencanaan

Bidang perencanaan pembangunan ini diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan 6 (enam) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d. 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN													
		INDIKATOR SASARAN												
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,1	4,2	n.a	n.a	n.a	4,5	4,5	100	TT		
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	89,00	90,00	n.a	98,48	86,60	92,35	98,66	100	TT		
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 1	Level 2	n.a	n.a	Level 1	Level 2	Level 3	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARA N							100	3	0	0
		INDIKATOR PROGAM												
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu	%	90,00	95,00	75	100	94,81	87,22	100	100	TT		
		Tingkat Konsistensi				90								

2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90,00	90,00		96,12	96,55	100	91,94	100	TT		
		Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	90	90	90	95,10	94,92	100	95,74	100	TT		
		Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	90	90	90	93,53	96,82	100	90,54	100	TT		
		Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	%	90	90	90	93,50	96,43	100	98,80	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		6	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100	6	0	0

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022 (data diolah)

2.2.5.2 Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan ini diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 2 (dua) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d. 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	n.a	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100	1	0	0
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100	100	TT		
		Persentase Hasil Krenova yang Dikembangkan	%	60,00	65,00	42,85	66,67	100,00	100,00	100	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR BIDANG		2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100	1	0	0

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022 (data diolah)

2.2.5.3 Kepegawaian

Bidang kepegawaian ini diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 (dua) indikator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.174

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepegawaian s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS CAPAIAN		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG KEPEGAWAIAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	angka indeks	50,07	50,09	51,73	51,7	50,03	51,24	53,13	100	TT		
		Indeks Sistem Merit	Angka Indeks	0,51	0,61	n.a	0	0	0,259	0,482	79,02			UK
JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								89,51	1	0	1
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	99,81	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	80	80	95,17	77,48	76,38	90,33	86,51	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS CAPAIAN		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	47	48	44,79	45,81	46,79	46,96	42,09	87,70		AT	
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,2	0,2	0,17	0,22	0,25	0,2	0,02	100	TT		
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	90	100	100	100	86,67	14,29	15,87			UK
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95	95	100	100	100	100	100	100		AT	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	*%*	*100*	*100*	n.a	n.a	n.a	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		9	RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM								87,95	7	1	1

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas masih 1 (satu) indikator sasaran berstatus upaya keras yaitu indikator *Indeks Merit System,* faktor penghambat belum tercapai dikarenakan belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pelaksana manajemen PNS) Indikator program yaitu tersebut. Indikator program yang masih bersatus perlu upaya keras yaitu Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN. Indikator tersebut belum mencapai target dikarenakan kasus terjadi pada akhir triwulan IV sehingga pada bulan tersebut masih dalam tahap penyelesaian.

2.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan ini diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 (dua) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.175
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pendidikan dan Pelatihan s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS CAPAIAN		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	32	35	35,63	37,91	27,08	25,08	30,13	86,08		AT	
		Persentase ASN yang memenuhi kompetensi diklat teknis dan fungsional	%	13,5	18	10	4,87	7,36	14,57	16,50	91,64		AT	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		2	RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM								88,86	0	2	0

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022 (data diolah)

2.2.5.5 Keuangan

Bidang keuangan ini diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan 6 (enam) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.176
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Keuangan s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	BIDANG KEUANGAN													
		FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN												
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	15	n.a	15,12	16,79	18,67	16,69	100	TT		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,4	79,5	n.a	n.a	n.a	49,87	62,75	78,93			UK
		JUMLAH INDIKATOR SASARAN	2								89,46	1	0	1
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	100		97,83	96,49	99,77	99,73	99,73		AT	

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	89,96		100	100	100	100	100	TT		
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100		0,57	0,86	100	42,86	42,86			UK
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	n.a	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase realisasi keuangan	%	93	93	n.a	94,57	93,68	89,00	87,61	94,20		AT	
2	Program pengelolaan Keuangan daerah	Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90	90	n.a	95,74	85,11	89,13	97,83	100	TT		
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	TT		
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	86,31	88,1	79,76	80,95	81,55	84,52	100	100	TT		
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,9	99,1	95,45	98,55	78,75	78,83	88,21	89,01		AT	
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,96	1,27	3,56	1,14	####	0,70	1,94	100	TT		
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	95	99,87	98,91	100	103,54	96,35	100	TT		
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	95	93,54	100	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			14	RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							94,70	10	3	1

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan status upaya keras yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Faktor penghambat dari indikator ini adalah Perencanaan penganggaran dari RMPJD sampai pada APDB sudah tidak sesuai jadwal (dimensi 1) sehingga mempengaruhi nilai pada dimensi 3 yaitu ketepatan waktu. Alternatif dalam rangka mengatasi masalah dari indikator ini adalah Penyusunan perencanaan dari RMPJD sampai pada APDB berkesinambungan dan tepat waktu. Pada saat pengisian aplikasi harus duduk bersama antara Bappeda, BPKPAD dan kominfo selaku PPID sehingga ada kesesuaian data. Untuk indikator program ada 1 (satu) indikator dengan upaya keras yaitu Persentase dokumen penganggaran tepat waktu. Faktor penghambat dari indikator ini adalah keterlambatan penetapan

RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetaoan RKPD dan KUA/PPAS kabupaten Temanggung. Alternatif dalam rangka mengatasi masalah dari indikator ini adalah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH

2.2.6.1 Sekretariat Daerah

Bidang Sekretariat Daerah ini diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.177
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Sekretariat Daerah s.d Tahun 2022

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
BIDANG : PEMERINTAHAN														
	INDIKATOR SASARAN													
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3,45	3,50	n.a	3,35	3,35	3,35	3,35	95,71		AT	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	angka	20	25	n.a	0	0	50	100	100	TT		
3	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	nilai	BB	BB	CC	B	B	B	B	91,07		AT	
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							95,59	1	2	0

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	INDIKATOR PROGRAM													
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	100	100	62,74	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	100	93,33	83,33	100	100	100	100	TT		
3		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	95	90,00	95,00	100	100	100	TT		
4	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	88	90	80	48,40	89,00	89,31	90,95	100	TT		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	%	30	30	n.a	28,57	16	27,27	60	100	TT		
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	n.a	86	59,78	82,22	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90	90	n.a	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	75	75	n.a	100	100	100	100	100	TT		
6	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	95,95	85,52	100	100	100	TT		
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66,7	80	n.a	66,67	50	50	75	62,50			UK
7	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	n.a	100	100	100	100	100	TT		
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit kerja tepat waktu	%	100	100	n.a	100	100	100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
9		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	92	95	n.a	96	97	96	100	100	TT		
10	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Prosentase pengadaaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
11	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	-	33,89	30,07	100	100	100	TT		
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	50	100	n.a	0	0	18,13	96,51	96,51		AT	
		Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	TT		

NO	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	TT		
		Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP	%	70,20	74,50	n.a	58,70	58,70	100	100	100	TT		
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	TT		
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		21	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							94,05	19	1	1

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas Indikator yang masih upaya keras yaitu Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP. Faktor penghambat dari indikator ini adalah laporan keuangan BUMD belum sesuai standar akuntansi. Alternatif dalam rangka mengatasi masalah dari indikator ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2.2.6.2 Sekretariat DPRD

Bidang Sekretariat DPRD ini diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 3 (tiga) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.178
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Sekretariat DPRD s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d. 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,00	91,50	93,75	73,08	90,48	80,00	88,89	97,15		AT	
JUMLAH INDIKATOR SASARAN		1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								97,15	0	1	0
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	18,75	15,38	14,29	10,00	27,78	100	TT		
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	93,98	99,82	100,00	100,00	100	100	TT		
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	57	58	42,16	74,83	78,86	82,16	88,15	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM								100	3	0	0

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2022 (Data Diolah)

2.2.7 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Pengawasan ini diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.179
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pengawasan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
		INDIKATOR SASARAN												
1		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	3,95	3,34	3,92	3,92	3,61	4,06	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA-RATA INDIKATOR SASARAN							100	1	0	0

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	n.a	100	100	100	100	100	TT		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	42	46	-	n.a	n.a	35,21	80,28	100	TT		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	17	23	-	n.a	n.a	12,37	38,17	100	TT		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	31	48	-	n.a	n.a	15,46	91,17	100	TT		
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,15	3,3		3,045	3,045	3,045	3,008	91,15		AT	
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	%	40	60	-	n.a	n.a	40	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		(WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)												
		Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	-	n.a	n.a	100	100	100	TT		
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	81,77	81,97	Angka	n.a	n.a	78,70	77,73	94,39		AT	
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	-	n. a	n. a	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			9	RATA-RATA INDIKATOR PROGRAM							98,39	7	2	0

Sumber : Inspektorat, 2022 (data diolah)

2.2.8 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang kewilayahan ini diimplementasikan oleh Kecamatan dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.180
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kewilayahan s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		INDIKATOR SASARAN												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Keputusan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	%	83,50	84,00	n.a	77,86	82,29	84,30	84,12	99,02	10	10	0
		Temanggung		83,50	84,00		81,68	82,58	85,20	85,20	100	TT		
		Tembarak		83,50	84,00		84,33	84,83	85,75	85,75	100	TT		
		Pringsurat		83,50	84,00		82,66	82,58	83,00	83,00	98,81		AT	
		Kaloran		83,50	84,00		82,66	82,58	83,00	83,50	99,40		AT	
		Parakan		83,50	84,00		71,83	85,97	81,02	81,02	96,45		AT	
		Bulu		83,50	84,00		82,9	82,53	84,90	84,9	100	TT		
		Kedu		83,50	84,00		n.a	83,00	88,39	88,39	100	TT		
		Kandangan		83,50	84,00		82,66	82,58	85,97	83,87	99,85		AT	
		Candiroto		83,50	84,00		71,83	81,25	87,38	84,87	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA S.D. 2022					CAPAIAN		STATUS	
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	(%)	TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ngadirejo		83,50	84,00		71,83	81,25	87,38	88,41	100	TT		
		Jumo		83,50	84,00		81,08	90,52	90,52	85,75	100	TT		
		Wonoboyo		83,50	84,00		84	84,19	84,22	84,22	100	TT		
		Kranggan		83,50	84,00		71,83	71,83	83,07	84,38	100	TT		
		Bejen		83,50	84,00		71,83	78,19	84,08	85,5	100	TT		
		Kledung		83,50	84,00		na	79,95	81,46	81,46	96,98		AT	
		Bansari		83,50	84,00		n.a	82.95	79,91	82	97,62		AT	
		Tlogomulyo		83,50	84,00		79,53	83,06	83,06	83,84	99,81		AT	
		Selopampang		83,50	84,00		75	82,41	80,71	80,71	96,08		AT	
		Gemawang		83,50	84,00		na	81,50	82,33	83,50	99,40		AT	
		Tretep		83,50	84,00		71,83	83,47	83,47	83,99	99,99		AT	
JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN			1	RATA-RATA INDIKATOR SASARAN							97,73	10	10	0
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	96,8	95,86	96,66	98,42	98,94	98,98	0	20	0
		Temanggung		100	100		99,90	96,87	99,91	98,99	98,99		AT	
		Tembarak		100	100		99,40	99,34	99,56	98,63	98,63		AT	
		Pringsurat		100	100		97,23	95,63	99,72	99,68	99,68		AT	
		Kaloran		100	100		99,36	99,34	98,11	99,64	99,64		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA				CAPAIAN S.D 2022	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	(%)	TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Parakan		100	100		97,41	99,23	99,76	99,76	99,76		AT	
		Bulu		100	100		99,64	93,04	99,86	98,94	98,94		AT	
		Kedu		100	100		94,28	99,41	99,68	98,71	98,71		AT	
		Kandangan		100	100		96,73	95,31	99,76	98,86	98,86		AT	
		Candiroto		100	100		97,39	96,66	99,79	98,82	98,82		AT	
		Ngadirejo		100	100		87,47	97,50	99,76	98,79	98,79		AT	
		Jumo		100	100		99,40	99,39	99,62	99,68	99,68		AT	
		Wonoboyo		100	100		95,84	99,24	99,57	98,82	98,82		AT	
		Kranggan		100	100		100	99,52	99,70	98,80	98,80		AT	
		Bejen		100	100		89,94	99,38	99,48	99,48	99,48		AT	
		Kledung		100	100		97	96,00	99,10	99,01	99,01		AT	
		Bansari		100	100		97,82	99,70	99,78	98,81	98,81		AT	
		Tlogomulyo		100	100		98,84	96,01	99,72	98,80	98,80		AT	
		Selopampang		100	100		96,83	96,28	99,61	98,76	98,76		AT	
		Gemawang		100	100		98,4	99,21	99,60	98,79	98,80		AT	
		Tretep		100	100		72,47	76,19	76,39	95,17	95,17		AT	
2	Program Penyelenggaraan pelayanan Publik Pemerintah dan	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	99,28	98,78	99,19	93,27	93,27	11	9	0
		Temanggung		100	100	100	93,22	93,89	93,44	93,14	93,14		AT	
		Tembarak		100	100	100	100	100	100	99,96	99,96		AT	
		Pringsurat		100	100	100	99,24	96,98	99,68	96,47	96,47		AT	

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kaloran		100	100	100	100	100	96,68	99,09	99,09		AT	
		Parakan		100	100	100	97,73	91,49	97,89	97,37	97,37		AT	
		Bulu		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kedu		100	100	100	97,73	100	100	100	100	TT		
		Kandangan		100	100	100	100	100	99,10	95,77	95,77		AT	
		Candiroto		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Ngadirejo		100	100	100	100	97,69	100	99,23	99,23		AT	
		Jumo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Wonoboyo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kranggan		100	100	100	97,63	95,63	96,93	95,39	95,39		AT	
		Bejen		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kledung		100	100	100	100	100	100	97,92	97,92		AT	
		Bansari		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Selopampang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Gemawang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tretep		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Progrram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	80,77	89,34	99	100	100	20	0	0
		Temanggung	%	100	100	100	100	66,67	100	100	100	TT		
		Tembarak		100	100	100	100	84,62	100	100	100	TT		
		Pringsurat		100	100	100	7,14	100	100	100	100	TT		
		Kaloran		100	100	100	7,14	14,00	100	100	100	TT		
		Parakan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bulu		100	100	100	84,21	100	100	100	100	TT		
		Kedu		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kandangan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Candiroto		100	100	100	100	71,43	100	100	100	TT		
		Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Jumo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Wonoboyo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kranggan		100	100	100	100	91,67	100	100	100	TT		
		Bejen		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kledung		100	100	100	100	100	92,31	100	100	TT		
		Bansari		100	100	100	0	100	100	100	100	TT		
		Tlogomulyo		100	100	100	100	75,00	91,67	100	100	TT		
		Selopampang		100	100	100	17,00	83,33	100	100	100	TT		
		Gemawang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tretep		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	89,93	86,3	86,3	84,07	84,07	1	2	1
		Temanggung	%	100	100	100	73,42	54,49	68,69	65,48	65,48			UK
		Parakan		100	100	100	86,30	90,79	90,79	90,79	90,79		AT	
		Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kranggan		100	100	100	100	100	85,71	90,14	90		AT	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	99,815	99,8	98	98,18	98,18	2	2	0
		Temanggung	%	100	100	100	100	100	93,37	93,97	93,97		AT	
		Parakan		100	100	100	99,26	99,26	98,73	98,73	98,73		AT	
		Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kranggan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	89,55	88,00	99,76	100	100	20	0	0
		Temanggung	%	100	100	100	100	100	95,24	100	100	TT		
		Tembarak		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Pringsurat		100	100	100	100	80,00	100	100	100	TT		
		Kaloran		100	100	100	100	80,00	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Parakan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bulu		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kedu		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kandangan		100	100	100	0	100	100	100	100	TT		
		Candiroto		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Jumo		100	100	100	100	0	100	100	100	TT		
		Wonoboyo		100	100	100	90,91	100	100	100	100	TT		
		Kranggan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bejen		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kledung		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bansari		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Selopampang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Gemawang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tretep		100	100	100	0	0	100	100	100	TT		
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	79,75	79,75	75	91,43	91,85	94,23	94,72	100	20	0	0
		Temanggung	%	80,00	80,00		94,33	95,02	90,32	90,43	100	TT		
		Tembarak		80,00	80,00		74,42	74	87	93,15	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pringsurat		80,00	80,00		96,85	96,85	96,85	96,85	100	TT		
		Kaloran		80,00	80,00		100	96,53	96,53	96,53	100	TT		
		Parakan		80,00	80,00		94,24	97,41	100,00	100	100	TT		
		Bulu		80,00	80,00		93,06	85,44	85,44	85,44	100	TT		
		Kedu		80,00	80,00		92,05	92,79	91,95	94,92	100	TT		
		Kandangan		80,00	80,00		77,59	89,47	87,34	87,35	100	TT		
		Candiroto		80,00	80,00		97,69	97,69	87,71	87,71	100	TT		
		Ngadirejo		80,00	80,00		99,13	98,71	98,73	98,73	100	TT		
		Jumo		80,00	80,00		93,7	98,03	98,03	98,03	100	TT		
		Wonoboyo		80,00	80,00		98,55	99,28	100	100	100	TT		
		Kranggan		80,00	80,00		100	94,92	100	100	100	TT		
		Bejen		75,00	75,00		87,04	85,45	100	100	100	TT		
		Kledung		80,00	80,00		100	100	100	100	100	TT		
		Bansari		80,00	80,00		83,33	83,33	100	100	100	TT		
		Tlogomulyo		80,00	80,00		90,91	94,37	94,37	94,37	100	TT		
		Selopampang		80,00	80,00		71,58	80,68	80,68	80,68	100	TT		
		Gemawang		80,00	80,00		84,15	84,15	100	100	100	TT		
		Tretep		80,00	80,00		100	92,47	92,47	100	100	TT		
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0,85	0,80	n.a	25,07	25,21	20,06	30,00	100	20	0	0

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Temanggung	%	1,00	1,00		100	100	100	100	100	TT		
		Tembarak		1	1		0,63	1	0	0	100	TT		
		Pringsurat		0,3	0		0	0	0	0	100	TT		
		Kaloran		0,3	0		0	0	0	0	100	TT		
		Parakan		1	1		0	0	0	0	100	TT		
		Bulu		1	1		0	0,44	0	0	100	TT		
		Kedu		1	1		100	100	100	100	100	TT		
		Kandangan		1	1		0	0,48	0	0	100	TT		
		Candiroto		1	1		0	0,0	0	0	100	TT		
		Ngadirejo		1	1		0	0,0	0	0	100	TT		
		Jumo		1	1		0	1,30	0	0	100	TT		
		Wonoboyo		1	1		0,76	0	0,68	100	100	TT		
		Kranggan		1	1		100	100	0,51	100	100	TT		
		Bejen		0,3	0		0,65	0,65	0,00	0	100	TT		
		Kledung		0	0		99,28	100	100	100	100	TT		
		Bansari		1	1		0	0	0	0	100	TT		
		Tlogomulyo		1	1		0	0,71	0	0	100	TT		
		Selopampang		1	1		100	100	100	100	100	TT		
		Gemawang		1	1		0	0	0	0	100	TT		
		Tretep		1	1		0	0	0	0	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	92,50	100	100	100	100	20	0	0
		Temanggung		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tembarak		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Pringsurat		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kaloran		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Parakan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bulu		100	100	100	0	100	100	100	100	TT		
		Kedu		100	100	100	50	100	100	100	100	TT		
		Kandangan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Candiroto		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Jumo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Wonoboyo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kranggan		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bejen		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Kledung		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Bansari		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Selopampang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Gemawang		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		Tretep		100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM			9	RATA-RATA INDIKATOR PROGRAM							97,17	104	43	1

Sumber : Kecamatan, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas masih ada 1 indikator yang masih berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik di Kecamatan Temanggung. Hal ini dikarenakan kelengkapan data masih belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan masyarakat kurang proaktif dalam mengajukan usulan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan data secara lengkap sesuai kondisi di lapangan dan lebih aktif mengajukan usulan sesuai kondisi lapangan.

2.2.9 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Bidang pemerintahan umum ini diimplementasikan oleh dengan 2 (dua) indikator sasaran dan 10 (sepuluh) indikator program. Evaluasi terhadap target indikator kinerja bidang pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.181
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemerintahan Umum s.d Tahun 2022

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	FUNGSI PENUNJANG													
		INDIKATOR SASARAN :												
1		Indeks Gotong-Royong	Angka	4,21	4,22	n.a	4,15	0,83	4,33	4,33	100	TT		
2		Indeks Toleransi	Angka	4,17	4,19	n.a	0,828	4	4,5	4,5	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100	*2*	*0*	*0*
		INDIKATOR PROGRAM :												
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62	62		0,00	0,00	0,00	63,75	100	TT		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10	10		1,04	0,00	4,84	55,71	100	TT		
2	Program Peningkatan	Persentase pemilih yang	%	87	87		87,21	87,21	87,21	87,21	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	mengguna kan hak pilihnya												
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30		25,00	25,00	25,00	32,73	100	TT		
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30		33,33	33,33	33,33	33,33	100	TT		
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100		0	0	0	100	100	TT		
4	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100		100	100	100	100	100	TT		
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertangani nya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100		100	100	100	100	100	TT		

No	BIDANG /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI					CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS		
				2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	10		0,35	63,32	36,68	11,1	100	TT		
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35	35		0	0	0	36	100	TT		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			10	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100	10	0	0

Sumber : Bangkesbangpol, 2022 (data diolah)

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Kemampuan pengelolaan APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi keuangan daerah digambarkan melalui beberapa indikator, antara lain: Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, Persentase Belanja Langsung, Persentase Belanja Tidak Langsung, Persentase Belanja Operasi, Persentase Belanja Tak Terduga, Persentase Belanja Transfer, Persentase Belanja Modal, dan Opini BPK. Realisasi APBD merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Keuangan daerah menjadi bagian penting dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu sehingga dapat menghitung proyeksi penganggaran di masa yang akan datang melalui kecenderungan (tren) realisasi keuangan setiap tahun. Analisis keuangan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah antara lain pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi perubahan struktur APBD, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dana perimbangan yang awalnya merupakan salah satu

dari sumber pendapatan daerah menjadi pendapatan transfer dan belanja yang awalnya dibagi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan struktur APBD ini dimulai pada tahun 2021.

3.1 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018 - 2022

Kinerja keuangan masa lalu merupakan gambaran keuangan daerah pada tahun sebelumnya dalam periode tertentu. Dalam hal penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah menggunakan periode selama lima tahun terakhir. Pembahasan kinerja keuangan masa lalu meliputi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber dana utama dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dari sisi fisik maupun non fisik. Pendapatan Daerah terbagi atas 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDS). Secara proporsi pendapatan Pemerintah Kabupaten Temanggung belum ideal, karena pendapatan terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan yang besarannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat dengan berbagai upaya ekstensifikasi pendapatan maupun intensifikasi pendapatan. Berikut adalah data pendapatan Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 yang tersaji dalam gambar 3.1 :

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Temanggung Tahun 2018-2022

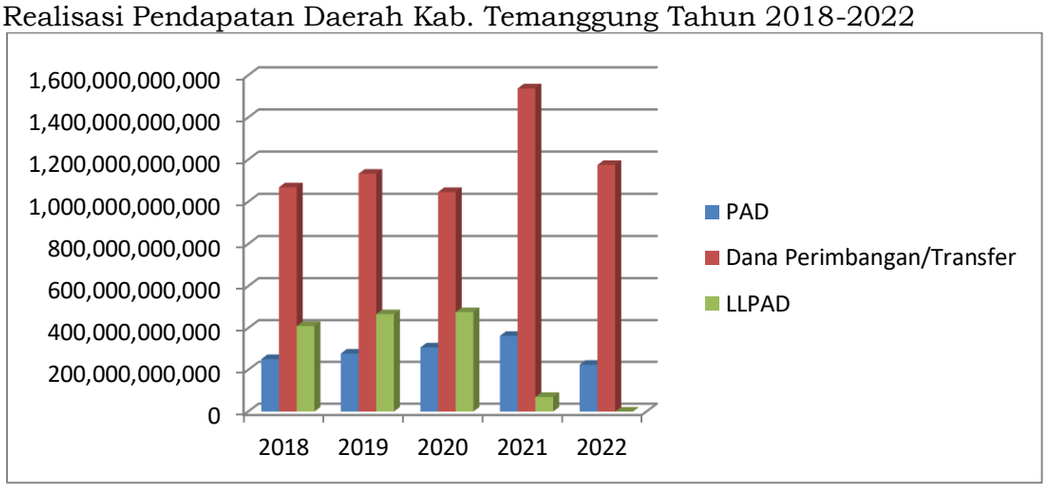

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan terbagi atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut sampai dengan Tahun 2020. Pada penyusunan APBD tahun Anggaran 2021 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka struktur Pendapatan Daerah berubah menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut tabel pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 hingga Tahun 2022 yang tersaji dalam 2 tabel sesuai dengan Permendagri yang dipedomani saat penyusunan APBD.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020
(Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**252.019.934.778**	**278.313.775.793**	**307.488.084.365**
4.1.1	Pajak Daerah	40.401.374.470	53.424.094.046	47.887.604.813
4.1.2	Retribusi Daerah	12.702.535.344	16.189.001.249	8.436.169.882
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.857.473.731	14.571.585.064	18.800.858.165
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.058.551.233	194.129.095.434	232.363.451.505
4.2	**Dana Perimbangan**	**1.069.110.356.426**	**1.133.246.263.266**	**1.046.567.778.773**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.075.868.022	45.213.757.136	52.880.696.555
4.2.2	Dana Alokasi Umum	793.485.677.000	828.948.502.000	762.027.309.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	225.548.811.404	259.084.004.130	231.659.773.218
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**410.105.575.957**	**466.823.784.623**	**476.792.590.209**
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.886.863.125	69.668.754.583	71.778.390.000
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	94.537.698.462	102.323.566.038	94.165.118.971
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	41.768.103.000	56.311.496.000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	20.888.403.370	11.118.713.002	6.655.760.238
4.3.6	Dana Desa	213.042.611.000	241.944.648.000	247.881.825.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	**1.731.235.867.161**	**1.878.383.823.682**	**1.830.848.453.347**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Tahun 2022
(Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Uraian	Jumlah	
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**363.128.342.571**	**308.705.886.109**
4.1.01	Pajak Daerah	52.832.020.942	74.191.559.232
4.1.02	Retribusi Daerah	9.400.033.763	9.643.158.066
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.633.082.917	21.426.146.839
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	281.263.204.949	203.445.021.972
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.537.846.595.458**	**1.585.778.027.969**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.385.928.637.379	1.448.787.218.335
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.917.958.079	136.990.809.634
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**70.031.052.000**	**1.000.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	571.300.000	1.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.459.752.000	0
	Jumlah Pendapatan Daerah	**1.971.005.990.029**	**1.895.483.914.078**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besaran PAD masih sangat jauh dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Secara ringkas berikut ini disajikan persentase PAD Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap jumlah Pendapatan Daerah.

Tabel 3.3
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap
Total Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2018	252.019.934.778	1.731.235.867.161	14,56
2019	278.313.775.793	1.878.383.823.682	14,82
2020	307.488.084.365	1.830.848.453.347	16,79
2021	363.128.342.571	1.971.005.990.029	18,42
2022	308.705.886.109	1.895.483.914.078	16,29

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 terhadap total pendapatan daerah mencapai rata-rata 16,18 persen. Komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar pada tahun 2022 bersumber dari Dana Perimbangan/Dana Transfer dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 83,66 persen, dan sisanya dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,47 persen. Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang tertinggi selalu bersumber dari dana perimbangan/transfer. Dana transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan daerah karena masih adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sektor wisata yang merupakan potensi daerah yang seharusnya menjadi salah satu kontributor penyumbang PAD yang cukup tinggi selama ini masih dikelola oleh BUMDes;

2. Sistem pemungutan pajak dan retribusi belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
3. Pada tahun 2018 terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, yang awalnya merupakan kewenangan daerah kemudian menjadi kewenangan provinsi;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali.

3.1.2 Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Tahun 2020, sehingga struktur APBD yang digunakan sampai dengan tahun 2020 adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sejak Tahun Anggaran 2021, penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga struktur Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Proporsi Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari Belanja Operasi masih tetap dominan dalam postur APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung hingga Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 secara lengkap terinci sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020
(Sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006)

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.064.943.026.117**	**1.138.907.139.719**	**1.213.289.339.823**
5.1.1	Belanja Pegawai	648.743.166.731	676.939.397.280	671.072.509.371
5.1.2	Belanja Bunga	727.484.616	0	0
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	64.113.369.020	58.690.565.000	68.809.177.692
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.741.555.000	22.228.162.500	7.162.252.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.972.398.083	5.259.573.640	6.484.504.647
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	337.484.252.667	375.789.441.299	409.802.732.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	160.800.000	0	49.958.164.113
5.2	**Belanja Langsung**	**605.366.259.491**	**702.126.495.551**	**569.915.609.275**
5.2.1	Belanja Pegawai	80.088.353.744	101.536.316.068	122.876.914.568
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339.506.112.227	377.340.991.916	344.955.640.184
5.2.3	Belanja Modal	185.771.793.520	223.249.187.567	102.083.054.523
	Total Jumlah Belanja	**1.670.309.285.608**	**1.841.033.635.270**	**1.783.204.949.098**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Struktur Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung digunakan hingga Tahun 2020, sehingga data yang disajikan pada tabel berikut ini hanya selama 3 (tiga) tahun. Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Persentase Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2018	605.366.259.491	1.670.309.285.608	36,24
2019	702.126.495.551	1.841.033.635.270	38,14
2020	569.915.609.275	1.783.204.949.098	31,96

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Proporsi Belanja Langsung Kabupaten Temanggung terhadap total Belanja Daerah mencapai rata-rata 35,45 persen. Belanja Langsung pada 3 (tiga) tahun terakhir bergerak secara fluktuatif. Pada Tahun 2020 belanja langsung mengalami penurunan proporsi sebesar 6,18 persen dari tahun sebelumnya akibat adanya kebijakan Pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sehingga dana perimbangan yang ditransfer ke Pemerintah Daerah mengalami penurunan. Kebijakan tersebut juga diadopsi oleh Pemerintah Daerah yang banyak mengalihkan anggaran kegiatan Perangkat Daerah untuk penanganan pandemi Covid-19.

Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2018	1.064.943.026.117	1.670.309.285.608	63,76
2019	1.138.907.139.719	1.841.033.635.270	61,86
2020	1.213.289.339.823	1.783.204.949.098	68,04

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Temanggung terhadap total Belanja Daerah mencapai rata-rata 64,55 persen. Persentase Belanja Tidak Langsung selama 3 (tiga) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 68,04 persen dan terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 61,86 persen. Peningkatan secara signifikan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh pergeseran anggaran ke Belanja Tak Terduga sebesar Rp49.958.164.113,00.untuk penanganan covid-19.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Tahun 2022
(Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Uraian	Jumlah	
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
5.1	**Belanja Operasi**	**1.232.194.234.987**	**1.295.686.749.508**
5.1.01	Belanja Pegawai	681.107.527.533	710.731.632.791.
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.561.990.957	492.943.591.757
5.1.05	Belanja Hibah	89.546.728.997	85.102.866.541
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.977.987.500	6.908.658.419
5.2	**Belanja Modal**	**235.995.614.408**	**247.089.139.440**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	58.015.740	3.908.713.890
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.015.739.240	95.059.501.590
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.641.790.248	102.564.048.329
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.894.050.162	39.768.985.023
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.309.106.018	5.766.890.608
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	76.913.000	21.000.000
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.779.500.000**	**0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.779.500.000	0
5.4	**Belanja Transfer**	**403.999.817.899**	**415.972.520.858**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.656.124.477	7.936.684.862
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.343.693.422	408.035.835.996
Total Jumlah Belanja		**1.877.969.167.294**	**1.958.748.409.806**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Tabel 3.8
Persentase Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah

Kode	Uraian	Realisasi TA 2021		Realisasi TA 2022	
		Rp.	%	Rp.	%
5	**Belanja Daerah**	**1.877.969.167.294**		**1.958.748.409.806**	
5.1	Belanja Operasi	1.232.194.234.987	65,61	1.295.686.749.508	66,15
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.779.500.000	0,31	0	0
5.4	Belanja Transfer	403.999.817.899	21,51	415.972.520.858	21,24

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Belanja Operasi memiliki persentase terbesar dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung, karena dalam Belanja Operasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Tahun 2022 realisasi belanja tidak terduga sebesar 0% karena tidak ada belanja darurat yang harus dicukupi.

Pada pos Belanja Modal persentase terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2018	185.771.793.520	1.670.309.285.608	11,12
2019	223.249.187.567	1.841.033.635.270	12,13
2020	102.083.054.523	1.783.204.949.098	5,72
2021	235.995.614.408	1.877.969.167.294	12,57
2022	247.089.139.440	1.958.748.409.806	12,61

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Proporsi Belanja Modal Kabupaten Temanggung terhadap total Belanja Daerah mencapai rata-rata 10,83 persen. Persentase Belanja Modal selama 5 (lima) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 12,61 persen dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,72 persen. Belanja Modal sebagai komponen belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan menjadi salah satu sumber daya yang dapat digunakan dalam jangka menengah hingga jangka panjang dalam melaksanakan pembangunan. Secara ideal

belanja modal dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah untuk menunjang kegiatan, namun demikian kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pada tahun 2020 proporsi realisasi belanja modal hanya 5,72% dari realisasi belanja langsung. Tingginya kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, menjadikan sebagian besar belanja modal dialihkan untuk penanganan Covid-19 maupun tidak dapat dilaksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Realisasi belanja modal pada tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk belanja peralatan Rumah Sakit sebagai upaya pemenuhan standar penanganan covid-19.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali, pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2021.

2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pinjaman daerah ini merupakan penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat yang berupa Dana Bergulir.

Mulai Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan rekomendasi BPK-RI, Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak lagi memasukkan retensi/jaminan pemeliharaan sebagai komponen penerimaan pembiayaan, tetapi retensi/jaminan pemeliharaan yang akan dicairkan pada tahun berikutnya merupakan komponen aset lancar berupa Kas yang Dibatasi Penggunannya.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022 menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai Pilkada yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan secara bertahap di Tahun 2022 dan Tahun 2023.

2) Pembayaran Pokok Utang

Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran utang pemerintah daerah pada Pemerintah atas kelebihan dana yang disalurkan oleh Pemerintah dan hutang kepada Pihak Ketiga. Pembayaran tersebut berupa pengembalian biaya pelayanan penanganan Covid-19 pada RSUD Temanggung yang bersumber dari APBN berdasar notisi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan hutang jaminan pemeliharaan atau retensi Tahun Anggaran 2021 yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 secara jelas tercantum pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2020
(Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**87.224.723.479**	**91.129.078.155**	**124.692.881.503**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	66.478.733.932	85.356.884.193	123.395.072.830
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.607.678.240	0	0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	33.430.200	55.857.857	50.489.211
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Pihak	5.104.881.107	5.716.336.105	1.247.319.462
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**62.794.420.839**	**5.084.193.737**	**9.888.176.647**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.436.607	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.472.951.092	0	4.171.840.542
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	31.205.062.058	0	0
6.2.5	Pengeluaran Perhitungan Pihak		5.084.193.737	5.716.336.105
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak	11.090.971.082	0	0
Jumlah Pembiayaan Netto		**24.430.302.640**	**86.044.884.418**	**114.804.704.856**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Tabel 3.11
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 dan Tahun 2022
(Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Uraian	Jumlah	
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA2022
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**162.455.516.962**	**254.301.081.892**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	162.448.209.105	254.248.460.087
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.307.857	52.621.805
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.243.879.610**	**10.629.679.120**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.243.879.610	5.629.679.120
Jumlah Pembiayaan Netto		**161.211.637.352**	**243.671.402.772**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022 porsi terbesar pos penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan penghematan belanja daerah dan SiLPA BLUD. Pada penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan atas pekerjaan pada tahun berjalan yang akan dibayarkan pada pihak ketiga di tahun berikutnya. Pencairan dana cadangan digunakan untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah.

Sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran pokok utang daerah kepada Pemerintah Pusat yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Rekening pengeluaran pihak ketiga digunakan untuk membayar retensi/jaminan pemeliharaan, namun sejak Tahun Anggaran 2022 atas rekomendasi BPK-RI Retensi/Jaminan Pemeliharaan bukan lagi menjadi komponen pengeluaran pembiayaan namun menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada

sisi aktiva. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Pemerintah Pusat atas kelebihan pembayaran penanganan pandemi Covid-19.

3.2 Analisis Rasio

Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pihak yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangan. Analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengelola keuangan daerah.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah, antara lain:

a. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau dengan anggaran sebelumnya. Rumus rasio ini sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD}\ x\ 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kriteria efektivitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Kriteria Rasio Efektivitas PAD

No.	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1.	X > 100%	Efektif
2.	X = 100%	Efektivitas Berimbang
3.	X < 100%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun (2012)

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 –Tahun Anggaran 2022

Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	261.511.805.053	252.019.934.778	96,37	Tidak Efektif
2019	260.464.334.440	278.313.775.793	106,85	Efektif
2020	251.969.585.751	307.488.084.365	122,03	Efektif
2021	271.757.079.716	363.128.342.571	133,62	Efektif
2022	305.939.643.656	308.705.886.109	100,90	Efektif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Pada Tahun Anggaran 2018 capaian realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mencapai target yaitu pada Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sehingga menyebabkan rasio efektifitasnya masuk dalam kategori tidak efektif. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan PAD, sehingga di tahun-tahun selanjutnya target PAD tercapai bahkan melampaui target. Pada Tahun 2021 rasio efektifitasnya sangat tinggi akibat dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang melonjak tinggi akibat dari Pandemi Covid-19 yaitu pendapatan pada RSUD Kabupaten Temanggung.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$Rasio\ Efisiensi\ Keuangan\ Daerah = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.14
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

No.	Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
1.	X < 100%	Efisien
2.	X = 100%	Efisiensi Berimbang
3.	X > 100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun (2012)

Tabel 3.15
Penghitungan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 –Tahun Anggaran 2022

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	1.670.309.285.608	1.731.235.867.161	96,48	Efisien
2019	1.841.033.635.270	1.878.383.823.682	98,01	Efisien
2020	1.783.204.949.098	1.830.848.453.347	97,40	Efisien
2021	1.877.969.167.294	1.971.005.990.029	95,28	Efisien
2022	1.958.748.409.806	1.895.483.914.078	103,34	Tidak Efisien

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2022, mengalami penurun dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun secara target realisasi pendapatan tercapai, namun angka tersebut masih di bawah realisasi belanja daerah secara keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan oleh upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mendorong realisasi belanja dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap strategi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah meningkat. Selain hal tersebut, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih mengalami *refocusing* sehingga asumsi-asumsi Pendapatan Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.16
Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018 - Tahun Anggaran 2022
(Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja
2018	1.670.309.285.608	1.141.192.556.722	68,32
2019	1.841.033.635.270	1.236.735.432.764	67,18
2020	1.783.204.949.098	1.214.876.493.815	68,13
2021	1.877.969.167.294	1.232.194.234.987	65,61
2022	1.958.748.409.806	1.295.686.749.508	66,15

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Realisasi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Temanggung masih tergolong tinggi, hal ini digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai upaya menjalankan roda perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.17
Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018–Tahun Anggaran 2022 (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2018	1.670.309.285.608	185.771.793.520	11,12
2019	1.841.033.635.270	223.249.187.567	12,13
2020	1.783.204.949.098	102.083.054.523	5,72
2021	1.877.969.167.294	235.995.614.408	12,57
2022	1.958.748.409.806	247.089.139.440	12,61

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Besaran ideal untuk persentase belanja operasi dan belanja modal pada APBD belum ada ukuran pastinya, semua tergantung kemampuan dan prioritas Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada kedua jenis belanja tersebut. Namun demikian untuk persentase belanja modal perlu ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

$$Rasio\ Pertumbuhan\ (r) = \frac{Pn - P0}{P0}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

Po = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Tabel 3.18
Penghitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018 –2020

Keterangan	Tahun			Rata-Rata
	2018	2019	2020	
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	252.019.934.778	278.313.775.793	307.488.084.365	
Pertumbuhan PAD (%)	-18,38	10,43	10,48	0,84
Dana Perimbangan	1.069.110.356.426	1.133.246.263.266	1.046.567.778.773	
Pertumbuhan Dana Perimbangan (%)	0,77	6,00	-7,65	-0,29
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	410.105.575.957	466.823.784.623	476.792.590.209	
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (%)	-4,12	13,83	2,14	3,95
Pendapatan	1.731.235.867.161	1.878.383.823.682	1.830.848.453.347	
Pertumbuhan Pendapatan (%)	2,75	8,5	-2,53	2,91
BELANJA				
Belanja Tidak Langsung	1.064.943.026.117	1.138.907.139.719	1.213.289.339.823	
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (%)	-1,63	6,95	6,53	3,95
Belanja Langsung	605.366.259.491	702.126.495.551	569.915.609.275	
Perumbuhan Belanja Langsung (%)	16,01	15,98	-18,83	4,39
Belanja	1.670.309.285.608	1.841.033.635.270	1.783.204.949.098	
Pertumbuhan Belanja (%)	5,56	10,22	-3,14	4,21

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Tabel 3.19
Penghitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2021 –2022

Keterangan	Tahun		Rata-Rata
	2021	2022	
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	363.128.342.571	308.705.886.109	
Pertumbuhan PAD (%)		-14,99	-14,99
Pendapatan Transfer	1.537.846.595.458	1.585.778.027.969	
Pertumbuhan Pendapatan Transfer (%)		3,12	3,12
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.031.052.000	1.000.000.000	
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)		-98,57	-98,57
Pendapatan	1.971.005.990.029	1.895.472.010.883	
Pertumbuhan Pendapatan (%)		-3,83	-3,83
BELANJA			
Belanja Operasi	1.232.194.234.987	1.295.686.749.508	
Pertumbuhan Belanja Operasi (%)		5,15	5,15
Belanja Modal	235.995.614.408	247.089.139.440	
Perumbuhan Belanja Modal (%)		4,70	0
Belanja Tidak Terduga	5.779.500.000	0	
Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga (%)		-100	-100
Belanja Tranfer	403.999.817.899	415.972.520.858	
Pertumbuhan Belanja Transfer (%)		2,96	2,96
Belanja	1.877.969.167.294	1.958.748.409.806	
Pertumbuhan Belanja (%)		4,30	4,30

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$Rasio\ Kemandirian\ Keuangan\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.20
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

No.	Persentase Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1	0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
2	25% - 50%	Rendah	Konsultatif
3	50% - 75%	Sedang	Partisipatif
4	75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Oppier (2013)

1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 3.21
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 – Triwulan III 2022

TA	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2018	252.019.934.778	1.069.110.356.426	23,57	Rendah Sekali	Instruktif
2019	278.313.775.793	1.133.246.263.266	24,56	Rendah Sekali	Instruktif
2020	307.488.084.365	1.046.567.778.773	29,38	Rendah	Konsultatif
2021	363.128.342.571	1.537.846.595.458	23,61	Rendah Sekali	Instruktif
2022	308.693.982.914	1.585.778.027.969	19,47	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat rendah sekali jika diukur dengan indikator Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 24,5%. Ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dari Pemerintah masih sangat besar, hal tersebut karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2020 selain karena kenaikan PAD Kabupaten Temanggung yaitu dari sisi pendapatan BLUD, Pendapatan Transfer yang diterima dari Pemerintah juga mengalami penurunan akibat dari *refocusing* anggaran guna penanganan pandemi Covid-19.

3.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2018 – 2022

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yakni tekait Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Keenam urusan ini harus mendapat prioritas utama dalam penganggaran Daerah. Berikut alokasi anggaran belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tahun 2018-2022 Kabupaten Temanggung :

1. Belanja Pendidikan

Tabel 3.22
Proporsi Belanja Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-Tahun 2022

No	Tahun	Pendidikan	Total Belanja	Persentase
1	2018	498.249.820.377	1.670.309.285.608	29,83
2	2019	525.662.068.538	1.841.033.635.270	28,55
3	2020	521.762.542.156	1.783.204.949.098	29,26
4	2021	567.725.324.119	1.877.969.167.294	30,23
5	2022	658.470.122.039	2.163.271.983.090	30,44

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor

pendidikan dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Temanggung telah mengalokasikan anggaran untuk belanja pendidikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Belanja Kesehatan

Tabel 3.23
Proporsi Belanja Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-Tahun 2022

No	Tahun	Kesehatan	Total Belanja	Persentase
1	2018	283.733.805.783	1.670.309.285.608	16,99
2	2019	363.094.517.152	1.841.033.635.270	19,72
3	2020	328.556.454.440	1.783.204.949.098	18,43
4	2021	393.024.001.332	1.877.969.167.294	20,93
5	2022	535.197.651.461	2.163.271.983.090	24,74

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.24
Proporsi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten TemanggungTahun 2018-Tahun 2022

No	Tahun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total Belanja	Persentase
1	2018	131.545.211.615	1.670.309.285.608	7,88
2	2019	73.276.055.586	1.841.033.635.270	3,98
3	2020	23.062.219.527	1.783.204.949.098	1,29
4	2021	106.375.879.349	1.877.969.167.294	5,66
5	2022	73.628.394.462	2.163.271.983.090	3,40

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Berdasar Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Minimal di Kabupaten Temanggung, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada urusan pekerjaan umum yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator jumlah warga yang dapat terpenuhi kebutuhan pokok air minum dan terlayani pengolahan air limbah domestik. Dukungan anggaran pada belanja urusan pekerjaan umum tersebut untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.25
Proporsi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten TemanggungTahun 2018-2022

No	Tahun	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Total Belanja	Persentase
1	2018	3.432.724.072	1.670.309.285.608	0,21
2	2019	22.498.672.295	1.841.033.635.270	1,22
3	2020	15.907.254.791	1.783.204.949.098	0,89
4	2021	28.772.644.261	1.877.969.167.294	1,53
5	2022	30.185.522.234	2.163.271.983.090	1,40

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung diprioritaskan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 yaitu terkonsentrasi pada fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana maupun yang terdampak program Pemerintah. Pendanaan program-program yang mendukung SPM tersebut diupayakan tercukupi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung demi tercapainya target dan indikator yang telah ditetapkan.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.26
Proporsi Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Temanggung Tahun 2018- Tahun 2022

No	Tahun	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Total Belanja	Persentase
1	2018	4.791.157.414	1.670.309.285.608	0,29
2	2019	3.727.539.483	1.841.033.635.270	0,20
3	2020	4.939.755.092	1.783.204.949.098	0,28
4	2021	15.554.157.367	1.877.969.167.294	0,83
5	2022	14.353.909.933	2.163.271.983.090	0,66

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Prioritas mitigasi bencana, penanganan bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat umum menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal pada Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Temanggung. Kenaikan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan besarnya prioritas Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pencegahan, penanganan, dan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat

umum. Selain itu pelayanan kepada masyarakat akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga terakomodasi dalam pendanaan pada Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban.

6. Urusan Sosial

Tabel 3.27
Proporsi Belanja Urusan Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – Tahun 2022

No	Tahun	Sosial	Total Belanja	Persentase (%)
1	2018	6.027.581.462	1.670.309.285.608	0,36
2	2019	10.477.664.345	1.841.033.635.270	0,57
3	2020	4.984.696.025	1.783.204.949.098	0,28
4	2021	7.532.088.129	1.877.969.167.294	0,40
5	2022	27.804.660.046	2.163.271.983.090	1,28

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022 (diolah)

Pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan cukup tinggi pada Belanja Urusan Sosial, hal ini sebagai akibat dari peraturan baru yang mengatur penggunaan DBH CHT untuk bantuan sosial bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Prioritas untuk memenuhi Pelayanan Standar Minimal untuk menangani rehabilitasi sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3.4 PROYEKSI DAN KEBIJAKAN PENDANAAN TAHUN 2024-2026

3.4.1 Proyeksi dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah terus berusaha untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber pendapatan keuangan daerah. Besar kecilnya PAD tergantung pada sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh setiap daerah, serta potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pemasukan. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila pendapatan yang bersumber dari PAD tinggi dan tidak bergantung dengan pemerintah pusat. Ditengah kondisi kedepan yang penuh ketidakpastian dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19 , maka untuk meningkatkan PAD menjadi sebuah tantangan yang cukup berat. Selain itu terdapat isu-isu yang sedang berkembang saat ini yaitu akan terjadi resesi dikarenakan adanya inflasi yang tinggi

akibat kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Berdasar pada realisasi pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 hingga Tahun 2022 yang masih rendah, maka untuk meningkatkan pendapatan di Tahun 2024 hingga Tahun 2026 perlu fokus terhadap produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak aktivitas ekonomi daerah mengingat potensi alam yang dimiliki Kabupaten Temanggung yang sangat baik. Peningkatan promosi pariwisata melalui even-even yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung akan berdampak pada kunjungan pada tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Temanggung.

Kemudahan dan pelayanan prima pada calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Temanggung sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan kinerja pada BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai potensi peningkatan PAD diharapkan mampu menjadi alternatif pendapatan yang potensial bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berikut adalah tabel pendapatan Tahun 2023 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 hingga Tahun 2026.

Tabel 3.28
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

Kode	Uraian	2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.920.329.183.722**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**303.730.612.722**
4.1.01	Pajak Daerah	69.510.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.468.040.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.922.771.777
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	202.829.800.945
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.616.598.571.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.475.532.443.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.240.191.603.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	67.611.875.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	779.535.375.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.890.309.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	274.154.044.000
4.2.01.05	Dana Desa	235.340.840.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.066.128.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	127.861.128.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.205.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0

Tabel 3.29
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024 – Tahun 2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.907.088.079.808**	**1.912.627.120.028**	**1.918.265.546.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**308.705.886.109**	**314.244.926.329**	**319.883.352.301**
4.1.01	Pajak Daerah	74.191.559.232	75.522.761.678	76.877.849.589
4.1.02	Retribusi Daerah	9.643.158.066	9.816.183.080	9.992.312.644
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.426.146.839	21.810.591.368	22.201.933.899
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	203.445.021.972	207.095.390.203	210.811.256.169
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.598.382.193.699**	**1.598.382.193.699**	**1.598.382.193.699**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.476.238.465.520	1.476.238.465.520	1.476.238.465.520
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.240.191.603.000	1.240.191.603.000	1.240.191.603.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	67.611.875.000	67.611.875.000	67.611.875.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	779.535.375.000	779.535.375.000	779.535.375.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.890.309.000	118.890.309.000	118.890.309.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	274.154.044.000	274.154.044.000	274.154.044.000
4.2.01.05	Dana Desa	236.046.862.520	236.046.862.520	236.046.862.520
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.143.728.179	122.143.728.179	122.143.728.179
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.143.728.179	122.143.728.179	122.143.728.179
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Mengacu pada realisasi pendapatan Tahun 2022, proyeksi pendapatan Tahun 2024 menggunakan asumsi capaian realisasi pendapatan Tahun 2022. Kesadaran wajib pajak ke depan diharapkan semakin meningkat sehingga akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Peningkatan retribusi daerah melalui optimalisasi retribusi pada pasar-pasar daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan di masing-masing pasar daerah sehingga wajib retribusi merasa memperoleh timbal balik yang sepadan dengan retribusi yang mereka setorkan ke Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selain itu promosi tempat-tempat wisata di wilayah Kabupaten Temanggung terutama yang belum banyak dikenal masyarakat luas diharapkan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Temanggung.

Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sumbernya adalah dari dividen atas penyertaan modal pada BUMD. Pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD tersebut untuk memperoleh hasil yang maksimal. Seiring membaiknya perekonomian daerah dan naiknya daya beli masyarakat, maka di tahun-tahun mendatang BUMD dapat berperan lebih untuk menjadi penggerak roda perekonomian Kabupaten Temanggung terutama pada sektor perbankan untuk UMKM dan melalui ekstensifikasi usaha yang terus dilakukan oleh BUMD. Sumber terbesar pada komponen Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan BLUD, selain itu ada pada pendapatan bunga dan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah.

Berdasarkan realisasi Tahun 2022, rata-rata pelampauan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebesar 1,79%. Pelampauan atas target anggaran inilah yang dijadikan asumsi proyeksi target pendapatan di Tahun 2025 dan Tahun 2026 berdasar proyeksi target pendapatan Tahun 2024 seperti yang tersaji pada tabel 3.29. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat pada masing-masing komponen pendapatan, meskipun diperkirakan tidak semua masing-masing

komponen pendapatan akan tercapai namun secara umum akan mencapai target yang diproyeksikan.

Pada Pendapatan Transfer tidak semua komponen pendapatan diproyeksikan mengalami kenaikan. Kondisi neraca ekonomi negara sangat berpengaruh pada persentase alokasi dana yang disalurkan ke Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil diproyeksikan tetap seperti halnya DBH CHT, hal ini didasarkan pada alokasi Tahun 2023 yang meningkat cukup signifikan karena bertambahnya besaran alokasi DBH CHT yang disalurkan ke Pemerintah Daerah sehingga untuk tahun-tahun berikutnya diproyeksikan tidak ada peningkatan. Dana Alokasi Umum diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun 2023 sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan untuk tahun 2025 dan 2026 juga diproyeksikan tidak ada peningkatan karena murni kebijakan Pemerintah Pusat tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Daerah. DAU terbagi atas DAU yang sudah ditentukan penggunaannya dan DAU yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk DAK diproyeksikan tidak mengalami kenaikan, besaran alokasi DAK ke Pemerintah Daerah berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Provinsi, namun diproyeksikan menurun karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan dari PKB dan BBNKB langsung masuk ke penerimaan Kabupaten/Kota tanpa melalui mekanisme bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Temanggung sementara memproyeksikan tetap sesuai Tahun 2023, dan akan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Provinsi di masa mendatang. Besaran pendapatan Bantuan Keuangan akan dicantumkan dalam penganggaran setelah alokasi dari Pemerintah Provinsi diundangkan, sehingga dalam proyeksi masih dianggap nihil. Pada pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih dicantumkan nihil karena bersifat insidental, artinya hanya akan muncul ketika terjadi kerja sama atau kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga atau pihak lainnya.

Proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2025 dan Tahun 2026, masih menggunakan pola yang sama dengan proyeksi

pendapatan daerah pada Tahun 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di masa mendatang. Harapan meningkatnya perekonomian nasional dan stabilnya ekonomi secara global memunculkan optimisme Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kemandirian dalam pembangunan daerah di masa yang akan datang.

3.4.2 Proyeksi dan Kebijakan Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah sesuai hasil audiensi dengan OPD merujuk pada kebutuhan OPD dan prioritas pembangunan daerah, belanja daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut proyeksi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 hingga Tahun 2026.

Tabel 3.30
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024 – Tahun 2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
5	**BELANJA**	**2.042.869.639.239**	**1.993.179.992.824**	**2.003.543.845.061**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.436.291.794.782**	**1.383.473.253.757**	**1.390.690.620.024**
5.1.01	Belanja Pegawai	812.107.222.160	816.167.758.271	820.248.597.062
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.464.605.798	517.036.928.827	519.622.113.471
5.1.05	Belanja Hibah	102.155.970.708	42.666.750.562	43.180.084.314
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.563.996.116	7.601.816.097	7.639.825.177
5.2	**BELANJA MODAL**	**205.127.132.792**	**206.152.768.456**	**207.183.532.299**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.536.889.059	74.914.573.504	75.294.146.372
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.145.012.959	63.460.738.024	63.778.041.714
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.240.637.368	60.541.840.555	60.844.549.758
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.121.718.023	6.152.326.613	6.183.088.246
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.875.383	83.289.760	83.706.209
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**398.950.711.665**	**401.053.970.611**	**403.169.692.738**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.383.471.730	8.533.894.476	8.687.016.223
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.567.239.935	392.520.076.135	394.482.676.515

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada Tahun 2024 yang berpijak pada alokasi belanja daerah pada Tahun 2023 mengalami pertumbuhan kurang lebih sebesar 0,5%. Komponen Belanja Pegawai mengalami kenaikan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada ASN untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan beban belanja pegawai karena kenaikan jabatan, pangkat, golongan, dan tunjangan bagi ASN dan Non ASN di

lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung dicukupi dengan proyeksi kenaikan pada belanja pegawai. Belanja yang bersifat rutin pada komponen Barang dan Jasa sebagai wujud fasilitasi pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masyarakat. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menganggarkan belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada, sehingga nilai belanja hibah pada Tahun Anggaran 2024 cukup tinggi.

Pada komponen Belanja Modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung meningkatkan sarana dan pra sarana pembangunan daerah. Semakin besar alokasi belanja modal yang diimbangi dengan menurunnya belanja operasi merupakan salah satu indikator meningkatnya pertumbuhan pembangunan di suatu daerah. Belanja Tidak Terduga sebagai dana pemyediaan jika terjadi kedaruratan bencana, dialokasikan tetap tanpa ada penambahan mengingat kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung menganggarkan dana kedaruratan di masing-masing OPD pengampu. Belanja Bagi Hasil merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menganggarkan sebesar 10% dari pendapatan retribusi dan pajak setiap tahunnya, sehingga apabila proyeksi pendapatan pajak dan retribusi naik maka belanja bagi hasil juga mengalami kenaikan. Upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa, diwujudkan dalam Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, baik Bantuan Keuangan dari Provinsi, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun Belanja Bantuan Khusus yang merupakan sinergitas legislatif dan eksekutif berupa aspirasi melalui anggota DPRD.

3.4.3 Proyeksi dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung memanfaatkan SiLPA untuk menutup defisit APBD. Melalui pos pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat berinvestasi pada BUMD yang dimiliki dengan harapan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui dividen, selain itu Pembiayaan Daerah dapat juga digunakan untuk Dana Cadangan

penyelenggaraan Pilkada. Berikut proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 hingga Tahun 2026.

Tabel 3.31
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2024 – Tahun 2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.007.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000		
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Pembiayaan Netto	**20.007.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Secara lengkap proyeksi APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.32. Defisit anggaran akan dibiayai dengan SiLPA Tahun lalu, jika nilai SiLPA tidak dapat menutup defisit anggaran maka Pemerintah Kabupaten Temanggung akan mengambil kebijakan pemilahan alokasi anggaran sesuai dengan arah prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.32
Proyeksi APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – Tahun 2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.907.088.079.808**	**1.912.627.120.028**	**1.918.265.546.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**308.705.886.109**	**314.244.926.329**	**319.883.352.301**
4.1.01	Pajak Daerah	74.191.559.232	75.522.761.678	76.877.849.589
4.1.02	Retribusi Daerah	9.643.158.066	9.816.183.080	9.992.312.644
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.426.146.839	21.810.591.368	22.201.933.899
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	203.445.021.972	207.095.390.203	210.811.256.169
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.598.382.193.699**	**1.598.382.193.699**	**1.598.382.193.699**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.476.238.465.520	1.476.238.465.520	1.476.238.465.520
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.240.191.603.000	1.240.191.603.000	1.240.191.603.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	67.611.875.000	67.611.875.000	67.611.875.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	779.535.375.000	779.535.375.000	779.535.375.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.890.309.000	118.890.309.000	118.890.309.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	274.154.044.000	274.154.044.000	274.154.044.000
4.2.01.05	Dana Desa	236.046.862.520	236.046.862.520	236.046.862.520
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.143.728.179	122.143.728.179	122.143.728.179
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.143.728.179	122.143.728.179	122.143.728.179
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
5	**BELANJA**	**2.042.869.639.239**	**1.993.179.992.824**	**2.003.543.845.061**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.436.291.794.782**	**1.383.473.253.757**	**1.390.690.620.024**
5.1.01	Belanja Pegawai	812.107.222.160	816.167.758.271	820.248.597.062
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.464.605.798	517.036.928.827	519.622.113.471
5.1.05	Belanja Hibah	102.155.970.708	42.666.750.562	43.180.084.314
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.563.996.116	7.601.816.097	7.639.825.177

Kode	Uraian	2024	2025	2026
5.2	**BELANJA MODAL**	**205.127.132.792**	**206.152.768.456**	**207.183.532.299**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.536.889.059	74.914.573.504	75.294.146.372
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.145.012.959	63.460.738.024	63.778.041.714
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.240.637.368	60.541.840.555	60.844.549.758
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.121.718.023	6.152.326.613	6.183.088.246
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.875.383	83.289.760	83.706.209
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**398.950.711.665**	**401.053.970.611**	**403.169.692.738**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.383.471.730	8.533.894.476	8.687.016.223
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.567.239.935	392.520.076.135	394.482.676.515
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(135.781.559.431)**	**(80.552.872.796)**	**(85.278.299.061)**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.007.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Pembiayaan Netto	**20.007.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**(115.774.559.431)**	**(80.545.872.796)**	**(85.271.299.061)**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum.

4.1.1.Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah sifatnya permasalahan makro dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang wajib menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Temanggung ke depan. Permasalahan daerah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan msayarakat dan aspek daya saing sampai tiga tahun ke depan, yaitu sebagai berikut.

1. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan

   Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan akan mewujudkan produktivitas kerja yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan.

Tantangan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah untuk menghadapi revolusi industri 4.0, revolusi *society* 5.0 dan disruption sehingga mampu bersaing dan beradaptasi secara cepat.

Sampai dengan saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Temanggung masih kurang optimal, hal ini ditandai capaian Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung yaitu 70,77 pada tahun 2022 masih berada pada posisi 4 dari 5 Kabupaten/Kota di kawasan Purwomanggung, dan masih di bawah capaian provinsi dan nasional.

Kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dapat dilihat salah satunya dari angka rata-rata lama sekolah (RLS), capaian pada tahun 2022 mencapai 7,41 naik 0,16 poin dibandingkan capaian tahun 2021. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (7,75) dan capaian Nasional (8,54). Angka rata-rata lama sekolah yang belum optimal diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2018-2022.

Kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan ditandai dengan usia harapan hidup yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi, gizi masyarakat, dan munculnya penyakit. Masih adanya angka kematian ibu (75,32%) dan angka kematian bayi (13,23%) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas kehidupan perempuan dan anak dari sisi kesehatan ibu dan bayi masih perlu ditingkatkan dan program-program untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta pemenuhan hak anak senantiasa harus tetap dikedepankan.

Kualitas sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan juga masih perlu ditingkatkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selama ini masih adanya gap antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja sehingga belum semua angkatan kerja

bisa mendapatkan lapangan pekerjaaan. Hal ini ditandai dengan adanya pengangguran sejumlah 12.024 orang berdasarkan data BPS tahun 2022.

2. Ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor pengungkit, penanganan kemiskinan dan didukung penguatan infrastruktur dasar yang memadai.

   Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid 19, hal ini ditandai dari capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada posisi 4 dari 5 Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung, capaian angka kemiskinan pada posisi 13 di kawasan Jawa Tengah, ditambah dengan adanya kebijakan kenaikan BBM yang menyebabkan terjadinya inflasi.

   Perekonomian Kabupaten Temanggung senantiasa terus didorong sehingga mampu memulihkan kondisi minimal sama dengan sebelum terjadinya covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,34 sedangkan sebelum covid-19 mencapai angka 5,2. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sektor pertanian yang kontribusinya termasuk besar (23,41%) mampu mencapai pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan sektor lainnya sehingga akan mengungkit nilai pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini diasumsikan akan bisa tercapai melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas petani dan menumbuhkan petani modern/millennial sehingga mempunyai daya saing tinggi.

   Kemiskinan juga masih menjadi perhatian penting, terutama kemiskinan ekstrim yang pada tahun 2024 harus tuntas. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Temangung adalah 9,33 dengan angka kemiskinan ekstrem 0,96. Kemiskinan melibatkan banyak sektor dan saling terkait satu sama lain sehingga dalam penanganannya harus melibatkan banyak sektor, banyak stakeholders dan terintegrasi satu sama lain.

Pemenuhan ketersediaan infraturktur dasar yang memadai di seluruh wilayah akan sangat mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya kesenjangan antar wilayah karena rendahnya ketimpangan. Infastruktur dasar antara lain adalah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, air bersih dan perumahan.

3. Penyelenggaraan pemerintah daerah masih harus ditingkatkan sehingga mampu melayani masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan terwujud kepuasan masyarakat.

   Menghadapi globalisasi, revolusi industri 4.0. revolusi *society* 5.0 dan *disruption* maka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan peradaban dunia saat ini. Dibutuhkan pemerintah daerah yang mampu menginisiasi dan menjadi katalisator bagi masyarakat dan daerahnya untuk beradaptasi sehingga tidak tertinggal dengan daerah lain, yaitu dalam pemanfaatan teknologi, inovasi, serta adanya perubahan peradaban modern yang serba digital. Masyarakat membutuhkan pelayananan pemerintah daerah yang cepat, murah, mudah, transparan, bebas akses dan bebas waktu.

   Penguatan reformasi birokrasi juga diperlukan sehingga terwujud aparatur pemerintah daerah yang melakukan pelayanan publik berbasis digital tanpa meninggalkan sisi kemanusiaannya. Pada tahun 2022 nilai indeks reformasi birokrasi termasuk kategori B, masih memerlukan beberapa upaya peningkatan sehingga nilainya meningkat. Indeks merit system (0,29), indeks profesionalitas ASN (52,81), nilai keterbukaan informasi publik 89,56 dan nilai IKPD 62,749 semuanya masih perlu ditingkatkan.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah

daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   a. Bidang Pendidikan
      - Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu sebesar 7,41 atau belum mencapai Wajar Dikdas sembilan tahun karena masih adanya angka putus sekolah SD sederajat 0,03% dan SMP sederajat 0,29%, yang mana masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) 6-18 tahun sejumlah 2.305 anak berdasarkan hasil koordinasi antara Bappeda, Dindukcapil, Dindikpora, dan Kemenag Temanggung pada 28 Oktober 2022. Hal ini disebabkan karena faktor motivasi anak, perhatian/persepsi orang tua siswa, memiliki kebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus), budaya, dan faktor ekonomi orang tua siswa.
      - Masih rendahnya persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat pada tahun 2022 tercapai sebesar 95,35% atau lebih rendah capaiannya dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 98,56%, yang disebabkan karena adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua.
      - Menurunnya persentase SMP yang terakreditasi minimal selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 tercapai sebesar 91,03%, tahun 2021 tercapai sebesar 88,75%, dan tahun 2022 tercapai sebesar 86,75%, hal ini terjadi disebabkan karena persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan, dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, masih ada keterbatasan kuota dan anggaran pelaksanaan akreditasi.
      - Masih rendahnya capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

pada tahun 2022 yaitu sebesar 18,92%. Hal ini disebabkan karena pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal minat dan motivasi belajarnya sangat rendah. Disamping itu ada yang merasa tidak butuh pendidikan (ijazah), dan ada beberapa yang sudah bekerja.

- Menurunnya persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) dari 40,31% pada tahun 2021 menjadi 39,59% di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena hampir semua satuan pendidikan PAUD dikelola oleh masyarakat dengan kemampuan manajerial dan finansial yang sangat terbatas.
- Belum maksimalnya jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2022 adalah sebesar 94,74%. Indikator ini merupakan indikator SPM sehingga target dan capaiannya harus 100%. Namun, di Kabupaten Temanggung belum mencapai target karena hampir semua satuan pendidikan PAUD dikelola oleh masyarakat dengan kemampuan manajerial dan finansial yang sangat terbatas.

b. Bidang Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2022 yaitu sebesar 75,32% yang disebabkan karena tingginya faktor risiko pada ibu hamil 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu banyak), ibu hamil memiliki riwayat penyakit, kurang optimalnya kunjungan nifas, dan belum maksimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam kasusu gawat darurat maternal dan deteksi kasus komplikasi persalinan.
- Masih tingginya angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2022 yaitu sebesar 13,23% yang disebabkan karena kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal, pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, kurangnya kelengkapan sarana prasarana penanganan

kegawatdaruratan asfiksi atau penyakit pada bayi, serta belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi.

- Masih tingginya Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,15%, hal ini disebabkan karena kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, belum lengkapnya sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan asfiksia atau penyakit pada bayi, belum optimalnya kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penganananan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan, serta belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi.
- Masih tingginya Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) yaitu sebesar 15,60%, yang disebabkan karena faktor risiko yang dialami oleh ibu pada saat kehamilan dan balita dengan infeksi meningitis, kelainan jantung, sesak nafas maupun kecelakaan serta tidak terdeteksinya penyakit penyerta sejak dini, BBLR (berat bayi lahir rendah), asfiksia, dan kelainan congenital.
- Belum optimalnya cakupan anak usia sekolah dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian tahun 2022 sebesar 82,05% yang disebabkan karena pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar baru dilakukan untuk kelas 3 dan kelas 4, pendampingan penjaringan kesehatan di sekolah belum dilakukan secara menyeluruh, dan pelaksanaan pemeriksaan tindak lanjut penjaringan masih belum optimal.
- Belum optimalnya persentase masyarakat Temanggung yang berusia produktif 15 s.d. 59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar yaitu pada tahun 2022 tercapai sebesar 89,07% dan usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 tercapai

sebesar 83,22%. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya kegiatan posbindu dan posyandu lansia, tidak semua Puskesmas melaksanakan evaluasi terkait capaian kegiatan di tahun sebelumnya, pelaporan dan pencatatan data skrining dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum terorganisasi dengan baik, serta kurangnya sosialisasi tentang Puskesmas Santun Lansia.

- Masih belum maksimalnya capaian fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama yang pada tahun 2022 tercapai sebesar 40% atau hanya 10 FKTP dari 25 FKTP yang sudah terakreditasi pratama. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penilaian akreditasi fasyankes tergantung regulasi dari pusat, *workshop* dan pembinaan untuk Puskesmas yang re-akreditasi belum optimal, penilaian akreditasi untuk klinik sulit dilaksanakan, serta adanya surat edaran Kemenkes Nomor HK 02.02/I/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu baru 69,04% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase.
   - Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman. Hingga tahun 2022, akses air minum baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 95,32% sedangkan untuk akses aman menggunakan layanan air minum dari PDAM yakni sebesar 18,19% pada tahun 2022.

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Masih adanya RTLH di Kabupaten Temanggung sampai akhir tahun 2022 sebanyak 11.421unit atau 5,25% dari total 217.652 unit rumah.

- Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan seluas 121,41 ha atau 4,55% dari total 2.495,69 ha luasan permukiman perkotaan yang perlu dilakukan penataan kawasan.
- Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman. Hingga tahun 2022, sanitasi baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 88,11% sedangkan untuk akses aman baru mencapai 2,5% berdasarkan perhitungan DPRKPLH tahun 2022.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   - Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dengan capaian tahun 2022 baru sebesar 60,64%, hal ini disebabkan karena Temanggung memiliki wilayah yang luas dengan topologi pegunungan dan memiliki model permukiman yang berkerumun dengan jalan lingkungan yang sempit sehingga terkadang sulit dalam menjangkau lokasi kebakaran, pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah, dan sarana prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum sesuai jangkauan wilayah.
   - Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu masih sebesar 43,75% yang disebabkan karena wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, dan jalan sempit, lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi, serta masih terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air *(groundtank)* di masing-masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

f. Bidang Sosial

- Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2022 berdasarkan data dari BPS mencapai angka sebesar 9,33%.
- Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mana pada tahun 2021 mencapai angka 100%. Namun, pada tahun 2022 angka capaian turun menjadi 64,30% dimana hal ini disebabkan oleh faktor masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan.
- Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperolah bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar ada penurunan capaian dari yang tadinya 100% pada tahun 2021 turun menjadi 61,70% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verifikasi oleh daerah.

2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

- Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi disebabkan rendahnya *skill* pencari kerja. Pada tahun 2022 hanya 71,43% pencari kerja yang telah mendapat pelatihan berbasis kompetensi.
- Masih adanya pengangguran yang ditunjukkan dengan angka TPT sebesar 2,54% pada tahun 2022 yang disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja, angkatan kerja yang belum terserap karena keterbatasan lapangan kerja.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan karena keterbatasan perempuan dalam memahami potensi diri yang ada dan kuatnya budaya patriarki dimana laki laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan.

- Belum optimalnya pemenuhan hak anak karena masih adanya anak terlantar, masih adanya kemiskinan, dan ketahanan keluarga yang kurang (pola asuh, *broken home*).
- Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dari 62,45% ke 66,41%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 56,87%, tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi 57,82%. Untuk tahun 2022, persentase tidak mengalami kenaikan, tetap pada posisi 57,82%, walaupun dengan jumlah angkatan kerja perempuan yang berbeda.
- Belum semua desa/kelurahan menerapkan komitmen desa/kelurahan sayang ibu dan bayi, yaitu capaian pada tahun 2022 baru 115 desa/kelurahan yang menerapkan komitmen tersebut atau sebesar 39,79%. Hal ini disebabkan karena masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan dan melahirkan menjadi urusan perempuan.
- Masih terdapat 4 kecamatan yang belum berpredikat kecamatan layak anak yaitu Kecamatan Tretep, Wonoboyo, Kledung, Bejen, sehingga persentase kecamatan dan kelurahan layak anak semakin meningkat dan sudah mencapai 80%. Hingga saat ini kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/kelurahan layak anak.

c. Bidang Pangan

- Ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung surplus tetapi masih ada potensi kerentanan disebabkan ada jeda masa panen sehingga diperlukan upaya-upaya agar kondisi tetap terjaga seperti melalui penyimpanan hasil panen di gudang

cadangan pangan.

- Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan yang berasal dari beras sehingga diperlukan pemahaman yang terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya diversifikasi pangan termasuk dibutuhkan sentuhan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan bahan pangan lokal tertentu.

d. Bidang Pertanahan

- Masih terjadinya konflik pertanahan di masyarakat yang disebabkan penguasaan dan tukar guling yang belum sepenuhnya selesai sehingga masih diperlukan pendampingan.

e. Bidang Lingkungan Hidup

- Masih tingginya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung yaitu seluas 10,280 Ha pada tahun 2022 dengan penanganan yang baru mencapai 1,75% dari luas lahan kritis yang ada, hal ini disebabkan tingginya alih fungsi lahan yang tidak semestinya (lahan tanaman keras ditanami tanaman semusim).
- Terjadinya kerusakan lingkungan karena pengaruh perubahan iklim sehingga mengakibatkan dampak yang beragam (kesehatan, kerusakan lingkungan, kebakaran, polusi, penurunan debit mata air, penurunan kualitas dan produktifitas pertanian).
- Terjadinya penurunan kualitas air, udara, dan tanah sebagai dampak berkembangnya industri ditunjukan dengan capaian IKLH pada tahun 2022 sebesar 69,86.

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- Pelayanan administrasi kependudukan yang berupa Kartu Identitas Anak masih rendah dengan capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 49,77%, hal ini disebabkan karena proses migrasi *database* dari SIAK Daerah ke *database* SIAK terpusat yang dalam proses migrasi dimaksud ada sebagian data yang tidak terekam di data pusat

sehingga capaian kepemilikan KIA rendah.

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Pemberdayaan masyarakat desa masih menjadi masalah karena sumber daya pengelola yang masih rendah, selain itu potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup sehingga pengembangan unit-unit usaha di desa masih perlu upaya keras agar menarik untuk dikembangkan.
   - Masih rendahnya jumlah desa yang berklasifikasi swasembada yaitu dari 266 desa di Kabupaten Temanggung hingga saat ini baru 81 desa yang sudah berklasifikasi swasembada atau sebesar 30,45%, hal ini disebabkan karena tidak semua desa melakukan *updating* isian data profil karena data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun. Selain itu, desa lebih fokus pada isian data Indeks Desa Membangun (IDM).

h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Masih adanya sasaran *unmetneed* pada tahun 2022 sebesar 11,47% atau 15.084 pasangan dari jumlah total 130.776 pasangan usia subur yang disebabkan karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.
   - Belum maksimalnya persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022 yang tercapai sebesar 33,85% atau hanya 66 kampung KB dari 195 desa yang memenuhi IDM. Capaian indikator ini tidak ada peningkatan tahun 2020, hal ini disebabkan karena potensi kader dalam mendukung program masih belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB.

i. Bidang Perhubungan
   - Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena terlalu banyaknya lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai sampai dengan Tahun 2022 baru mencapai 41,06%.

j. Bidang Komunikasi dan Informatika
   - Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada *blank spot* di wilayah Kabupaten Temanggung sehingga menghambat komunikasi. Masih terdapat 12 area publik yang belum mendapat fasilitas akses internet dari sejumlah 60 area publik yang ada.
   - Belum optimalnya ketersediaan jaringan intranet pada OPD, UPT (eks UPT), dan desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan dengan Dinkominfo, yaitu pada tahun 2022 menurun dari 348 OPD, UPT (eks UPT), dan desa/kelurahan menjadi 323 OPD, UPT (eks UPT), dan desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan dengan Dinkominfo atau dengan capaian sebesar 84,11%. Hal ini disebabkan karena sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, serta beberapa UPT sudah dihapus dan tidak lagi masuk dalam organisasi perangkat daerah sehingga tidak dialokasikan anggaran pembangunan jaringan internet di eks UPT tersebut.

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   - Banyak koperasi yang tidak aktif karena proses penghapusan koperasi yang sudah tidak beroperasi menunggu verifikasi dari Kementerian Koperasi UKM. Berdasarkan data tahun 2022, hanya terdapat 175 koperasi aktif (27,47%) dari 637 koperasi di Temanggung.
   - Banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas karena standar omset yang meningkat berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas ke Usaha Kecil adalah beromset Rp 2.000.000.000,- (dua miliar) sampai

dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) pertahun.

l. Bidang Penanaman Modal

- Masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) karena rendahnya minat terhadap lokasi yang ditawarkan. Persentase PMA terhadap keseluruhan investasi tahun 2022 hanya sebesar 19,69%, yaitu sebesar Rp 306,9 miliar.

m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Belum maksimalnya Indeks Prestasi Olahraga pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,97 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 3,31. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya lahan terbuka yang dimanfaatkan untuk olahraga, menurunnya jumlah sumber daya manusia olahraga, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga dan kebugaran.
- Masih rendahnya persentase prestasi olahraga yaitu sebesar 45,24% atau hanya 19 cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi dari 42 cabang olahraga yang ada. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19, minimnya *event* olahraga prestasi yang ada, minimya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga, serta belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mengembangkan prestasi atlet.

n. Bidang Statistik

- Belum optimalnya pengelolaan data sektoral dalam perwujudan satu data pemerintahan. Selain itu, data statistik terkait data makro daerah merupakan hasil dari statistik dasar yang merupakan kewenangan BPS, sehingga untuk ketersediaan data menunggu rilis data dari instansi tersebut, sementara OPD tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan secara mandiri.

o. Bidang Persandian

- Capaian tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2022 sebesar 4%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang sebesar 8,3%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peralatan dalam kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung yaitu tidak adanya peralatan berupa *personal computer* dengan spesifikasi memadai yang dapat digunakan untuk melaksanakan *Pentest* terhadap sistem atau aplikasi di daerah. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kemampuan SDM persandian dan keamanan komunikasi yang dapat melakukan kegiatan tersebut.

p. Bidang Kebudayaan

- Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung yang mana sejarah yang sudah dilestarikan pada tahun 2022 baru mencapai 6.61% yang disebabkan belum tergali dan terdokumentasikannya sejarah lokal di Kabupaten Temanggung serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung.

q. Bidang Perpustakaan

- Masih rendahnya peminjaman buku di perpustakaan dengan capaian tahun 2022 baru mencapai 86,13% yang disebabkan menurunnya pengunjung perpustakaan di desa/kelurahan, sekolah, TBM dan Perpustakaan daerah dan kurang updatenya koleksi perpustakaan.
- Belum optimalnya upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Temanggung dengan capaian tahun 2022 yakni 99,12% karena masih terbatasnya penulis yang mengangkat tema budaya etnis nusantara di Kabupaten Temanggung.

r. Bidang Kearsipan

- Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan

yang ditandai dengan Indeks Manajemen Arsip pada tahun 2022 baru mencapai angka sebesar 62,46 dari target 67,00 yang disebabkan kurangnya pemahaman peraturan-peraturan kearsipan, kurangnya komitmen kepala OPD dan tidak tersedianya anggaran pengawasan kearsipan.

3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan
   a. Bidang Perikanan
      - Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 masih jauh dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional pada posisi angka 24,34 kg/kapita, sedangkan tingkat konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 36,21 kg/kapita dan untuk tingkat nasional sebesar 55,16 kg/kapita, yang disebabkan oleh tingginya harga ikan dibandingkan bahan makanan lain.
      - Produktivitas ikan masih belum optimal yang terlihat dari capaian produktivitas ikan tahun 2022 antara lain ikan nila sebesar 5,4 kg/m^2, ikan lele 12,6 kg/m^2 serta ikan mas sebesar 5,8 kg/m^2 yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) belum maksimalnya intensifikasi budidaya akibat penurunan kualitas pakan dan naiknya harga pakan, kualitas benih yang tidak stabil, dan kualitas air yang menurun; 2) tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar; 3) perubahan iklim mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan dan meningkatkanya serangan penyakit.
   b. Bidang Pariwisata
      - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal yakni baru mencapai 1,53% pada tahun 2022 karena masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi covid-19.
      - Pengembangan desa wisata di Kabupaten Temanggung masih belum maksimal yakni pada tahun 2022 baru mencapai 8,65% yang disebabkan kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas dan ketertarikan desa dalam pengembangan destinasi/desa wisata.

- Kabupaten Temanggung masih belum menjadi tujuan utama wisatawan yang ditunjukkan dari lama tinggal wisatawan selama periode 2018-2022 hanya 1 (satu) hari yang disebabkan masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan sarana prasarana pendukung wisata sehingga pengunjung destinasi wisata masih terbatas dan didominasi oleh wisatawan lokal.

c. Bidang Pertanian

- Ketersediaan protein per kapita di kabupaten Temanggung cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 62,59 gram/hari akibat luas tanam pangan serealia (padi dan jagung) berkurang karena adanya serangan hama. Sedangkan berkurangnya ketersediaan protein hewani disebabkan penurunan produksi ikan, ternak serta penurunan produksi telur.
- Produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) belum optimal karena serangan hama penyakit tanaman, kondisi cuaca/iklim ekstrim dan sarana prasarana pertanian yang kurang memadai (benih, pupuk, ketersediaan air).
- Produktivitas beberapa jenis tanaman hortikultura pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya misalnya produktivitas cabai rawit pada tahun 2021 sebesar 7,057 ton/ha berkurang menjadi 5,67 ton/ha pada tahun 2022 yang disebabkan oleh faktor cuaca terutama curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan serangan penyakit pada tanaman hortikultura, adanya serangan hama penyakit, naiknya harga saprodi serta kebijakan impor yang kurang berpihak kepada petani kecil.
- Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak mendukung, hama penyakit tanaman serta pengelolaan yang belum maksimal. Produktifitas tanaman tembakau berkurang dari 0,688 ton/ha pada tahun 2021

menjadi 0,668 ton/ha pada tahun 2022 karena pengaruh iklim (cuaca dan angin) tidak mendukung, *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) belum diterapkan serta tata niaga yang belum terkelola dengan baik. Produktivitas kopi robusta mengalami penurunan dari 0,71 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 0,69 ton/ha pada tahun 2022 karena sebagian tanaman sudah tua dan tidak produktif, kurangnya kegiatan untuk peningkatan produksi, serta adanya serangan hama penyakit. Sedangkan produktifitas tanaman cengkeh mengalami kondisi yang fluktuatif yang disebabkan oleh serangan penyakit Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC).

- Produktivitas ternak mengalami stagnansi disebabkan oleh tingginya pemotongan ternak dibawah bobot maupun dibawah umur dan adanya ketimpangan antara harga saprodi/nak dengan harga penjualan.
- Sarana alat mesin pertanian utama masih belum dikelola dengan baik karena belum semua kelompok tani membentuk struktur pengelolaan Alsintan berupa Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- Penanganan penyakit hewan masih belum optimal karena ketersediaan obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim.
- Kelembagaan kelompok petani yang naik kelas masih rendah yang terlihat dari data 2022 yang mana terdapat 28 kelompok tani yang naik kelas atau hanya sebesar 1,03% dari 2.709 kelompok tani yang ada karena masih banyak kelompok tani yang tidak aktif.

d. Bidang Perdagangan

- Kualitas sarana prasarana pasar tidak memadai yang mana pada tahun 2022 baru 66,67% kondisi pasar daerah yang berada dalam kondisi baik yang disebabkan tidak adanya perbaikan sarana prasarana secara rutin serta cuaca ekstrim

yang memperparah kerusakan.

- Rendahnya ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan yaitu pada tahun 2022 masih mencapai 62,67% yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati zona dagang.
- Rendahnya ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai peruntukan yakni pada tahun 2022 mencapai 53,27% dari jumlah PKL yang ada. Hal ini disebabkan peningkatan perkembangan jumlah PKL yang tidak diimbangi dengan tempat berjualan/lapak yang tersedia serta kurangnya penerangan dan akses transportasi umum menuju area PKL.
- Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi belum optimal karena tidak adanya petugas khusus yang melakukan pemantauan harga bahan pokok harian dan input data di UPT pasar.

e. Bidang Perindustrian

- Rendahnya jumlah IKM Industri Tembakau yang mempunyai cukai di produk lembutan kemasan yakni sebesar 9,92% atau hanya sebanyak 355 dari total 3.580 IKM yang disebabkan belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kepada seluruh IKM yang ada.

4. Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

- Masih ditemukan capaian kinerja dengan prestasi rendah di Kabupaten Temanggung berdasarkan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) selama periode 2018-2022 yakni sebesar 3,35 dengan hasil evaluasi sebagai berikut:
  1) Pada Tataran Pengambil Kebijakan terdapat 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R)
  2) Pada Tataran Pelaksana Kebijakan
     a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi rendah (R)

b. Capaian Kinerja

Terdapat 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi rendah (R).

Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya capaian kinerja dari satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Temanggung belum maksimal. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2021 karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dalam proses evaluator pusat (Kementrian PAN dan RB) tetapi proses pengajuan yakni 63,84 dengan predikat B. Hal ini disebabkan karena rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi belum berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan dan terukur sehingga masih ada ketidakkeselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level kabupaten, perangkat daerah, hingga individu.

b. Sekretariat DPRD

- Belum semua Raperda yang disahkan tepat waktu. Pada tahun 2022 baru 88,89% Raperda yang disahkan tepat waktu yang disebabkan karena faktor kinerja DPRD dalam menyelesaikan pembahasan Raperda.

5. Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Bidang Perencanaan

- Tingkat konsistensi Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah belum optimal dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 96,44% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, akan tetapi untuk capaian sampai

dengan 2022 sudah tercapai sebesar 100%. Hal ini disebabkan belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah.

b. Bidang Keuangan

- Rendahnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar 62,75% atau berada pada kategori Sangat Perlu Perbaikan yang disebabkan karena IPKD merupakan tanggung jawab provinsi dan Kabupaten Temanggung hanya berkewajiban untuk memasukan data pada aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id.
- Penurunan capaian yang signifikan pada persentase dokumen penganggaran tepat waktu yaitu sebesar 57,14%, yang mana pada tahun 2022 capaian persentase dokumen penganggaran tepat waktu hanya sebesar 42,86%. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung.
- Masih belum optimalnya capaian persentase realisasi keuangan, hal ini terlihat dari persentase realisasi keuangan menurun selama empat tahun terakhir dimulai dari 2019 dengan capaian 95,74% dan pada tahun 2022 hanya tercapai sebesar 65,76%. Hal ini disebabkan karena capaian belanja Perangkat Daerah yang menurun.
- Masih rendahnya capaian persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 96,35%, hal ini terjadi penurunan dari tahun 2021 yang tercapai sebesar 103,54% yang disebabkan karena belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara *real time* sehingga penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara cepat.

c. Bidang Kepegawaian

- Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas PNS yaitu pada tahun 2022 IP PNS Kabupaten Temanggung tercapai sebesar 53,13% atau dikategorikan sangat rendah (≤60) yang dikarenakan belum terkoneksinya data kepegawaian dengan perhitungan indeks dan belum semua pegawai melakukan *updating* data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian IP ASN.
- Belum maksimalnya capaian Indeks Sistem Merit dimana angka capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2022 berdasarkan hitungan mandiri baru mencapai 0,482 atau masih berada pada kategori III (0,41-0,6) dengan status kurang. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam 23ystem merit serta masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia pelaksana manajemen PNS.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Masih rendahnya capaian peningkatan kompetensi pengembangan ASN yang diukur melalui kinerja persentase kompetensi diklat kepemimpinan dimana jumlah pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 29,31% atau baru 141 pejabat yang lulus diklat PIM. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran yang fluktuatif, keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, serta terjadi proses manajemen kepegawaian yang tidak menentu.
- Belum optimalnya capaian persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional, yaitu pada tahun 2022 tercapai 16,50%, hal ini disebabkan karena banyak PNS yang melakukan diklat secara mandiri menggunakan anggaran Perangkat Daerah masing-masing yang belum melaporkan ke BKPSDM.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Perlunya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian serta penerapan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya iklim inovasi dan penerapan inovasi di Kabupaten Temanggung serta adanya keterbatasan anggaran, sehingga masih terus diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

6. Pengawasan Urusan Pemerintahan

- Perlunya peningkatan nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung yang mana dalam lima tahun terakhir dari 2018 hingga Tahun 2021 berada pada level 3 (terdefinisi), namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi level 2 (berkembang) dengan nilai 2,63. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, pada peraturan ini tercantum skala nilai dan parameter yang berbeda dengan peraturan sebelumnya.
- Belum maksimalnya Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), yang mana pada Tahun 2022 tercapai sebesar 77,37%. Angka tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 81,77%. Berdasarkan rangkuman hasil survei penilaian integritas oleh KPK, hal ini disebabkan oleh pembentukan perilaku antikorupsi belum optimal, risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) diyakini masih ditemui di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, masih terjadi risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi dalam skala rendah, belum maksimalnya media pengaduan/pelaporan bagi masyarakat, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan tertentu, serta risiko adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran dalam skala rendah.

7. Unsur Kewilayahan
   - Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik yang disebabkan karena kurangnya kesadaran perangkat akan jam kerja dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat desa/kelurahan, sehingga rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan pada Tahun 2022 baru mencapai 98,98% terkait dengan persentase kepemilikan KTP-El sedangkan untuk persentase realisasi penerimaan PBB tercapai sebesar 93,27% dari target sebesar 100%.
   - Belum seluruh sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi yang layak. Sampai dengan Tahun 2022 persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi yang layak baru mencapai angka 84,07% dari 23 kelurahan di empat kecamatan di Kabupaten Temanggung, dengan capaian terendah sebesar 65,48% berada pada beberapa kelurahan di Kecamatan Temanggung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas sarana dan prasarana kelurahan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset kelurahan.
   - Belum maksimalnya capaian persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dengan capaian tahun 2022 sebesar 98,18%. Hal ini disebabkan karena kurangnya harmonisasi antara pemerintah kelurahan, kelembagaan, dan masyarakat.
8. Unsur Pemerintahan Umum
   - Belum optimalnya stabilitas ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, hal ini disebabkan karena masih terdapat kejadian penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2022 persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pembinaan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba tercapai sebesar 11,1% (32 desa/kelurahan) menurun dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 36,68% (106 desa/kelurahan).

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Isu strategis daerah juga memperhatikan lingkungan strategis (global, nasional dan daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah baik isu secara global, nasional maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Isu Global, Nasional dan Daerah

Isu Global (SDGs)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Provinsi (RPJMN)	Isu Daerah (RPJPD)	Isu Daerah (RPJMD)
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan kota dan permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. Stabilitas politik dan keamanan 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien 3. Pemberantasan korupsi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Percepatan pemerataan dan keadilan 6. Keberlanjutan pembangunan 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Kesenjangan antar wilayah 9. Percepatan pembangunan kelautan	1. Penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 5. Kedaulatan pangan dan energi 6. Kesenjangan wilayah 7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	1. Perencanaan pembangunan 2. Pemerintahan umum 3. Kepegawaian 4. Komunikasi dan Informasi 5. Statistik 6. Perpustakaan dan Kearsipan 7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8. Kesehatan 9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10. Pendidikan 11. Pemuda dan Olah Raga 12. Kependudukan dan Catatan Sipil 13. Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak 14. Sosial 15. Kebudayaan 16. Agama 17. Perekonomian Daerah 18. Tenaga Kerja 19. Koperasi dan UMKM 20. Penanaman	1. Menekan laju kemiskinan 2. Kualitas sumber daya manusia 3. Percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 4. Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Isu Global (SDGs)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Provinsi (RPJMN)	Isu Daerah (RPJPD)	Isu Daerah (RPJMD)
			Modal 21. Pemberdayaan Masayarakat dan Desa 22. Pertanian 23. Kehutanan 24. Energi dan Sumber Daya mineral 25. Perikanan 26. Perdagangan 27. Perindustrian 28. Transmigrasi 29. Pariwisata 30. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 31. Pertanahan 32. Penataan Ruang	

Sumber : Bappeda 2022, data diolah

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran dan analisis kondisi daerah dan permasalahan daerah, analisis capaian kinerja daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan angka pendukung adalah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan pengeluaran real perkapita. Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung masih harus ditingkatkan, hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah yang baru tercapai 7,41 tahun dan belum sesuai target Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) yaitu 12 tahun. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi mutlak diperlukan karena tuntutan perkembangan jaman agar tidak tertinggal dengan daerah lain, hal ini dipengaruhi adanya revolusi industri 4.0 dan revolusi *society* 5.0. Keduanya mengedepankan pemanfaatan teknologi dalam semua aspek kehidupan baik di lingkup

pemerintahan maupun di kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah beserta jajaran aparatnya dituntut inovatif, adaptif, transparan, dan digitalisasi dalam semua aspek. Sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu menutup celah korupsi, pelayanan publik lebih efektif, efisien, murah, transparan, mudah dan akuntabel. Dukungan infrasturktur baik lunak maupun keras sangat dibutuhkan sehingga mendukung kompetensi ASN dan implementasi *e-government*.

Manusia yang berdaya saing tinggi tidak lepas dari derajat kesehatannya, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi dan anak. Kondisi kesehatan ibu yang kurang bagus bisa berdampak terjadinya stunting sehingga dalam rangka menurunkan angka stunting (tahun 2022 berdasarkan SSGI 28,9%) dikerahkan semua stakeholders dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Hal lainnya yang menjadi tantangan adalah pemenuhan hak anak seutuhnya sehingga semua anak bisa tumbuh dan berkembang optimal dan menjadi calon generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga bisa ditinjau dari sisi ketenagakerjaan, yaitu tidak adanya gap antara ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja. Kabupaten Temanggung walaupun angka TPT nya termasuk bagus pada tahun 2022 yaitu tercapai 2,54% namun masih ada sebagian masyarakat yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan, hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sehingga suatu saat jika terjadi bonus demografi akan menguntungkan jika kualitas tenaga kerjanya bagus, jika kualitas tenaga kerjanya rendah akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Pembangunan pemuda menjadi tantangan tersendiri sehingga pemuda mampu berdaya saing tinggi baik dari sisi pendidikan, perekonomian dan ketenagakerjaan.

2. Pemulihan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi *Covid-19* sehingga masih dibutuhkan

percepatan pemulihan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Rendahnya investasi, tingginya inflasi dan kurangnya pemakaian produk dalam negeri serta keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana kewilayahan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan terbesar adalah adanya kemiskinan ekstrem 0,96% di Kabupaten Temanggung dan pada tahun 2024 harus tuntas atau 0%. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah daearah berkolaborasi dengan berbagai stakeholders non pemerintah sehingga penanganannya terpadu dan bisa terwujud 0%.

Potensi industri di Kabupaten Temanggung ada di wilayah Kecamatan Kranggan dan Pringsurat, menyerap banyak tenaga kerja dari Kabupaten Temanggung dan sekitarnya, namun kondisi saat ini terjadi peningkatan pengangguran (terjadinya PHK) sebagai dampak pandemi *Covid-19* pada dunia industri, hal ini berdampak pada perekonomian daerah.

Perekonomian di Kabupaten Temanggung didukung oleh beberapa sektor unggulan (berdasarkan kontribusi PDRB Tahun 2022), yaitu industri pengolahan (26,19%), pertanian kehutanan dan perikanan (23,41%), serta perdagangan besar dan eceran (20,79%). Peningkatan kualitas dan percepatan pertumbuhannya diupayakan pada beberapa sektor unggulan sehingga mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan dalam kondisi baik (distribusi barang dan jasa), tercukupinya akses pendidikan, akses kesehatan, akses komunikasi, akses perumahan dan permukiman, pemenuhan air bersih buat masyarakat di seluruh kecamatan dan desa sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah dan semua bisa tumbuh berkembang dengan baik sesuai potensinya masing-masing.

Tantangan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif (dapat dirasakan semua lapisan masyarakat) dan

memperhatikan pelestarian lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan (dapat dirasakan oleh generasi berikutnya). Prinsip utamanya adalah pembagunan ekonomi yang memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan.

3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, sehingga dibutuhkan aparatur pemerintah yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman, yaitu revolusi industri 4.0; revolusi *society* 5.0 dan era *disruption*.

Menghadapai tantangan revolusi industri 4.0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu digitalisasi pelayanan publik di semua sektor, baik di tingkat kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan. Tuntutan masyarakat adalah pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, tanpa batas waktu dan *excellent*.

Menghadapi tantangan revolusi *society* 5.0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu aparatur pemerintah yang mampu bekerjasama, berpikiran maju, bersih, mampu memanfaatkan teknologi dan berinovasi. Selain itu pemerintah daerah harus menginisiasi dan menjadi katalisator dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang berbasis teknologi.

Menghadapi tantangan era *disruption* pemerintah daerah harus mampu melakukan pelayanan berbasis digital namun tidak meninggalkan sisi kemanusiaan terutama pelayanan yang bersifat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tuntutan masayarakat di era ini adalah adanya pemerintah yang lebih dekat, hadir dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya sehingga terwujud kepuasan masyarakat. Aparatur pemerintah harus mampu bersaing dengan pihak lain yang sama-sama melakukan pelayanan pada masayarakat (kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan komunikasi).

Isu strategis yang berkaitan langsung dengan program pusat

adalah pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak pada Bulan Februari dan November Tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dan dilakukan berbagai persiapan sehingga dalam pelaksanaannya terwujud kelancaran sesuai tujuan Pilpres dan Pilkada. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah penyiapan anggaran, penyiapan masyarakat calon pemilih terutama pemilih pemula, hal ini dilakukan kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil, sekolah dan KPU sehingga pada saat siswa berumur 17 tahun administrasi terkait KTP sudah selesai dan bisa ikut berpartisipasi dalam pilpres dan pilkada. Selain itu juga dilakukan persiapan guna pendidikan politik yang benar, mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif, penyiapan SDM yang akan menjadi petugas, penyiapan Linmas serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah "Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera", yang dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan *cluster* usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;

5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Sebagai ukuran tercapainya visi "Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil dan sejahtera", maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Sasaran **misi pertama:**

   a. Makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam era otonomi daerah yang bersendikan pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip *good governance* secara optimal.
   b. Makin mantapnya kemampuan, kemandirian dan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan dan aset daerah, data informasi berbasis *e-government*, dan pengawasan.
   c. Makin kuat dan berkembangnya kerjasama dan jejaring (*networking*) antara pemerintah daerah dengan berbagai kelompok usaha dan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
   d. Makin optimalnya kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dan aparatur pemerintah berbasis pada standar pelayanan minimum sehingga makin meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
   e. Makin mantap dan konsistennya kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka ikut serta menjaga kondusifitas dan kestabilan pelaksanaan

pembangunan berbagai bidang, khususnya politik dan hukum.

f. Makin matangnya kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
g. Makin mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tegaknya supremasi hukum dan HAM.
h. Makin berkurangnya angka kriminalitas dan konflik vertikal dan horizontal. Makin mantapnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

2. Sasaran **misi kedua:**

   a. Makin mantap dan kondusifnya suasana perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Makin tumbuhnya masyarakat yang berkarakter, kompetitif, berbudi luhur, bermoral, berbudaya, beretos kerja, dinamis, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
   c. Makin mantapnya kualitas masyarakat secara lahir dan batin.

3. Sasaran **misi ketiga:**

   a. Makin mantapnya kondisi perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor atau lapangan usaha unggulan daerah.
   b. Makin mantapnya prioritas pengembangan ekonomi daerah yang menekankan pada peran strategis pelaku ekonomi kerakyatan (usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi)

dan makin berkembangnya sinergitas antara pelaku ekonomi.

c. Makin kuatnya peranan sektor basis daerah yang tumbuh dalam model (*linkage*) sebagai suatu keuanggulan kompetitif dan dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian.
d. Makin berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada tingkat pedesaan yang berbasis *cluster* usaha secara terintegrasi dari hilir ke hulu.

4. Sasaran **misi keempat:**

a. Makin mantapnya kuantitas dan kualitas penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutama prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
b. Makin kuatnya kemampuan daerah didukung dengan makin besarnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana publik.
c. Makin mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan antar wilayah.

5. Sasaran **misi kelima:**

a. Makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada

pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

b. Makin mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten dalam penegakkan hukum.
c. Makin meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
d. Makin meningkatnya upaya mempertahankan fungsi daya dukung lahan pertanian terkait dengan kebijakan tanah lestari.

Skala prioritas pembangunan daerah pada tahapan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu pada periode tahun 2020-2025 diarahkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu:

a. Misi Pertama

Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis

berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan *networking* juga semakinberkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasnya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

b. Misi Kedua

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

c. Misi Ketiga

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan *cluster* usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis *cluster* usaha produktif.

d. Misi Keempat

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

e. Misi Kelima

Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

Gambaran mengenai keselarasan antara prioritas pembangunan Periode Keempat RPJPD 2005-2025 dengan Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Kesesuaian prioritas pembangunan Periode Keempat RPJPD 2005-2025 dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

NO.	VISI RPJPD 2005-2025 PERIODE KEEMPAT	SASARAN RPD KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan *cluster* usaha tingkat pedesaan	Meningkatnya perekonomian daerah
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
2	Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
		Meningkatnya toleransi masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak
3	Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
4	Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
5	Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
		Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur
		Meningkatknya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

Sumber: RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, diolah

Tabel 5.2
4 Pilar Periode Keempat RPJPD Tahun 2005-2025 dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

NO	PILAR PERIODE KEEMPAT RPJPD TAHUN 2005-2025	SASARAN RPD KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026
1	Struktur perekonomian yang kokoh	Meningkatnya perekonomian daerah
2	Kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
3	Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
		Meningkatnya toleransi masyarakat
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak
4	Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah	Meningkatnya kualitas SDM
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
		Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur
		Meningkatknya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sumber: RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, diolah

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, dan dengan memperhatikan RPJPD Tahun 2005- 2025, maka dibagun *logframe* kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

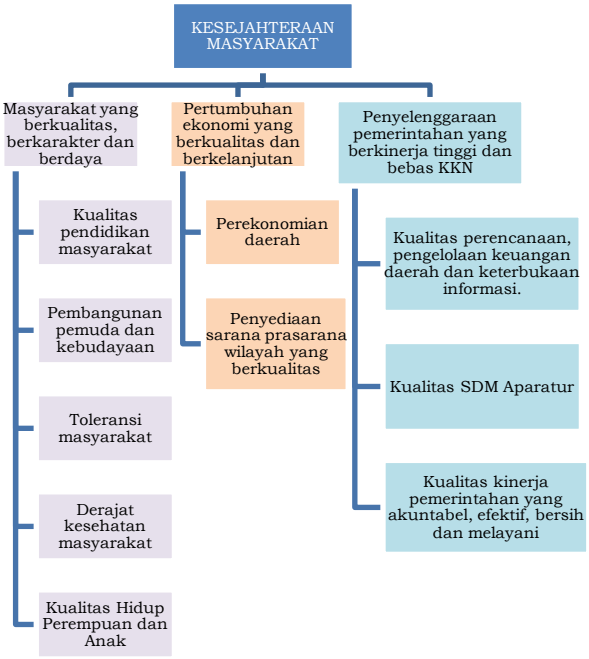

Gambar 5.1
Logframe Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Logframe tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang akan didukung oleh 3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi:
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
   b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
   c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
   d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
   e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
   a. Meningkatnya perekonomian daerah;
   b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN, dengan sasaran meliputi:
   a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
   b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
   c. Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Dalam rangka pencapaian tujuan daerah maka sasaran daerah yang akan diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

   Sumber daya manusia Kabupaten Temanggung yang berkualitas, berkarakter dan berdaya diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan dalam era disrupsi, globalisasi, megatrend dan geopolitik yang tidak menentu tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Temanggung. Kompetisi di era *Industry* 4.0 dan *Society* 5.0 membutuhkan SDM yang mampu berkompetisi dan memiliki daya saing tinggi, namun tetap memiliki nilai sikap perilaku berbudaya yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatnya toleransi masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

   Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang didukung oleh indikator sasarannya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan nasional yang tidak menentu, sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan, karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh indikator sasarannya yaitu meningkatnya Pendapatan Perkapita, turunnya Angka Kemiskinan, Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, menurunnya Tingkat Penganguran Terbuka (TPT), meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur, meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Terwujudnya penyelanggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan dan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani adalah pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam tataran pelaksanaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi yang didukung oleh meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), meningkatnya Indeks Merit System, meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

Dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2026. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Tahun				Akhir RPD 2026	Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**			**Angka**	**70,77**	**70,49**	**71,04**	**71,31**	**71,58**	**71,58**	
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,41	7,80	7,85	7,95	8,05	8,05	Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,55	12,49	12,6	12,65	12,7	12,7	Pendidikan
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,98	3,56	4,18	4,23	4,23	4,23	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Olahrga	Angka	2,97	3,41	3,61	3,81	3,90	3,90	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,31	3,41	4,21	4,66	5,11	5,11	Perpustakaan dan Kebudayaan
		Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,50	4,19	4,50	4,451	4,52	4,52	Bankesbangpol
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,70	75,53	75,71	75,72	75,73	75,73	Kesehatan
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,71	95,65	95,75	95,77	95,85	95,85	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Tahun				Akhir RPD 2026	Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	**Pertumbuhan Ekonomi**			**%**	**5,20**	**4,80**	**5,27**	**5,28**	**5,29**	**5,29**	
		Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	30,93	29,57	32,25	33,5	35	35	Bidang Koperasi dan UKM, Pangan Kelautan dan Perikanan
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	18,46	18,7	18,8	19	19,2	19,2	Bidang pertanian, Pangan, Kelautan Perikananan Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Penanaman modalmKoperasi Usaha Kecil Menengah
			Angka Kemiskinan	%	9,33	9,80	8,5	8,1	7,70	7,70	Sosial
			Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)	%	2,54	3,50	2,52	2,51	2,50	2,50	Tenaga kerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Tahun				Akhir RPD 2026	Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	n.a	n.a	74,95	75,20	75,29	75,29	PUPR , Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	69,86	70,53	65,41	65,66	65,87	65,87	Lingkungan Hidup
			Indeks Rasa Aman	Angka	4,55	4,44	4,62	4,69	4,76	4,76	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	**Indeks Reformasi Birokrasi**			**Predikat/nilai**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	62,74	79,5	65,5	66	66,5	66,5	Fungsi Penunjang Perencanaan , Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan , Penunjang Keuanagna , Bidang Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	Indeks Merit System	Angka	0,482	0,61	0,50	0,55	0,61	0,61	Fungsi Penunjang – Kepegawaian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Tahun				Akhir RPD 2026	Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatknya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	B/>60-70	BB/>70-80	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70	Fungsi Lainnya - Sekretaris Daerah, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Fungsi Lainnya Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	83,41 (B)	B/76,61 – 88,30	B/76, 61 – 88,30	B/76, 61 – 88,30	B/76, 61 – 88,30	B/76, 61 – 88,30	Fungsi Lainnya - Sekretaris Daerah

Sumber: Bappeda, 2022

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut, target kinerja sasaran Tahun 2024-2026 rata-rata mengalami tren kenaikan pada tiap tahunnya kecuali pada indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target kinerja IKLH tahun 2024-2026 secara angka mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2022, hal ini bukan berarti karena target kinerjanya lebih rendah dari tahun 2022 namun dikarenakan ada perubahan formulasi perhitungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021 mengatur regulasi mengenai IKLH dengan menerbitkan website perhitungan IKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu ppkl.menlhk.go.id/iklh. Website tersebut digunakan sebagai dasar kabupaten/kota di Indonesia untuk memantau variabel perhitungan dan nilai IKLH.

Perbedaan perhitungan pada PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021 terdapat pada metode dan sumber data yang digunakan pada perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang sebelumnya disebut Indeks Kualitas Tutupan Lahan

(IKTL). Sumber data yang digunakan pada perhitungan nilai IKTL sebelumnya diperoleh dengan perhitungan manual dan dilaksanakan Kabupaten sendiri. Namun setelah diterbitkannya PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan website ppkl.menlhk.go.id/iklh, maka nilai-nilai pada variabel yang digunakan dalam perhitungan IKL dihitung dengan perhitungan spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) yang dilakukan oleh KLHK, sehingga terjadi perbedaan nilai dari IKTL 74,33 menjadi IKL 53,19. Perbedaan tersebut menjadikan capaian IKLH di Tahun 2022 dari 69,18 terkonversi/perhitungan sesuai website menjadi 65,23, sehingga Target ditahun 2024-2026 ditetapkan menjadi 65,41, 65,66 dan 65,87.

5.1. Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Gambaran mengenai Keselarasan antara Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026
Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian daerah
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
	Meningkatnya toleransi masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Agenda 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
	Meningkatnya toleransi masyarakat
Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas
Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya toleransi masyarakat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan

Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026
	keuangan daerah dan keterbukaan informasi
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur
	Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

Sumber: Bappeda, 2022

5.2. Kesesuaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Gambaran mengenai keselarasan antara sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Kesesuaian Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026
Sasaran 1: Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	Meningkatnya toleransi masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 3: Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
Sasaran 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi

Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
	Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

5.2. *Cascading* Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Cascading Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5

Cascading Kinerja Rencna Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya masyarakat yang,berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,16	70,49	71,04	71,31	71,58	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,41	7,80	7,85	7,95	8,05	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	55,89	51,00	56,50	57,10	57,70	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
																		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,16	96,97	98,16	98,39	98,62		
																		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	86,75	97,2	90,36	91,57	92,77		
																		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	n.a	n.a	28,00	36,00	44,00		
										Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,55	12,49	12,55	12,60	12,65	Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	Angka	n.a	n.a	100	100	100	Program Pengelolaan Pendidikan	
																		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	Angka	n.a	n.a	100	100	100		
																		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	Angka	n.a	n.a	100	100	100		
																		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,92	100	100	100	100		
									Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,98	3,56	4,18	4,23	4,23	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	%	n.a.	n.a.	38	40	45	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan , Pemuda, dan Olahraga

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
										Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	2,97	3,41	3,61	3,81	3,9		Persentae atlet berprestasi	%	40,91	21,00	35,00	36,00	37,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pendidikan , Pemuda, dan Olahraga
										Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,76	3,41	4,21	4,66	5,11	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	n.a	30	30,1	30,2	30,3	Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
																	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	n.a	n.a	21,05	26,1	31,15	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
									Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,5	4,19	4,50	4,51	4,52	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	n.a	n.a	100	100	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Oranisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BANKESBANGPOL

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
									Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,70	75,53	75,71	75,72	75,73	Meningkatnya kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Angka	n.a	n.a	0.13	0,15	0,2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
																									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
																									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	
																									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	
																									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (	RSUD
																	Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,54	0,65	0,53	0,52	0,51	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	DPPPAPPKB
																									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
																									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
									Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	95,71	95,65	95,75	95,77	95,85	Meningkatkan kebijakan responsif Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,16	10,18	10,2	10,22	10,24	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
																									Program Perlindungan Perempuan	
																									Program Peningkatan Kualitas Keluarga	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																									Program Pemenuhan Hak Anak/PHA	
																									Program Perlindungan Khusus Anak	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	4,80	5,27	5,28	5,29	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan Per kapita	Ribu Rupiah	30,93	29,57	32,25	33,5	35	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	n.a	n.a	23,38	23,3	23,25	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
										Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	18,46	18,7	18,8	19	19,2									Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
																									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
																									Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
																									Program Penyuluhan Pertanian	
																	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,79	20	20,79	20,8	20,9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINKOPDAG UKM
																									Program Pengembangan Ekspor	
																									Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
																									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
																									Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,73	1,65	2,02	2,1	2,15	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
																	Meningkatnya nilai usaha industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	26,19	27	27,1	27,2	27,25	Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER
																									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
																	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	n.a	2,5	3	3,5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP
																									Program Pomosi Penanaman Modal	
																									Program Pelayanan Penanaman Modal	
																									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
																									Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
																	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	15,09	10,71	36	48	60	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DINKOPDAG
																									Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
																									Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	
																									Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
																		Persentase UKM yang difasilitasi	%	n.a	n.a	0,92	0,96	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																									Program Pengembangan UMKM	
																	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,1	78	78,5	78,7	79	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
																									Program Penanganan Kerawanan Pangan	
																									Program Pengawasan Keamanan Pangan	
																	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Rp	396.839	349.229	349.364	349.500	349.638	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
																									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
																									Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	
																									Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	
										Angka Kemiskinan	%	9,33	9,8	8,5	8,1	7,7	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	64,30	63	63	63	63	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
																									Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
																									Program Rehabilitasi Sosial	
																									Program perlindungan dan jaminan sosial	
																									Program Penanganan Bencana	
																									Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	9,77	6,39	10,53	11,65	13,16	Program penataan Desa	DINPERMADES
																									Program Peningkatan Kerjasama Desa	
																									Program Administrasi Pemerintahan Desa	
																									Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	
										Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,54	3,5	2,52	2,51	2,50	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,14	76,1	76,15	76,2	76,25	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
																									Program Penempatan Tenaga Kerja	
									Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	n.a	n.a	74,95	75,20	75,29	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,79	84	84,47	84,64	84,86	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUPR
																									Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
																									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
																									Program Penataan bangunan gedung	
																									Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
																									Program Penyelenggaraan Jalan	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,56	89,5	89,5	89,51	89,52	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
																		Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	98,99	97,97	99,02	99,03	99,03	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
																									Program Kawasan Permukiman	
																									Program Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat	
																									Program penyelesaian sengketa tanah garapan	
																		Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	41,06	38,65	41,55	42,03	42,03	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
										Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	69,86	70,53	65,41	65,66	65,87	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,22	46,00	52,70	53,30	53,80	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
																		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,82	86	83,82	83,87	83,92	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
																									Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
																									Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
																									Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																									Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
																									Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
																									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
																									Program Pengelolaan Persampahan	
										Indeks Rasa Aman	Angka	4,55	4,44	4,62	4,69	4,76	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indek Resiko Bencana	Angka	174,59	192,08	142,00	141,50	141,00	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
																		Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Angka	0	0	100	100	100	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
																		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	Angka	60,64	100	100	100	100	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	DAMKAR
																		Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	Angka	468	44	310	305	300		

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
3	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Predikat/nilai**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	62,74	79,5	65,5	66	66,5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,2	4,5	4,55	4,6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
																		Management resiko Indeks (MRI)	Level	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
																		Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Angka	Sangat Inovatif/61,01-100,00	Sangat Inovatif/61,01-100,0	Sangat Inovatif/61,01-100,00	Sangat Inovatif/61,01-100,0	Sangat Inovatif/61,01-100,0	Program penelitian dan pengembangan	BAPPEDA
																	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LKPD	Angka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
																		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	16,69	15	15.50	15,75	16	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
																	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	88,33	89,75	89,95	90,15	90,35	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
									Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	Angka	0,482	0,61	0,50	0,55	0,61	Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tinggi	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	53,13	50,09	53,18	53,23	53,28	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	BKPSDM
									Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Level/nilai	B/>60-70	BB/>70-80	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilia evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEKDA
																	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	Indeks SPBE	Angka	3,12	3	3,20	3,35	3,50	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DINKOMINFO

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	62,46	67	68	70	72	Program Pengelolaan Arsip Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
																	Meningkatnya dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	n.a	n.a	100	100	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SETWAN
																	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	n.a.	n.a	93,70	93,80	93,90	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
																		Maturitas SPIP	Nilai	3,008	3,3	3,009	3,12	3,12		
																		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,91	n.a	2,92	2,93	2,95		
																		Kapabilitas APIP	Level	n.a.	n.a	3	3	3	Program Perumusan Kenijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	83,41	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PREDIKAT	84,30	B	B	B	B	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi,	KECAMATAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Iku Perangkat Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Penanggung Jawab
																									Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	
																									Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
																	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	83,84	0	92,06	93,7	95,36	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	DINDUKCAPIL
																									Program Pencatatan Sipil	
																									Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	

Sumber: Bappeda, 2022

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan program prioritas.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan di setiap Perangkat Daerah. Oleh karena itu pilihan program dan indikator di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

6.1.1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan;
b. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
c. Peningkatan literasi masyarakat;
d. Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
e. Penurunan konflik di masyarakat;
f. Meningkatkan kesehatan keluarga;
g. Meningkatkan kebijakan reponsif gender.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

a. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
b. Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
c. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum;
d. Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan;
e. Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
f. Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan;
g. Pembudayaan gemar membaca di masyarakat;
h. Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya;
i. Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebhinekaan kepada masyarakat;
j. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik;
k. Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas;
l. Melaksanakan transformasi pelayanan kesehatan primer;
m. Melaksanakan transformasi pelayanan kesehatan rujukan;
n. Melaksanakan transformasi sistem ketahanan kesehatan;
o. Melaksanakan transformasi sistem pembiayaan kesehatan;
p. Melaksanakan transformasi sumber daya kesehatan;
q. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.

6.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan adalah:

a. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan;
b. Meningkatkan nilai usaha perdagangan;
c. Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata;
d. Meningkatkan nilai usaha industri;
e. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan;
f. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM;
g. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
h. Meningkatkan produksi perikanan;
i. Meningkatnya pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
j. Mengoptimalkan fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS;
k. Pertumbuhan penduduk yang terkendali;

   Pertumbuhan penduduk yang terkendali diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, karena akan mengurangi indeks ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif, sehingga akan menaikkan penghasilan dan investasi.
l. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
m. Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat;
n. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja;
o. Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
p. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya;

   Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan, yaitu kawasan budidaya yang

diperuntukkan untuk industri, produksi, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

q. Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat.

   Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan indeks rasa aman yang tinggi, sehingga sangat mendukung terwujudnya iklim investasi.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

a. Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan;
b. Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan;
c. Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan;
d. Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan;
e. Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal;
f. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
g. Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri;
i. Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi;
j. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
k. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
l. Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;

m. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
n. Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya;
o. Peningkatan sertifikasi keamanan pangan;
p. Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan;
q. Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan;
r. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan;
s. Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
t. Optimalisasi fungsi UPTD Rumah Singgah dalam pelayanan PPKS;
u. Peningkatkan pelayanan dan KIE Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga;
v. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
w. Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes;
x. Peningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
y. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
z. Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
aa. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya;
bb. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup;
cc. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

dd. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;

ee. Peningkatan pengelolaan sampah;
sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat, khususnya bank sampah memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan rumah tangga.

ff. Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

6.1.3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN

Strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN adalah:

a. Meningkatnya infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah;
b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
c. Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat;
d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah;
e. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
f. Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
g. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tertinggi;
h. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
i. Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
j. Meningkatnya pengelolaan kearsipan;

k. Meningkatnya dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD;
l. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual;
m. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum;
n. Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi;
o. Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi;
p. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
q. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
r. Meningkatnya layanan perhubungan;
s. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

a. Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;
b. Peningkatan peran serta *pentahelix* dalam perencanaan pembangunan;
c. Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat;
d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
e. Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi;
f. Peningkatan tata kelola manajemen asn berdasarkan sistem merit;
g. Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah;
h. Optimalisasi integrasi layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
i. Peningkatan kapasitas pengelola layanan sistem pemerintahan secara elektronik;

j. Peningkatan tata kelola arsip daerah;
k. Pemenuhan dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD.

Gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan akses layanan Pendidikan	Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai
			Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum
			Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
	Sasaran 2: Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olah raga
		Peningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
			Pembudayaan gemar membaca di masyarakat
		Peningkatkan Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
	Sasaran 3: Meningkatnya Toleransi di Masyarakat	Penurunan konflik di masyarakat	Peningkatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebhinekaan kepada masyarakat
			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik
			Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan keluarga	Transformasi pelayanan kesehatan primer
			Transformasi pelayanan kesehatan rujukan
			Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan
			Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
			Transformasi sumber daya kesehatan
	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kebijakan responsif gender	Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Sasaran 1: Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan	Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
			Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Peternakan
			Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia Pertanian dan Peternakan
		Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
			Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal
		Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan nilai usaha industri	Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
		Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan	Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi
		Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Peningkatan kelembagaan, permodalan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
			Peningkatan Penyediaan dan distribusi Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
			Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
		Meningkatkan produksi perikanan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
			Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan penyediaan benih ikan
		Meningkatnya pemberdayaan PPKS	Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama
			Optimalisasi fungsi UPTD Rumah Singgah dalam pelayanan PPKS
		Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Peningkatkan Pelayanan dan KIE Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga
		Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat	Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes
		Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja	Peningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui Pendidikan dan pelatihan
			Pembangunan, peningkatan, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 3: Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah	Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah
			Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah
		Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya	Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya
			Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup
			Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
			Peningkatan pengelolaan sampah
		Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Tujuan 3: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan
			Peningkatan peran serta *Pentahelix* dalam perencanaan pembangunan
			Peningkatan budaya inovasi di lingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah
		Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tertinggi	Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit
	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah
		Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	Optimalisasi integrasi layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik
			Peningkatan kapasitas pengelola layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik
		Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Peningkatan tata kelola arsip daerah
		Meningkatnya dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD	Pemenuhan dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
		Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Peningkatan kualitasKebijakan Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Peningkatan dukungan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan
		Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarpras Pelayanan Publik
		Meningkatnya layanan perhubungan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarpras layanan perhubungan
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarpras Administrasi Kependudukan

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

6.2. ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah kebijakan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dimaksudkan sebagai pemandu sinkronisasi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan didasarkan pada telaah urgensi permasalahan dan isu strategis pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sampai akhir periode Rencana Pembangunan Daerah.

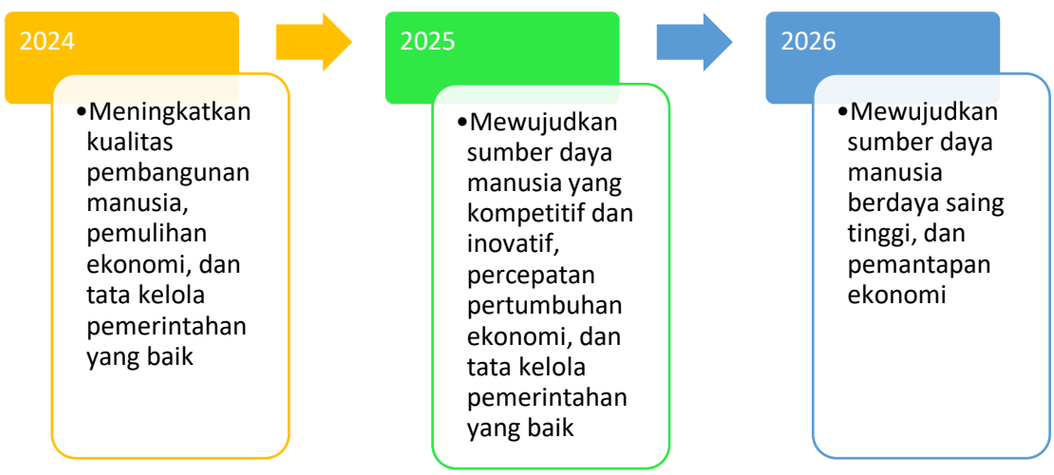

Gambar 6.1.
Diagram Tema Kebijakan Tahunan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Arah kebijakan tahunan RPD 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Arah kebijakan tahunan RPD 2024-2026

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas/Fokus
2024	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan	Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah: 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas/Fokus
	tata kelola kepemerintahan yang baik	pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; 2. pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi; pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan. 3. pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
2025	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik	Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah: 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi; 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
2026	Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi	Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah: 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, peningkatan kualitas SDM berdaya saing tinggi melalui peningkatan produktivitas

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas/Fokus
		2. pemantapan ekonomi melalui penjagaan iklim usaha yang kondusif, memperluas pangsa pasar produk daerah dengan optimalisasi teknologi, inovasi produk daerah yang mendukung ketahanan ekonomi, dan pengembangan pariwisata dan kebudayaan 3. reformasi birokrasi melalui penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang terpadu (mall pelayanan publik)

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

6.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arahan kebijakan tersebut di atas dituangkan dalam rumusan **Program Prioritas** sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan:

- Program Pengelolaan Pendidikan

  Program ini didalamnya terdapat sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui pemenuhan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, pelaksanaan pendidikan dasar SD dan SMP, PAUD, pendidikan non formal, dan peran serta masyarakat untuk mencapai wajib belajar 9 tahun dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

2) Bidang Kesehatan:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

  program ini mencakup sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan gizi, pelayanan kesehatan ibu, bayi, remaja, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, yang semuanya itu memberikan solusi terhadap permasalahan angka kematian ibu,

angka kematian bayi, angka kematian balita, status gizi balita (gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting), serta penyakit menular dan tidak menular.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
   - Program Pengembangan Permukiman;
   - Program Penyelenggaraan Jalan;
   - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Program Kawasan Permukiman;
     program ini mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan aman, mengatasi kawasan kumuh, dan memfasilitasi pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
   - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran;
   - Program Penanggulangan Bencana.

6) Bidang Sosial
   - Program perlindungan dan jaminan social.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja
   - Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini mendukung terwujudnya tenaga kerja yang kompeten untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
   - Program Perlindungan Perempuan;
   - Program Pemenuhan Hak Anak/PHA.
3) Bidang Pangan:
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
4) Bidang lingkungan hidup
   - Program Pengelolaan Persampahan.
5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Program Pendaftaran Penduduk;
   - Program Pencatatan Sipil;
   - Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
   - Program pengelolaan profil kependudukan.
6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Program Peningkatan Kerjasama Desa.
7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Program pengendalian penduduk;
   - Program pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
   - Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
8) Bidang Komunikasi dan Informatika
   - Program Informasi dan Komunikasi Publik;
   - Program aplikasi informatika.
9) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
   - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM).
10) Bidang Penanaman Modal
   - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

11) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
    - Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
12) Bidang Kebudayaan:
    - Program Pengembangan Kebudayaan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan:

1) Bidang kelautan dan perikanan
    - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2) Bidang Pariwisata
    - Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
3) Bidang Pertanian
    - Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
    - Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
4) Bidang Perindustrian
    - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan:
    - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2) Keuangan:
    - Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3) Pendidikan dan Pelatihan:
    - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4) Penelitian dan Pengembangan

- Program Penelitian dan Pengembangan.

e. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat daerah:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan.

f. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan:

- Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum.

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

6.4. RENCANA INOVASI

Untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD Tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Temanggung merencanakan inovasi sebagaimana Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Rencana Inovasi Pendukung Capaian Sasaran
RPD 2024-2026

o	Sasaran	Inovasi	PD
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	SIPAUS (Sistem Informasi Penanganan Anak Usia Sekolah)	DINDIKPORA
2	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	SIDAMUDA (Sistem Informasi Data Kepemudaan)	DINDIKPORA
		SIFORDA (Sistem Informasi Olahraga Daerah)	
3	Meningkatnya Toleransi di Masyarakat	Penyebarluasan nilai-nilai toleransi melalui: - Media Sosial (Medsos Kesbangpol, Media Center Kominfo, Temanggung TV, RT FM) - Paskibraka dan Purna Paskibraka - Organisasi Masyarakat - FKUB (Kabupaten dan di 20 Kecamatan)	BANKESBANGPOL

o	Sasaran	Inovasi	PD
		- Penghayat kepercayaan di daerah - Pelajar dan mahasiswa	
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Pembentukan Satgas Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk percepatan penurunan stunting - peningkatan transformasi sistem kesehatan	DINKES
		- Layanan JAPRI BUFAS (Jadwal Periksa Ibu Nifas)	Puskesmas Parakan
		- SIMILTA (Skrinning Mandiri Ibu Hamil Terpantau)	
		- Gardu Imun (Gerakan Peduli Imunisasi)	Puskesmas Traji
		- Upaya Peningkatan Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil yang Menderita Anemia menggunakan aplikasi Mr. Pillster	
		- Peningkatan Pengetahuan Tentang Ketepatan Waktu Minum Obat Pada Pasien TBC Menggunakan Aplikasi Alarm Minum Obat	
		- "GEMPI" (Gerakan Edukasi Untuk Mengatasi Penyakit Hipertensi)	Puskesmas Kledung
		- Program CETING PAK JAMIL (CEgah stunTING dengan Penyuluhan dAn Konseling seJAk masa kehaMILan)	
		- SEPUR SENJA (Setor Cepuk Dahak Seminggu Gur Siji Masyarakat Aman Sehat dan Bahagia	
		- PELITA HATI	Puskesmas Bansari
		- CETING SI PANDU	
		- SeNi Ibu Sari (Senam Nifa Ibu Postpartum Puskesmas Bansari)	
		- MAMI RESTIKU SEHAT	
		- Mbak Lita Online " Mari Bersama Aktifkan Pelita Hati Online"	
		- Pojok Tensi untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus hipertensi	Puskesmas Bulu
		- SI BELA BERSAJAK (Sayangi ibu setelah bersalin dengan pijat oksitosin) dalam pelayanan persalinan di Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung	
		- Bu dan mbak IKA BIJAK (Ibu dan mbak Intip Konjungtiva Anda Bisa Jauhi Anemia Kehamilan)	Puskesmas Temanggung
		- Koncalan Rembulan (Konsultasi Perencanaan Kehamilan Untuk Remaja, Ibu dan Calon Pengantin)	
		- Sibumil SMART (stiker ibu hamil sudah melakukan Antenatal Care Terpadu di Puskesmas Temanggung)	
		- Stiker Pondaasi Hamil (Penanda kondisi Kehamilan untuk mencegah Kompikasi pada ibu hamil)	

o	Sasaran	Inovasi	PD
		- Penjaringan bumil Risti oleh Kader, GEBRAK dengan BUSA dan VISI BUHASITI (Gerakan Amankan Kehamilan dengan Buku Saku dan Video edukasi Ibu hamil Resiko Tinggi)	
		- Manajemen Persalinan dengan tehnik RABA SUDO NYERI (Efflurage, Deep Back Massage, Counter Pressure, Abdominal Lifting)	
		- Optimalisasi pencegahan stunting dengan KATA UTI (Makan Pantau Ukur tinggi	
		- Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan dengan SI KUMBANG TAMAN (Deteksi Dini Gangguan pertumbuhan dan Perkembangan Anak)	
		- KALI CHINTA (Kartu Kendali Cegah Hipertensi Kita)	
		- Si Kumbang Taman (Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Temanggung	
		- Batik Tulis (Basmi Jentik dan Tuberkulosis)	
		- PATUDU_Pencegahan dan Pelayanan Stunting Terpadu	
		- Pemanfaatan media e-leaflet dan e-banner untuk meningkatkan cakupan kunjungan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) di Puskesmas Dharmarini Kabupaten Temanggung	Puskesmas Dharma Rini
		- Optimalisasi pelayanan perkesmas pada pasien Hipertensi melalui kunjungan rumah untuk meningkatkan kepatuhan pasien di Puskesmas Dharmarini Kabupaten Temanggung	
		- KLASIKAL (Kelas Ibu Hamil dan Keluarga)	Puskesmas Tlogomulyo
		- TITENI TUMBANG (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang)	
		- KOPI CI TUTI (Komitmen Disiplin ANC Terpadu dan Terintegrasi dengan Kartu Kendali untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi)	
		- KEBULI IDAMAN (Kelas Ibu Balita Terintegrasi dan Mantap)	
		- TEMAN SUZI (Temui Dampingi dengan Asuhan Gizi)	
		- SANDING HATI (Sayangi Dampingi Hamil Resiko Tinggi)	
		- TAMU CAPER (Ketahui Tekanan Darahmu untuk Mencegah Hipertensi)	
		- BULINMAS BIDADARI (Ibu Bersalin di Puskesmas dapat Akta Kelahiran, Potrer Bayi dan Bidan Datang Kunjungi Rumah Ibu)	

o	Sasaran	Inovasi	PD
		- TEMAN SI MANIS (Sistem Pemantauan Atasi Kencing Manis)	
		- JAMALI NYEDHAK RONDO (Jadikan Masyarakat Peduli Nyetor Dahak Loro TB ne Endho)	
		- Optimalisasi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Remaja Sadar Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Tembarak Kabupaten Temanggung	Puskesmas Tembarak
		- Optimalisasi Penemuan Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Tembarak Kabupaten Temanggung	
		- SERAT CENTINI	Puskesmas Selopampang
		- KETAN ISI SAK CETHING	Puskesmas Pare
		- Setangkai Anggrek Bulan	Puskesmas Pringsurat
		- PANDU BU MITA (Pelayanan Terpadu Ibu Hamil Sehat dan Bahagia)	Puskesmas Rejosari
		- Kadal Terpeduli	Puskesmas Kaloran
		- Tempe Kemulan	
		- Papeda	
		- Jago Ceting	
		- CENTINI BERSERI	Puskesmas Ngadirejo
		- PRODUK PENCETUS	
		- GERBEK PARU (GERAKAN BERANTAS KASUS TB PARU)	Puskesmas Jumo
		- KELANTING (KELAS BALITA STUNTING)	
		- CANTING (CONTOH MENU MAKANAN UNTUK MENCEGAH DAN MENANGANI STUNTING	
		- NGEMIL (NGOBROL BARENG IBU HAMIL)	
		- JITU (JEMPUT IBU INPARTU)	
		- MATOA (MAJANG FOTO PERTAMA)	
		- SIMATANTING (SIMBAH PEDULI PENCEGAHAN STUNTING)	
		- GERCEP PENJAHIT (GERAKAN CEPAT PENJARINGAN HIPERTENSI)	
		- OPTIMALISASI PENDAMPINGAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI OLEH SUAMI SIAGA (DABURISUSI) DI PUSKESMAS JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG	
		- KELAS IMUD (Kelas Ibu Muda)	Puskesmas Bejen
		- Suscatin Jamirah (Kursus calon pengantin dan remaja putri minum tablet tambah darah)	
		- ANTING EMAS (Cegah Stunting Dengan Program Inovasi Kesehatan	Puskesmas Wonoboyo
		- SEMUT MERAH(Setiap Jumat Minum Tablet Tambah Darah)	
		- GEMAR ASIK - (Generasi Remaja Anti Rabi Gasik)	

o	Sasaran	Inovasi	PD
		- SUSCATIN - (Kursus Calon Pengantin)	
		- AYU TING-TING - (Ayo Cegah Stunting Sejak Bunting)	
		- KURSI BIRU - (Kursus Singkat Ibu Menyusui Baru)	
		- KELANTING - (Kelas Ibu Balita Risiko Stunting)	
		- SIGRAK CENTING SEWU (Aksi Gerakan Cegah Stanting dengan 1000 HPK)	Puskesmas Gemawang
		- NASI KEBULI (Nakes Atasi Denagn Kelas Bumil Keliling)	
		- LENCANA (Keluarga Berencana Pasca Persalinan	
		- Mari ATINE (Remaja Putri Anti Anemia)	
		- AKU SI MANIS (ayo Cukupi Nutrisi Masa Nifas)	
		- LAHAN PADI BU MILA (Penyuluhan dan Pendampingan Pada Ibu Hamil Anemia)	
		- HKUPAS DUKU ROLAS	
		- TEMBUS BEKAKAS (Optimalisasi Temukan Tuberkolosis Bersama kader kesehatan)	
		- Jamil Ceria (Remaja dan ibu hamil Cegah Anemia)	Puskesmas Kandangan
		- CetingE Bu Hartapan (Cegah Stunting melalui E-book Seribu Hari Pertama Kehidupan)	
		- KOLABORASI (KONSELING BERSAMA FARMASI)	Puskesmas Candiroto
		- PENDERITA (Penemuan Diare pada Balita)	
		- Gerabah Magicom (Gerakam Minum Tablet Tambah Darah Seminggu Sekali Catat di Google Form)	
		- Optimalisasi pengobatan pasien hipertensi dengan TUKONTAN (Kartu Kontrol Pengobatan)	
5	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Jaring Pengaman Sosial	DINSOS
		Employment Services Car (Mobil Pelayanan Ketenagakerjaan)	DISNAKER
6	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Temanggung Bebas Sampah	DPRKPLH
		Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan	
7	Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	sinergitas 3 OPD pengampu data untuk mencapai target IPKD	BPAPKD
8	Meningkatkan kualitas kinerja	Laporan Triwulan (IKPD) masuk ke aplikasi SIMPELBANGDA	SETDA

o	Sasaran	Inovasi	PD
	pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	SKM (Sistem Kepuasan Masyarakat) online	SETDA

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Perencanaan penganggaran yang menyeluruh menjadi hal penting meskipun memang tidak serta merta menjamin suatu tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan mudah. Selain itu, perlu adanya keterpaduan antar pemangku kebijakan, sinergitas, dan aspek berkelanjutan yang dapat mendukung masyarakat dan daerah dalam mencapai tujuan.

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja Pemerintah. Kerangka ini digunakan untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah dalam menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024 – 2026 dengan mengutamakan urgensi atau kebutuhan riil yang langsung mendukung pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan administratif yang telah tertuang dalam program prioritas yang ditetapkan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kemampuan keuangan daerah selanjutnya didistribusikan pada program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan tersebut diperoleh berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026

Kode	Uraian	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.907.088.079.808**	**1.912.627.120.028**	**1.918.265.546.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**308.705.886.109**	**314.244.926.329**	**319.883.352.301**
4.1.01	Pajak Daerah	74.191.559.232	75.522.761.678	76.877.849.589
4.1.02	Retribusi Daerah	9.643.158.066	9.816.183.080	9.992.312.644
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.426.146.839	21.810.591.368	22.201.933.899
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	203.445.021.972	207.095.390.203	210.811.256.169
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.598.382.193.699**	**1.598.382.193.699**	**1.598.382.193.699**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.476.238.465.520	1.476.238.465.520	1.476.238.465.520
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.240.191.603.000	1.240.191.603.000	1.240.191.603.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	67.611.875.000	67.611.875.000	67.611.875.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	779.535.375.000	779.535.375.000	779.535.375.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.890.309.000	118.890.309.000	118.890.309.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	274.154.044.000	274.154.044.000	274.154.044.000
4.2.01.05	Dana Desa	236.046.862.520	236.046.862.520	236.046.862.520
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.143.728.179	122.143.728.179	122.143.728.179
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.143.728.179	122.143.728.179	122.143.728.179
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
5	**BELANJA**	**2.306.238.361.211**	**2.217.365.558.406**	**2.228.550.338.471**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.699.660.516.754**	**1.607.658.819.339**	**1.615.697.113.434**
5.1.01	Belanja Pegawai	812.107.222.160	816.167.758.271	820.248.597.062
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.833.327.770	681.222.494.409	684.628.606.881
5.1.05	Belanja Hibah	202.155.970.708	102.666.750.562	103.180.084.314
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.563.996.116	7.601.816.097	7.639.825.177

Kode	Uraian	2024	2025	2026
5.2	**BELANJA MODAL**	**205.127.132.792**	**206.152.768.456**	**207.183.532.298**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.536.889.059	74.914.573.504	75.294.146.372
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.145.012.959	63.460.738.024	63.778.041.714
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.240.637.368	60.541.840.555	60.844.549.758
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.121.718.023	6.152.326.613	6.183.088.246
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.875.383	83.289.760	83.706.209
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**398.950.711.665**	**401.053.970.611**	**403.169.692.738**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.383.471.730	8.533.894.476	8.687.016.223
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.567.239.935	392.520.076.135	394.482.676.515
	SURPLUS/(DEFISIT)	**-399.150.281.403**	**-304.738.438.378**	**-310.291.792.471**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**399.150.281.403**	**304.738.438.378**	**310.291.792.471**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	379.143.281.403	304.731.438.378	310.284.792.471
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000		
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Pembiayaan Netto	**399.150.281.403**	**304.738.438.378**	**310.291.792.471**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa program urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Indikasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024 – 2026 memuat program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Berikut uraian program pembangunan serta fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Temangung Tahun 2024-2026:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan.

II. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

III. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengembangan Permukiman.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman

di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.

V. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

VI. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

I. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

III. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Peningktan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

i. Program Pengelolaan Persampahan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Sampah.

IV. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota & Penguatan dan

Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

V. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan

Kesertaan Ber-KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

VI. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, & Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

VIII. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

IX. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota.

X. Urusan Pemerinatahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XI. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

XII. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XIII. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

XIV. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

XV. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

XVI. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota.

XVII. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

XVIII. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

I. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Pembangunan Prasarana Pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

e. Program Penyuluhan Pertanian

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

III. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

IV. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

V. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Unsur Pedukung Urusan Pemerintah

I. Sekretariat Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, & Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

b. Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerjasama Daerah.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

II. Sekretariat DPRD

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, & Layanan Administrasi DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Fasilitasi Tugas DPRD.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, & Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), & Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

II. Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, & Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

III. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, & Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

IV. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, & Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

V. Pendidikan Dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis & Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

I. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

7. Unsur Kewilayahan

I. Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. Unsur Pemerintahan Umum

II. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

   Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai indikator kinerja program yang telah ditetapkan, perlu adanya rincian pagu indikatif yang merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta pendanaannya. Data tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Di bagian ini juga dicantumkan kondisi kinerja awal dan kinerja akhir setiap indikator kinerja program.

Indikasi rencana program prioritas beserta rincian kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG					**2.042.507.964.921**	**2.052.616.489.746**	**2.062.775.807.194**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**663.265.653.838**	**666.581.982.107**	**669.914.892.018**		
1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**469.617.846.738**	**471.965.935.972**	**474.325.765.652**		**Dindikpora**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**					**193.647.807.100**	**194.616.046.136**	**195.589.126.366**		**Dindikpora**
		persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a.	n.a.	81,35	81,72	82,09	82,09	
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	39,59	40,41	42,43	44,55	46,78	46,78	
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	94,74	76,60	77,17	77,75	78,34	78,34	
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a.	n.a.	89,05	90,55	92,05	92,05	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	48,29	47,47	49,14	49,99	50,84	50,84	
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	Angka	n.a.	n.a.	0,02	0,03	0,04	0,04	
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase APM SD Sederajat	%	94,12	98,30	98,50	98,70	98,90	98,90	
		persentase APK SD Sederajat	%	100,45	105,05	104,87	104,69	104,51	104,51	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	Angka	0,0296	0,03	0,02	0,01	0,005	0,005	
		Rasio Siswa/Guru SD	Angka	n.a.	n.a.	1:28	1:28	1:28	1:28	
		Rasio Siswa/Rombel SD	Angka	n.a.	n.a.	1:28	1:28	1:28	1:28	
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	61,22	53,90	61,27	61,32	61,37	61,37	
		persentase Kepala SD memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	Angka	n.a.	n.a.	0,1	0,1	0,1	0,1	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	89,49	79,50	90,49	91,49	92,49	92,49	
		persentase APM SMP Sederajat	%	79,77	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50	
		persentase APK SMP Sederajat	%	95,35	98,59	98,70	98,77	98,84	98,84	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,6	98,50	98,70	98,90	99,10	99,10	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	0,29	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14	
		Rasio Siswa/Guru SMP	Angka	n.a.	n.a.	1:32	1:32	1:32	1:32	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	Angka	n.a.	n.a.	1:32	1:32	1:32	1:32	
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	65,53	63,21	66,00	66,25	66,50	66,50	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	Angka	n.a.	n.a.	0,07	0,08	0,09	0,09	
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,14	95,17	95,92	96,67	97,42	97,42	
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100	
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a.	n.a.	88,00	90,00	92,00	92,00	
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	%	n.a.	n.a.	17,00	20,00	26,00	26,00	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**393.542.362.343**	**395.510.074.155**	**397.487.624.525**		
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**153.209.417.343**	**153.975.464.430**	**154.745.341.752**		**DINKES**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**238.350.773.152**	**239.542.527.018**	**240.740.239.653**		**DINKES**
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	75,32	67,5	73	72	71	71	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	13,23	12	13,5	12,80	12	12	
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	13,44	20	13,44	13,44	13,44	13,44	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,09	100	100	100	100	100	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	72	100	100	100	100	
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	9,15	7	9,15	9,15	9,15	9,15	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,95	100	100	100	100	100	
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	15,6	13,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,31	0,5	0,31	0,3	0,29	0,29	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	13,03	27	14	14	14	14	
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	82,33	80	82,5	82,6	82,7	82,7	
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82,05	100	100	100	100	100	
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	89,07	100	100	100	100	100	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,22	100	100	100	100	100	
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	%	-		62	64	66	66	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,78	100	100	100	100	100	
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95,65	100	100	100	100	100	
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87,03	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penduduk	3,62	20	8	7	6	6	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	70.5	80	82	85	87	87	
		persentase rumah sehat	%	87,42	82	87,5	87,6	87,7	82,5	
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	98,72	94	98,2	98,4	98,6	98,6	
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**					**1.457.575.848**	**1.464.863.727**	**1.472.188.046**		**DINKES**
		persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	n.a.	n.a.	23,1	26,9	30,7	30,7	
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman**					**453.146.000**	**455.411.730**	**457.688.789**		**DINKES**
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	100	73,5	100	100	100	100	
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan**					**71.450.000**	**71.807.250**	**72.166.286**		**DINKES**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	94,96	83,09	84,01	84,03	84,05	84,05	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**87.130.053.900**	**87.530.654.170**	**87.933.257.440**		
1.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**13.510.928.080**	**13.578.482.720**	**13.646.375.134**		**DPUPR**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
1.03.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**					**19.245.987.800**	**19.342.217.739**	**19.438.928.828**		**DPUPR**
		persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	58,83	59,32	59,32	59,37	59,42	59,42	
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	97,97	97	97,97	97,97	97,97	97,97	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
1.03.03	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**					**10.529.055.750**	**10.581.701.029**	**10.634.609.534**		**DPUPR**
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	95,32	90,00	95,5	95,7	96	96	
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	n.a	n.a.	100	100	100	100	
1.03.05	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**					**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**		**DPRKPLH**
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
1.03.06	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**					**385.215.000**	**387.141.075**	**389.076.780**		**DPUPR**
		persentase saluran drainase kondisi baik	%	69,04	68,1	69,04	69,34	69,64	69,64	
1.03.08	**Program Penataan Bangunan Gedung**					**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	n.a.	80	100	100	100	100	
1.03.09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**					**210.000.000**	**211.050.000**	**212.105.250**		**DPUPR**
		persentase Trotoar Kondisi Baik	%	73,93	62	73,93	73,97	74,01	74,01	
1.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**					**37.608.893.100**	**37.786.937.566**	**37.965.872.253**		**DPUPR**
		persentase Jalan Kondisi Mantap	%	88,15	85	89,29	89,5	89,75	89,75	
		persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	92,88	93,73	93,75	94,00	94,25	94,25	
		persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	17,61	n.a.	18,61	19,61	20,61	20,61	
1.03.12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**					**629.974.170**	**633.124.041**	**636.289.661**		**DPUPR**
		persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,56	88,1	89,5	89,51	89,52	89,52	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					7.489.000.000	7.526.445.000	7.564.077.225		
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**					**1.186.000.000**	**1.191.930.000**	**1.197.889.650**		**DPRKPLH**
		persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5,25	5	4,46	4,11	3,75	3,75	
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	88,11	86,8	88,3	88,4	88,5	88,5	
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**					**6.303.000.000**	**6.334.515.000**	**6.366.187.575**		**DPRKPLH**
		persentase rumah layak huni	%	94,75	89,42	95,54	95,89	96,25	96,25	
		persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,86	18,25	4,84	4,82	4,80	4,80	
		persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**9.280.086.166**	**9.326.486.597**	**9.373.119.030**		
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**6.313.388.266**	**6.344.955.207**	**6.376.679.983**		**SATPOL PP**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
1.05.02	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					**1.250.660.000**	**1.256.913.300**	**1.263.197.867**		**SATPOL PP**
		persentase Satlinmas yang teratih	%	n.a	n.a.	3,46	6,92	10,38	10,38	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	n.a	n.a.	100	100	100	100	
		persentase penegakan Perda/Perbup	%	n.a	n.a.	100	100	100	100	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.767.493.234**	**1.776.330.700**	**1.785.212.354**		**BPBD**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**					**511.000.000**	**513.555.000**	**516.122.775**		**BPBD**
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
1.05.04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**					**1.205.037.900**	**1.211.063.090**	**1.217.118.405**		**SATPOL PP**
		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60	69,8	75	80	91,67	91,67	
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	46,67	100	100	100	100	100	
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	n.a	n.a.	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	n.a	n.a.	3,08	6,15	9,23	9,23	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**19.412.588.758**	**19.509.651.702**	**19.607.199.960**		
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**5.260.576.758**	**5.286.879.642**	**5.313.314.040**		**DINSOS**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**					**150.000.000**	**150.750.000**	**151.503.750**		**DINSOS**
		Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosal (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
1.06.03	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**					**30.000.000**	**30.150.000**	**30.300.750**		**DINSOS**
		persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**					**950.000.000**	**954.750.000**	**959.523.750**		**DINSOS**
		Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	
1.06.05	**Program perlindungan dan jaminan sosial**					**11.052.012.000**	**11.107.272.060**	**11.162.808.420**		**DINSOS**
		persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	85	100	100	100	100	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	91,11	95	100	100	100	100	
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	100	10,2	50	60	65	65	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	61,7	48	48	48	48	48	
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**					**1.770.000.000**	**1.778.850.000**	**1.787.744.250**		**DINSOS**
		persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**					**200.000.000**	**201.000.000**	**202.005.000**		**DINSOS**
		persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100		100	100	100	100	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**7.603.603.435**	**7.641.621.452**	**7.679.829.559**		
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**		**6.253.603.435**	**6.284.871.452**	**6.316.295.809**		**DINPERINAKER**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**					**850.000.000**	**854.250.000**	**858.521.250**		**DINPERINAKER**
		persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,43	65	72	72,56	73		
		persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	n.a.	n.a.	80	81	82		
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**					**400.000.000**	**402.000.000**	**404.010.000**		**DINPERINAKER**
		persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	53,61	65	35	36	37	37	
		persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	n.a	n.a	30	31	32	32	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	n.a	n.a	1	1,2	1,3	1,3	
		persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	n.a	n.a	90	92	94	94	
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**					**100.000.000**	**100.500.000**	**101.002.500**		**DINPERINAKER**
		persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	84,89	79	82,37	83,37	83,4	83,4	
		persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	76,47	58	69,75	70	75	75	
		persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	n.a.	45	46	47	47	
		persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	93,33	100	100	100	100	100	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**230.000.000**	**231.150.000**	**232.305.750**		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.8.02	**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**					**60.000.000**	**60.300.000**	**60.601.500**		**DPPPAPPKB**
		persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,64	2,34	2,65	2,66	2,67	2,67	
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	45,71	100	100	100	100	
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**					**60.000.000**	**60.300.000**	**60.601.500**		**DPPPAPPKB**
		persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,003	0,011	0,0029	0,0028	0,0027	0,0027	
		persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,003	0,011	0,0029	0,0028	0,0027	0,0027	
2.08.04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DPPPAPPKB**
		persentase desa sayang ibu dan bayi	%	39,79	62,28	62,28	62,63	62,98	62,98	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	
2.08.06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DPPPAPPKB**
		Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	
2.08.07	**Program Perlindungan Khusus Anak**					**35.000.000**	**35.175.000**	**35.350.875**		**DPPPAPPKB**
		persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0048	0,011	0,004	0,0039	0,0038	0,0038	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**25.219.716.738**	**25.345.815.322**	**25.472.544.398**		
2.09.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**24.119.716.738**	**24.240.315.322**	**24.361.516.898**		**DKPPP**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.09.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**					**1.000.000.000**	**1.005.000.000**	**1.010.025.000**		**DKPPP**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	100	100	100	100	
2.09.04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DKPPP**
		persentase penanganan kerawanan pangan	%	n.a	56	100	100	100	100	
2.09.05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DKPPP**
		persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	100	90	90	90	90	90	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		
2.10.04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DPRKPLH**
		Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	
2.09.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**26.706.619.556**	**26.840.152.654**	**26.974.353.417**		
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**13.083.839.556**	**13.149.258.754**	**13.215.005.048**		**DPRKPLH**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**					**200.000.000**	**201.000.000**	**202.005.000**		**DPRKPLH**
		persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	62,73	100	100	100	100	
		persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**					**800.000.000**	**804.000.000**	**808.020.000**		**DPRKPLH**
		Indeks Kualitas Air	Angka	52,22	46	52,7	53,3	53,8	53,8	
		Indeks Kualitas Udara	Angka	83,82	86	83,82	83,87	83,92	83,92	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	1,75		0,067	0,067	0,067	0,067	
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**					**1.500.000.000**	**1.507.500.000**	**1.515.037.500**		**DPRKPLH**
		persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	0	0,07	63,90	65,00	70,00	70,00	
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**					**15.000.000**	**15.075.000**	**15.150.375**		**DPRKPLH**
		persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100	100	
2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DPRKPLH**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DPRKPLH**
		persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	26,88	28,60	30,00	31,30	31,30	
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**					**100.000.000**	**100.500.000**	**101.002.500**		**DPRKPLH**
		persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	84,62	66,67	100	100	100	100	
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**					**10.000.000**	**10.050.000**	**10.100.250**		**DPRKPLH**
		persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**					**10.897.780.000**	**10.952.268.900**	**11.007.030.245**		**DPRKPLH**
		persentase sampah yang tertangani	%	59,06	38,32	60,21	60,50	61	61	
		Cakupan layanan persampahan	%	61,25	55	64,71	66,44	68,17	68,17	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**6.414.772.809**	**6.446.846.673**	**6.479.080.906**		
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**5.164.772.809**	**5.190.596.673**	**5.216.549.656**		**DINDUKCAPIL**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**					**750.000.000**	**753.750.000**	**757.518.750**		**DINDUKCAPIL**
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	99,29	99	87	89,73	92		
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**					**20.000.000**	**20.100.000**	**20.200.500**		**DINDUKCAPIL**
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,77	99	99,82	99,85	99,87		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.12.04	**Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan**					**480.000.000**	**482.400.000**	**484.812.000**		**DINDUKCAPIL**
		persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	91,3	n.a	94,9	98,5	98,5		
		persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	%	0,3	n.a	0,8	1,3	1,8		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**					**7.578.362.609**	**7.616.254.422**	**7.654.335.694**		
2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**3.653.362.609**	**3.671.629.422**	**3.689.987.569**		**DINPERMADES**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.13.02	**Program Penataan Desa**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINPERMADES**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	%	n.a	n.a	50	60	70	70	
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINPERMADES**
		persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	n.a.	8	9	11	11	
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**					**3.545.000.000**	**3.562.725.000**	**3.580.538.625**		**DINPERMADES**
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	%	100	90	50	60	70	70	
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	100	90	70	80	90	90	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	%	n.a	n.a.	100	100	100	100	
		persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	n.a.	37	39	41	41	
		persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	35,71	n.a	38,34	39,47	40,60	40,60	
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**					**330.000.000**	**331.650.000**	**333.308.250**		**DINPERMADES**
		persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	n.a.	3,7	4	5	5	
		persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	n.a.	50	55	60	60	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**15.328.615.561**	**15.405.258.639**	**15.482.284.932**		
2.14.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**3.974.118.561**	**3.993.989.154**	**4.013.959.100**		**DPPPAPPKB**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**					**416.000.000**	**418.080.000**	**420.170.400**		**DPPPAPPKB**
		Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (unmetneed)	%	11,47	9,17	10,50	10,30	10	10	
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	%	2,45	2,04	2	1,85	1,75	2	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	%	6,67	26,3	12,6	12,5	12,4	12,4	
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**					**6.622.597.000**	**6.655.709.985**	**6.688.988.535**		**DPPPAPPKB**
		Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	76,58	76,21	88,5	88,6	88,7	88,7	
		Pesentase Kepesertaan KB Aktif	%	76,58	76,21	75,75	75,80	75,85	75,85	
		Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	%	45,03	49,19	46,10	46,15	46,20	46,20	
		Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	%	33,9	33,9	37,88	45,45	53,03	53,03	
2.14.04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**					**4.315.900.000**	**4.337.479.500**	**4.359.166.898**		**DPPPAPPKB**
		Indeks Pembangunan Keluarga	%	55,97	50	55,98	55,99	56	56	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					19.719.671.958	19.818.270.318	19.917.361.669		
2.15.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**5.691.894.358**	**5.720.353.830**	**5.748.955.599**		**DINHUB**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**14.027.777.600**	**14.097.916.488**	**14.168.406.070**		**DINHUB**
		persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	41,06	38,647343	41,55	42,03	42,03	42,03	
		persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	0	0	30	35	40	40	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	98,18	100,00	98,25	99,12	99,12	99,12	
		persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	85,71	100	100	100	100	100	
		persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,56	99,50267789	99,61	99,66	99,71	99,71	
		persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	32,08	14,26	33,48	33,86	34,24	34,24	
		persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	n.a	n.a.	63,58	64,09	64,60	64,60	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**9.293.215.198**	**9.339.681.274**	**9.386.379.680**		
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**4.026.768.083**	**4.046.901.923**	**4.067.136.433**		**DINKOMINFO**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.16.02	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**					**3.535.570.815**	**3.553.248.669**	**3.571.014.912**		**DINKOMINFO**
		persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	25	30	35	40	45	45	
		persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	n.a	0	100	100	100	100	
		persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	0	80	85,00	90,00	100	100	
2.16.03	**Program Aplikasi Informatika**					**1.730.876.300**	**1.739.530.682**	**1.748.228.335**		**DINKOMINFO**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	n.a	0	100	100	100	100	
		persentase layanan publik secara elektronik	%	n.a	0	50,00	55,00	60,00	60,00	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**15.370.897.754**	**15.447.752.243**	**15.524.991.004**		
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**14.759.527.754**	**14.833.325.393**	**14.907.492.020**		**DINKOPDAG**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.17.03	**program pengawasan dan pemeriksaan koperasi**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINKOPDAG**
		persentase koperasi sehat	%	15,09	10,71	36	48	60	60	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.17.04	**program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINKOPDAG**
		persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	n.a	n.a.	1,74	2,33	2,91	2,91	
2.17.05	**program pendidikan dan latihan perkoperasian**					**486.370.000**	**488.801.850**	**491.245.859**		**DINKOPDAG**
		persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	89,14	75	91,43	93,71	96	96	
2.17.06	**program pemberdayaan dan perlindungan koperasi**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINKOPDAG**
		persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	n.a	n.a.	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.17.07	**program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)**					**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINKOPDAG**
		persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	n.a	n.a.	4,45	6,67	8,89	8,89	
2.17.08	**program pengembangan umkm**	**program pengembangan umkm**				**25.000.000**	**25.125.000**	**25.250.625**		**DINKOPDAG**
		persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	n.a.	0,92	0,96	1	1	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					**4.154.154.974**	**4.174.925.749**	**4.195.800.378**		
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**3.288.954.974**	**3.305.399.749**	**3.321.926.748**		**DPM**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**					**20.000.000**	**20.100.000**	**20.200.500**		**DPM**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	n.a	50	60	70	70	
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**					**60.000.000**	**60.300.000**	**60.601.500**		**DPM**
		persentase promosi penanaman modal	%	n.a	n.a	25	50	75	75	
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**					**350.000.000**	**351.750.000**	**353.508.750**		**DPM**
		persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
		persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**					**425.200.000**	**427.326.000**	**429.462.630**		**DPM**
		persentase pengendalian penanaman modal	%	n.a	n.a	12	16	20	20	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**					**10.000.000**	**10.050.000**	**10.100.250**		**DPM**
		persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	n.a	100	100	100	20	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**5.884.448.500**	**5.913.870.743**	**5.943.440.096**		
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**					**990.000.000**	**994.950.000**	**999.924.750**		**DINDIKPORA**
		persentase organisasi pemuda yang aktif	%	92,86	80,76	95	95,5	96	96	
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**					**4.494.448.500**	**4.516.920.743**	**4.539.505.346**		**DINDIKPORA**
		persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	96	35,4	96,45	96,5	96,6	96,6	
		persentase prestasi olahraga	%	45,24	59	60	62	64	64	
2.19.04	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**					**400.000.000**	**402.000.000**	**404.010.000**		**DINDIKPORA**
		persentase gugus depan yang aktif	%	100	92,89	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**107.833.000**	**108.372.165**	**108.914.026**		
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**					**107.833.000**	**108.372.165**	**108.914.026**		**DINKOMINFO**
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**50.000.000**	**50.000.000**	**50.250.000**		
2.21.2	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**					**50.000.000**	**50.250.000**	**50.501.250**		**DINKOMINFO**
		persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	n.a	n.a	33,3	66,7	100	100	
		persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	n.a	n.a	30	60	100	100	
2.22	**URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**4.696.730.188**	**4.720.213.839**	**4.743.814.908**		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.22.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**4.155.503.688**	**4.176.281.206**	**4.197.162.612**		**DINBUDPAR**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**					**541.226.500**	**543.932.633**	**546.652.296**		**DINBUDPAR**
		persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	n.a	n.a	4,1	8,2	12,3	12,3	
		persentase kelompok kesenian yang produktif	%	n.a	n.a	38	44	50	50	
		persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,61	6,73	7,49	9,25	11,01	11,01	
		persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	5,18	9,18	13,18	17,18	17,18	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**4.225.599.797**	**4.246.727.796**	**4.267.961.435**		
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**3.825.599.797**	**3.844.727.796**	**3.863.951.435**		**DINPUSIP**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**					**385.000.000**	**387.000.000**	**389.010.000**		**DINPUSIP**
		Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	**%**	n.a	n.a	0,025	0,026	0,027	0,027	
		persentase peminjam di perpustakaan	**%**	n.a	n.a	40	42	46	46	
		Persentase perpustakaan yang aktif	**%**	n.a	n.a	34	35	36	36	
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**					**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**		**DINPUSIP**
		Persentase Penelusuran Naskah Kuno	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**150.000.000**	**150.750.000**	**151.503.750**		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**					**150.000.000**	**150.750.000**	**151.503.750**		**DINPUSIP**
		Persentase arsip vital konvesional yang dialih mediakan	%	40,08	50	55,00	60,00	65,00	65,00	
		Persentase audit internal kearsipan	%	53,333	60,000	66,67	73,33	80,00	80,00	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**2.509.166.000**	**2.521.711.830**	**2.534.320.389**		
3.25.03	**program pengelolaan perikanan tangkap**					**2.459.166.000**	**2.471.461.830**	**2.483.819.139**		**DKPPP**
		persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	43,58	30	10	10	10	10	
3.25.04	**program pengelolaan perikanan budidaya**					**10.000.000**	**10.050.000**	**10.100.250**		**DKPPP**
		Produktivitas ikan nila	kg/m2	5,4	6	1,2	1,3	1,4	1,4	
		Produktivitas ikan lele	kg/m2	12,6	14	12,6	12,7	12,8	12,8	
3.25.05	**program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**					**10.000.000**	**10.050.000**	**10.100.250**		**DKPPP**
		persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	100	33	10	10	10	10	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
3.25.06	**program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**					**30.000.000**	**30.150.000**	**30.300.750**		**DKPPP**
		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	n.a	n.a	22,08	22,52	22,97	22,97	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**309.425.000**	**310.972.125**	**312.526.986**		
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**					**309.425.000**	**310.972.125**	**312.526.986**		**DINBUDPAR**
		persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	100	21	0,03	0,04	0,05	0,05	
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1	1	
		persentase Peningkatan Desa Wisata	%	8,65	11,76	13,26	14,76	16,26	16,26	
		persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	9,9	9,02	4,9	5,46	5,92	5,92	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**19.293.106.000**	**19.389.571.530**	**19.486.519.388**		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
3.27.02	**program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**					**6.093.000.000**	**6.123.465.000**	**6.154.082.325**		**DKPPP**
		Produktivitas padi	Kuintal/ha	61,03	63,3	61,25	61,5	61,75	61,75	
		Produktivitas jagung	Kuintal/ha	54	46	54,5	54,6	54,7	54,7	
		Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	69,16	79,6	60,5	61	61,25	61,25	
		Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	81	80,15	68	69	70	70	
		Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	76,36	55	50	50,5	51	51	
		Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	79,04	69,5	65	65,5	66	66	
		Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,68	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2	
		Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	6,93	7,25	7,1	7,15	7,2	7,2	
		Produktivitas kopi arabika	Kuintal/ha	5,9	7	6,5	6,5	6,5	6,5	
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,4	177,6	177,4	177,5	177,6	177,6	
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,7	13,71	13,7	13,71	13,72	13,72	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,7	13,71	13,7	13,71	13,72	13,72	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
		Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,35	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	
		persentase kelahiran pedet	%	na	-	55,5	56	56,5	56,5	
3.27.03	**program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**					**7.794.515.400**	**7.833.487.977**	**7.872.655.417**		**DKPPP**
		persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
3.27.04	**program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**					**525.575.000**	**528.202.875**	**530.843.889**		**DKPPP**
		persentase penanganan penyakit hewan	%	100	90	85	87	89	89	
		persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	84,26	70	75	77	79	79	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
3.27.05	**program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**					**500.000.000**	**502.500.000**	**505.012.500**		**DKPPP**
		persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	n.a	n.a	41	42	43	43	
3.27.07	**program penyuluhan pertanian**					**4.380.015.600**	**4.401.915.678**	**4.423.925.256**		**DKPPP**
		persentase Kelompok Tani yanga naik kelas	%	1.03	1,033591731	1,30	1,30	1,30	1,30	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**1.007.500.000**	**1.012.537.500**	**1.017.600.188**		
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**					**900.000.000**	**904.500.000**	**909.022.500**		**DINKOPDAG**
		persentase fasilitasi pelaku usaha informal	%	n.a	n.a	13,71	27,42	41,12	41,12	
		persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	50	67	67	67	67	67	
		persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	n.a	-	1,5	2,41	3,33	3,33	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	62,27	70	75	79,63	84,26	84,26	
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**					**10.000.000**	**10.050.000**	**10.100.250**		**DINKOPDAG**
		persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	98,08	95	70	75	80	80	
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**					**17.500.000**	**17.587.500**	**17.675.438**		**DINKOPDAG**
		cakupan pelaku usaha yang di bina	%	n.a	n.a	1,15	2,31	3,46	3,46	
3.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**					**40.000.000**	**40.200.000**	**40.401.000**		**DINKOPDAG**
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	100	95	98,37	99,41	99,42	99,42	
3.30.07	**program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri**					**40.000.000**	**40.200.000**	**40.401.000**		**DINKOPDAG**
		persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	n.a	n.a	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**810.000.000**	**814.050.000**	**818.120.250**		
3.31.02	**Program Perencanaan dan pembangunan industri**					**810.000.000**	**814.050.000**	**818.120.250**		**DINPERINAKER**
		persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	64,62	35	71,62	78,2	85,2	85,2	
		persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	9,92	5,3	15,36	20,95	26,53	26,53	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**33.892.866.310**	**34.062.330.642**	**34.232.642.295**		
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**27.077.627.310**	**27.213.015.447**	**27.349.080.524**		
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	**Bag. Umum**
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	**Bag. Umum**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	6,6	10,8	17	23,9	32,6	32,6	**Bag. Organisasi**
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	**Bag. Prokompim**
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**					**4.783.738.600**	**4.807.657.293**	**4.831.695.579**		
		persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	**Bag. Pemerintahan**
		persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	**Bag.Pemerintahan**
		persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	**Bag. Pemerintahan**
		persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%	90,95	90	90	90	90	90	**BAG KESRA**
		persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	n.a	60	60	60	60	60	**BAG KESRA**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase produk hukum yang difasilitasi	%	n.a	n.a	100	100	100	100	**BAG HUKUM**
		persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	**BAG HUKUM**
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	100	**BAG HUKUM**
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	100	**BAG HUKUM**
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**					**2.031.500.400**	**2.041.657.902**	**2.051.866.192**		
		persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	**BAG PEREKONOMIAN**
		persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	**BAG PEREKONOMIAN**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66,67	80	83,33	83,33	83,33	83,33	**BAG PEREKONOMIAN**
		persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	**BAG PEMBANGUNAN**
		persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	**BAG PEMBANGUNAN**
		persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	**BAG PEMBANGUNAN**
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	95	100	100	100	100	100	**BAG PBJ**
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	100	100	100	**BAG PBJ**
		persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	96,51	100	97	98	99	99	**BAG PBJ**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**45.616.328.794**	**45.844.410.438**	**46.073.632.490**		
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**31.119.221.401**	**31.274.817.508**	**31.431.191.596**		**SEKRETARIAT DPRD**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
4.02.02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					**14.497.107.393**	**14.569.592.930**	**14.642.440.895**		**SEKRETARIAT DPRD**
		persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	n.a	n.a	90	90	90	90	
		persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	74,91	100	95	95	95	95	
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	58	100	100	100	100	
		persentase kegiatan peningakatan Kapasitas Anggota DPRD	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
5.01	**PERENCANAAN**									

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
						7.724.225.055	**7.762.846.180**	**7.801.660.411**		
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**5.319.442.555**	**5.346.039.768**	**5.372.769.967**		**BAPPEDA**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**					**819.782.500**	**823.881.413**	**828.000.820**		**BAPPEDA**
		persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	95	95	95	95	95	
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**					**1.585.000.000**	**1.592.925.000**	**1.600.889.625**		**BAPPEDA**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	91,94	90	90	90	90	90	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	90	90	90	90	90	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	100	90	90	90	90	90	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	100	90	90	90	90	90	
5.02	**KEUANGAN**					**506.020.077.31**	**508.550.177.70**	**511.092.928.588**		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
						3	**0**			
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**25.834.793.306**	**25.963.967.273**	**26.093.787.109**		**BPKPAD**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
5.02.02	**Program pengelolaan Keuangan daerah**					**478.259.949.007**	**480.651.248.752**	**483.054.504.996**		**BPKPAD**
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	%	100	89,96	100	100	100	100	
		persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	42,86	100	100	100	100	100	
		persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	n.a	n.a	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**					**1.215.148.000**	**1.221.223.740**	**1.227.329.859**		**BPKPAD**
		Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	99,1	80	80	85	85	
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**710.187.000**	**713.737.935**	**717.306.625**		**BPKPAD**
		persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	20,84	17,79	8	9	10	10	
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	n.a	n.a	95	95,5	96	96	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**8.018.111.674**	**8.058.202.232**	**8.098.493.244**		
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**4.230.612.174**	**4.251.765.235**	**4.273.024.061**		**BKPSDM**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**					**3.787.499.500**	**3.806.436.998**	**3.825.469.182**		**BKPSDM**
		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	38,11	40,29	41,39	42,36	42,57	42,57	
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	%	86,32	86,41	86,5	86,58	87,67	87,67	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**71.670.000**	**72.028.350**	**72.388.492**		
5.04.02	**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia**					**71.670.000**	**72.028.350**	**72.388.492**		**BKPSDM**
		Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,17	96,17	96,18	97	97,02	97,02	
5.05	**PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN**					**970.000.000**	**974.850.000**	**979.724.250**		
5.05.02	**Program penelitian dan pengembangan Daerah**					**970.000.000**	**974.850.000**	**979.724.250**		**BAPPEDA**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplemantasikan	%	100	65	100	100	100	100	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**6.524.492.597**	**6.557.115.060**	**6.589.900.635**		
6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**5.593.356.597**	**5.621.323.380**	**5.649.429.997**		**INSPEKTORAT**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**					**550.215.000**	**552.966.075**	**555.730.905**		**INSPEKTORAT**
		persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan,	%	80,28	46	61	75	81	81	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi								
		persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	38,17	23	48	53	59	59	
		persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	91,17	48	63	79	94	94	
		persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	100	100	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**380.921.000**	**382.825.605**	**384.739.733**		**INSPEKTORAT**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	60	100	100	100	100	
		persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	n.a	n.a	20	54	100	100	
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	n.a	n.a	3	3	3	3	
7.01	**KECAMATAN**					**69.234.534.987**	**69.511.992.662**	**69.790.837.625**		
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**52.653.774.425**	**52.917.043.297**	**53.181.628.514**		**KECAMATAN**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**					**2.001.001.862**	**2.011.006.871**	**2.021.061.906**		**KECAMATAN**
		persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	%	99,00	100	100	100	100	100	
		persentase realisasi penerimaan PBB	%	98,82	100	100	100	100	100	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					**13.743.000.000**	**13.743.000.000**	**13.743.000.000**		**KECAMATAN**
		Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%	86,60	100	100	100	100	100	
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%	90,00	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
7.01.04	**Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum**					**364.000.000**	**365.820.000**	**367.649.100**		**KECAMATAN**
		persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**472.758.700**	**475.122.494**	**477.498.106**		**KECAMATAN**
		persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	n.a	n.a	100	100	100	100	
		Persenatase jumlah desa yang menyelesaiakan APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**5.834.980.875**	**5.864.155.779**	**5.893.476.558**		
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**2.984.980.875**	**2.999.905.779**	**3.014.905.308**		**BANKESBANGPOL**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	
8.01.02	**program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**					**460.000.000**	**462.300.000**	**464.611.500**		**BANKESBANGPOL**
		persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	na	na	80	90	100	100	
8.01.03	**program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**					**1.500.000.000**	**1.507.500.000**	**1.515.037.500**		**BANKESBANGPOL**
		persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	n.a	na	80	90	100	100	
8.01.04	**program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**					**30.000.000**	**30.150.000**	**30.300.750**		**BANKESBANGPOL**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
						2024	2025	2026	2026	
		persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	n.a	na	13,33	16,67	20	20	
8.01.05	**program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**					**300.000.000**	**301.500.000**	**303.007.500**		**BANKESBANGPOL**
		persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n.a	na	100	100	100	100	
8.01.06	**program peningkatan kewaspadaaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**					**560.000.000**	**562.800.000**	**565.614.000**		**BANKESBANGPOL**
		persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	n.a	na	100	100	100	100	

Sumber: Bappeda, data diolah

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja disusun atas dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ukuran untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah dapat tercapai. Suatu indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*). Indikator kinerja daerah merupakan hasil akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*).

Perumusan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan beberapa indikator yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah yang ditetapkan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Target			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
1	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**70,77**	**70,49**	**71,77**	**72,27**	**72,77**	**72,77**
a	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,41	7,80	7,85	7,95	8,05	8,05
b	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,55	12,49	12,6	12,65	12,70	12,70
c	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,98	3,56	4,18	4,23	4,23	4,23
d	Indeks Pembangunan Olahrga	Angka	2,97	3,41	3,61	3,81	3,90	3,90
e	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,31	3,41	4,21	4,66	5,11	5,11
f	Indeks Toleransi	Angka	4,50	4,19	4,50	4,51	4,52	4,52
g	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,70	75,53	75,71	75,72	75,73	75,73
h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,71	95,65	95,75	95,77	95,85	95,85
2	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,20**	**4,80**	**5,27**	**5,28**	**5,29**	**5,29**
a	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	30,93	29,57	32,25	33,50	35	35
b	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	18,46	18,7	18,8	19	19,2	19,2
c	Angka Kemiskinan	Angka	9,33	9,80	8,50	8,10	7,70	7,70
d	Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)	Angka	2,54	3,50	2,52	2,51	2,50	2,50

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Target			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
e	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	n.a	n.a	74,95	75,20	75,29	75,29
f	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	69,86	70,53	63,47	64,05	64,83	64,83
g	Indeks Rasa Aman	Angka	4,55	4,44	4,62	4,69	4,76	4,76
3	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Predikat**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**	**B/>60-70**
a	IPKD	Angka	62,74	79,5	65,5	66	66,5	66,5
b	Indeks Merit System	Angka	0,482	0,61	0,50	0,55	0,61	0,61
c	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B/>60-70	BB/>70-80	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70
d	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	83,41 (B)	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama tersebut secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga								
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	55,89	51,00	56,50	57,10	57,70	57,70
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,16	96,97	98,16	98,39	98,62	98,62
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	86,75	97,2	90,36	91,57	92,77	92,77
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	n.a	n.a	28,00	36,00	44,00	44,00
	Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	n.a	n.a	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	n.a	n.a	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	n.a	n.a	100	100	100	100
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	%	18,92	100	100	100	100	100

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
		atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	n.a.	n.a.	38	40	45	45
	Meningkatnya Atlet berprestasi	Persentae atlet berprestasi	%	40,91	21,00	35,00	36,00	37,00	37,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	n.a	30	30,1	30,2	30,3	30,3
	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	62,46	67	68	70	72	72
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase kelompok seni dan budaya yang aktif	Angka	n.a	n.a	21,05	26,10	31,15	31,15
	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,73	1,65	2,02	2,10	2,15	2,15
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
Meningkatnya toleransi masyarakat	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	n.a	n.a	100	100	100	100

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
	Dinas Kesehatan								
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0	0	0,13	0,15	0,20	0,20
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,16	10,18	10,20	10,22	10,24	10,24
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,54	0,65	0,63	0,60	0,55	0,55
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan								
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	n.a	n.a	23,38	23,30	23,25	23,25
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,1	78	78,5	78,7	79	79
	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Ribu Rp	396,839	349,229	349,364	349,500	349,638	349,638
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan								

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,79	20	20,79	20,80	20,90	20,90
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	15,09	10,71	36	48	60	60
		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	n.a	0,92	0,96	1,00	1,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja								
	Meningkatnya nilai usaha industri	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	%	26,19	27	27,10	27,20	27,25	27,25
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,14	76,10	76,15	76,20	76,25	76,25
	Dinas Penanaman Modal								
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	n.a	2,5	3	3,5	3,5
	Dinas Sosial								
	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	64,30	63	63	63	63	63
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	9,77	6,39	10,53	11,65	13,16	13,16

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,79	84,00	84,47	84,64	84,86	84,86
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,56	89,50	89,50	89,51	89,52	89,52
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup								
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	98,99	97,97	99,02	99,03	99,03	99,03
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,22	46,00	52,27	53,3	53,8	53,8
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,82	86,00	83,82	83,87	83,92	83,92
	Dinas Perhubungan								
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	41,06	38,65	41,55	42,03	42,03	42,03
	Meningkatnya Layanan Perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	n.a	n.a	67,11	68,72	70,21	70,21
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indek Resiko Bencana	Angka	174,59	192,08	142,00	141,50	141,00	141,00
	Satpol PP dan Damkar								
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Angka	0	0	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Angka	60,64	100	100	100	100	100
		Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	Angka	468	44	310	305	300	300
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,2	4,5	4,55	4,6	4,6
		Management Resiko Indeks (MRI)	Level	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif / 60,01-100,00	Sangat Inovatif / 60,01-100,00	Sangat Inovatif / 60,01-100,00	Sangat Inovatif / 60,01-100,00	Sangat Inovatif / 60,01-100,00	Sangat Inovatif / 60,01-100,00
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah								

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LPKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	16,69	15	15,50	15,75	16	16
	Dinas Komunikasi dan Informatika								
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	88,33	89,75	89,95	90,15	90,35	90,35
	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	Indeks SPBE	Angka	3,12	3,00	3,20	3,35	3,5	3,5
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	53,13	50,09	52,90	52,95	53,00	53,00
	Sekreatriat Daerah								
Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel,	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilia evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (EPPD)	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD								

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	n.a	n.a	100	100	100	100
	Inspektorat								
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	93,6	n.a	93,7	93,8	93,9	93,9
		Maturitas SPIP	Nilai	3,008	3,045	3,009	3,12	3,12	3,12
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,91	n.a	2,92	2,93	2,95	2,95
		Kapabilitas APIP	Level	n.a.	n.a	3	3	3	3
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	83,84	0	92,06	93,70	95,36	95,36
	20 Kecamatan								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Angka	84,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung , 2022

8.3. Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 8.3

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrga	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas , berdaya saing dan non diskriminatif	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a.	n.a	81,35	81,72	82,09	82,09
				Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	39,59	40,41	42,43	44,55	46,78	46,78
				Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	94,74	76,60	77,17	77,75	78,34	78,34
				Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a.	n.a.	89,05	90,55	92,05	92,05
				Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	48,29	47,47	49,14	49,99	50,84	50,84
				Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	n.a.	n.a.	0,02	0,03	0,04	0,04
				Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase APM SD Sederajat	%	94,12	98,30	98,50	98,70	98,90	98,90
				Persentase APK SD Sederajat	%	100	105,05	104,87	104,69	104,51	104,51
				Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,0296	0,03	0,02	0,01	0,005	0,005
				Rasio Siswa/Guru SD	%	n.a.	n.a.	01:28	01:28	01:28	01:28
				Rasio Siswa/Rombel SD	%	n.a.	n.a.	01:28	01:28	01:28	01:28
				Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	61,22	53,90	61,27	61,32	61,37	61,37
				Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Rasio Jumlah Pengawas SD	%	n.a.	n.a.	0,1	0,1	0,1	0,1
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	89,49	79,50	90,49	91,49	92,49	92,49
				Persentase APM SMP Sederajat	%	79,77	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50
				Persentase APK SMP Sederajat	%	95,35	98,59	98,70	98,77	98,84	98,84
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,60	98,50	98,70	98,90	99,10	99,10
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	0,29	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14
				Rasio Siswa/Guru SMP	Angka	n.a.	n.a.	01:32	01:32	01:32	01:32
				Rasio Siswa/Rombel SMP	Angka	n.a.	n.a.	01:32	01:32	01:32	01:32
				Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	65,53	63,21	66,00	66,25	66,50	66,50
				Persentase Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	n.a.	n.a.	0,07	0,08	0,09	0,09
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,14	95,17	95,92	96,67	97,42	97,42
				Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
				Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a.	n.a.	88,00	90,00	92,00	92,00
				Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	n.a.	n.a.	17,00	20,00	26,00	26,00

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
		Meningkatnya Daya saing pemuda dan olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	92,86	80,76	95	95,5	96	96
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	96	35,4	96,45	96,5	96,6	96,6
				Persentase prestasi olahraga	%	45,24	59	60	62	64	64
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	100	92,89	100	100	100	100
2	Dinas Kesehatan	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	75,32	67,5	73	72	71	71
				Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	13,23	12	13,5	12,80	12	12
				Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	13,44	20	13,44	13,44	13,44	13,44
				Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,09	100	100	100	100	100
				Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	72	100	100	100	100
				Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	9,15	7	9,15	9,15	9,15	9,15
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,95	100	100	100	100	100
				Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	15,60	13,6	15,60	15,60	15,60	15,60
				Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,31	0,5	0,31	0,30	0,29	0,29

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	28,90	27	14	14	14	14
				Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	82,33	80	82,5	82,6	82,7	82,7
				Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82,05	100	100	100	100	100
				Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	89,07	100	100	100	100	100
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,22	100	100	100	100	100
				Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	n.a	n.a	62	64	66	66
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,78	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95,65	100	100	100	100	100
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87,03	100	100	100	100	100
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penduduk	3,62	20	8	7	6	6
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	70.5	80	82	85	87	87
				Persentase rumah sehat	%	87,42	82	87,5	87,6	87,7	87,7
				Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	98,72	98	98,2	98,4	98,6	98,6

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	n.a	n.a	23,1	26,9	30,7	30,7
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	100	73,5	85	100	100	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	94,96	83,09	84,01	84,03	84,05	84,05
	Rumah Sakit Umum Daerah	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya utilitas dan aksesibilita s wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	58,83	59,32	59,32	59,37	59,52	59,52

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	97,97	97	97,9	97,9	97,9	97,9
			Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	95,32	90	95,5	95,7	96	96
				Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,04	68,1	69,04	69,34	69,64	69,64
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	73,93	62	73,93	73,97	74,01	74,01
			Program penataan bangunan gedung	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	88,15	85	89,29	89,5	89,75	89,75
				Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	92,88	93,73	93,75	94	94,25	94,25

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	17,61	n.a	18,61	19,61	20,61	20,61
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,56	88,1	89,50	89,51	89,52	89,52
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingungan Hidup	Penduduk dengan hunian yang layak	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5,25	75,16	5,00	4,46	4,11	4,11
				Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	88,11	100	88,3	88,4	88,5	88,5
			Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	94,75	100	95,54	95,89	96,25	96,25
				Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,86	100	4,84	4,82	4,8	4,8
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	52,22	100	52,7	53,33	53,8	53,8
				Indeks Kualitas Udara	Angka	83,82	97,21	83,82	83,87	83,92	83,92
				Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	1,75	100	0,067	0,067	0,067	0,067

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	n.a	n.a	63,90	63,90	65,00	65,00
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	26,88	28,60	30,00	31,30	31,30

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Hidup Untuk Masyarakat								
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	84,62	0,00	100	100	100	100
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	59,06	38,20	60,21	60,50	61,00	61,00
				Cakupan layanan persampahan	%	61,25	55,00	64,71	66,44	68,17	68,17
5	Dinas Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PSKS	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100
			Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
				Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
				Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	85	100	100	100	100
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	91,11	95	100	100	100	100
				Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	100	10,2	50	60	65	65
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	61,70	48	48	48	48	48
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga	Program Pelatihan Kerja dan	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,43	65	72	72,56	73	73

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
		kerja, serta meningkatnya kesempatan kerja	Produktivitas Tenaga Kerja								
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	n.a	n.a	80	81	82	82
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	53,61	65	35	36	37	37
				Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	n.a	n.a	30	31	32	32
				Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	n.a	n.a	1	1,2	1,3	1,3
				Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	n.a	n.a	90	92	94	94
			Program Hubungan Industrial	Presentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	84,89	79	82,37	83,37	83,4	83,4
				Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	76,47	58	69,75	70	75	75
				Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	n.a	45	46	47	47
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	93,33	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	64,62	35	71,62	78,2	85,2	85,2
				Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	9,92	5,3	15,36	20,95	26,53	26,53
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,64	2,34	2,65	2,66	2,67	2,67
				Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	45,71	100	100	100	100
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,003	0,01	0,0029	0,0028	0,0027	0,0027
				Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,003	0.011	0,0029	0,0028	0,0027	0,0027
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	39,79	62,28	62,28	62,63	62,98	62,98

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	kategori	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0048	0,011	0,004	0,0039	0,0038	0,0038
		Meningkatnya pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	%	11,47	9,17	10,5	10,3	10	10
				Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,45	2,04	2	1,85	1,75	1,75
				Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	6,67	26,3	12,6	12,5	12,4	12,4

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	76,58	76,21	88,5	88,6	88,7	88,7
				Persentase kepesertaan KB aktif	%	76,58	76,21	75,75	75,8	75,85	75,85
				Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	45,03	49,19	46,1	46,15	46,2	46,2
				Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	33,9	33,9	37,88	45,45	53,03	53,03
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	%	55,97	50	55,98	55,99	56	56
8	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	41,06	38,65	41,55	42,03	42,03	42,03

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
		Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	0	0	30	35	40	40
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	98,18	100	98,25	99,12	99,12	99,12
				Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
				Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	85,71	100	100	100	100	100
				Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,56	100	99,61	99,66	99,71	99,71
				Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	32,08	14,26	33,48	33,86	34,24	34,24
				Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	n.a	n.a	63,58	64,09	64,60	64,60
9	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang optimal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja spending mandatory dalam APBD	%	100	89,96	100	100	100	100
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	42,86	100	100	100	100	100
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	88,21	99,1	80	80	85	85
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	20,84	17,79	8	9	10	10
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	n.a	n.a	95	95,5	96	96
				Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	%	n.a	n.a	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	25	30	35	40	45	45
				Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	0,00	80,00	85,00	90,00	100	100
			Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase layanan publik secara elektronik	%	n.a	n.a	50,00	55,00	60,00	60,00
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	n.a	n.a	33,3	66,7	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	n.a	n.a	30	60	100	100
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Meningkatnya peran koperasi UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	15,09	10,71	36	48	60	60
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	n.a	n.a	1,74	2,33	2,91	2,91
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	89,14	75	91,43	93,71	96	96
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	prosentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha	prosentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	n.a	n.a	4,45	6,67	8,89	8,89

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Mikro (UMKM)								
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	n.a	0,92	0,96	1	1
		Meningkatnya kelancaran usaha perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	prosentase fasilitasi pelaku usaha informal	%	n.a	n.a	13,71	27,42	41,12	41,12
				Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	50	67	67	67	67	67
				Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	n.a	n.a	1,5	2,41	3,33	3,33
				Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	62,27	70	75	79,63	84,26	84,26
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	98,08	68,41	70	75	80	80
			Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	n.a	n.a	1,15	2,31	3,46	3,46

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	100	95	98,37	99,41	99,42	99,42
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	n.a	n.a	100	100	100	100
12	Dinas Penanaman Modal	Meningkatnya fasilitasi penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	100	100
				presentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	n.a	50	60	70	70
			Program Promosi Penanaman Modal	presentase promosi penanaman modal	%	n.a	n.a	25	50	75	75
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	presentase pengendalian penanaman modal	%	n.a	n.a	12	16	20	20
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	n.a	100	100	100	100
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	38,11	40,29	41,39	42,36	42,57	42,57
				Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	%	86,32	86,41	86,5	86,58	87,67	87,67
			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,17	96,17	96,18	97	97,02	97,02

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	n.a	n.a	4,1	8,2	12,3	12,3
				Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	n.a	n.a	38	44	50	50
				Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,61	6,73	7,49	9,25	11,01	11,01
				Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	5,18	9,18	13,18	17,18	17,18
		Meningkatnya jumlah wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	100	21	0,03	0,04	0,05	0,05
				Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1	1
				Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	8,65	11,76	13,26	14,76	16,26	16,26
				Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	9,90	9,02	9,5	10	10,5	10,5
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilika dokumen kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	99,29	89,47	87,03	89,73	92,43	92,43
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,77	0	99,82	99,85	99,87	99,87

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	91,3	0	94,9	98,5	98,5	98,5
				Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	0,3	0	0,8	1,3	1,8	1,8
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menigkatnya kualitas Pemerintah Desa	Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	angka	n.a	n.a	50	60	70	70
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	n.a	8	9	11	11
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaoran Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	n.a	n.a	50	60	70	70
				Persentase penyelnggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	n.a	n.a	70	80	90	90

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	n.a	37	39	41	41
				Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	35,71	36,84	38,34	39,47	40,6	40,6
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	n.a	3,7	4	5	5
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	Angka	n.a	n.a	50	55	60	60
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Meningkatnya budaya baca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	na	na	0,025	0,025	0,025	0,025
				Persentase peminjam di perpustakaan	%	na	na	40	42	46	46
				Persentase perpustakaan yang aktif	%	na	na	34	35	36	36
		Meningkatnya penyelenggaraan	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip konvesional yang dialih mediakan	%	40,08	50	55	60	65	65

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
		kearsipan sesuai pedoman									
				Persentase audit internal kearsipan	%	53,33	60	66,67	73,33	80	80
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	n.a	n.a	100	100	100	100
18	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan	Meningkatnya kecukupan kebutuhanpangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	100	100	100	100
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	na	na	100	100	100	100
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	100	90	90	90	90	90
		Meningkatnya pengembangan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	43,58	30	10	10	10	10

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	kg/m2	5,40	6	1,2	1,3	1,4	1,4
				Produktivitas ikan lele	kg/m2	12,60	14	12,6	12,7	12,8	12,8
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	100	33	10	10	10	10
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	na	na	22,08	22,52	22,97	22,97
		Meningkatnya pendapatan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	Kuintal/ha	61,03	63,30	61,25	61,5	61,75	61,75
				Produktivitas jagung	Kuintal/ha	54,00	46,00	54,5	54,6	54,7	54,7
				Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	69,16	79,60	60,5	61	61,25	61,25
				Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	81,00	80,15	68	69	70	70
				Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	76,36	55,00	50	50,5	51	51
				Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	79,04	69,50	65	65,5	66	66

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Produktivitas tembakau	Kuintal /ha	6,68	6,80	6,2	6,2	6,2	6,2
				Produktivitas kopi robusta	Kuintal /ha	6,93	7,25	7,1	7,15	7,2	7,2
				Produktivitas kopi arabika	Kuintal /ha	5,90	7,00	6,5	6,5	6,5	6,5
				Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,4	177,60	177,4	177,5	177,6	177,6
				Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,70	13,71	13,7	13,71	13,72	13,72
				Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,70	13,71	13,7	13,71	13,72	13,72
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
				Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,35	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88
				Persentase kelahiran pedet	%	na	na	55,5	56	56,5	56,5
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	na	na	100	100	100	100
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	100	90	85	87	89	89

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	84,26	70	75	77	79	79
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	na	na	41	42	43	43
			Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang naik kelas	%	1,03	0,98	1,30	1,30	1,30	1,30
19	Inspektorat	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	80,28	46	61	75	81	81
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	38,17	23	48	53	59	59

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	91,17	48	63	79	94	94
				Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	100	100
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	60	100	100	100	100
				Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	n.a	n.a	20	54	100	100
				Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	%	n.a	n.a	3	3	3	3

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
20	Sekretariat Daerah	Meningkatnya Penyelengaraan pemerintahan dan kualitas perumusan kebijakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	6,6	10,8	17,39	23,9	32,6	32,6
				Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%	90,95	90	85	86	86	86

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	n.a	60	60	60	60	60
				Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	100
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66.67	80	83,33	83,33	83,33	83,33
				Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	95	100	100	100	100	100
				Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	96,51	100	97	98	99	99
21	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah	Meningkatnya kualitas perencaaan pembangunan, penelitian dan pengemb	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	95	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	98,80	90	98,81	98,82	98,83	98,83
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90,54	90	90,55	90,56	90,57	90,57
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	91,94	90	91,95	91,96	91,97	91,97
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	95,74	90	95,75	95,76	95,77	95,77
			Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplemantasikan	%	100	65	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
22	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang teratih	%	n.a	n.a	3,46	6,92	10,38	10,38
				presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				persentase penegakan Perda/Perbup	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60	69,8	75	80	91,67	91,67
				Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	46,67	100	100	100	100	100
				Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	n.a	n.a	3,08	6,15	9,23	9,23
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
24	Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	n.a	n.a	90	90	90	90
				Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	74,91	100	95	95	95	95
				Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	58	100	100	100	100
				Presentase kegiatan peningakatan Kapasitas Anggota DPRD	%	n.a	n.a	100	100	100	100
25	Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	99	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
		publik di Kecamatan		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	98,82	100	95	95	95	95
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%	86,60	77	79	81	83	83
				Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%	90	95	100	100	100	100
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	n.a	n.a	100	100	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	n.a	n.a	80	90	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	prosentase pelaksanaan pendidikan politik	%	n.a	n.a	80	90	100	100
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	n.a	n.a	13,33	16,67	20	20
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n.a	n.a	100	100	100	100
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	n.a	n.a	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
						2022		2024	2025	2026	
			Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial								

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung , 2022

8.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dengan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dimasukan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung sebagaimana Tabel 8.4.

Tabel 8.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinerja Makro Daerah									
1.	a. Indeks Pembangunan Manusia	Capaian indeks pembangunan manusia tahun n	angka	70.77	71,04	71,31	71,58	71,58	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	b. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	(Indeks Pembangunan Manusia Tahun n - Indeks Pembangunan Manusia Tahun n-1) / Indeks Pembangunan Manusia Tahun n-1	%	0,012	0,007	0,003	0,003	0,003	
2.	a. Angka Kemiskinan	Capaian angka kemiskinan tahun n	angka	9.33	9,33	9,8	9,30	9,25	Dinas Sosial
	b. Laju Penurunan Angka Kemiskinan	(Angka Kemiskinan Tahun n - Angka Kemiskinan Tahun n-1) / Angka Kemiskinan Tahun n-1	%	2,10	-8,24	5,04	-5,10	-0,53	
3.	a. Angka Pengangguran	Capaian Angka pengangguran tahun n	angka	2.54	2,52	2,51	2,50	2,50	Dinas Perindustrian dan TenagaKerja
	b. Laju Penurunan Angka Pengangguran	(Angka Pengangguran Tahun n - Angka Pengangguran Tahun n-1) / Angka Pengangguran Tahun n-1	%	-0,31	-0,03	0,38	-0,03	-0,02	
4.	a. Pertumbuhan Ekonomi	Capaian Pertmbuhan Ekonomi	angka	5.2	5,27	5,28	5,29	5,29	DKPPP, DINKOPDAG, DINBUDPAR, DPMPTSP, DINPERMADES
	b. Laju Pertumbuhan Ekonomi	(Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun n - Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun n-1) / Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun n-1	%	0,5	0,09	0,001	0,001	0,001	

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
5.	a. Pendapatan Per-Kapita	Capaian pendapatan per-kapita	angka	28.484.021	28.480.000	30.190.000	30.800.000	30.800.000	DKPPP, DINKOPDAG, DINBUDPAR, DPMPTSP, DINPERMADES
	b. Laju Pertumbuhan Pendapatan Per-Kapita	(Pendapatan Per-Kapita Tahun n – Pendapatan Per-Kapita Tahun n-1) / Pendapatan Per-Kapita Tahun n-1	%	4.24	-0,01	3,83	2,02	2,10	
6.	a. Ketimpangan pendapatan	Capaian Ketimpangan pendapatan tahun n	%	18.46	18,78	18,70	18,80	19,00	DKPPP, DINKOPDAG, DINBUDPAR, DPMPTSP, DINPERMADES
	b. Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	(Ketimpangan Pendapatan Tahun n - Ketimpangan Pendapatan Tahun n-1) / Ketimpangan Pendapatan n-1	%	-7.07	-0,48	-0,42	0,53	1,06	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Urusan Pendidikan								
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun	%	95.51	100	100	100	100	DINDIKPORA
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7-12 tahun	%	96.06	100	100	100	100	DINDIKPORA
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 13-15 tahun	%	73.29	100	100	100	100	DINDIKPORA

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
4.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	%	21.56	100	100	100	100	DINDIKPORA
	Urusan Kesehatan								
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk	rasio	0.001	0.106	0.106	0.106	0.106	Dinas Kesehatan
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS	%	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan / Jumlah ibu hamil	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir	%	99,09	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	92,95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Jumlah balita							
7.	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar	%	65,59	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun	%	88.18	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 60 tahun keatas	%	85.74	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi	%	84,78	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM	%	123,45	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ	%	104,19	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC	%	95,65	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinveksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinveksi HIV	%	87,03	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha) di tahun existing / Luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten	rasio	97.97	97.90	97.90	97.90	97.90	DPUPR
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	%	95,32	100	100	100	100	DPUPR
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang	%	82,38	100	100	100	100	DPRKPLH

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di Kab							
4.	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya (DPUPR) / Jumlah pemanfaatan IMB yang berlaku (DPM)	%	100	100	100	100	100	DPM dan DPUPR
5.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan Kabupaten	%	88,15	89.29	89.50	89.75	89.75	DPUPR
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	DPUPR
7.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	100	100	100	100	100	DPUPR
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	%	100	100	100	100	100	BPBD

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	%	100	100	100	100	100	DPRKPLH
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	31,34	5.40	5.40	5.30	5.30	DPRKPLH
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah		5,25	4.50	4.10	3.80	3.80	DPRKPLH
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit perumahan	%	100	100	100	100	100	DPRKPLH
	Urusan Ketentraman Ketertiban Perlindungan Umum								
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP dan DAMKAR
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP dan DAMKAR

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi							
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP dan DAMKAR

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah							
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota							
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah dan rincian kejadian kebakaran beserta waktu tanggapnya dijumlah waktu tanggap yang dibutuhkan dari kejadian kebakaran	menit	66,67	75	80	91,67	91,67	SATPOL PP dan DAMKAR
		Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten							
	Urusan Sosial								
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis							
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
	saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota							
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
	Urusan Tenaga Kerja								
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	%	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	DINPERINAKER
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	0,014	0.02	0.02	0.02	0.02	DINPERINAKER
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja		3473502,796	3781682,01	37816823,01	37816823,01	3781682,01	DINPERINAKER
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	21,19%	24	27	28	28	DINPERINAKER

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
	Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan							
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	53,61	35	36	37	37	DINPERINAKER
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	%	13,34	10.20	10.22	10.24	10.24	DPPPAPPKB
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	%	100	0.0035	0.0034	0.0033	0.0033	DPPPAPPKB
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan	Per 100.000 penduduk	0,003	0.004	0.003	0.002	0.002	DPPPAPPKB
	Urusan Pangan								
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan	%	176,4	106,19	105,24	105,24	105,24	DKPPP
	Urusan Pertanahan								
1.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	DPRKPLH

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum							
2.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%	100	100	100	100	100	BPN/ DPRKPLH
3.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	%	100	100	100	100	100	DPRKPLH/DINPER MADES
		Urusan Lingkungan Hidup							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	indek	69.86	63.47	64.05	64.83	64.83	DPRKPLH
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	%	59,06	65,41	65,66	65,87	65,87	DPRKPLH
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	%	4	6	6	6	6	DPRKPLH

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan							
Urusan Kependudukan Catatan Sipil									
1.	Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman / Jumlah penduduk wajib KTP-el	%	99.29	99.1	99.2	99.3	99.3	DINDUKCAPIL
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun	%	49,77	62.61	70.61	78.61	78.61	DINDUKCAPIL
3.	Prosentase anak berakte kelahiran (usia 0-18 th)	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun	%	99,14	99.4	99.5	99.6	99.6	DINDUKCAPIL
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah PD	%	47.83	0	0	0	0	DINDUKCAPIL
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri'	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	%	100	100	100	100	100	DINPERMADES
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun	%	20,16	81	82	83	83	DINPERMADES

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)							
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	indek	1.32	1.98	1.96	1.94	1.94	DPPPAPPKB
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)	Jumlah peserta KB aktif modern Jumlah pasangan usia subur	%	76,58	75.75	75.80	75.85	75.85	DPPPAPPKB
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani Jumlah Pasangan Usia Subur	%	11,47	10.5	10.3	10	10	DPPPAPPKB
Urusan Perhubungan									
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	1	0.80	0.80	0.80	0.80	DINHUB
2.	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	DINHUB
Urusan Komunikasi dan Informasi									
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Jumlah PD	%	100	100	100	100	100	DINKOMINFO
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	%	26,15	40	45	50	50	DINKOMINFO
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	%	75,19	74.00	*74.50*	75.00	75.00	DINKOMINFO

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota / Jumlah Penduduk							
Urusan Koperasi dan UMKM									
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (koperasi sehat)	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset / Jumlah seluruh koperasi	%	15,07	36	48	60	60	DINKOPDAG
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Usaha kecil)	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	100	0.92	0.96	1	1	DINKOPDAG
Urusan Penanaman Modal									
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	%	22,67	2.5	3	3.5	3.5	DPM
Urusan Pemuda dan Olahraga									
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 th) yang berwirausaha di kabupaten/kota Jumlah pemuda (umur 16-30 th) / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)	%	0	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	DINPERINAKER
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	%	6,08	30	35	40	40	DINDIKPORA

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota							
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	75	60	80	90	90	DINDIKPORA
Urusan Statistik									
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah PD	%	100	100	100	100	100	DINKOMINFO
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah PD	%	100	100	100	100	100	DINKOMINFO
Urusan Persandian									
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian	Indek	100	39.81	39,81	39.81	39.81	DINKOMINFO
Urusan Kebudayaan									
1.	Terlestarikannya cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata	%	100	100	100	100	100	DINBUDPAR
Urusan Perpustakaan									
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	nilai	68.17	68.50	69.00	69.50	69.50	DINPUSIP

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	%	75,69	30.10	30.20	30.30	30.30	DINPUSIP
	Urusan Kerasipan								
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	67,26	56.71	59.68	63.38	63.38	DINPUSIP
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah	%	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	DINPUSIP

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK							
Urusan Pilihan									
Urusan Perikanan dan Kelautan									
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	14.699.279	12.843.535	12.852.066	12.860.682	12.860.682	DKPPP
Urusan Pariwisata									
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) Jumlah wisatawan tahun n-1	%	30,23	0.04	0.04	0.06	0.06	DINBUDPAR
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) Jumlah wisatawan tahun n-1	%	103,87	0.04	0.05	0.06	0.06	DINBUDPAR
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	%	14,80	1	2	3	3	DINBUDPAR

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Jumlah kamar yang tersedia							
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku / Total PBRB harga berlaku		1,87	0.02	0.02	0.02	0.02	DINBUDPAR
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata / Jumlah total PAD (Realisasi)		2,34	0.09	0.09	0.09	0.09	DINBUDPAR
	Urusan Pertanian								
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun / Luas panen	Ton/ha	19,55	6.125	6.15	6.175	6.175	DKPPP
2.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) / Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	%	276	-65	-70	-75	-75	DKPPP
-65	**Urusan Kehutanan**								
	-								
	Urusan ESDM								
	-								
	Urusan Perdagangan								
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten	%	0,12	93.75	93.75	93.75	93.75	DPM dan DINKOPDAG

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk / Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	%	78,29	90	90	90	90	DKPPP
3.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	%	101	83.33	100	100	100	DINKOPDAG
	Urusan Perindustrian								
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 / Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten	%	0,87	1.7	1.7	1.7	1.7	DINPERINAKER
2.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan	%	0,21	0.1	0.1	0.1	0.1	DINPERINAKER dan DPM
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan	%	100	0.1	0.1	0.1	0.1	DINPERINAKER
4.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	angka	5	5	5	5	5	DINPERINAKER

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energi - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi							
	Urusan Transmigrasi								
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Perencanaan dan Keuangan								
1.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga Kesehatan / Jumlah APBD	%	10,70	10.00	10.00	10.00	10.00	BPKPAD
2.	Rasio PAD	Jumlah PAD (Realisasi) / Jumlah PDRB Non Migas	%	1.68	1.5	1.5	1.5	1.5	BPKPAD
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level	3	3,050	3,100	3,150	3,150	INSPEKTORAT
4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	rasio	66,15	45.00	45.00	45.00	45.00	BPKPAD

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Jumlah Belanja APBD							
6.	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Jumlah WTP	10	10	10	10	10	BPKPAD
				Pengadaan					
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	%	0	0	0	0	0	BAGIAN PBJ SETDA
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	%	1.97	1,47	1.48	1,49	1,49	BAGIAN PBJ SETDA
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung	Rasio	50.63	50.65	50.66	50.67	50.67	BAGIAN PBJ SETDA
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan	Jumlah niai PBJ yang menggunakan Produk	%	283.834	100	100	100	100	BAGIAN PBJ SETDA

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
	Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1							
		Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi							
	Kepegawaian								
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	%	100	61,83	62,04	62,25	62,25	BKPSDM
		Jumlah pegawai seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
2.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	25,63	64.33	64.33	64.33	64.33	BKPSDM
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25,00	38.5	38.54	38.58	38.58	BKPSDM
		Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
	Keuangan								

No	Indikator sasaran	Rumus		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
					2022	2024	2025	2026		
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	-1	%	8.54	90.00	90.00	90.00	90.00	BPKPAD
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi Dibagi total belanja PAD dalam APBD dikurangi satu	-1	%	33.62	100	100	100	100	BPKPAD
3.	Manajemen Aset	Jumlah Asset Management: 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);		angka	4	4	4	4	4	BPKPAD
4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya		%	8,79	12	11	10	10	BPKPAD
Transparansi dan Partisipasi Publik										
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda		%	90.32	90.00	90.00	90.00	90.00	BPKPAD
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda		%	100	100	100	100	100	DINKOMINFO

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu
				2022	2024	2025	2026		
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci							

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung , 2022

8.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bagaian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Temanggung sebagaimana Tabel 8.5.

Tabel 8.5
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2026

NO	Urusan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian RPD			Kondisi akhir RPD	Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	n.a.	100	100	100	100	DINDIKPORA
2		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	n.a.	100	100	100	100	DINDIKPORA
3		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100	DINDIKPORA
4	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
5		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
6		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
7		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
8		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
9		Presentase warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
10		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
11		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
12		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES

NO	Urusan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian RPD			Kondisi akhir RPD	Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	
13		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
14		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	95,65	100	100	100	100	100	DINKES
15		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87,03	100	100	100	100	100	DINKES
16	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	95,32	90	100	100	100	100	DPUPR
17		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	DPRKPLH
18	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	DPRKPLH
19		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	DPRKPLH
20	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
21		jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	0	100	100	100	100	SATPOL DAMKAR
22		jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
23		jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
24		jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	43,75	0	100	100	100	100	SATPOL DAMKAR
25	SOSIAL	jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS

NO	Urusan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian RPD			Kondisi akhir RPD	Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	
26		jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
27		jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
28		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
29		jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung , 2022

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
3. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program pembangunan.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SETDA

TENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003